



# 2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara hirarkis, diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 meliputi Pendahuluan, Kondisi Umum Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Arahan Pengembangan Wilayah, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Program pemerintah Daerah dan Penutup, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Maluku, RTRW Kota Tual dan RPJPD Kota Tual. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan Kota Tual.

Tual, 25 April 2019

**WALIKOTA TUAL**



**ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR. ....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. DASAR HUKUM .....	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I-4
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-13
1.5. SISTIMATIKA .....	I-14
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH.....</b>	<b>II-6</b>
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	II-18
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM .....	II-47
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-144
<b>BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU .....	III-1
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ....	III-16
3.3. RENCANA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN .....	III-19
<b>BAB IV. PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	IV-1
4.2. ISU STRATEGIS .....	IV-24
<b>BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. VISI .....	V-1
5.2. MISI .....	V-3
5.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	V-8
<b>BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM     PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>..VI-1</b>
6.1 STRATEGI.....	VI-2
6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	VI-10
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-16
<b>BAB VII. ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TUAL .....</b>	<b>..VI-1</b>
7.1 KEBIJAKAN UMUM.....	VII-1
7.2 PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN .....	VII-14
7.3 ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN NEGARA .....	VII-16

<b>BAB VIII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN</b>	
<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN .....	VIII-1
8.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VIII-4
<b>BAB IX. KINERJA PENYELENGGARAAN</b>	
<b>PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>IX-1</b>
<b>BAB X. PENUTUP.....</b>	<b>X-1</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Wilayah Administrasi Kota Tual	II-4
Tabel 2.2	Data klimatologi Kota Tual Tahun 2013-2017	II-7
Tabel 2.3	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual periode 2013-2017	II-15
Tabel 2.4	Penduduk Kota Tual menurut Jenis Kelamin pada Tahun 2017	II-16
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk Kota Tual Tahun 2013-2017	II-17
Tabel 2.6	Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017	II-19
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017	II-21
Tabel 2.8	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Kota Tual Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II-23
Tabel 2.9	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Tual Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II-24
Tabel 2.10	Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Tual Tahun 2012-2017	II-25
Tabel 2.11	PDRB Per Kapita Kota Tual (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.12	Perkembangan Pengentasan Penduduk Miskin Kota Tual Tahun 2012-2017	II-27
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Kota Tual dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2012-2016	II-30
Tabel 2.14	Angka Kriminalitas Kota Tual Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.15	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tual Tahun 2012-2016	II-33
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tual Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tual dan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.18	Presentase penduduk menurut ijazah pendidikan terakhir yang ditamatkan	II-36
Tabel 2.19	Angka kematian Ibu melahirkan per-1.000 kelahiran	II-37

	hidup	
Tabel 2.20	Angka Kematian Bayi Kota Tual Tahun 2012-2017	II-38
Tabel 2.21	Presentase Balita Gizi Buruk di Kota Tual Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.22	Usia Harapan Hidup Kota Tual 2012-2016	II-41
Tabel 2.23	Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan oleh Masyarakat Kota Tual 2013-2018	II-43
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tual 2013-2017	II-44
Tabel 2.25	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Tual 2013-2017	II-45
Tabel 2.26	Sanggar Seni Budaya Kota Tual	II-46
Tabel 2.27	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk Kota Tual Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Sekolah Kota Tual 2013-2017	II-49
Tabel 2.29	Presentase Anak Usia Dini Kota Tual 2013-2017	II-50
Tabel 2.30	Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan 2013-2018	II-52
Tabel 2.31	Indikator Fasilitas Pendidikan Kota Tual 2013-2018	II-53
Tabel 2.32	Rasio Guru Kota Tual Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.33	Data Guru Berkualifikasi S1/D-IV di Kota Tual	II-55
Tabel 2.34	Rasio Posyando per Satuan Balita Kota Tual Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.35	Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu, per Satuan Penduduk Kota Tual 2013-2018	II-58
Tabel 2.36	Rasio Rumah Sakit Kota Tual 2013-2018	II-59
Tabel 2.37	Rasio Dokter Kota Tual 2013-2017	II-60
Tabel 2.38	Rasio Tenaga Medis Kota Tual 2013-2018	II-61
Tabel 2.39	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kota Tual Tahun 2013-2018	II-62
Tabel 2.40	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan di Kota Tual selama 2013-2017	II-64
Tabel 2.41	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan Tahun 2013-2017	II-65
Tabel 2.42	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Tual Tahun 2013-2017	II-66
Tabel 2.43	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual Tahun 2013-2017	II-67

Tabel 2.44	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Tual Tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.45	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Tual Tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.46	Angka Kejadian Malaria di Kota Tual Tahun Waktu 2013-2017	II-70
Tabel 2.47	Prevalensi HIV/AIDS Kota Tual Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.48	Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Tual 2013-2017	II-72
Tabel 2.49	Rasio Jalan per Satuan Penduduk di Kota Tual Taun 2013-2017	II-74
Tabel 2.50	Presentase Jalan yang memiliki Draenase & Trotoar, 2013-2017	II-75
Tabel 2.51	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Tual 2013-2017	II-75
Tabel 2.52	Penduduk Berakses Air Minum Kota Tual 2013-2017	II-77
Tabel 2.53	Rumah Tangga Berakses Air Bersih Kota Tual 2013-2017	II-77
Tabel 2.54	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Tual 2013-2016	II-78
Tabel 2.55	Rasio RTH terhadap Luas Wilayah ber HPL/HGB, 2013-2017	II-79
Tabel 2.56	Luas RTH Publik Tahun 2013-2017	II-80
Tabel 2.57	Rasio Bangunan ber-IMB, Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.58	Ruang Publik Berubah Peruntukkan Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.59	Rasio & Cakupan Rumah Layak Huni Kota Tual Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.60	Rasio Permukiman Layak Huni Kota Tual Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.61	Cakupan ketersediaan Layak Huni Kota Tual Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.62	Cakupan Rumah Layak Huni terjangkau Kota Tual Tahun 2013-2017	II-86
Tabel 2.63	Presentase Permukiman yang tertata Kota Tual Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.64	Presentase Areal Kawasan Kumuh Kota Tual Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.65	Presentase Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	II-89



## Kota Tual Tahun 2013-2017

Tabel 2.66	Rasio Polisi Pamong Praja Kota Tual Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.67	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Tual Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.68	Presentase Penegakan Perda, 2013-2017	II-92
Tabel 2.69	PMKS tertangani di Kota Tual 2013-2017	II-93
Tabel 2.70	Indikator Ketenagakerjaan Kota Tual 2013-2017	II-95
Tabel 2.71	Presentase Angkatan Kerja Perempuan 2013-2017	II-96
Tabel 2.72	Rasio KDRT Kota Tual Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.73	Cakupan Penanganan KDRT terhadap Perempuan & Anak Kota Tual Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.74	Cakupan Layanan Bantuan Hukum & Penegakan Hukum atas Kekerasan terhadap Perempuan & Anak, Kota Tual Tahun 2013-2017	II-100
Tabel 2.75	Ketersediaan Pangan Utama Kota Tual Tahun 2013-2017	II-101
Tabel 2.76	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2013-2017	II-103
Tabel 2.77	Presentase Luas Lahan Bersertifikat Kota Tual Tahun 2013-2017	II-103
Tabel 2.78	Luas Lahan Milik Pemerintah Kota Tual Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.79	Volume Sampah yang tertangani di Kota Tual Tahun 2013-2017	II-106
Tabel 2.80	Presentase Cakupan Area Pelayanan Sampah Kota Tual Tahun 2013-2017	II-107
Tabel 2.81	Rasio Penduduk ber-KTP & cakupan KTP yang diterbitkan, 2013-2017	II-108
Tabel 2.82	Indikator Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Tual 2013-2017	II-110
Tabel 2.83	Presentase PKK Aktif Kota Tual Tahun 2013-2017	II-111
Tabel 2.84	Presentase Posyandu Aktif Kota Tual Tahun 2013-2017	II-112
Tabel 2.85	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual Tahun 2013-2017	II-113
Tabel 2.86	Rasio Akseptor KB di Kota Tual Tahun 2013-2017	II-114
Tabel 2.87	Indikator terkait Pengendalian Penduduk Kota Tual Tahun 2013-2017	II-114

Tabel 2.88	Arus Penumpang Kapal Kota Tual Tahun 2013-2018	II-116
Tabel 2.89	Jumlah Izin Trayek di Kota Tual Tahun 2013-2017	II-116
Tabel 2.90	Jumlah Uji Kir Kota Tual Tahun 2013-2017	II-117
Tabel 2.91	Jumlah Pelabuhan Dan Terminal Kota Tual Tahun 2013-2017	II-118
Tabel 2.92	Presentase layanan angkutan darat, Kota Tual Tahun 2013-2017	II-118
Tabel 2.93	Cakupan Pemasangan Rambu Lalulintas 2013-2017	II-119
Tabel 2.94	Cakupan Layanan Telekomunikasi, Kota Tual Tahun 2013-2017	II-120
Tabel 2.95	Presentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Kota Tual Tahun 2013-2017	II-121
Tabel 2.96	Surat Kabar, Televisi dan Website di Kota Tual, Tahun 2013-2017	II-122
Tabel 2.97	Presentase Koperasi Aktif Kota Tual Tahun 2013-2017	II-123
Tabel 2.98	Presentase Usaha Mikro & Kecil Kota Tual Tahun 2013-2017	II-123
Tabel 2.99	Indikator Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal Kota Tual Tahun 2013-2017	II-124
Tabel 2.100	Ketersediaan Data Statistik	II-125
Tabel 2.101	Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan, Kota Tual Tahun 2013-2017	II-126
Tabel 2.102	Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2.103	Produksi Perikanan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-129
Tabel 2.104	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-130
Tabel 2.105	Jumlah produksi kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-131
Tabel 2.106	Rasio Kawasan Lindung Perairan & Proporsi Tangkapan Ikan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-133
Tabel 2.107	Obyek wisata di Kota Tual Tahun 2018	II-134
Tabel 2.108	Jumlah Kunjungan Wisata Kota Tual Tahun 2013-2017	II-135
Tabel 2.109	PAD Sektor Pariwisata Kota Tual Tahun 2013-2017	II-136
Tabel 2.110	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan, Kota Tual Tahun 2013-2017	II-137
Tabel 2.111	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman	II-138

	Keras), Kota Tual Tahun 2013-2017	
Tabel 2.112	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras), Kota Tual Tahun 2013-2017	II-139
Tabel 2.113	Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar, Kota Taul Tahun 2013-2017	II-140
Tabel 2.114	Cakupan Bina Kelompok Tani Kota Tual Tahun 2013-2017	II-141
Tabel 2.115	Perkembangan Presentase Rumah Berlistrik Kota Tual Tahun 2013-2017	II-142
Tabel 2.116	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kota Tual Tahun 2013-2017	II-143
Tabel 2.117	Nilai Ekspor Perdagangan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-143
Tabel 2.118	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Tual Tahun 2013-2018	II-144
Tabel 2.119	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Tual Tahun 2013-2017	II-145
Tabel 2.120	Pengeluaran Non Pangan per Kapita Kota Tual Tahun 2013-2017	II-147
Tabel 2.121	Produktivitas Total Kota Tual Tahun 2013-2017	II-148
Tabel 2.122	Rasio Panjang Jalan per Kendaraan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-149
Tabel 2.123	Presentase Luas Wilayah Produktif Kota Tual Tahun 2014-2018	II-150
Tabel 2.124	Luas Wilayah Perkotaan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-150
Tabel 2.125	Data Kelistrikan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-152
Tabel 2.126	Angka Kriminalitas Kota Tual Tahun 2013-2017	II-152
Tabel 2.127	Perizinan Kota Tual Tahun 2013-2017	II-154
Tabel 2.128	Pajak Daerah Kota Tual Tahun 2013-2017	II-154
Tabel 2.129	Retribusi Daerah Kota Tual Tahun 2013-2017	II-155
Tabel 2.130	IPM Kota Tual Tahun 2013-2017	II-156
Tabel 2.131	Komponen Pembentuk IPM Kota Tual 2013-2017	II-157
Tabel 2.132	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual Tahun 2013-2017	II-158
Tabel 2.133	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual Tahun 2013-2017	II-159
Tabel 3.1	Rasio Ketergantungan Kota Tual Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.2	Porsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain	III-10

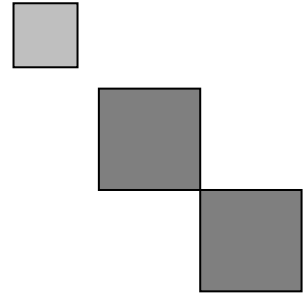
	Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018	
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Tual (Rupiah) Tahun 2013-2017	III-16
Tabel 3.4	Porsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tual Tahun 2015 – 2017	III-17
Tabel 3.5	Defisit Anggaran Kota Tual Tahun 2013 – 2017	III-23
Tabel 3.6	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2019-2023	III-24
Tabel 5.1	Proyeksi Pembiayaan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2019 – 2023	V-5
Tabel 5.2	Visi, Misi dan Penjelasan Misi Kota Tual Periode 2018-2023	V-9
Tabel 6.1	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tual Periode 2018-2023	VI-3
Tabel 6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Tual	VI-8
Tabel 6.3	Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Kota Tual	VI-12
Tabel 7.1		VII-20
Tabel 8.1	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Tual 2019 – 2023	VIII-3
	Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara Tahun 2020-2024	
Tabel 8.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tual 2019 – 2023	VIII-5
Tabel 9.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tual	IX-2
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Tual 2018 – 2023	IX-6
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tual 2018 – 2023	IX-6



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Tual	II-2
Gambar 2.2	Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual Tahun 2013-2017 (%)	II-20
Gambar 2.3	Grafik Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2016	II-29
Gambar 2.4	Grafik Perkembangan angka melek huruf Kota Tual 2013-2017 (%)	II-31
Gambar 2.5	Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tual Tahun 2013-2017	II-32
Gambar 2.6	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Tual Tahun 2013 – 2017	II-38
Gambar 2.7	Persentase (%) Balita Gizi Buruk di Kota Tual Tahun 2013-2017	II-40
Gambar 2.8	Grafik Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Tual 2013-2017	II-41
Gambar 3.1	Grafik Porsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2018	III-5
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Rata – Rata Pendapatan Daerah Kota Tual Tahun 2013 – 2018	III-6
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2013 – 2018	III-8
Gambar 3.4	Grafik Porsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2013 – 2018	III-8
Gambar 3.5	Grafik Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Tual Tahun 2019 – 2023	III-18
Gambar 3.6	Grafik Proyeksi Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2019 – 2023	III-20
Gambar 7.1	Peta Kawasan Strategis Kecamatan Kur-Tam	VII-6
Gambar 7.2	Peta Kawasan Strategis Kawasan Dullah Selatan	VII-7
Gambar 7.3	Peta Kawasan Strategis Kawasan Dullah Utara	VII-8
Gambar 7.4	Peta Kawasan Strategis Pulau-Pulau Kur	VII-9





# BAB I

# **PENDAHULUAN**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan searah dengan pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah daerah (jangka waktu 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam ketentuan pasal 19 UU No. 25 Tahun 2004 ayat (2) bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 264 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam PP ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, sedangkan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Tual menyusun RPJMD Kota Tual 2018-2023 yang berlaku pada sejak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tual terpilih.

## **I.2. Dasar Hukum**

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Tual 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  - s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 01 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - w. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P69 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
  - x. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
  - y. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual Tahun 2012-2032.
  - z. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual Tahun 2012-2032. Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 serta RTRW RPJMD kabupaten/kota lain disekitar Kota Tual.

#### **1.3.1. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2015-2019**

Identifikasi hubungan Visi dan Misi dalam dokumen RPJMD Kota Tual dengan RPJMN, merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dengan tujuan mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam matriks sebagai berikut:

**Tabel 1.3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Tual  
Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2014-2019**

<b>RPJMN 2014-2019</b>	<b>RPJMD KOTA TUAL 2018-2023</b>
<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”	“Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan)”
<b>MISI</b>	<b>MISI</b>
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, cerdas, dan sehat.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan sosial, dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	Mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pengembangan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar serta memberikan ruang yang cukup bagi peningkatan kesempatan kerja.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	Mengembangkan iklim kondusif untuk peningkatan daya tarik investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	Memantapkan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan dokumen perencanaan antara Pemerintah Daerah Kota Tual dengan Pemerintah Pusat tercermin dari keselarasan antar strata dokumen perencanaan. Sesuai dengan periodisasi yang berbeda antara dokumen RPJMN Tahun 2015-2019, dengan dokumen RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023. Sehingga keselarasan prioritas pembangunan pada pelaksanaan perencanaan Tahun 2018-2023 secara otomatis merujuk dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2022-2025.

Sebagai bagian dari perencanaan nasional, RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 juga mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA. Misi dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 telah mendukung agenda prioritas nasional tersebut kecuali pada Agenda Nomor 4 yaitu Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, karena agenda tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

### **1.3.2. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024**

Penyusunan RPJMD Kota Tual tahun 2018-2023 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014-2019. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 adalah; "Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera dan Aman Dijiwai Semangat Siwa Lima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan, dan; Maluku Yang Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan" sedangkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah; "Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugus Kepulauan", antara lain;



**Tabel 1.3.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024**

<b>RPJMD PROVINSI MALUKU 2014-2019</b>	<b>RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024</b>	<b>RPJMD KOTA TUAL 2018-2023</b>
<b>VISI</b>	<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
"Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera Dan Aman Dijiwai Semangat Siwa Lima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan, dan; Maluku Yang Berkualitas Dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan".	"Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugus Kepulauan".	"Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan)"
<b>MISI</b>	<b>MISI</b>	<b>MISI</b>
Memantapkan masyarakat Maluku yang Rukun, Religius, Aman dan Damai	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani	Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, cerdas, dan sehat.
Menjadikan masyarakat Maluku yang Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau	Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang Adil dan Demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial, dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif.
	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau	Mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pengembangan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar serta memberikan ruang yang cukup bagi peningkatan kesempatan kerja.
	Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata	Mengembangkan iklim kondusif untuk peningkatan daya tarik investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
	Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan berprestasi	Memantapkan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.
		Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan dokumen perencanaan antara Pemerintah Daerah Kota Tual dengan Pemerintah Provinsi Maluku tercermin dari keselarasan antar strata dokumen perencanaan. Sesuai dengan periodisasi yang berbeda antara dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dengan dokumen RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023. Sehingga keselarasan prioritas pembangunan pada pelaksanaan perencanaan Tahun 2019-2023 secara otomatis merujuk dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025.

RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Teknokratik Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan misi Gubernur dalam RPJMD Teknokratik Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

1. Misi 1 Walikota konsisten terhadap Misi 2, dan 6 Gubernur;
2. Misi 2 Walikota konsisten terhadap misi 1 Gubernur;
3. Misi 3 Walikota konsisten terhadap Misi 5 Gubernur;
4. Misi 4 Walikota konsisten terhadap Misi 3 dan 5 Gubernur;
5. Misi 5 Walikota konsisten terhadap Misi 5 Gubernur;
6. Misi 6 Walikota konsisten terhadap Misi 4 Gubernur; dan
7. Misi 7 Walikota konsisten terhadap Misi 3 Gubernur.

### **1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025**

RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat Visi, Misi dan program prioritas Walikota/ Wakil Walikota Kota Tual masa bakti tahun 2018-2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang

termuat dalam RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014.

Tabel 1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025

<b>TAHAP I (2005-2010)</b>	<b>TAHAP II (2010 – 2015)</b>	<b>TAHAP III (2015-2020)</b>	<b>TAHAP IV (2020 – 2025)</b>
Masa transisi pemekaran	“MENATA DAN MEMBANGUN Kota Tual sebagai Kota Kepulauan yang ditujukan untuk menciptakan Tual yang aman, Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas, Infrastruktur yang semakin merata dan kualitas pelayanan publik yang semakin baik”.	“MENINGKATKAN pembangunan Kota Tual sebagai Kota Kepulauan yang ditujukan untuk menciptakan percepatan pembangunan berbasis pemanfaatan sumberdaya kepulauan terutama potensi kelautan dan perikanan dengan menekankan pada kualitas pelayanan dasar, ketersediaan infrastruktur dan meningkatnya daya saing dan keunggulan komparatif”.	“MEWUJUDKAN Kota Tual sebagai Kota Kepulauan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kokoh dan terpelihara berlandaskan sektor/komoditas unggulan terutama potensi kelautan dan perikanan yang kompetitif serta masyarakat yang sejahtera”.

Pada tahap awal penyusunan, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025 menjadi salah satu bahan perumusan dalam menjabarkan visi dan misi walikota ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Hasil perumusan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023, selanjutnya diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan lima tahunan ketiga. Penyelarasan ini untuk mencapai konsistensi perumusan tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 terhadap upaya pencapaian RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025.

#### **1.3.4. Keterkaitan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 dengan RTRW Kota Tual Tahun 2012-2023**

Penyusunan RPJMD Kota Tual tahun 2018-2023 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Maluku dan RTRW Kota Tual tahun 2012-2032 sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Tual. RPJMD Kota Tual juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kota Tual yaitu mewujudkan Kota sebagai kota pusat pelayanan kelautan dan perikanan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam mendukung Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang dirumuskan dalam kebijakan sebagai berikut:

1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air, serta infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
3. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
5. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
6. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;

8. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
9. pengembangan kawasan tertinggal atau gugus pulau untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan atau gugus pulau.

#### **1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Tual dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten yang Berbatasan**

Secara administrasi Kota Tual juga berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya, yaitu sebelah selatan dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya Kota Tual merupakan Ibukota atau bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga memiliki karakteristik daerah kepulauan dan adat istiadat yang sama. Karenanya RPJMD dan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023, sehingga dapat tercipta sinkronisasi pembangunan antar kedua wilayah, khususnya untuk mendukung strategi umum dalam RPJMD Kota Tual, yang menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah, mengatasi arus migrasi penduduk dan mobilitas tenaga kerja, peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah, ketertiban dan keamanan umum bersama, kualitas lingkungan hidup, dan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Hasil analisa hubungan menunjukkan adanya konsistensi RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 terhadap RPJMD dan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal visi dan misi pembangunan. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat ada hubungan atau kesamaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun visi misi tersebut memiliki kesamaan, namun bisa berbeda

dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program karena tiap daerah memiliki ciri khas potensi dan permasalahan yang berbeda. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus kedua daerah dalam sebuah system pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Fungsi khusus berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan oleh Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

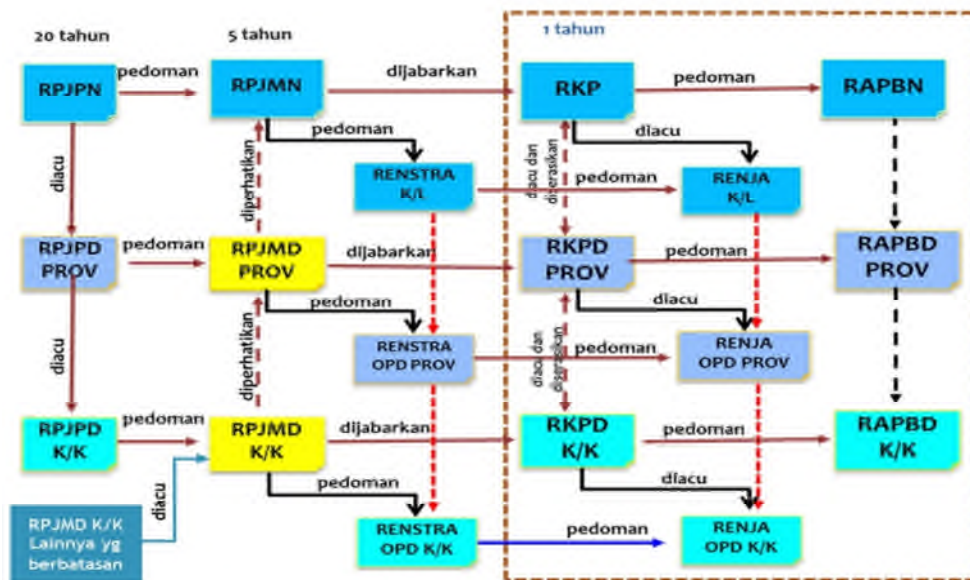
#### **1.3.6. Keterkaitan RPJMD Kota Tual dengan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperspektif 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. RENSTRA OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan OPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA- OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

#### **1.3.7. Keterkaitan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD**

Pelaksanaan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Kota Tual yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kota. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran, serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara singkat Keterkaitan RPJMD Kota Tual dengan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1. Keterkaitan Antara RPJMD Kota Tual dengan Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Dengan demikian penyusunan RPJMD ini memperhatikan aspek ruang dan kewilayahan yaitu menjadi pedoman sekaligus batasan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan berjalan sinergis dengan program dan kegiatan kewilayahan.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 - 2023, ditetapkan dengan maksud: menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita Kota Tual sesuai dengan dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh

pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2018 – 2023 adalah:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 tahun kedepan.
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan asaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2018 - 2023 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tual Tahun 2005 - 2025;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023;
- e. Menetapkan indikator kinerja satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2018 – 2023.



### 1.5. Sistematika

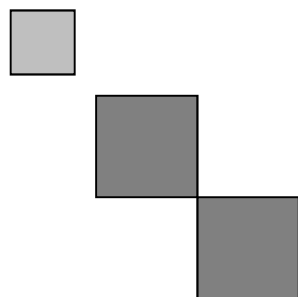
Sistematika hasil penyusunan RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023, terdiri dan sembilan Bab, adalah sebagai berikut :

- BAB I      **Pendahuluan** terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika.
- BAB II      **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, menguraikan tentang kondisi geografi, kondisi topografi, kondisi demografi, kondisi kondisi perekonomian daerah dan gambaran umum kondisi urusan.
- BAB III      **Gambaran Keuangan Daerah**, menguraikan tentang deskripsi tentang pendapatan daerah, APBD dan perincian pendapatan serta alokasi belanja daerah secara ringkas.
- BAB IV      **Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**, menguraikan tentang permasalahan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan di Kota Tual.
- BAB V      **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**, menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Tual yang akan dicapai.
- BAB VI      **Strategis dan Arah Kebijakan Daerah**, menguraikan Strategis, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan di Kota Tual.
- BAB VII      **Arah Pengembangan Wilayah**, menguraikan tentang Arah Pengembangan Wilayah di Kota Tual.
- BAB VIII      **Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan**, menguraikan tentang kerangka pendanaan pembangunan daerah, dan program perangkat pembangunan daerah.

BAB IX     **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,**  
menguraikan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB X     **Penutup,** menguraikan tentang penutup.





## BAB II

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi Kota Tual akan diuraikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Berikut adalah gambaran umum kondisi Kota Tual.

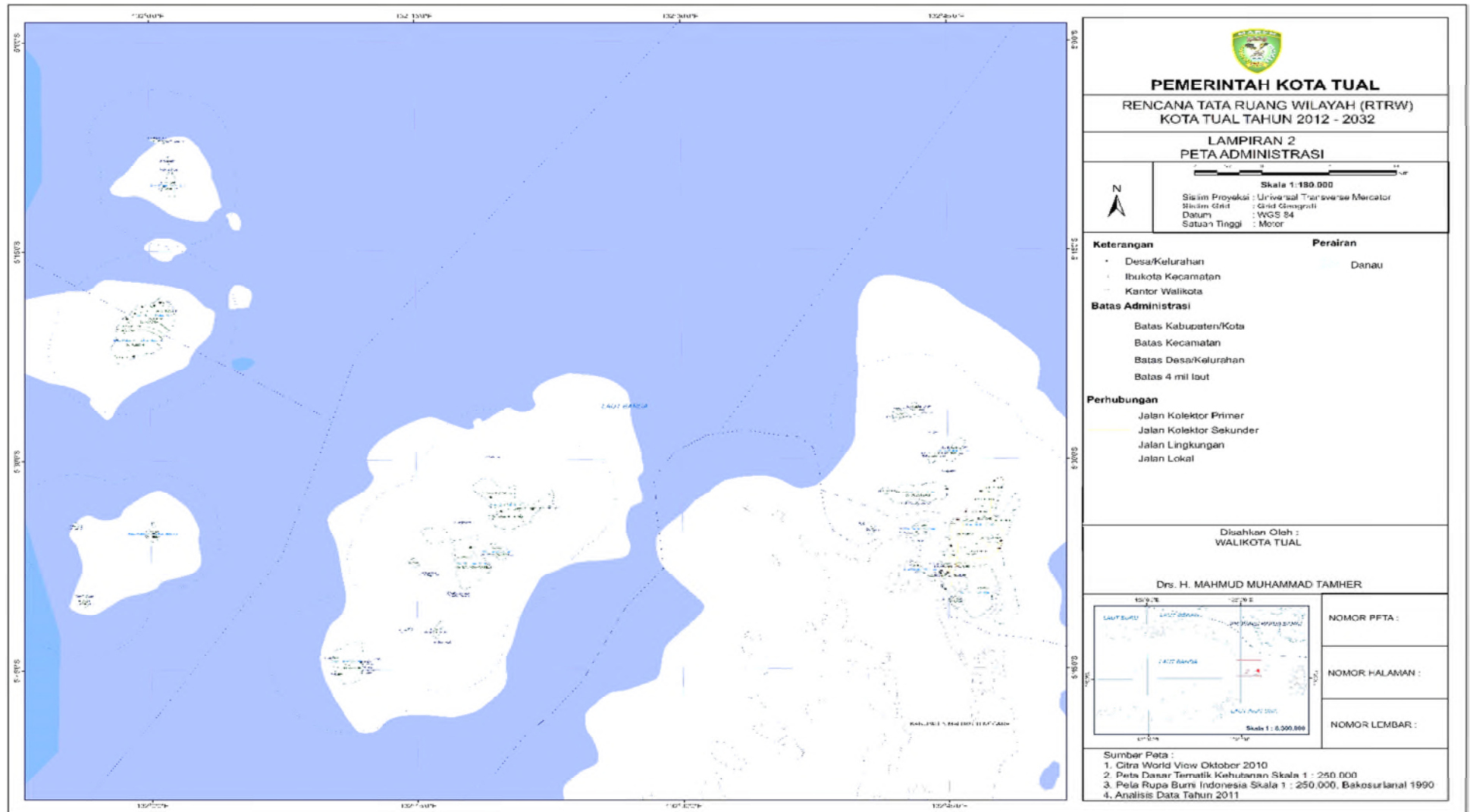
#### **2.1. Informasi Kondisi Umum Daerah**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **2.1.1.1. Geografi**

Secara Geografi Kota Tual terletak pada posisi antronomi 5°-6,5° Lintang Selatan dan 131° - 133,5° Bujur Timur. Luas wilayah ±19.342,39 Km<sup>2</sup> dengan luas daratan ±254,39 Km<sup>2</sup> dan luas perairannya ±19.088 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kota Tual memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura, dan Sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda. Data Administrasi Kota Tual disajikan dalam Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tual



Kota Tual secara administratif terdiri dari 5 kecamatan, 27 desa, 3 kelurahan dan 11 dusun, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kota Tual merupakan wilayah kepulauan, dengan Pulau Dullah sebagai pulau terbesar di kota ini. Kota Tual terdiri atas 66 pulau, meliputi 3 gugusan pulau yaitu gugus Pulau-pulau Kur, gugus Pulau Tayando Tam, dan gugus Pulau Dullah. Terdapat pulau-pulau tidak berpenghuni yang pada umumnya dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan atau sebagai tempat singgah kapal. Jarak ibukota Tual dengan ibukota kecamatan terjauh, yakni Tubyal di Kecamatan Pulau-pulau Kur sekitar 103 kilometer atau 57 mil laut yang jarak tempuhnya sangat tergantung pada kondisi cuaca. Data Administrasi Kota Tual disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut.



Tabel 2.1.  
Wilayah Administrasi Kota Tual

No.	Kecamatan	Desa/Dusun/Kelurahan
1.	Pulau Dullah Utara Ibu Kota Kecamatan Namser	1. Desa Dullah 2. Desa Dullah Laut 3. Desa Fiditan 4. Desa Labetawi 5. Desa Ngadi 6. Desa Ohoitahit 7. Desa Ohoitel 8. Desa Tamedan 9. Dusun Duroa 10. Dusun Watran 11. Dusun Laerkamor
2.	Pulau Dullah Selatan Ibukota Kecamatan Wearhir	1. Desa Taar 2. Desa Tual 3. Dusun Fair 4. Dusun Mangon 5. Dusun Pulau Ut 6. Keluarahan Ketsoblak 7. Kelurahan Lodar El 8. Kelurahan Masrum
3.	Tayando Tam Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel	1. Desa Tayando Yamtel 2. Desa Tayando Langgiar 3. Desa Tayando Ohoiel 4. Desa Tayando Yamru 5. Desa Tam Ngurhir 6. Dusun Tam Ohoitom
4.	Pulau-Pulau Kur Ibukota Kecamatan Finualen	1. Desa Finualen 2. Desa Tubyal 3. Desa Kaymear 4. Desa Sermaf 5. Desa Lokwirin
5.	Kur Selatan Ibukota Kecamatan Kanara	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Hirit 5. Desa Mangur Tiflen 6. Desa Rumoin 7. Desa Mangur Niela 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual (RTRW) 2012-2032, Kota Tual  
Dalam Angka 2017

#### 2.1.1.2. Topografi

Kondisi topografi di Kota Tual cukup beragam mulai dari kondisi datar hingga relatif berbukit dengan ketinggian berkisar antara 100-115 meter di atas permukaan laut. Wilayah pulau merupakan wilayah landai dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut yang mempunyai beberapa bukit rendah di tengahnya. Pulau Dullah Laut, Pulau Ut dan kepulauan Tayando mempunyai kondisi cenderung datar dan sangat landai sehingga sering mengalami genangan air pasang; sedangkan kondisi pulau Kur memiliki kontur yang variatif karena terdapat daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Adapun kemiringan lereng di Kota Tual secara umum adalah sekitar 0-8 persen dan 8-15%.

#### 2.1.1.3. Hidrologi dan Oseaografi

Kondisi hidrologi kota tual secara garis besar dapat digambarkan terdapat 2 danau air tawar yaitu danau Fanil & danau Ngadi yang merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat, aktivitas pertanian dan juga dikembangkan menjadi tempat wisata.

Secara oseanografi, Kota Tual dipengaruhi Laut Banda & Laut Arafura. Gelombang laut dipengaruhi kecepatan angin dan penjalarannya searah dengan arah angin, kecuali pada dangkalan yang banyak bertebaran wilayah perairan, arah gelombang dikendalikan bentuk kontur laut dengan ketinggian gelombang mencapai 1,2 meter hingga 2,4 meter. Kota Tual yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Kei mempunyai arus laut yang mencapai 1 meter/detik terutama di beberapa selat dan muara teluk antara lain teluk Un di petuanan desa Taar dan Selat Tut yang membatasi desa Fair Kecamatan Dullah Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara. Arus permukaan yang datang ke wilayah perairan Kota Tual dipengaruhi 2 musim yaitu musim Timur (April-Oktober) dan musim Barat (Oktober-April) dengan arah arus umumnya berasal dari timur dan timur laut serta dari arah Barat Laut. Pasang surut

perairan wilayah Kota Tual tergolong pasang campuran mirip harian ganda sebagaimana tipe umum di perairan lain Maluku. Tunggang air (tidal range) maksimum umumnya lebih besar dari 2,5 meter dimana pasang tertinggi terjadi pada bulan April & Desember sedangkan surut terendah terjadi pada bulan Oktober

#### 2.1.1.4. Klimatologi

Iklim di Kota Tual sangat dipengaruhi oleh iklim wilayah-wilayah di sekitarnya. Pengaruh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia serta Pulau Papua di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, menjadikan iklim di wilayah ini seringkali terjadi perubahan. Berikut kondisi beberapa parameter iklim:

- a. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari;
- b. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret/April dan Oktober/November;
- c. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora;
- d. Bulan April sampai September dominan bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan serta angin Tenggara;
- e. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut dan angin Barat Laut.

Kondisi iklim di Kota Tual berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA – 72, 1986) dan Klasifikasi Oldeman (1980) secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) zone Agroklimat yaitu:

- 1) Zone II.5 : Curah hujan tahunan 3.000 – 4.000 mm, tercakup di dalamnya zone A2 (> 9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman, termasuk wilayah Pulau Dullah dsk);
- 2) Zone IV.1 : Curah hujan tahunan 3.000 – 1.000 mm, tercakup di dalamnya zone A2 (> 9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman, termasuk wilayah Kecamatan Tayando Tam.

Suhu rata-rata untuk tahun 2015 – 2017 adalah 26,56 °C dengan suhu minimum 22.2 °C terjadi pada tahun 2013 dan maksimum 32,3 °C pada tahun 2014 . Rata-rata Curah Hujan di Kota Tual secara keseluruhan yaitu sebesar 2685.275 mmdengan Untuk Kelembaban rata-rata 84,56%, dan penyinaran matahari rata-rata 48,35% dan tekanan udara rata-rata 1010,95milibar. Data komponen cuaca ini berdasarkan data StasiunMeteorologi DumatubunLanggur.Data iklim Kota Tual disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.  
Data klimatologi Kota TualTahun 2013-2017

Data Klimatologi		2013	2014	2015	2016	2017	rata-rata
suhu (°c)	Minimal	22,2	24,0	23,5	23,9	23,4	23,40
	Maksimal	27,7	32,23	30,88	31,3	27,89	30,00
	rata-rata	24,6	27,6	26,83	27,2	26,7	26,60
kelembaban (%)	rata-rata	84,4	83	84,5	86,41	86,27	84,90
Tekanan Udara (mb)	rata-rata	1009,7	1010,2	1012,3	1011,6	1011	1.011
Curah Hujan (mm)	rata-rata	2444,1	2773,4	2315,2	3208,4	2927,1	2733,6
penyinaran (%)	rata-rata	44,3	60	49,01	40,08	38,25	46,3

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2013-2017; Data diolah, 2018

#### 2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah menunjukkan penggunaan lahan yang meliputi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual 2012-2032, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kota Tual terdiri

dari kawasan Lindung dengan luas kurang lebih 11.755 ha dan kawasan Budidaya dengan luas kurang lebih 11.853 ha. Kawasan Lindung terdiri dari hutan lindung seluas 8.295 ha, kawasan resapan air seluas 1.419 ha, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau seluas 2.815 ha, kawasan suaka alam-pelestarian alam & cagar budaya seluas 181 ha, kawasan rawan bencana alam serta kawasan lindung lainnya seluas 22.949 ha. Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan seluas 1.903 ha, peruntukan perdagangan dan jasa seluas 13 ha, kawasan perkantoran seluas 76 ha, peruntukan industri seluas 95 ha, peruntukkan pariwisata seluas 87 ha, ruang terbuka non hijau seluas 154 ha, ruang evakuasi bencana yaitu berupa perbukitan di pulau Dullah, Tayando & pulau-pulau Kur, peruntukan kegiatan sektor informal seluas 5 ha dan kawasan peruntukan lainnya seluas 212.832 ha

#### 2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032, potensi pengembangan wilayah di Kota Tual dapat digambarkan sebagai berikut:

1. pengembangan struktur ruang kota
  - a. sistim pusat pelayanan kota yang meliputi:
    - 1) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang terdiri dari pusat pelayanan Kota dengan fungsi pelayanan pemerintahan di kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan pusat pelayanan Kota dengan fungsi Perdagangan & jasa di Kelurahan Masrum dan Kelurahan Ketsoblak.
    - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) yang terdiri dari:
      - Sub PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pertanian & pariwisata di desa Tubyal Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Desa Warkar Kecamatan Kur Selatan;

- Sub PPK dengan fungsi Pelayanan Pemerintahan serta perdagangan & jasa di desa Dullah Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam.
- 3) Pusat Lingkungan (PL) yang meliputi fungsi pelayanan Pemerintahan serta perdagangan dan jasa di di Desa Tayando Ohoiel dan Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam, Desa Niela Kecamatan Kur Selatan, Desa Kaimear Kecamatan Pulua-pulau Kur, desa Dullah Laut dan Desa Tamedan Kecamatan Pulau Dullah Utara.
- b. sistim prasarana wilayah kotasalah satunya terdiri darisistim Prasarana Utama yang meliputi:
- 1) sistim jaringan transportasi darat yaitu sistim jaringan jalan dan jaringan angkutan sungai, laut, dan penyeberangan yang meliputi:
- pengembangan rencana jaringan kolektor sekunder Ruas Lingkar Pulau Kur, Ruas Langgiar-Yamru-Ohoiel, ruas Tam Ngurhir – Tam Ohoitom, ruas lingkar Fiditan, ruas Tual – Tamedan, & ruas Tual-Ohoitel-Ohoitahit;
  - Jaringan jalan lokal yaitu ruas Labetawi – Difur – Ohoitahit; ruas lingkar Pulau Fair; ruas Ohoitahit – Nam dan Ruas Watraan – Luv
  - Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi terminal tipe B di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan; Terminal Penumpang Tipe C di desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara; Halte-halte di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Kecamatan Pulau Dullah Utara; rencana unit pengujian kendaraan bermotor di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan.
  - Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas & angkutan yaitu pengembangan trayek angkutan umum perkotaan yang melayani perjalanan dalam kota & antar kota

meliputi Tual – Ohoitahit, Tual – Fiditan, Tual – Dullah, Tual – Taar, Tual – Langgur, rencana jalur Ohoitahit – Labetawi – Tamedan – Labetawi – Dullah – Ngadi – Ohoitel dan rencana jalur Ohoitel – Watraan – Luv – Watraan – Ohoitel.

- Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi dermaga penyeberangan di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau dullah Selatan, Desa Tayando Yamtel di Kecamatan Tayando Tam dan desa Tubyal kecamatan Pulau-pulau Kur dengan alur penyeberangan meliputi Tual-Tayando Yamtel-Tubyal

2) sistim jaringan transportasi laut meliputi:

- a) Pengembangan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Tual di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan yang melayani alur pelayaran pengumpul untuk penumpang pulang pergi dari Kota Tual menuju pelabuhan lain di Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Pulau Jawa, Sulawesi dan daerah lain di Indonesia; pelayaran pengumpul barang dengan alur pelayaran meliputi Tual – Ambon – Surabaya;
- b) Pengembangan Pelabuhan pengumpan di desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam dengan alur pelayanan Tual – Tayando – Lokwirin – Geser (kabupaten Seram Bagian Timur) – Ambon;
- c) Pelabuhan khusus meliputi pelabuhan bahan bakar minyak di Kelurahan Masrun & Desa NGadi, Pelabuhan Angkutan Laut di Kelurahan Masrum Pelabuhan Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Tual, Rencana Pelabuhan Pendaratan ikan Kelvik di desa Taar, Rencana Pelabuhan Penampungan curah cair tidak terbatas di terbatas di

desa Ngadi, Rencana Pelabuhan Penampungan gas tidak terbatas di terbatas di desa Ngadi

- c. Sistem prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan energi/kelistrikan; sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air kota dan infrastruktur kota lainnya.

## 2. Pengembangan Kawasan

### a. kawasan budidaya Kota Tual meliputi

- 1) kawasan perumahan;
- 2) kawasan perdagangan dan jasa yaitu pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pertokoan modern kecamatan Pulau Dullah Utara & Selatan;
- 3) kawasan perkantoran baik perkantoran Pemerintah maupun perkantoran swasta di kecamatan Pulau Dullah Utara & Selatan;
- 4) kawasan industri untuk industri besar di desa Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara & Industri rumah tangga/kecil & ringan di seluruh kecamatan Kota Tual;
- 5) kawasan pariwisata yaitu wisata buatan & wisata alam di seluruh kecamatan Kota Tual;
- 6) ruang terbuka non hijau yaitu lahan perkerasan dan badan air (danau Ngadi & danau Fanil);
- 7) ruang evakuasi bencana dengan pembagian sebagai berikut
  - Pulau Dullah berpusat di Bukit Iban desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara;
  - Pulau Tayando berpusat pada bukit Tu Ilun Ratan di desa Ohoiel dan Bukit Rubai Un Fit di desa Yamtel;
  - Pulau-pulau Kur berpusat di Gunung Namsar desa Kanara/Yapas Kecamatan Kur Selatan dan gunung Burun di Desa Kaimear kecamatan Puau-pulau Kur;
- 8) ruang kegiatan sector informal berupa kawasan warung dan pedagang kaki lima di kecamatan Pulau Dulau Utara &



Pulau Dullah Selatan, terutama di arahkan di Kelurahan Masrum & desa Fiditan ;

- 9) kawasan peruntukkan lainnya yaitu kawasan peruntukan perikanan, hutan produksi, pertanian, pelayanan umum (perndidikan/kesehatan) dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

b. kawasan lindung yang meliputi

- 1) hutan lindung tersebar di kecamatan Pulau Dullah Utara & Tayando Tam;
- 2) kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- 3) kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan pantai dan kawasan sekitar danau;
- 4) ruang terbuka hijau yang terdiri dari taman kota, lapangan olahraga, hutan mangrove, jalur hijau dan sebagainya;
- 5) suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
- 6) kawasan rawan bencana alam terhadap gempa bumi, tsunami, dan banjir akibat gelombang pasang
- 7) kawasan lindung lainnya berupa pantai berterumbu karang di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 22.949 ha.

Selain pengembangan-pengembangan yang ada, juga ditetapkan kawasan-kawasan startegis yang meliputi kawasan agropolitan di Kecamatan Pulau Dullah Utara, kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan; kawasan minapolitan di semua kecamatan, dan kawasan konservasi penyu di pulau Woning kecamatan Kur Selatan.

#### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kota Tual merupakan wilayah rawan bencana terutama bencana gempa bumi (tektonik), tsunami serta gelombang pasang dan angin topan akibat perubahan iklim. Berikut deskripsi bencana yang berpotensi terjadi di Kota Tual:

1. Gempa bumi (gempa tektonik)

Hampir seluruh wilayah Kota Tual merupakan daerah dengan resiko gempa bumi yang tinggi. Bencana ini dapat menimbulkan kerusakan sarana & prasarana umum, bangunan penduduk maupun korban jiwa. Gempa bumi yang terjadi di Kota Tual umumnya merupakan gempa bumi dengan episentrum dangkal yang menunjukkan kemungkinan resiko kerusakan cukup besar di permukaan.

2. Tsunami

Hampir seluruh wilayah Kota Tual merupakan wilayah dengan resiko kejadian Tsunami yang tinggi terutama Kecamatan pulau-pulau Kur dan kecamatan Tayando Tam yang berada di sebelah barat Kota Tual. Beberapa wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana tsunami antara lain adalah:

- a) Daerah-daerah pesisir , terutama pesisir barat wilayah kecamatan Pulau-pulau Kur;
- b) Wilayah pulau dengan morfologi landai dan ketinggian maksimum kurang dari 50 meter;
- c) Wilayah pulau-pulau kecil seperti Pulau Bui, Tengah, Kaimear, woning, MAnggi, Fadol, dan pulau-pulau lain sekitarnya;
- d) Wilayah pesisir pulau yang tidak memiliki karang penghalang (*coral reef*).

3. Gelombang Pasang

Perubahan iklim membawa dampak yang besar bagi keadaan bumi dan mendatangkan bencana. Salah satu bencana alam akibat perubahan iklim adalah bencana gelombang pasang yang mengancam kawasan pesisir pantai & mengganggu transportasi antar pulau.

Beberapa wilayah dengan resiko tinggi terhadap bencana gelombang pasang antara lain sebagai berikut:

- a) Pesisir dengan hunian penduduk berjarak kurang dari 50 meter dari garis pasang laut rata-rata;
- b) Pesisir dengan kemiringan pantai curam dan tidak memiliki karang penghalang
- c) Wilayah-wilayah dengan akses komunikasi rendah seperti di Pulau Kurdan sekitarnya

#### 4. Angin Topan

Angin Topan merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh adanya pengaruh pola dan kecepatan pergerakan angin. Di Kepulauan Kai termasuk di dalamnya Kota Tual, angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras sedangkan kecepatan angin yang cukup tinggi terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober. Wilayah-wilayah dengan resiko tinggi terhadap bencana angin topan antara lain:

- a. daerah pesisir yang menghadap langsung ke laut tanpa vegetasi penghalang;
- b. wilayah padat pemukiman dengan dominasi bangunan semi permanen

##### 2.1.1.8. Demografi

Demografi merupakan salah satu komponen data penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah karena menggambarkan kondisi penduduk suatu daerah secara keseluruhan. Hal ini diperlukan karena suatu perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang dapat memudahkan pengolahan dan analisis perkembangan pembangunan daerah sebelumnya yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah perencanaan selanjutnya.

Pada tahun 2013 sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, jumlah penduduk Kota Tual adalah sebesar 87.180 jiwa yang meningkat sebanyak 1.845 jiwa atau naik sebanyak 2,12% pada tahun 2014 menjadi 89.025 jiwa. Penurunan penduduk

kembali terjadi pada tahun 2015 dimana jumlah penduduk Kota Tual turun sebesar 5.404 jiwa atau 6,01 persen sehingga menjadi 83.621 jiwa penduduk. Pada tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,85 persen atau sebanyak 711 jiwa menjadi 8.432 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 86.531 jiwa yang berarti mengalami kenaikan sebanyak 2.199 jiwa atau 2,61 persen. Perkembangan jumlah penduduk Kota Tual periode 2013-2017 dapat dibandingkan pada tabel 2.3. sebagai berikut.

Tabel 2.3.  
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual  
Tahun Periode 2013-2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan 2013-2017
	2013	2014	2015	2016	2017	
PP. Kur	6557*	3730	2516	2689	2814	5,76%
Kur Selatan	-	2820	3060	3454	3662	9,45%
Tayando Tam	7508	7489	7183	7146	7488	2,14%
P. Dullah Utara	21254	21691	21279	21224	22044	1,80%
P. Dullah Selatan	51861	53295	49583	49819	50523	0,94%
Kota Tual	87180	89025	83621	84332	86531	1,73%

\*Jumlah Penduduk Kec. P.p Kur & Kur Selatan masih digabung

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Adapun jumlah rata-rata penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan jumlah rata-rata penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pulau-pulau Kur. Berdasarkan tabel 2.3. Menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tual cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tual periode 2013-2017 adalah sebesar 1,74%. Dari 5 kecamatan di Kota Tual, Kecamatan Kur Selatan merupakan kecamatan dengan pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 9,84 % & Kecamatan Pulau selatan memiliki pertumbuhan terkecil yaitu 0,95%. Laju pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang umumnya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Nilai rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 persen menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dan sebaliknya kemudian nilai persis 100 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sama banyaknya dengan jumlah penduduk perempuan. Data ini penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berwawasan kesetaraan gender yaitu perimbangan pembangunan dan perempuan secara adil. Penduduk Kota Tual menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin 2017 ditunjukkan dalam tabel 2. 4. Sebagai berikut.

Tabel 2.4.

Penduduk Kota Tual menurut Jenis Kelamin pada Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin (%)
	Laki-laki	Perempuan	
PP. Kur	1385	1429	97
Kur Selatan	1852	1810	102
Tayando Tam	3730	3752	99
P. Dullah Utara	10970	11074	99
P. Dullah Selatan	25191	25337	99
Kota Tual	43128	43397	99

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2018; Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel 2.4 rasio jenis kelamin Kota Tual adalah sebesar 99persen atau kurang dari 100 persen yang berarti di Kota Tual pada akhir periode 2013-2017 terdapat lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 43.397 jiwa perempuan berbanding 43.128 jiwa laki-laki. Hal tersebut berlaku pada 4 dari 5 kecamatan yang ada kecuali pada Kecamatan Kur Selatan dimana nilai Rasio Jenis kelamin kecamatan tersebut sebesar 102 persen yang berarti terdapat lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.852 laki-laki dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 1.810 jiwa.

Kepadatan penduduk menggambarkan distribusi penduduk yang tersebar dalam luasan suatu daerah dan diperoleh dengan perbandingan jumlah penduduk terhadap luasan wilayah bersangkutan. Kepadatan penduduk Kota Tual tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 349,95 jiwa/km<sup>2</sup> atau setiap 1 kilometer persegi luasan area yang ada di Kota Tual dihuni oleh 349-350 jiwa penduduk kemudian kepadatan terendah terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 328,71 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada akhir periode 2013-2017 yaitu pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kota Tual mencapai 340,15 jiwa/km<sup>2</sup> atau mengalami sedikit penurunan. Secara keseluruhan, kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah kecamatan Pulau Dullah Selatan dengan luas wilayah sebesar 40,75 km<sup>2</sup> mempunyai kepadatan penduduk berkisar antara 1.216-1308 jiwa/km<sup>2</sup> kemudian kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tayando Tam dengan luas 73,74 km<sup>2</sup> mempunyai kepadatan penduduk yang berkisar antara 96-102 jiwa/km<sup>2</sup>. perkembangan kepadatan penduduk Kota Tual sebagaimana ditunjukkan tabel 2.5. sebagai berikut.

Tabel 2.5.  
Kepadatan Penduduk Kota Tual Tahun 2013-2017

Kecamatan	Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
	2013	2014	2015	2016	2017
P.p Kur	334,37*	190,21	128,30	137,12	143,50
Kur Selatan		98,19	106,55	120,26	127,51
Tayando Tam	101,82	101,56	97,41	96,91	101,55
P. Dullah Utara	232,11	236,88	232,38	231,78	240,73
P. Dullah Selatan	1.272,66	1.307,85	1216,76	1.222,55	1.239,83
Kota Tual	342,70	349,95	328,71	331,51	340,15

\*) jumlah penduduk masih digabungkan

Sumber: data olahan, 2018

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **A. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mengukur kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan daerah bersangkutan. Terdapat 2 macam PDRB yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku atau PDRB nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian serta PDRB atas dasar harga konstan yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

##### **1) Struktur Ekonomi**

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kota Tual masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta beberapa lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tual. Secara berturut-turut sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 7 persen. PDRB Kota Tual menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2016 tercatat sebesar 1.904.436,72 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka terdapat kenaikan sebesar 146.111,65 juta rupiah atau 8,31 persen. Adapun struktur Perekonomian Kota Tual ditunjukkan dalam tabel 2.6. sebagai berikut.

Tabel 2.6.  
Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Tahun 2013-2017

No.	Lapangan usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata pertumbuhan
1	Pertanian, kehutanan & perikanan	39.01	39.88	38.74	37.86	37.55	38,608
2	Pertambangan dan Penggalian	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0,41
3	Industri Pengolahan	1.58	1.58	1.57	1.58	1.62	1,586
4	Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0,056
5	Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.44	0.41	0.4	0.39	0.38	0,404
6	Konstruksi	8.52	8.49	8.71	8.71	8.67	8,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	12.54	12.42	12.58	12.73	13.17	12,688
8	Transportasi dan Pergudangan	3.03	3.02	3.03	3.05	3.09	3,044
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.05	1.05	1.05	1.04	1.02	1,042
10	Informasi dan Komunikasi	1.79	1.77	1.73	1.74	1.76	1,758
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.32	2.26	2.28	2.39	2.29	2,308
12	Real Estat	0.48	0.45	0.46	0.44	0.43	0,452
13	Jasa Perusahaan	0.33	0.32	0.31	0.3	0.30	0,312
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	16.63	16.34	16.95	17.46	17.47	16,97
15	Jasa Pendidikan	6.7	6.72	6.97	7.03	6.95	6,874
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.65	3.43	3.41	3.53	3.56	3,516
17	Jasa Lainnya	1.48	1.4	1.35	1.32	1.25	1,36

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara;

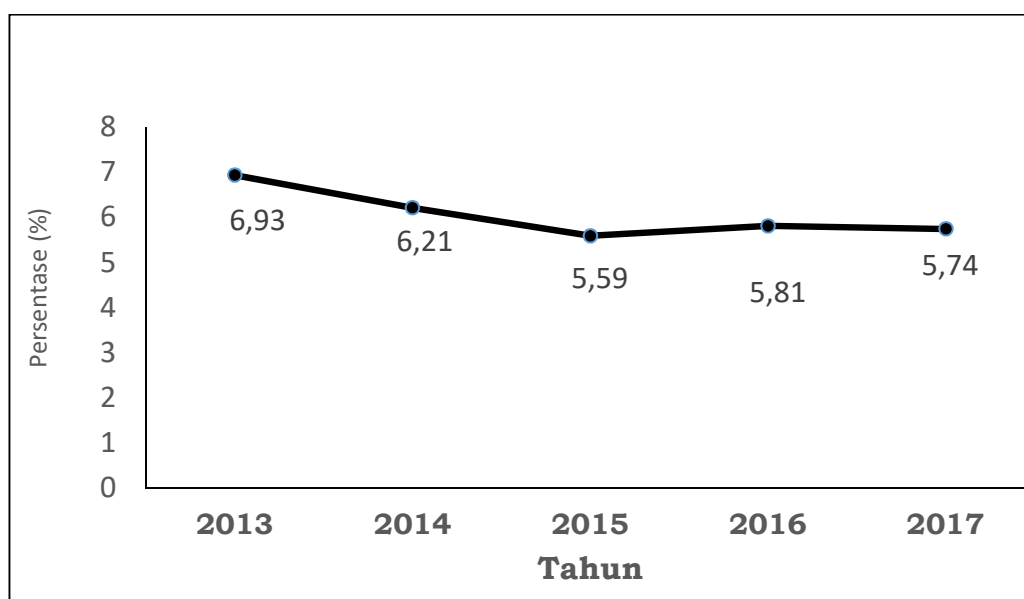
Sumber:PDRB Kota Tual 2017



## 2) Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi ekonomi suatu daerah pada periode tertentu dapat dilihat melalui analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Perekonomian Kota Tual pada tahun 2016 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. PDRB Kota Tual Tahun 2017 atas dasar Harga Konstan 2010 naik sebesar 72.596 juta rupiah dari tahun 2016 yaitu dari 1.265.188 juta rupiah menjadi 1.337.783 juta rupiah atau naik sebesar 5,74 persen dari keadaan perekonomian tahun 2016 sebesar 5,81 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual berturut sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada gambar grafik 2.2 sebagai berikut.

Gambar 2.2.  
Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi  
Kota Tual Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : PDRB Kota Tual 2017

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pedagang besar, reparasi mobil dan motor sebesar 8,28 persen di tahun 2017. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013– 2017

No.	Lapangan usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata pertumbuhan
1	Pertanian, kehutanan & perikanan	5.23	7	3.83	3.84	4.22	5.81
2	Pertambangan dan Penggalian	3.48	5.49	4.83	6.01	6.92	5.8
3	Industri Pengolahan	6.42	7.07	4.98	5.17	7.38	5.87
4	Listrik dan Gas	3.74	27	0.41	8.6	1.32	9.77
5	Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.18	3.26	3.21	5.38	3.01	3.77
6	Konstruksi	5.76	5.59	5.24	6.26	6.33	5.47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	6.69	6.99	7.69	6.65	8.28	7.38
8	Transportasi dan Pergudangan	4.95	6.28	5.86	6.02	6.20	5.69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.5	6.24	6.46	3.09	4.26	5.73
10	Informasi dan Komunikasi	6.42	6.57	5.63	6.33	6.78	6.02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.52	6.05	8.64	10.64	1.35	8.64
12	Real Estat	3.38	5.26	3.09	3.17	3.49	3.89
13	Jasa Perusahaan	4.32	5.51	4.34	3.53	3.91	4.45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	9.39	5.16	8.37	8.84	8.14	8.25
15	Jasa Pendidikan	5.42	5.03	6.06	6.91	4.94	6.02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.17	2.21	5.17	6.54	4.76	4.49
17	Jasa Lainnya	0.86	1.35	1.58	2.42	3.04	1.4

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara;

Sumber:PDRB Kota Tual 2017

Pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,28 persen. Sedangkan seluruh

lapangan usaha lain pada Tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha-lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya; lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,14 persen; lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 7,38 persen; lapangan usaha pertambangan dan galian sebesar 6,92 persen; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,78 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,33 persen;

Selanjutnya, Nilai dan perkembangan pertumbuhan PDRB Kota Tual selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 2.8. sebagai berikut:

Tabel 2.8.

**Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tual Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

NO	SEKTOR	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian	532.218,17	15,17	624.563,70	17,35	681.089,34	9,05	720.229,01	5,75	786.263,51	9,17%
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.546,38	11,56	6.369,49	14,84	7.272,98	14,18	7.879,55	8,34	8.634,45	9,58%
3.	Industri Pengolahan	21.571,92	14,67	24.762,57	14,79	27.645,01	11,64	30.159,08	9,09	33.930,17	12,50%
4.	Listrik dan Gas	574,50	(8,03)	765,15	33,19	982,33	28,38	1.227,29	24,94	1.389,94	13,25%
5.	Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.969,41	7,92	6.442,94	7,93	7.023,44	9,01	7.490,47	6,65	8.045,20	7,41%
6.	Konstruksi	116.265,13	16,26	132.935,95	14,34	153.062,27	15,14	165.962,89	8,43	181.443,49	9,33%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	171.128,76	9,99	194.440,55	13,62	221.163,08	13,74	242.346,97	9,58	275.835,21	13,82%
8.	Transportasi dan Pergudangan	41.322,27	12,09	47.268,51	14,39	53.357,88	12,88	58.036,87	8,77	64.717,35	11,51%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.360,64	14,15	16.520,26	15,04	18.525,65	12,14	19.716,17	6,43	21.331,45	8,19%
10	Informasi dan Komunikasi	24.486,02	7,88	27.675,20	13,02	30.407,62	9,87	33.147,51	9,01	36.907,27	11,34%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	31.634,98	14,55	35.354,83	11,76	40.073,43	13,35	45.448,28	13,41	48.046,93	5,72%
12	Real Estat	6.498,47	12,84	7.119,33	9,55	8.010,64	12,52	8.401,94	4,88	8.914,22	6,10%
13	Jasa Perusahaan	4.474,49	8,57	4.946,15	10,54	5.457,19	10,33	5.725,59	4,92	6.277,57	9,64%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	226.880,30	19,84	255.849,76	12,77	298.030,42	16,49	332.473,43	11,56	365.815,69	10,03%
15	Jasa Pendidikan	91.357,42	13,32	105.279,01	15,24	122.476,06	16,33	133.868,22	9,30	145.449,59	8,65%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.866,09	9,27	53.704,09	7,70	59.951,40	11,63	67.279,10	12,22	74.556,93	10,82%
17	Jasa Lainnya	20.183,02	10,00	21.987,41	8,94	23.796,35	8,23	25.044,36	5,24	26.102,59	4,23%
<b>TOTAL</b>		<b>1.364.337,96</b>	<b>14,51</b>	<b>1.565.984,90</b>	<b>14,78</b>	<b>1.758.325,08</b>	<b>12,28</b>	<b>1.904.436,72</b>	<b>8,31</b>	<b>2.093.661,54</b>	<b>9,94%</b>

\*angka sementara;

\*\*angka sangat sementara;

Sumber: PDRB Kota Tual 2017

Tabel 2.9.

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Tual Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	410.956,44	5,23	439.709,65	7,00	456.543,87	3,83	474.062,84	3,84	494.091,09	4,22%
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.436,60	3,48	4.680,37	5,49	4.906,63	4,83	5.201,66	6,01	5.561,85	6,92%
3.	Industri Pengolahan	16.826,24	6,42	18.015,67	7,07	18.913,22	4,98	19.890,70	5,17	21.358,16	7,38%
4.	Listrik dan Gas	751,39	3,74	954,28	27,00	958,17	0,41	1.040,55	8,60	1.054,02	1,29%
5.	Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.063,31	3,18	5.228,22	3,26	5.396,27	3,21	5.686,84	5,38	5.857,76	3,01%
6.	Konstruksi	86.066,32	5,76	91.734,48	6,59	96.541,39	5,24	102.583,36	6,26	109.073,79	6,33%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	148.790,63	6,69	159.194,63	6,99	171.443,31	7,69	182.848,96	6,65	197.996,93	8,28%
8.	Transportasi dan Pergudangan	37.005,89	4,95	39.330,59	6,28	41.633,70	5,86	44.139,86	6,02	46.875,15	6,20%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.275,22	6,50	11.978,64	6,24	12.752,21	6,46	13.146,87	3,09	13.706,54	4,26%
10	Informasi dan Komunikasi	23.757,71	6,42	25.317,73	6,57	26.743,91	5,63	28.437,07	6,33	30.366,04	6,78%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	26.455,33	11,52	28.057,05	6,05	30.479,91	8,64	33.742,16	10,64	34.180,46	1,30%
12	Real Estat	5.129,22	3,38	5.398,89	5,26	5.565,70	3,09	5.742,31	3,17	5.942,63	3,49%
13	Jasa Perusahaan	3.801,79	4,32	4.011,27	5,51	4.185,33	4,34	4.333,18	3,53	4.502,54	3,91%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	157.823,67	9,39	165.964,61	5,16	179.855,15	8,37	195.748,96	8,84	221.679,33	13,25%
15	Jasa Pendidikan	72.375,08	5,42	76.018,13	5,03	80.625,61	6,06	86.193,12	6,91	90.452,66	4,94%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.464,38	2,17	40.338,02	2,21	42.423,95	5,17	45.198,91	6,54	47.352,47	4,76%
17	Jasa Lainnya	16.321,08	0,86	16.541,01	1,35	16.801,80	1,58	17.209,14	2,24	17.732,31	3,04%
<b>TOTAL</b>		<b>1.066.300,30</b>	<b>6,06</b>	<b>1.132.473,24</b>	<b>6,21</b>	<b>1.195.770,13</b>	<b>5,59</b>	<b>1.265.188,47</b>	<b>5,81</b>	<b>1.337.783,92</b>	<b>1.337.783,92</b>

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara;

Sumber: PDRB Kota Tual 2017

## B. Laju Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin melemahnya/merosotnya nilai riil mata uang suatu Negara. Perkembangan harga tersebut diindikasikan melalui indeks harga konsumen (IHK). Pertumbuhan inflasi Kota Tual mengalami perkembangan yang variatif dengan rata-rata pertumbuhan 31,55 persen. nilai inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 11.48 persen dan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.97 persen.

Nilai inflasi rata-rata Kota Tual selama tahun 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10.

Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Tual Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata (%)
Kota Tual	na	11.48	8.58	2.97	9.41	8,11
Provinsi Maluku	8.81	7.19	6.15	3.26	0.78	4,35
Nasional	8.38	8.36	3.35	3.26	3.61	4,65

Sumber: Kajian ekonomi & keuangan regional Provinsi Maluku triwulan IV 2017 & triwulan IV2016; data olahan 2018

## C. PDRB Per Kapita

Gambaran perekonomian Kota Tual secara makro dapat juga terlihat melalui beberapa indikator makro ekonomi lainnya seperti PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya PDRB per penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil perkapita. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota Tual mencapai 24,20 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 7,14 persen pada tahun 2013 dan berturut-turut sebesar 12,40; 19,54; dan 7,40 persen pada tahun 2014-2016. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Tual dapat dilihat pada tabel 2.11. sebagai berikut.

Tabel 2.11.

## PDRB Per Kapita Kota Tual (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,10	7,02	8,14	8,54	9,09
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10
3.	Industri Pengolahan	0,25	0,28	0,33	0,36	0,39
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
6.	Konstruksi	1,33	1,49	1,83	1,97	2,10
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,96	2,18	2,64	2,87	3,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,47	0,53	0,64	0,69	0,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16	0,19	0,22	0,23	0,25
10.	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,31	0,36	0,39	0,43
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,40	0,48	0,54	0,56
12.	Real Estat	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10
13.	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,60	2,87	3,56	3,94	4,23
15.	Jasa Pendidikan	1,05	1,18	1,46	1,59	1,68
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,60	0,72	0,80	0,86
17.	Jasa Lainnya	0,23	0,25	0,28	0,30	0,30
	<b>PDRB</b>	<b>15,65</b>	<b>17,59</b>	<b>21,03</b>	<b>22,58</b>	<b>24,20</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kota Tual 2017

Angka pertumbuhan PDRB per Kapita menunjukkan hasil meningkat dari tahun ke tahun pada periode 2013-2017. Pada tahun 2013 sebesar 15,65 juta rupiah meningkat menjadi 24,20 juta rupiah pada tahun 2017. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,09 juta Rupiah dengan pertumbuhan rata-rata tahun sebesar 7,14 %.

#### D. Capaian Pengentasan Kemiskinan

Sejatinya pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dimana kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang harus diperhatikan. Dengan menggunakan batasan garis kemiskinan, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam periode 2012-2017, garis kemiskinan Kota Tual terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 269.265 per kapita per bulan menjadi 372.731 per kapita per bulan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan naiknya batas garis kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin Kota Tual selama tahun 2012-2017 mengalami penurunan dimana jumlah penduduk miskin tahun 2017 adalah sebesar 17.090 penduduk (24.00%), lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebanyak 18.70 penduduk (32.01%).

Tabel 2.12.

Perkembangan pengentasan Penduduk Miskin  
Kota Tual Tahun 2012-2017

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)</b>
2012	18,70	32,01	269.265
2013	15,00	23,28	291.769
2014	14,81	22,31	297.378
2015	16,74	24,90	328.247
2016	17,12	24,74	345.670
2017	17,09	24,00	372 731

Sumber : Inkesra Kota Tual 2017

Dari gambaran di atas secara umum dapat dikatakan berbagai program kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Tual memberikan dampak positif bagi usaha menekan jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin Kota Tual terhadap total penduduk di Kota Tual apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku tahun 2016 berada pada urutan ke 7 dengan presentase 24,00%



dari seluruh jumlah penduduk Kota Tual. Adapun data penduduk miskin dalam kurun waktu 2012-2016 Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.13 sebagai berikut.

Tabel 2.13.

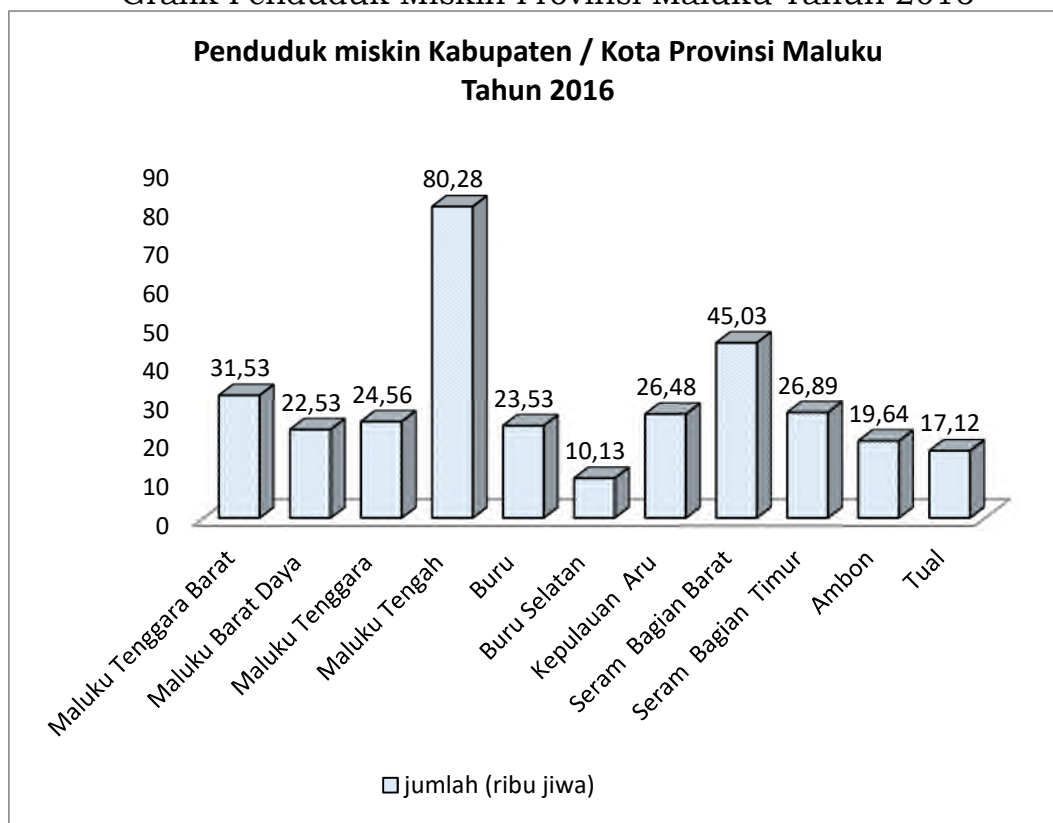
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Kota Tual dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)	Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)	Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)	Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)	Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)
Maluku Tenggara Barat	30.7	28.45	32,4	29,75	31.37	28.56	32.43	29.17	31.53	28.31
Maluku Barat Daya	23.2	32.55	21.0	29.25	23.86	28.33	22.90	31.58	22.53	31.01
Maluku Tenggara	25.5	26.03	81,4	25.06	78.93	24.21	24.94	25.23	24.56	24.81
Maluku Tengah	88.1	24.05	22,4	22.15	21.95	21.41	81.43	22.10	80.28	21.68
Buru	23.2	19.78	24,3	18.51	23.79	17.55	23.42	18.47	23.53	18.02
Buru Selatan	10.3	18.29	9.8	17.05	40.21	16.59	10.41	17.58	10.13	16.86
Kepulauan Aru	25.0	28.57	24.3	27.34	25.08	26.33	26.14	28.64	26.48	28.71
Seram Bagian Barat	42.5	25.35	41.4	24.63	20.43	23.79	44.61	26.35	45.03	26.50
Seram Bagian Timur	26.9	25.92	25.8	24.49	9.70	23.40	27.44	25.37	26.89	24.51
Ambon	22.0	5.98	16,9	4,42	16.89	4.23	17.94	4.38	19.64	4.64
<b>Tual</b>	<b>16.0</b>	<b>25.66</b>	<b>15,0</b>	<b>23,28</b>	<b>14.81</b>	<b>22.31</b>	<b>16.74</b>	<b>24.90</b>	<b>17.12</b>	<b>24.74</b>

Sumber : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Tual 2017.

Gambar 2.3.

Grafik Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2016



#### E. Angka Kriminalitas

Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan daerah yang kondusif, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menyatakan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Resort Maluku Tenggara selama satu tahun . Angka kriminalitas yang tertangani di Kota tual selama 2013-2017 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2. 14. Sebagai berikut.

Tabel 2.14.

Angka Kriminalitas Kota Tual  
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani (kasus)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Angka kriminalitas
2013	148	87.180	16.98
2014	120	89.025	13.48
2015	83	83.621	9.93
2016	282	84.332	33.44
2017	148	86.531	17.10

Sumber : Data Kepolisian Resort Maluku Tenggara 2018; Data Olahan, 2018

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah tindak pidana yang tertangani selama 1 tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun berkenaan per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas Kota Tual selama 2013-2017 mengalami fluktuasi. Angka kriminalitas terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,93 kasus dengan jumlah tindak criminal tertangani sebanyak 83 kasus sedangkan angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 33.44 kasus dengan kasus criminal tertangani sebanyak 282 kasus. Mendekati akhir periode 2013-2018, yaitu pada tahun 2017 tindak kriminal yang tertangani di Kota Tual adalah sebanyak 148 kasus dengan angka kriminalitas sebesar 17.10 kasus. Angka kriminalitas perlu terus ditekan agar tercipta keadaan yang tetram dan stabil melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif.

### 2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran terkait keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut:

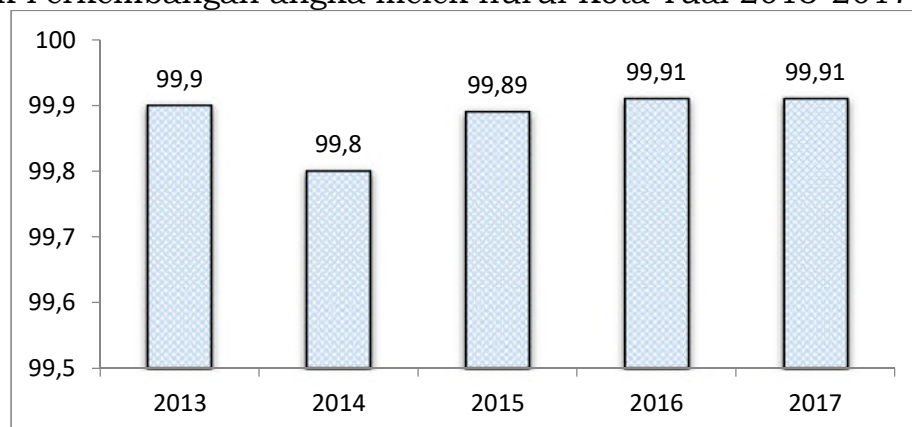
#### 2.2.2.1. Pendidikan

##### A. Angka Melek Huruf (Umur 15 Tahun Keatas)

Angka melek huruf diartikan sebagai perbandingan penduduk yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Indikator ini menggambarkan mutu SDM yang diukur dalam aspek pendidikan dimana semakin tinggi Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah dianggap dapat menunjukkan kesiapan wilayah tersebut dalam penyediaan SDM yang handal. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu Bangsa karena dapat menunjukkan kesejahteraan sosial yang merata serta dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Angka Melek Huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, mengukur kemampuan penduduk dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis.

Angka melek huruf Kota Tual pada tahun 2013-2017 rata-rata mencapai 99.88 persen. Ini berarti hampir seluruh penduduk Kota Tual mempunyai kemampuan baca dan tulis serta mengerti kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perkembangan angka melek huruf Kota Tual 2013-2017 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2.4.  
Grafik Perkembangan angka melek huruf Kota Tual 2013-2017 (%)



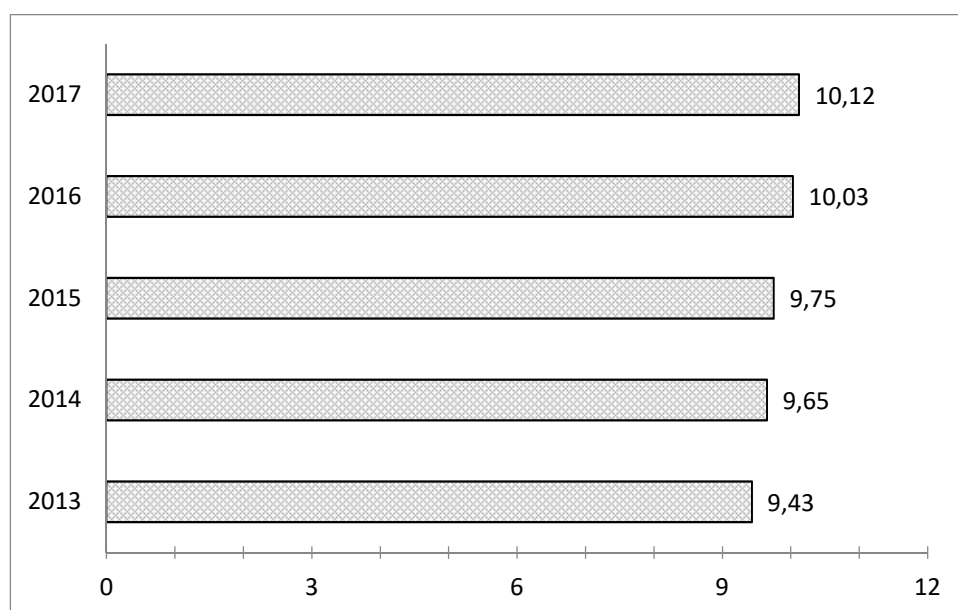
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018

## B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah didapatkan dengan mengolah sekaligus dua variabel yaitu tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan beberapa lama penduduk mengenyam pendidikan dibangku sekolah.

Gambar 2.5.

Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah  
Kota Tual Tahun 2013-2017 (Tahun)



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018

Data pada grafik menunjukkan terjadi peningkatan lama sekolah dimana pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah mencapai 9,43 tahun meningkat menjadi 10,12 tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Jenjang Pendidikan dasar penduduk Kota Tual semakin tercapai setiap tahunnya. Berdasarkan data badan pusat statistik.

Untuk memberikan gambaran rata-rata lama sekolah Kota Tual secara regional, digunakan data dari badan pusat statistik yang mana nilai indikator ini mencapai 9,76 tahun pada tahun 2016. Capaian tersebut sudah berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 7.95 tahun. Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi agar pendidikan dasar dan menengah dapat dituntaskan bagi seluruh penduduk Kota Tual. Data capaian secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.15.

Tabel 2.15.

Perbandingan rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tual  
Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Maluku Tenggara Barat	8.57	8.86	8.88	8.98	8.99
2.	Maluku Barat Daya	7.31	7.32	7.60	7.61	7.85
3.	Maluku Tenggara	8.45	8.51	8.71	9.05	9.17
4.	Maluku Tengah	8.37	8.84	8.88	8.89	9.18
5.	Buru	6.75	6.91	7.15	7.43	7.67
6.	Buru Selatan	6.00	6.31	6.62	6.95	6.96
7.	Kepulauan Aru	7.92	7.93	7.98	8.13	8.39
8.	Seram Bagian Barat	8.30	8.37	8.42	8.42	8.43
9.	Seram Bagian Timur	6.71	6.90	6.97	7.30	7.53
10.	Kota Ambon	11.21	11.44	11.61	11.63	11.64
11.	Kota Tual	9.43	9.54	9.65	9.67	9.76
<b>12.</b>	<b>Maluku</b>	<b>8.80</b>	<b>8.81</b>	<b>9.15</b>	<b>9.16</b>	<b>9.27</b>
<b>13.</b>	<b>Nasional</b>	<b>7.59</b>	<b>7.61</b>	<b>7.73</b>	<b>7.84</b>	<b>7.95</b>

sumber : Inkesra Kota Tual Tahun 2017, dan Badan Pusat Statistik(<http://ipm.bps.go.id/data/nasional> - akses pada 21 April 2018)

### C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai

dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur daya serap jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dimana semakin tinggi nilai APK, dapat diartikan semakin banyak jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan aspek usia. Perkembangan APK Kota Tual ditunjukkan pada tabel 2.16. sebagai berikut:

Tabel 2.16.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tual  
Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Tingkat Pendidikan		
		SD/MI (%)	SMP/MTs (%)	SMA/SMK/MA (%)
1.	2013	119.28	102.03	98.54
2.	2014	106.46	97.54	98.47
3.	2015	103.8	95.01	99.63
4.	2016	105.8	98.1	-
5.	2017	105.8	98.1	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tual untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Untuk jenjang SD/MI dari 119.28 persen pada tahun 2013 menjadi 105.8 persen pada tahun 2017. Angka partisipasi kasar jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2017 menjadi sebesar bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 102.03 persen. Capaian APK SMA/MA/SMK tersebut masih perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Capaian APK yang meningkat pada tingkat SMP/MTs yaitu dari 98,93% menjadi 100%.

#### D. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni digunakan untuk mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang ideal ditempuh pada kelompok usia sekolah yang

bersangkutan. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs dan 16-18 tahun untuk SMA/SMK/MA) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka Partisipasi Murni Kota Tual ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tual dan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Tingkat Pendidikan		
		SD/MI (%)	SMP/MTs (%)	SMA/SMK/MA (%)
1.	2013	98.05	93.42	98.54
2.	2014	98.90	94.44	98.47
3.	2015	94.47	98.08	99.63
4.	2016	94.41	98.08	-
5	2017	94.51	99.08	-

Sumber : data Dinas Pendidikan, 2018 & 2017

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tual untuk semua jenjang pendidikan dasar cenderung mengalami penurunan sedangkan untuk tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD/MI meningkat menurun dari 98,05% menjadi 94.51% dan jenjang SMP/MTs dari 93,42% menjadi 99.08%.CapaianAPM SD/MI &SMP/MTs perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun guna mendukung implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU).

#### E. Penduduk

Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia Kota Tual, salah satunya dapat diukur melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan.



Tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Tual diukur dengan ijazah yang diraih disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18.  
Presentase penduduk menurut ijazah pendidikan terakhir yang ditamatkan

Jenjang	2013	2014	2015	2016
Tidak mempunyai ijazah	14.45	NA	10.26	3.86
SD& sederajat	30.77	NA	23.88	31.85
SMP & sederajat	18.34	NA	24.79	14.63
SMA& Sederajat	27.28	NA	30.59	35.89
Diploma I, II	9.16	NA	1.40	1.56
Diploma III/Akademi		NA	0.87	2.47
Diploma IV/S1/S2/S3		NA	7.86	9.73

Sumber: Inkesra Kota Tual 2013-2017

Presentase penduduk yang tidak berijazah mengalami penurunan dari 14.45% pada tahun 2013 menjadi 3.86 % pada tahun 2016; ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan hingga tuntas pada tiap jenjang pendidikan.

#### 2.2.2.2. Kesehatan

##### 1. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, penurunan angka kematian ibu melahirkan mengalami

penurunan dapat di lihat dari tabel realisasi pencapaian penanganan dari tahun 2014-2018.

Tabel 2.19.

Angka kematian Ibu melahirkan per-1.000 kelahiran hidup					
2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan rata-rata
2	5	5	7	1	0,85 %

Realisasi Angka Kematian Ibu Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

## 2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Penyebabnya karena faktor dari dalam yaitu merupakan bawaan lahir yang terjadi pada masa pembuahan atau dalam masa kehamilan dan faktor dari luar yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan lingkungan penduduk, sarana prasarana serta pelayanan kesehatan maupun kondisi social ekonomi masyarakat. Angka Kematian bayi dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam meninjau dan merencanakan program pembangunan di bidang kesehatan khususnya pelayan bayi dan ibu hamil.

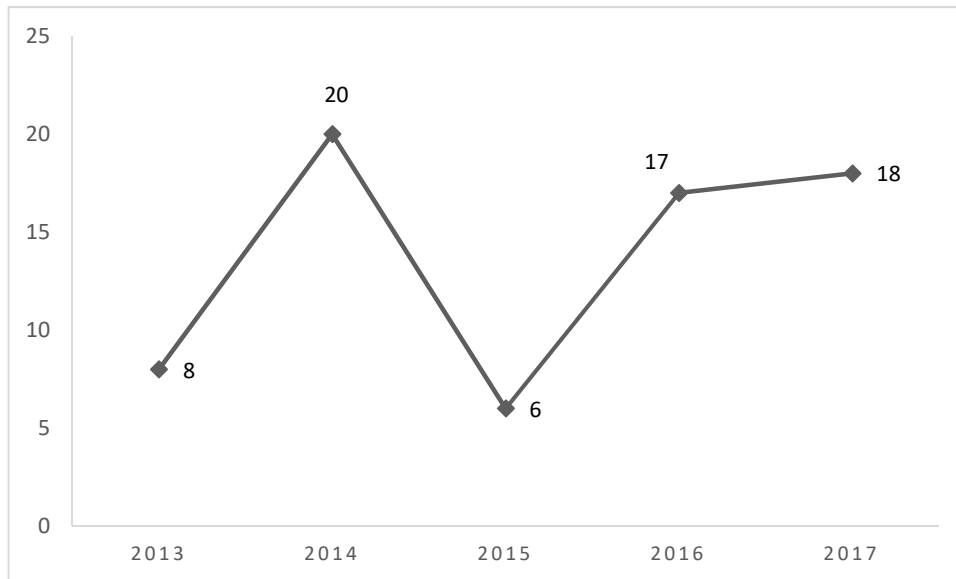
Tabel 2.20.  
Angka Kematian Bayi Kota Tual Tahun 2012-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata (% tahun)
Jumlah Kematian bayi (jiwa)	10	21	7	21	26	66.79
Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	1,256	1,066	1,204	1,263	1,425	3.89
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	8	20	6	17	18	67.30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

Pada tahun 2013 angka kematian bayi mencapai 8 per 1.000 kelahiran hidup yang meningkat sebesar 150% menjadi 20 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Pada tahun 2015 AKB mengalami pertumbuhan yang baik dibandingkan tahun sebelum yaitu sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun sebesar -70% namun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 17 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat sebesar 183,33% dan pada tahun 2017 menjadi 18 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat 6% dari tahun 2016.

Gambar 2.6.  
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup  
Kota Tual Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018

Selama kurun waktu tahun 2013-2017, angka kematian bayi di Kota Tual mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terdata sangat tinggi yaitu sebesar 67,30%. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menekan Angka Kematian bayi melalui program dan kegiatan yang mendukung. Grafik AKB Kota Tual

### 3. Presentase Balita Gizi Buruk

Data Presentase Balita gizi buruk merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja pembangunan bidang kesehatan di suatu daerah. Presentase Balita gizi buruk Kota Tual selama tahun 2013-2017 ditunjukkan pada tabel 2. 21, sebagai berikut.

Tabel 2.21.

Presentase Balita Gizi Buruk Di Kota Tual Tahun 2013-2017

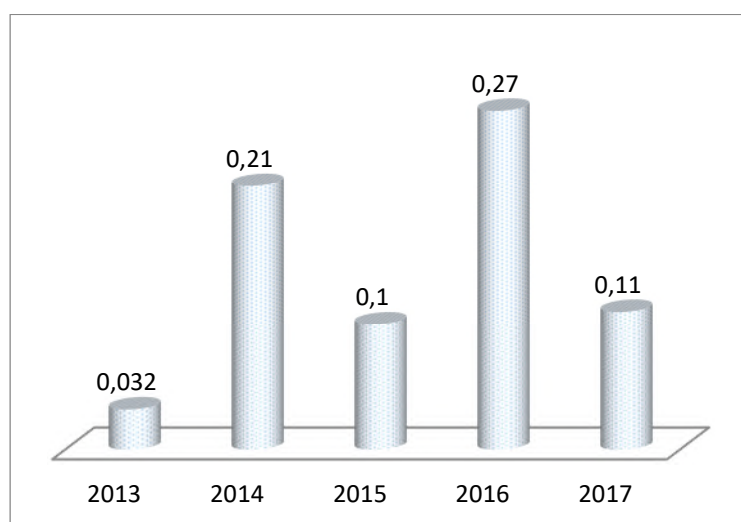
<b>Indikator</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Pertumbuhan rata-rata (% tahun)</b>
Balita gizi buruk (jiwa)	2	13	6	13	7	1.42%
Jumlah balita (jiwa)	6,227	6,309	6,170	4,867	6,508	2.93%
Presentase Balita gizi buruk (%)	0.03	0.21	0.10	0.27	0.11	2.0%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

Kasus gizi buruk yang ditemukan di Kota Tual selama selang 2013-2017 mengalami penurunan yang cukup baik mencapai 2,0 persen. Pada tahun 2013 terdapat 2 kasus balita gizi buruk dengan presentase sebesar 0.03 persen dari jumlah seluruh balita kemudian pada tahun 2014 naik sangat tinggi menjadi 13 orang dengan presentase 0.21 persen. Di Tahun 2015 jumlah tersebut dapat ditekan menjadi 6 kasus balita gizi buruk dengan presentase sebesar 0.10 persen namun pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 13 kasus dengan presentase 0.27 persebnpada tahun 2017, jumlah balita gizi buruk ditekan menjadi 7 kasusatau sebesar 0.11 persen dari seluruh balita yang ada pada waktu itu.Berikut grafik Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Tual Tahun 2013-2017.

Gambar 2.7.

Persentase (%) Balita Gizi Buruk  
Di Kota Tual Tahun 2013-2017



Sumber : Data Dinas Kesehatan 2018, diolah

#### 4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) yaitu rata-rata lama hidup yang dihitung menurut umur merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah karena semakin panjang usia seseorang, dapat diasumsikan semakin baik kesehatannya. Usia harapan hidup dapat digunakan untuk sebagai patokan untuk mengukur & meningkatkan kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Data AHH Kota Tual periode 2013-2017 ditunjukkan tabel 2.22 sebagai berikut.

Tabel 2.22.  
Usia Harapan Hidup Kota Tual 2012-2016

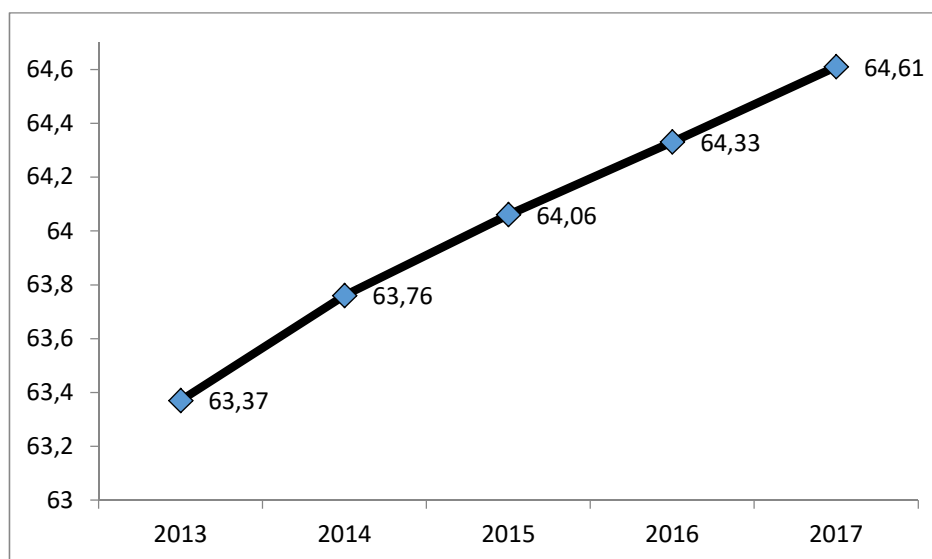
Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Angka usia harapan hidup (tahun)	63.37	63.76	64.06	64.33	64.61	64.63
Pertumbuhan per tahun (%)		0.62	0.47	0.42	0.44	0.49

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018; Data Olahan, 2018

Penduduk Kota Tual mempunyai usia harapan hidup rata-rata 64,63 tahun. Angka harapan hidup tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan harapan usia hidup sebesar 0.49 per tahun. Pada tahun 2013, AHH Kota Tual sebesar 63,37 tahun, meningkat menjadi 63,76 tahun pada tahun 2014 kemudian meningkat menjadi 64,06 pada tahun 2015. Tahun 2016 AHH meningkat menjadi 64,33 tahun dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar menjadi 64,61 tahun. Perkembangan AHH ditunjukkan gambar 2.6.

Gambar 2.8.

Grafik Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Tual 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018

Perkembangan ini menunjukkan semakin baiknya kualitas kesehatan yang ditunjang oleh berbagai program dan kegiatan bidang kesehatan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat termasuk di dalamnya penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi masyarakat seperti BPJS, Jamkesmas dan sebagainya.

## 5. Jaminan kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan, pemerintah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui pelaksanaan program jaminan kesehatan. Di Kota Tual terdapat beberapa jenis jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah antara lain seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), kartu BPJS, Jamakesda, Jamkesmas dan sebagainya.

Adapun data pemanfaatan program jaminan kesehatan di kota Tual adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23.  
Pemanfaatan program jaminan kesehatan oleh masyarakat Kota Tual 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk yang mengikuti program jaminan kesehatan	NA	NA	NA	26.368	18.115	52.780
Jumlah penduduk yang memanfaatkan kartu jaminan kesehatan	NA	NA	NA	NA	NA	33.467

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

#### 2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena erat kaitannya dengan kemampuan finansial penduduk. Perkembangan Ketenagakerjaan ditunjukkan melalui beberapa indikator tenaga kerja yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang pengangguran dan penyerapan tenaga kerja oleh dunia kerja. Pembahasan capaian Ketenagakerjaan Kota Tual



periode 2013-2017 secara garis besar dilakukan terhadap tingkat pengangguran terbuka dan rasio ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan jumlah pengangguran usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Data ini bermanfaat untuk melihat presentase jumlah penganggur yang ada dari seluruh jumlah penduduk angkatan kerja.

Tabel 2.24.  
Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)	2.100	2.646	3.318	2.282	4.474
JUmlah penduduk angkatan kerja (jiwa)	24.775	24.508	25.947	26.766	27.118
Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,48	10,8	12,79	8,53	16,5
Jumlah Penduduk yang bekerja (jiwa)	22.675	21.862	22.629	21.114	22.644

Sumber: Dinas PTSP, PMD & Tenaga Kerja, 2018

Dari tabel 2.24. Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual mengalami fluktuasi. Pada tahun awal periode tercatat sebesar 8,48 persen dengan jumlah pengangguran terbuka mencapai 2.100 jiwa. Pada tahun 2017 Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 16,49 persen dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.474 jiwa yang merupakan jumlah terendah selama periode dimaksud. Adapun tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah penganggur sebanyak 3.318 jiwa dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,79 persen.

Rasio Penduduk yang bekerja adalah presentase perbandingan penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang diserap dunia kerja pada suatu wilayah. Tabel 2.25. Menunjukkan perkembangan jumlah rasio penduduk yang bekerja dan angka partisipasi angkatan kerja selama 2013-2017.

Tabel 2.25.  
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Tual 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk yang bekerja	22.675	21.862	22.629	21.114	22.644
Angkatan Kerja	24.775	24.508	25.947	26.766	27.118
Rasio Penduduk yang bekerja	91,52	89,20	87,21	78,88	83,51
Angka Partisipasi angkatan kerja (%)	59.4	56.93	58.37	58.43	58.78

Sumber: Dinas PTSP, PMD & Tenaga Kerja, 2018

perkembangan rasio penduduk yang bekerja menunjukkan pertumbuhan menurun selama 2013-2017. Pada tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja adalah sebanyak 91,52 persen menurun menjadi 83,51 persen pada tahun 2017. Yang berarti terdapat 16,49 persen penduduk angkatan kerja belum memiliki lapangan pekerjaan atau sebanyak 4.474 jiwa.

### **2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

#### **2.2.3.1. Seni Budaya**

Perkembangan seni budaya di Kota Tual salah satunya dapat dilihat dari aktivitas kesenian yang dilakukan. Aktivitas seni budaya

ditandai dengan keberadaan 23 sanggar budaya yang tersebar di seluruh Kota Tual. Adapun sanggar seni budaya yang beraktivitas di Kota Tual menurut data terakhir antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.26.  
Sanggar Seni Budaya Kota Tual

Nama Sanggar Seni Budaya	Lokasi
El Masrum	Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Seni Namser	Desa Dullah, Kec. P. Dullah Utara
Sanggar Seni Debus	Kec. Tayando Tam
Sanggar Seni Al Banda	Komp. Banda Eli, Desa Tual
Sanggar Seni Budaya Kur	Kec. Pulau-pulau Kur
Sanggar Seni Ekel	Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Yu Roa	Desa Fiditan, Kec. P. Dullah Utara
Sanggar Seni Efut	Kel. Lodar El, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Seni Rhema	Un Petak XX, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Seni Smansa SMAN 1 Kota Tual	Lodar El, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar AL-Amin	Dusun Mangon, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Anggrek	Desa Fiditan Kampung Larat, Kec. P. Dullah Utara
Sanggar Melati	Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Seni Sawat Maren	Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Seni Pantai Difur	Desa Labetawi, Kec. P. Dullah Utara
Sanggar Seni MM Centre	Kota Tual
Sanggar Fik Fikir	Desa Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan
Sanggar Kil Kilun	Desa Tamedan, Kec. P. Dullah Utara
Sanggar Lenyar	Dusun Dumar
Sanggar Loor Rivun	Desa Labetawi, Kec. Pulau Dullah

	Selatan
Sanggar Manwain Kale	Mangur, Kec. Pulau-pulau Kur
Sanggar Budaya Watran	Watran, Kec. Pulau Dullah Utara

Sumber: Lakip Kota Tual 2017

Indikator jumlah grup kesenian diperoleh dengan menghitung jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dimana perhitungan ini bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan & kebijakan di bidang kebudayaan. Perkembangan jumlah grup kesenian (yang aktif) tahun 2013-2017 per 10.000 penduduk Kota Tual sebagaimana ditampilkan dalam table 2.27. sebagai berikut.

Tabel 2.27.  
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk Kota Tual  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah grup kesenian	NA	12	16	23	23	25,69%
Jumlah penduduk	87.180	89.025	83.621	84.332	86.531	1,73%
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	-	1.35	1.91	2.73	2.66	27,28%

Sumber: Lakip Kota Tual 2014-2017; Dinas Kependudukan& Catatan Sipil Kota Tual, 2018; Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 2.27. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah grup kesenian dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25.69 persen. Pada tahun 2017 jumlah sanggar seni budaya aktif yang ada sebanyak 23 kelompok yang meningkat dari jumlah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 12 unit. Demikian pula dengan jumlah grup

kesenian untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kota Tual terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27.28 Persen. Pada tahun 2014 sebesar 1.35 meningkat menjadi 2.66 pada tahun 2017 yang berarti pada tahun 2017 untuk setiap 10.000 orang penduduk Kota Tual terdapat 2-3 kelompok seni budaya.

#### 2.2.3.2. Olahraga

Indikator olahraga adalah salah satu unsur yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pola hidup sehat. Indikator olahraga di Kota Tual ditilik dari jumlah organisasi Olahraga yang aktif, jumlah lapangan olahraga, Organisasi Olahraga, dan jumlah kegiatan olahraga. Jumlah organisasi olahraga pada tahun 2017 menurut data Dinas Pemuda & Olahraga adalah sebanyak 9 organisasi dengan fasilitas lapangan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 16 unit. Jumlah tersebut meningkat dari jumlah lapangan olahraga pada tahun 2014 sebanyak 15 unit. Hal ini menunjukkan bahwa indikator olahraga di Kota Tual tidak signifikan pertumbuhannya sekalipun terdapat prestasi-prestasi olahraga yang diraih sejumlah penduduknya.

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disajikan secara rinci berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

##### 2.3.1.1. Terkait Pelayanan Dasar

###### A. Pendidikan

###### 1) Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan besaran yang menunjukkan daya serap jenjang pendidikan yang ada terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah Kota Tual dihitung pada jenjang pendidikan dasar yaitu setara SD & SMP

terhadap penduduk usia 7-15 tahun yang disajikan dalam tabel 2.28. sebagai berikut.

Tabel 2.28.  
Angka Partisipasi Sekolah Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
SD/MI/Paket A (%)	119.28	106.46	103.8	105.8	105.8	-2,83%
SMP/MTs/Paket B (%)	102.03	97.54	95.01	98.1	98.1	-0,94%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Perkembangan angka partisipasi sekolah Kota Tual menunjukkan hasil yang baik. Angka partisipasi sekolah jenjang Sekolah Dasar yaitu pada penduduk Kota Tual usia 7-12 tahun mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -2.83 persen dalam kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah jenjang ini sebesar 119,28 persen dan mengalami penurunan menjadi 105.8 persen. ini berarti dari seluruh penduduk usia sekolah dasar (SD & setara) atau penduduk usia 7-12 tahun seluruhnya mengenyam pendidikan dasar yang diselenggarakan di Kota Tual. Dari data ini juga terlihat bahwa sejumlah peserta pendidikan dasar merupakan penduduk usia 7-12 tahun yang tidak tercatat sebagai penduduk Kota Tual atau berasal dari daerah lain, yang ditunjukkan dengan presentase lebih dari 100 persen.

Angka partisipasi sekolah jenjang SMP dan sederajat menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun terjadi tren penurunan sebesar rata-rata -0.94 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah jenjang SMP dan setara di Kota Tual adalah sebesar 102.03 persen dan pada tahun 2017 turun menjadi 98.1 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 terdapat sebesar 1,9 persen penduduk yang tidak mengenyam pendidikan setara SMP dari total

seluruh penduduk berusia usia 13-15 tahun yang ada. Penyelenggaraan pendidikan dasar khususnya untuk jenjang SMP perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencakup seluruh penduduk usia bersangkutan.

## 2) pendidikan anak usia dini

pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang membina anak usia lahir sampai sebelum sekolah agar siap menjalani pendidikan dasar pada masa yang akan datang. Presentase Anak usia dini di Kota Tual adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak anak usia sebelum sekolah yang dipersiapkan perkembangannya untuk menghadapi pendidikan di bangku sekolah dikemudian hari dimana nilainya diperoleh dengan membandingkan jumlah anak terdidik di PAUD dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun.

Tabel 2.29.  
Presentase anak usia dini Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Siswa TK/PAUD (jiwa)	6,430	6,940	7,569	7,889	9,407	10,12%
Jumlah Anak Usia 4-6 tahun (jiwa)	5,688	5,998	6,780	6,989	8,012	9,05%
Presentase Pendidikan Anak Usia dini (%)	113.05	115.705	111.637	112.877	117.411	0,72%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Dari data perkembangan presentase anak usia dini Kota Tual dapat diketahui bahwa anak usia 4-6 tahun yang ada seluruhnya mengenyam pendidikan anak usia dini. Hal ini sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak anak yang disiapkan untuk menerima pendidikan dasar selanjutnya sehingga kualitas pendidikan dasar semakin meningkat dari sisi

partisipannya. Presentase pendidikan anak usia dini dari tahun 2013-2017 mencapai rata-rata 114.14 persen setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0.72 persen. presentase yang melebihi 100 persen menunjukkan adanya sejumlah siswa yang berasal dari luar daerah yang dididik pada TK/PAUD di Kota Tual. Cakupan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 117,41 persen dengan jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 8.012 jiwa dan siswa TK/PAUD sebanyak 9.407 jiwa. hal tersebut berarti pada tahun 2017 terdapat 17 persen siswa TK/PAUD di Kota Tual yang berasal dari luar atau sebanyak 1.395 jiwa.

### 3) Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Dan Angka Melanjutkan.

Ketiga indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan penuntasan proses pendidikan disetiap jenjangnya. Angka putus sekolah adalah presentase murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Selama kurun waktu 2013-2017 tidak terdapat kejadian putus sekolah sehingga kondisi ini perlu terus untuk dipertahankan dengan menjaga sistim pendidikan yang telah dijalankan dengan baik.

Demikian juga dengan angka kelulusan yaitu presentase perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian tersebut. Angka kelulusan di Kota Tual selama 2013-2017 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan yakni seluruhnya mencapai 100 persen diikuti dengan presentase angka melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang juga rata-rata mencapai 100 persen. data ini memberikan gambaran bahwa kualitas pendidikan Kota Tual semakin baik sehingga hal ini perlu terus dijaga berbagai pihak terlibat termasuk guru maupun murid & orang tua. Tabel 2.29. Menyajikan data Angka



Putus Sekolah, Angka Kelulusan Dan Angka Melanjutkan selama 2013-2017

Tabel 2.30.  
Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Angka Putus Sekolah						
SD/MI (%)	-	-	-	-	-	-
SMP/MTs (%)	-	-	-	-	-	-
Angka Kelulusan						
SD/MI (%)	100	100	100	100	100	0%
SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	0%
Angka melanjutkan						
SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	0%
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	100	100	100	100	0%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018

#### 4) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan media yang digunakan dalam melakukan berbagai aktivitas pendidikan. Salah satu penunjang utama pelaksanaannya adalah gedung sekolah. Fasilitas pendidikan Kota Tual selanjutnya akan dibahas mengenai jumlah sekolah dalam kondisi baik dan rasio ketersediaan sekolah per 10.000 jiwa penduduk.

Gedung sekolah dalam keadaan baik menunjang proses pembelajaran bagi pelajar sehingga pelajar dapat terfasilitasi dengan selayaknya. Gedung sekolah dalam kondisi baik sebagaimana data tersaji menunjukkan bahwa fasilitas

gedung sekolah selama 5 tahun terakhir cenderung tetap secara kuantitas.

Indikator ketersediaan sekolah pendidikan dasar adalah perbandingan jumlah sekolah pendidikan dasar yaitu SD/setara dan SMP/setara terhadap penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun untuk setiap 10.000 jiwa penduduk suatu wilayah. Berdasarkan data tercatat, terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar mengalami fluktuasi.

Perkembangan indikator terkait fasilitas pendidikan khususnya rasio sekolah pendidikan dasar dan jumlah sekolah dalam kondisi baik sebagaimana disajikan dalam tabel 2.230. sebagai berikut.

Tabel 2.31.  
Indikator Fasilitas Pendidikan Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio ketersediaan SD/ sederajat & SMP/ sederajat	51:11	51:11	51:11	51:11	51:11	0,00%
Jumlah sekolah dalam kondisi baik						
Pendidikan Dasar- SD/MI+SMP/MTs (unit)	86	86	86	89	89	0,01%
Pendidikan Menengah - SMK/MA/SMK (unit)	20	20	20	20	20	0,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

## 5) Tenaga Pengajar

### a. Rasio Guru

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid yang diasuh pada suatu jenjang pendidikan. Data ini digunakan untuk mengukur banyaknya siswa yang dihadapi 1 orang guru dalam proses

pendidikan di sekolah. Rasio jumlah guru di Kota Tual pada kurun 2013-2017 melebihi target yang diharapkan dimana rasio yang ditargetkan adalah sebesar 1 guru berbanding 23 namun dalam perkembangannya rasio murid yang dihadapi seorang guru dalam proses belajar mengajar di Kota Tual tidak mencapai batas maksimal yang ditentukan tersebut tetapi hanya sebesar 1 guru berbanding 10-18 orang murid. Angka ini memberikan ekspektasi yang baik dimana semakin sedikit jumlah murid yang dihadapi seorang guru dalam proses belajar mengajar maka dapat diasumsikan semakin besar perhatian guru sebagai tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga menghasilkan SDM anak didik yang berkualitas. Berikut data rasio guru pendidikan dasar di Kota Tual.

Tabel 2.32.  
Rasio Guru Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio guru SD/ sederajat (murid/ 1 guru)	18	17	16	16	14	-5,98
Rasio guru SMP/ sederajat (murid/ 1 guru)	15	14	11	11	10	-9,30

Sumber: Lakip Kota Tual 2014-2017; data olahan 2018

Rasio guru terhadap murid mengalami penurunan yang berarti terdapat peningkatan jumlah guru atau terjadi penurunan jumlah murid yang bersekolah dari kurun waktu sebelumnya. Pada tahun 2013 di jenjang sekolah dasar, rata-rata seorang guru berhadapan dengan 18 orang murid kemudian pada tahun 2017 jumlah tersebut menurun menjadi 14 orang siswa. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, di tahun 2013 rata-rata seorang guru berhadapan dengan 15 orang murid

kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 10 orang murid. Perkembangan rasio guru berbanding murid memberi gambaran bahwa perbandingan jumlah guru terhadap murid yang dihadapi berada dalam rasio yang sangat baik.

b. Presentase Guru Berkualifikasi SI/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi sarjana dianggap memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi pembelajaran yang lebih baik dan maju. Penguasaan materi pembelajaran seorang guru sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dimana dengan pendidikan yang lebih tinggi maka penguasaan dan pemahaman materi pendidikan seorang guru menjadi lebih baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas.

Tabel 2.33.

Data Guru Berkualifikasi S1/D-IV di Kota Tual Tahun 2017-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Guru berijazah S1/D-IV	615	839	856	891	954	12,40%
Jumlah seluruh guru	1.136	1.143	1.169	1.305	1.345	4,40%
Presentase Guru berijazah S1/D-IV	54,14	73,40	73,22	68,28	70,93	8,12%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; data olahan, 2018

Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, presentase guru berijazah S1/D-IV Kota Tual mengalami fluktuasi. Jumlah presentase terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 54,14 persen yaitu terdapat sekitar 615 orang guru berijazah S1/D-IV dari total seluruh guru yang ada sebanyak 1.136. Presentase guru dengan kualifikasi S1/D-IV tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 73,40persen dengan jumlah jumlah guru berijazah S1/DIV sebanyak 839 orang dari total 1143 orang guru. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 954 guru

kualifikasi tersebut dari total 1345 orang guru yang ada. Dari keseluruhan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lebih dari separuh guru atau rata-rata 67,99 persen guru yang melakukan proses Pendidikan selama 2013-2017 adalah tenaga yang telah memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV. Peningkatan kualifikasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mana juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya sekolah serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

## **B. Kesehatan**

### **1. Sarana & Prasarana Kesehatan**

- Rasio Posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dimana pelayanan kesehatan dasar anak merupakan target utama operasionalnya. Penyelenggaraan posyandu dilakukan bersama dengan partisipasi masyarakat guna memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Rasio Posyandu menunjukkan kualitas daya pelayanan fasilitas tersebut dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan Balita dimana semakin tinggi rasio Posyandu mengindikasikan semakin baik daya pelayanannya.

Tabel 2.34.  
Rasio Posyando per Satuan Balita Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Posyandu (unit)	-	97	93	91	91	-2,09%
Jumlah Balita (Balita)	6.227	6.309	6.170	4.867	6.508	3,47%
Rasio Posyandu	-	15,37	15,07	18,70	13,98	-1,03%

Sumber: Lakip Kota Tual 2014-2017, Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Perkembangan rasio posyandu 2013-2017 mengalami pertumbuhan menurun. Pada tahun 2014 rasio posyandu adalah sebesar 15,37 yang berarti terdapat 15-16 posyandu bagi setiap 1000 jiwa balita kemudian pada tahun 2017 rasio ini menjadi 13,98 yang berarti terdapat 13-14 posyandu yang melayani atau setiap 1 unit posyandu melayani 72-77 balita.

- Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu, per Satuan Penduduk

Puskesmas & klinik merupakan sarana kesehatan selain rumah sakit yang dapat diakses masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing. Rasio Puskesmas, Klinik dan Puskesmas pembantu adalah alat ukur yang menunjukkan keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas dan fasilitas serupa. Adapun data rasio Puskesmas, klinik & pustu Kota Tual selama 2013-2017 disajikan dalam tabel 2.34. Sebagai berikut.

Tabel 2.35.  
Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu, per Satuan Penduduk  
Kota Tual, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Puskesmas (unit)	11	13	13	15	15	8,39%
Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	5	4	4	4	4	-5,00%
Jumlah Klinik (unit)	2	2	3	3	3	12,50%
Jumlah (unit)	18	19	20	22	22	5,20%
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.180	89.025	83.621	84.332	86.531	1,73%
Rasio (/1000 penduduk)	0,21	0,21	0,24	0,26	0,25	4,69%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Klinik, Pustu mengalami peningkatan yang mana pertumbuhan rata-rata tahunannya mencapai 5.49 persen. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk pada tahun 2013 sebesar 0,21 meningkat menjadi 0,25 Puskesmas, Klinik, Pustu per seribu penduduk pada tahun 2017. Hal tersebut berarti pada tahun 2013 1 unit puskesmas/klinik/pustu melayani sekitar 4762 orang yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sehingga 1 Puskesmas atau Klinik atau Pustu melayani 4000 penduduk. Bila dibandingkan dengan standar yang ditentukan secara nasional maka rasio pelayanan puskesmas/klinik/pustu tersebut telah memenuhi syarat karena standar pelayanan minimal rasio puskesmas yang puskesmas adalah 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa.

- Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan, perawatan, diagnose serta pengobatan kepada masyarakat dengan ditunjang oleh tenaga medis yang kompeten dan fasilitas yang mendukung. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayaninya. Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk Kota Tual 2013-2017 tercatat sebagaimana ditunjukkan tabel 2.35. sebagai berikut.

Tabel 2.36.  
Rasio Rumah Sakit Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Rumah Sakit (unit)	0	1	1	1	1	0,00%
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.180	89.025	83.621	84.332	86.531	1,73%
Rasio Rumah Sakit (/1000 penduduk)	0	0.011	0.012	0.012	0.011	-4,17%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk selama 2013-2018 tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Pada tahun 2017 dan 2014 rasio rumah sakit sebesar 0.11 yang berarti untuk setiap 1000 penduduk dilayani 0,11 rumah sakit atau pada tahun tersebut 1 unit rumah sakit yang ada rata-rata melayani sekitar 90.909 penduduk setiap tahunnya. Sedangkan rasio 0,012 pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa rumah sakit yang ada mampu melayani 83.333 pasien. Perubahan jumlah rasio ini bukan dipengaruhi



pertambahan maupun pengurangan jumlah rumah sakit yang ada namun lebih dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah penduduk. Rasio tersebut telah memenuhi persyaratan dimana rasio rumah sakit untuk wilayah kabupaten/kota yang ditentukan adalah satu unit rumah sakit melayani 240.000 jiwa

## 2. Tenaga kesehatan

### • Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk adalah angka perbandingan jumlah dokter terhadap 1000 penduduk. Perkembangan RAsio Dokter Kota Tual 2013-2017 disajikan dalam tabel 2.36. sebagai berikut.

Tabel 2.37.  
Rasio Dokter Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Dokter	14	9	9	11	12	-1,10%
Jumlah Penduduk	87180	89025	83621	84332	86531	1,73%
Rasio Dokter	0.16	0.10	0.11	0.13	0.14	-0,41%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 2.36. Rasio Dokter Kota Tual kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dimana rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya adalah sebesar -0.41 persen. Rasio Dokter tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0.16 yang berarti setiap 1000 penduduk dilayani oleh 0,16 dokter atau 1 orang dokter melayani 6.250 orang penduduk. Rasio dokter terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,10 yang berarti setiap 1 dokter melayani 10.000 orang penduduk.

Berdasarkan rasio ini, dapat disimpulkan bahwa Kota Tual perlu menambah jumlah tenaga dokter yang ada karena perbandingan dokter yang ada selama 2013-2017 adalah 1 dokter melayani sekitar 6.250 – 10.000 penduduk yang mana rasio tersebut melebihi standar yang ditentukan yaitu 1:5.000 sampai 1:2.500

- Rasio Tenaga medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis merupakan perbandingan antara jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk. Indikator ini berguna untuk mengukur cakupan pelayanan seorang tenaga medis terhadap jumlah penduduk yang dilayani dimana semakin banyak tenaga medis, dapat berarti semakin efektif pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Perkembangan rasio tenaga medis Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.  
Rasio Tenaga Medis Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah tenaga medis (jiwa)	155	197	221	209	244	12,65%
Jumlah Penduduk (jiwa)	87180	89025	83621	84332	86531	1,73%
Rasio tenaga medis (/1000 penduduk)	1.78	2.21	2.64	2.45	2.82	12,88%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 2.37. Rasio tenaga medis mengalami perkembangan yang cukup baik dengan pertumbuhan mencapai 12,88 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013

rasio tersebut sebesar 1,78 dan meningkat menjadi 2,82 pada tahun 2017. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2013 1 orang tenaga medis melayani 562 penduduk dan pada tahun 2017 1 orang tenaga medis melayani 355 penduduk. Semakin kecil jumlah rasio yang ada menunjukkan semakin bertambahnya jumlah tenaga medis, yang diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### 3. Kebidanan

- Cakupan komplikasi kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan presentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Indikator ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan secara professional terhadap kesakitan dan permasalahan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dangi dalam masa nifas yang mengancam jiwa ibu dan atau bayi. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tual tahun 2013-2017 ditunjukan dalam tabel 2.38 di bawah

Tabel 2.39.  
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kota Tual  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Komplikasi yang ditangani	65	102	139	0	0	46,60%
Jumlah ibu dengan komplikasi	300	304	312	0	0	1,98%
Cakupan komplikasi yang ditangani	21.67	33.55	44.52	0	0	43,76%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Walaupun fluktuatif pada awal periode dimaksud, namun cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tual selama periode 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang baik atau cenderung menurun. Pada tahun 2013 cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 21.6 persen atau sebanyak 65 orang dari total 300 ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitif. Selanjutnya jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan meningkat yaitu mencapai 304 pada tahun 2014 dan ditangani 102 ibu sehingga presentase cakupan penangan menjadi 33.55 persen. Pada tahun 2015 cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 44.55 persen atau data menunjukkan bahwa sebanyak 139 orang dari total 312 ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitive. Perkembangan menggembirakan yang menunjukkan salah satu penanda keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu dalam masa nifas terjadi pada tahun 2016-2017 dimana kasus komplikasi kebidanan pada ibu tidak ada. Hal ini perlu terus dipertahankan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan

Data penolong kesehatan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan pada saat persalinan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan merupakan presentase jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan

dengan kompetensi kebidanan di Kota Tual selama 2013-2017 ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.40.  
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan  
dengan kompetensi Kebidanan di Kota Tual selama 2013-  
2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	1110	1017	1087	1179	1233	2,89%
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	1432	1453	1489	1496	1739	5,16%
Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan	77.5	69.99	73	78.81	70.90	-1,87%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Tabel 2.40 menunjukkan selama 2013-2017 cakup hal ini perlu ditingkatkan lagi agar minimal dapat mencapai target nasional sebesar 90 persen sehingga membawa dampak yang baik bagi kesehatan ibu & anak.

#### 4. Bayi & Balita

- Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Indikator ini merupakan presentase Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari total jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada. Semakin besar presentase cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.41.  
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun  
2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	2	13	6	13	7	1,42%
Jumlah seluruh balita gizi buruk	2	13	6	13	7	1,42%
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	0,00%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan data tersaji, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tual selama 2013-2017 seluruhnya mendapatkan perawatan. Data ini menunjukkan adanya keberhasilan penanganan perawatan Balita Gizi Buruk oleh Pemerintah Kota Tual melalui berbagai program dan kegiatan terkait.

- Cakupan kunjungan bayi

Pelayanan minimal yang diterima seorang bayi, dapat diketahui melalui nilai cakupan kunjungan bayi. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi (29 hari – 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, posyandu, penitipan anak, rumah, maupun panti asuhan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Data Cakupan Kunjungan Bayi Kota Tual 2013-2017 disajikan dalam tabel 2.41. sebagai berikut.

Tabel 2.42.  
Cakupan Kunjungan Bayi Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
jumlah bayi yang memperoleh layanan kesehatan	1210	1123	1270	1188	1323	2,70%
jumlah seluruh bayi lahir hidup	1364	1066	1419	1425	1656	6,98%
Cakupan Kunjungan bayi	88.7	105.3	89.5	83.4	79.9	-1,83%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Cakupan kunjungan bayi 2013-2017 mengalami pertumbuhan menurun yang ditandai dengan nilai negatif pada pertumbuhan rata-rata tahunan yaitu -1,83 persen. Pada tahun 2017 cakupan ini sebesar 79,9 persen yang menurun dari tahun 2014 sebesar 88,7 persen. Pada tahun 2014 terjadi cakupa melebihi 100 persen atau sebesar 105,3 persen yang berarti pada tahunan tersebut, terdapat balita dari daerah lain yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Tual atau sebanyak 57 orang bayi.

- Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (ICU)  
Tercapainya imunisasi pada bayi secara lengkap (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar yang meliputi Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 3 Dosis Polio, 5 Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak pada bayi; 2 Dosis TT pada ibu hamil & wanita usia subur; dosis DT, 1 dosis Campak, dan 2 Dosis TT pada anak usia sekolah. Pemberian imunisasi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mempunyai dampak bagi peningkatan usia harapan hidup yang juga berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Adapun presentase Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (ICU) Kota Tual 2013-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.43.  
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization  
(UCI) Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah desa/kelurahan	30	30	30	30	30	0,00%
Jumlah desa/kelurahan UCI	25	24	25	24	24	-0,96%
Cakupan desa/kelurahan UCI	83.3	80	83.3	80	80	-0,95%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan data pada tabel 2.43.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (ICU) Kota Tual 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang tidak begitu berbeda berkisar antara 80-83.3 persen dengan perkembangan rata-rata tahunan 5 tahun terakhir sebesar -0,95 persen. Ini berarti bahwa sekitar 90 persen dari seluruh desa maupun kelurahan yang ada di Kota Tual sudah termasuk dalam Desa/kelurahan UCI. Kondisi tersebut cukup baik karena telah mencakup sebagian besar desa/kelurahan yang ada sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat melayani seluruh desa/kelurahan.

#### 5. Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA merupakan presentase perbandingan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun terhadap Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama. Data Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Tual 2013-2017 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.44.  
Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TBC  
BTA Kota Tual Tahun Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	93	90	75	73	89	-0,16%
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (orang)	93	78	105	376	89	50,06%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100	115,38	71,43	19,41	100	79,92%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan data tersaji, Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Tual selama 2013-2017 dapat dikatakan sangat baik yaitu rata-rata 79.92 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2014 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA sebesar 115,38 persen yang berarti jumlah penderita yang ada di lapangan lebih besar dari perkiraan yang ada, yaitu sebanyak 90 orang dari perkiraan 78 penderita. Cakupan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 71,43 persen dimana dari 105 orang yang diperkirakan sebagai penderita baru TBC BTA hanya ditemukan & diobati sebanyak 75 orang.

6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penyakit Demam Berdarah adalah salah satu penyakit yang disebarkan melalui perantara gigitan nyamuk. Kejadian DEMAM Berdarah dapat mewabah dan membutuhkan perhatian serius untuk menanggulangnya karena dapat merenggut nyawa penderita. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD merupakan presentase perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 Tahun dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di

satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kota Tual kurun 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel 2. 45. Sebagai berikut.

Tabel 2.45.  
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit  
DBD Kota Tual Tahun 2013-2017.

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati	66	0	26	87	120	58,14
Jumlah perkiraan penderita baru DBD	62	0	68	87	85	7,89
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	106.4	0	38.26	100	141.18	33,63

Sumber: Dinas Kesehatan 2018; Lakip Kota Tual 2016; Hasil Olahan 2018.

Perkembangan cakupan ini sebagaimana data tersaji pada tabel menunjukkan bahwa kasus demam berdarah yang ditemukan cukup tinggi. Pada tahun 2013 terdapat 66 orang penderita dari perkiraan sebelumnya yaitu sebanyak 62 orang, cakupan pada tahun ini sebesar 106,4 persen karena adanya perbedaan penderita di lapangan dengan perkiraan. Pada tahun 2017 cakupan ini semakin meningkat yaitu menjadi 141,18 persen dimana terdapat 120 penderita yang ditemui dan diobati dari total 85 penderita yang diperkirakan.

#### 7. Angka kejadian Malaria.

Penyakit Malaria juga merupakan jenis penyakit yang ditularkan melalui perantara nyamuk. Angka kejadian malaria di Kota Tual selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana ditunjukkan tabel 2.45. sebagai berikut.

Tabel 2.46.  
Angka Kejadian Malaria di Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
jumlah penderita malaria	88	126	55	55	66	1,71%
Angka kejadian Malaria	3.03	1.91	0.81	0.79	0.78	-24,57%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan data pada tabel 2. 46, Kejadian malaria dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik yakni mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka kejadian malaria sebesar 3.03 mengalami penurunan sebesar 2,25 pada tahun 2017. Hal ini perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan penekanannya agar dapat meningkatkan kesehatan penduduk Kota Tual.

#### 8. Prevalensi HIV / AIDS

HIV/AIDS adalah penyakit mematikan yang mengancam hidup pengidapnya dimana penularannya dapat melalui gaya hidup bebas, jarum suntik dan sebagainya. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi merupakan presentase perbandingan jumlah pasien HIV/AIDS pada suatu wilayah terhadap jumlah penduduk pada wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV/AIDS Kota Tual selama 2013-2017 disajikan dalam table 2.46. sebagai berikut.

Tabel 2.47.  
Prevalensi HIV/AIDS Kota Tual Kurun Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
jumlah Pasien HIV/AIDS	25	22	35	20	17	-2,69
Jumlah penduduk	87180	89025	83621	84332	86531	1,73
Prevalensi HIV/AIDS	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02	-1,24

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018; Hasil Olahan, 2018

Tabel 2.47. Menunjukkan bahwa prevalensi HIV /AIDS di Kota Tual mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan -1,24 persen. Pada tahun 2013 terdapat 25 pasien HIV/AIDS atau 0,03 persen dari populasi Kota Tual saat itu. Pada tahun 2017 angka ini turun menjadi 0,02 atau terdapat sekitar 17 penderita dari total 86531 penduduk. Kondisi ini perlu terus ditekan melalui kegiatan-kegiatan kesehatan edukatif, bimbingan rohani dan berbagai tindakan preventif lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

#### 9. Pelayanan Kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan indikator yang mengukur kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 di sarana kesehatan terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada. Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Tual 2013-2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 masyarakat miskin yang menerima pelayanan pada sarana kesehatan adalah sebesar 0.66 persen dari total masyarakat miskin yang ada di Kota Tual. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 1.59 persen dan menurun 1.48 persen menjadi 0.11 persen dari jumlah total masyarakat miskin pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan selisih yang tipis menjadi 0.12

persen dan terus meningkat menjadi 1.29 persen pada tahun 2017.

### C. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

#### Pekerjaan umum

##### 1. Proporsi jalan dalam kondisi baik

Jalan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam keseharian sehingga kondisi yang baik dapat menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelancaran berbagai aktivitas. Kondisi tersebut merupakan salah satu pendukung pengembangan wilayah secara infrastruktur maupun secara ekonomi. Proporsi jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan seluruhnya. Perkembangan jalan dalam kondisi baik Kota Tual 2013-2017 disajikan dalam tabel 2.48. sebagai berikut.

Tabel 2.48.

Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jalan dalam kondisi baik (Km)	107.926	131.32	148.85	258.46	255.46	26,88%
Panjang jalan seluruhnya (Km)	146.618	179.30	330.6	330.6	330.6	26,67%
Proporsi jalan dalam kondisi baik	0.74	0.73	0.45	0.78	0.77	8,09%
Presentase jalan dalam kondisi baik	73.61	73.24	45.02	78.18	77.27	8,36%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; data olahan, 2018

Perkembangan jalan dalam kondisi baik di Kota Tual selama tahun 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya mencapai 26,88 persen. Proporsi jalan dalam kondisi baik terendah terjadi

pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.45 atau dengan cakupan sebesar 45.02 persen yang merupakan penurunan dari proporsi tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.73 pada tahun 2014 dan 0.74 pada tahun 2013. Keadaan tersebut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 0.78 dan 0.77 pada tahun 2017 dengan total panjang jalan dalam kondisi baik pada akhir periode sesuai data tahun 2017 mencapai 255,46 km. jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun awal periode yaitu sepanjang 107.93 Km.

## 2. Rasio Jalan dengan jumlah penduduk

Rasio panjang jalan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah penduduk pada suatu daerah. indikator ini berguna untuk melihat tingkat kemudahan akses ke semua bagian kota. Perkembangan rasio jalan per satuan penduduk di Kota Tual periode 2013-2017 ditunjukkan pada tabel selanjutnya.

Tabel 2.49.

Rasio Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Tual Periode 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Panjang jalan seluruhnya (Km)	146.618	179.30	330.6	330.6	330.6	26,67%
Jumlah Penduduk (jiwa)	87180	89025	83621	84332	86531	-0,12%
Rasio panjang jalan per satuan penduduk	0.0017	0.002	0.0039	0.0039	0.0038	27,52%
Rasio panjang jalan per 1000 penduduk	1,68	2,01	3,95	3,92	3,82	28,21%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2018; data olahan, 2018

Berdasarkan tabel 2.49, rasio panjang jalan per satuan penduduk Kota Tual mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28.21 persen. Pada tahun 2013 rasio jalan per satuan penduduk sebesar 0.0017 km/jiwa meningkat pada tahun 2017 menjadi 0.0038 km/jiwa. Walaupun jumlah jalan tidak mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir namun peningkatan rasio ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Rasio persatuan penduduk tersebut telah memenuhi syarat apabila dibandingkan dengan SPM Panjang jalan minimal yang dilalui kendaraan (roda empat) yang ditetapkan sebesar 0,6 km/1000 penduduk karena rasio jalan per 1000 penduduk di Kota Tual berkisar di atas 1,68 km/1000 penduduk.

### 3. Presentase Jalan yang memiliki Draenase & Trotoar

Jalan sebagai prasarana fisik seharusnya dapat menunjang kualitas lingkungan suatu daerah antara lain dapat menyediakan akses bagi pejalan kaki melalui trotoar, maupun sebagai penunjang sistim pembuangan air serta pencegahan banjir melalui draenase.

Dari data tercatat diketahui bahwa rasio Panjang jalan di Kota Tual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan semakin luasnya lingkungan permukiman sehingga sistim draenase menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Pertumbuhan rata-rata jalan dengan draenase dan trotoar mencapai 26,67 persen setiap tahunnya sedangkan rasio jalan dengan draenase dan trotoar terhadap Panjang jalan seluruhnya sebesar 7,51 persen. Pada tahun 2013 terdapat 1,21 persen atau sebanyak 1,77 km jalan dengan draenase dan trotoar bila dibandingkan dengan Panjang jalan Kota Tual 146,62 km. Keadaan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 terdapat 1,25 persen atau 4,12 km jalan dengan draenase dan

trotoar bila dibandingkan dengan Panjang jalan Kota Tual 330,60 km. Perkembangan indicator ini dapat dilihat pada tabel selanjutnya.

Tabel 2.50.

Presentase jalan yang memiliki Drainase & Trotoar, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Panjang jalan seluruhnya (Km)	146,62	179,30	330,60	330,60	330,60	26,67%
Panjang jalan dengan drainase dan trotoar minimal 1,5 m (km)	1,77	1,77	2,04	3,23	4,12	25,29%
Rasio panjang jalan per satuan penduduk (%)	1,21	0,99	0,62	0,98	1,25	7,51%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; LAKIP Kota Tual 2013-2017; data olahan, 2018

#### 4. Presentase Rumah tinggal bersanitasi

Presentase Rumah Tinggal bersanitasi merupakan presentase perbandingan rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal yang ada pada kurun waktu tertentu. Selama periode 2013-2017, jumlah rumah tangga bersanitasi di Kota Tual mengalami peningkatan yang ditunjukkan melalui angka pertumbuhan rata-rata mencapai 9,46 persen. Pada tahun 2013 presentase rumah tinggal bersanitasi adalah sebesar 28,14 persen meningkat menjadi 40,2 persen tahun 2017. Perkembangan presentase rumah tinggal bersanitasi ditampilkan ditunjukkan dalam tabel 2.51. sebagai berikut.



Tabel 2.51.  
Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rumah tangga bersanitasi	4906	5056	5356	5906	6956	9,26
Jumlah seluruh rumah tangga	17436	17805	16724	16866	17306	-1,69
Presentase	28,14	28,4	32,03	35,02	40,2	9,46

Sumber: Dinas PUPR Kota Tual, 2019. Data olahan 2019

#### 5. Presentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator ini diperoleh menghitung presentase perbandingan penduduk yang mempunyai akses air minum terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Adapun perkembangan penduduk berakses air minum sebagaimana ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.52.  
Penduduk Berakses Air Minum Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah penduduk berakses air minum (jiwa)	19040	20040	23290	23290	36390	19,43
Jumlah penduduk (jiwa)	87180	89025	83621	84332	86531	-0,12
Presentase	21,84	22,51	27,85	30,6	42,1	18,56

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; data Olahan 2018

Data pada tabel 2.52, memberi gambaran bahwa penduduk berakses air minum mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan mencapai 19,43 persen. Presentase penduduk berakses air minum terhadap jumlah penduduk juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 18,56 persen. Pada tahun 2013, penduduk berakses air minum sebanyak 19.040 jiwa atau 21,84 persen

dari total jumlah penduduk saat itu sebanyak 87.180 jiwa dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 36.390 atau sebanyak 42,05 persen dari total populasi sebanyak 86.531 jiwa. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar ketersediaan air minum dapat mencakup seluruh penduduk Kota Tual.

#### 6. Presentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Indikator ini dihitung berdasarkan presentase perbandingan jumlah rumah tangga yang mendapat akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya yang ada di Kota Tual. Perkembangan rumah tangga berakses air bersih Kota Tual 2013-2017 sebagaimana ditampilkan table selanjutnya.

Tabel 2.53.  
Rumah Tangga Berakses Air Bersih Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rumah tangga berakses air bersih (kk)	8413	8.699	6301	7876	4653	-10,23
Jumlah seluruh rumah tangga (kk)	12405	12405	11567	11567	11567	-1,69
Presentase	67.82	70.12	54.47	68.09	40.23	-8,71

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; data olahan, 2018

Presentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Tual mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan jumlah akses rumah tangga. Pada akhir 2017, jumlah presentase rumah tangga berakses air bersih adalah sebesar 40,23 persen atau sebanyak 4.653 rumah tangga dari total seluruh rumah tangga yang ada. Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun awal periode yaitu pada tahun 2013 dengan presentase sebesar 67.82 persen. Pertumbuhan rata-rata presentase rumah tangga berakses air bersih adalah sebesar -8.71 persen yang berarti

mengalami penurunan. Penurunan akses tersebut diasumsikan terjadi karena terjadi peningkatan pemanfaatan sumber air bersih lainnya selain air dari PDAM antara lain seperti sumur pribadi, air ledeng lainnya, air non perpipaan, dan sebagainya.

#### 8. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merupakan perbandingan jumlah tempat peribadatan terhadap jumlah penduduk untuk setiap 1000 jiwa penduduk. Tempat ibadah yang ada di Kota Tual antarlain Masjid, Gereja, Langgar, Musola, dan Pura. Jumlah tempat peribadatan di Kota Tual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.19 persen; pada tahun 2013 terdapat 94 unit rumah ibadah meningkat menjadi 109 unit rumah ibadah pada tahun 2016. Jumlah tersebut mempengaruhi besaran rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Tual dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 1.47 unit per jiwa menjadi 1.56 unit per jiwa pada tahun 2016. Ini berarti untuk setiap 1000 jiwa penduduk di Kota Tual terdapat 1 sampai 2 rumah ibadah. Perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kota Tual 2013-2016 disajikan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.54.

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Tual 2013-2016

Indikator	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah tempat ibadah	94	92	99	109	5,19%
Jumlah Penduduk	64032	65882	67783	69689	2,86%
Rasio tempat Ibadah per satuan penduduk	1.47	1.40	1.46	1.56	2,12%

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2014-2017; data olahan, 2018

## Penataan Ruang

### 1. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB

Rasio Ruang terbuka Hijau terhadap luas wilayah adalah indikator yang digunakan untuk melihat seberapa luas wilayah yang menjadi tutupan bagi ruang terbuka hijau terhadap total luas wilayah ber HPL/HGB seluruhnya. Perkembangan indikator rasio RTH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.

Rasio RTH terhadap luas wilayah ber HPL/HGB, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas ruang terbuka hijau (ha)	2808	2803	2797	2794	2789	-0,17
Luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	1580	1573	1567	1560	1555	-0,40
Rasio RTH / satuan luas wilayah ber-HPL/HGB	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79	0,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; data olahan 2018

Dari data tercantum dapat diketahui bahwa perkembangan rasio ruang terbuka hijau di Kota Tual selama 2013-2017 cenderung cukup stagnan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0,23 persen. Luas ruang terbuka hijau sendiri terus mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -0,17 persen dimana pada tahun 2013 terdapat 2808 ha ruang terbuka hijau dan turun menjadi 2789 ha pada tahun 2017. Ruang terbuka hijau perlu diperluas hingga minimal mencapai 30 persen luasan wilayah perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual.

## 2. Luas RTH publik.

Ruang terbuka hijau publik merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dan dapat diakses umum. Rencana tata ruang wilayah kota tual 2012-2032 mengatur proporsi ruang

terbuka hijau publik adalah sebesar 20 persen dari luas wilayah. Perkembangan luas RTH publik Kota Tual tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.56.  
Luas RTH Publik Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas RTH publik yang tersedia (ha)	2808	2803	2797	2794	2789	-0,17%
luas wilayah (ha)	25439	25439	25439	25439	25439	0,00%
Presentase luas RTH publik	11,04	11,02	10,99	10,98	10,96	-0,18%
Luas RTH yang seharusnya tersedia, 20% dari luas wilayah (ha)	5087,8	5087,8	5087,8	5087,8	5087,8	0,00%
RTH publik yang dibutuhkan untuk mencapai target RTRW (ha)	2279,8	2284,8	2290,8	2293,8	2298,8	0,21%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; data olahan, 2018

Presentase ruang terbuka publik mengalami penurunan luasan setiap tahunnya dengan pertumbuhan -0,18 persen. Presentase luas RTH publik yang ditargetkan adalah seluas 5087,8 ha atau sebesar 20% dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2013 terdapat sebesar 2808 ha RTH publik atau sekitar 11,04 persen dari luas wilayah. Pada tahun 2017 RTH publik mengalami penurunan luasan dengan presentase sebesar 10,96 persen atau seluas 2789 ha. Untuk mencapai RTH publik seluas 20 persen atau 5087,8 ha dibutuhkan luasan sekitar 2298,8 ha lagi.

### 3. Rasio bangunan ber-IMB

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Rasio bangunan ber-IMB adalah indikator yang digunakan untuk melihat bangunan ber-IMB terhadap total seluruh bangunan yang ada pada suatu daerah. Perkembangan indikator ini dapat diikuti dalam tabel berikut.

Tabel 2.57.  
Rasio Bangunan ber-IMB, Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah bangunan ber-IMB (unit)	31	29	28	30	25	-4,86
Jumlah bangunan(unit)	15102	14871	14692	14236	13886	-2,07
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,21	0,20	0,19	0,21	0,18	-2,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; data olahan 2018

Dari data pada tabel diketahui bahwa penerapan izin mendirikan bangunan di Kota Tual sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya dengan nilai pertumbuhan -4,86 persen. Pertumbuhan rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan -2,82 persen dimana pada tahun 2013 terdapat 31 unit bangunan ber-IMB atau mencakup hanya 0,21 persen dari total bangunan yang ada sebanyak 15102 kemudian angka tersebut turun menjadi 0,18 pada tahun 2017 dengan jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 25 unit dari total seluruh bangunan yang ada sebanyak 13886 unit.

#### 4. Ruang Publik berubah peruntukkan

Ruang publik adalah setiap ruang wilayah yang peruntukan untuk dapat diakses oleh umum seperti lapangan olahraga, taman-taman kota, sempadan danau, sempadan pantai dan sebagainya.

Tabel 2.58.  
Ruang Publik Berubah Peruntukkan Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Ruang Publik Yang Berubah Fungsi (ha)	15	37	23	26	43	46,81
Jumlah Ruang Publik Yang Tersedia (ha)	1.984	1.974	1.961	1.938	1.923	-0,78
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya (%)	0,76	1,87	1,17	1,34	2,24	47,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; data olahan 2018

Dari tabel 2.58. diketahui bahwa ruang publik yang berubah peruntukkannya mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan pertumbuhan 47,89 persen. Pada tahun 2013 terdapat 15 ha ruang publik yang berubah peruntukkannya atau senilai 0,76 persen dari ruang publik yang ada seluas 1984 ha. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana ruang publik yang berubah peruntukkannya menjadi 43 ha atau sebesar 2,24 persen dari luas ruang publik sebesar 1.923 ha.

#### **D. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman**

##### **1. Rasio Rumah Layak Huni**

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan rumah layak huni terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Perkembangan indikator ini selama 2013-2017 untuk Kota Tual dapat diikuti pada tabel 2.59. sebagai berikut.

Tabel 2.59.  
Rasio & Cakupan Rumah Layak Huni Kota Tual  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah rumah layak huni(unit)	939	2470	6667	10692	14132	1,06
Jumlah penduduk (jiwa)	87180	89025	83621	84332	86531	1,73
Rasio rumah layak huni (unit/orang)	0,01	0,03	0,08	0,13	0,16	1,13

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Sesuai tabel 2.58. Diketahui bahwa Pada tahun 2013 rasio rumah layak huni adalah 0,01 yang berarti perbandingan satu unit rumah layak huni terhadap jumlah penduduk adalah 1:100 jiwa yang meningkat menjadi 0,16 pada tahun 2017 yang berarti perbandingan satu unit rumah layak huni terhadap jumlah penduduk adalah 1: 6 jiwa sampai 1:7 jiwa.

Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 1,06 persen. Hal tersebut dikarenakan selama periode 2013-2017 setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah rumah layak huni dengan pertumbuhan sebesar 1,06persen namun jumlah penduduk Kota Tual mengalami penurunan setiap tahunnya.

##### **2. Rasio permukiman layak huni**



Salah satu keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan permukiman adalah pencapaian indikator rasio permukiman layak huni. Rasio permukiman layak huni memberikan gambaran tentang luasan permukiman layak huni dari seluruh total luas wilayah permukiman. Perkembangan rasio permukiman layak huni kota tual 2013-2017 sebagaimana ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.60.  
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas permukiman layak huni (ha)	2.002,39	2.078,94	2.127,82	2.284,84	2.407,91	4,73%
Luas seluruh permukiman (ha)	2.097	2.189	2.276	2.331	2.594	5,52%
Rasio permukiman layak huni (ha)	0,95	0,95	0,96	0,98	0,94	-0,24%

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Tabel 2.59. memberikan gambaran bahwa perkembangan rasio permukiman layak huni mempunyai pertumbuhan yang cenderung menurun. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan rata-rata luas wilayah permukiman yang lebih tinggi (5,51%) dari pertumbuhan permukiman layak huni (4,73%). Walau demikian, perkembangan rasio permukiman layak huni dapat dikatakan baik karena cakupannya hampir mencapai 100 persen dari luas permukiman yang ada.

### 3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman. Cakupan rumah layak huni merupakan presentase perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah total rumah yang ada. Perkembangan indikator ini selama 2013-2017 dapat diikuti pada tabel 2.61. sebagai berikut.

Tabel 2.61.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah rumah layak huni (unit)	14.430	13.594	13.738	13.800	14.038	-0,64%
Jumlah rumah (unit)	17.436	16.486	16.724	16.867	17.307	-0,14%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	82,76	82,46	82,14	81,82	81,11	-0,50%

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Tabel 2.60, menunjukkan bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami pertumbuhan yang cenderung agak menurun ditandai dengan nilai pertumbuhan sebesar -0,5 persen. Kendati demikian cakupan tersebut pada tabel secara umum dapat dikatakan cukup baik karena rata-rata mencakup sekitar 82 persen dari total perumahan yang ada di Kota Tual.

### 4. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

Terdapat tiga kebutuhan pokok manusia yang sangat penting keberadaannya. Semakin baik kualitas ketiga kebutuhan pokok tersebut maka kesejahteraan seorang individu akan semakin

meningkat. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selain kebutuhan pangan dan sandang. Ketersediaan rumah dituntut untuk tidak sekedar ada namun juga diharapkan agar dapat memenuhi kriteria layak huni untuk mendukung kesejahteraan penghuninya. Ketersediaan rumah layak huni terjangkau di Kota Tual ditunjukkan melalui indikator cakupan rumah layak huni yang terjangkau dan diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau terhadap jumlah rumah tangga MBR. Dapat dilihat pada table 2.62. sebagai berikut.

Tabel 2.62.

Cakupan Rumah Layak Huni Terjangkau Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni & terjangkau (keluarga)	854	1.812	5.516	8.224	9.706	95,93
Jumlah rumah tangga MBR (keluarga)	939	2.470	6.667	10.692	14.132	1,06
Cakupan rumah layak huni bagi rumah tangga MBR (%)	91	73	83	77	69	5,50

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Dari data tercatat, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 cakupan rumah layak huni dan terjangkau bagi rumah tangga MBR di Kota Tual adalah mencapai 69 persen yang mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 91 persen. Kendati demikian merujuk kepada kuantitas rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni terjangkau menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 terdapat 854 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan meningkat menjadi 9.706 rumah

tangga MBR. Pertumbuhan rata-rata cakupan rumah layak huni bagi rumah tangga MBR mengalami penurunan 5,50 persen setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang pertumbuhannya mencapai 1,06 persen lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah rumah layak huni yang terjangkau yang sebesar 95,93 persen.

#### 5. Presentase permukiman yang tertata

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai penyelenggaraan urusan perumahan dan Kawasan permukiman adalah dengan melihat indikator presentase permukiman yang tertata. Indikator ini diperoleh dengan menghitung presentase perbandingan luas area permukiman yang tertata dengan luas wilayah seluruhnya. Perkembangan permukiman yang tertata 2013-2017 disajikan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.63.

Presentase Permukiman Kota Tual yang Tertata, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas area permukiman yang tertata (ha)	1955,91	2047,91	2134,91	2189,91	2407,91	5,37
Luas area permukiman seluruhnya (ha)	2097	2189	2276	2331	2549	5,03
Presentase area permukiman yang tertata (%)	93	94	94	94	94	0,32

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Presentase permukiman yang tertata selama 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang sama dengan nilai pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0.32 persen. Pada tahun 2013 presentase ini sebesar 93 persen atau terdapat sekitar 1955,91 ha

permukiman tertata dari total area permukiman yang ada sekitar 2097 ha. Pada tahun 2017 presentase ini sebesar 94. persen atau terdapat sekitar 2.407,91 ha permukiman tertata dari total area permukiman yang ada sekitar 2.549 ha.

#### 6. Presentase lingkungan pemukiman kumuh

Kawasan kumuh adalah suatu wilayah berpenduduk padat, tidak terencana, dan tidak mempunyai sarana prasarana lingkungan yang baik serta memenuhi standar seperti jalan akses ke lingkungan, sistem drainase, sanitasi, listrik dan sebagainya. Presentase areal kawasan kumuh adalah presentase perbandingan luas wilayah kumuh terhadap luas wilayah total daerah tertentu. Perkembangan presentase areal kumuh di Kota Tual mengalami cenderung mengalami peningkatan namun secara umum dapat dikatakan baik karena cakupan rata-ratanya kurang dari 1 persen luas wilayah daratan Kota Tual. Perkembangan presentase areal kawasan kumuh Kota Tual 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel 2.64. sebagai berikut.

Tabel 2.64.

Presentase Areal Kawasan Kumuh Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas kawasan kumuh (ha)	76,55	98,88	107,02	123,07	141,09	16,76%
Luas wilayah (ha)	25.439	25.439	25.439	25.439	25.439	0,00%
Presentase areal kawasan kumuh (%)	95,11	95,11	0,55	0,55	0,55	23,64%

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Selain membandingkan dengan luas wilayah, untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit adalah membandingkannya dengan luasan permukiman. Dari total luasan permukiman Kota Tual, rata-rata luasan lingkungan permukiman kumuh adalah

berkisar antara 3-5%. Gambaran tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.65.

Presentase Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Tual  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas permukiman layak huni (ha)	2002,39	2078,94	2127,82	2284,84	2407,91	4,73%
Luas seluruh permukiman (ha)	2097	2189	2276	2331	2594	5,52%
Presentase areal kawasan kumuh (%)	3,7	4,5	4,7	5,3	5,4	42,50%

Sumber: Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tual, 2018;  
data olahan, 2018

## **E. Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat**

### **1. Rasio Polisi Pamong Praja**

Keberadaan Polisi Pamong Praja turut menjamin penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum. Jumlah aparat Polisi Pamong Praja merupakan salah satu pendukung yang penting untuk diketahui untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas pelayanannya dalam menjaga keamanan. Rasio Polisi Pamong Praja adalah perbandingan jumlah Polisi Pamong Praja terhadap setiap 10.000 penduduk. Rasio Polisi Pamong Praja Kota Tual 2013-2017 ditampilkan dalam tabel 2.65 sebagai berikut.

Tabel 2.66.

## Rasio Polisi Pamong Praja Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Polisi pamong Praja	79	114	135	165	260	35,63%
Jumlah Penduduk	87180	89025	83621	84332	86531	1,73%
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	9.06	12.81	19.73	19.57	30.05	29,53%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2016; Satuan Polisi Pamong Praja, 2018; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2018; data olahan, 2018.

Dari data Rasio Polisi Pamong Praja Kota Tual 2013-2017 diketahui bahwa jumlah Polisi Pamong Praja mengalami peningkatan sebesar 29,53% setiap tahun. Pada tahun 2013 jumlah Polisi Pamong Praja sebanyak 79 orang dengan rasio terhadap jumlah penduduk sebesar 9.06 Polisi Pamong Praja setiap 10.000 penduduk Kota Tual atau 1 orang Polisi Pamong Praja menangani 1103-1104 orang penduduk. Pada tahun 2016 jumlah Polisi Pamong Praja meningkat menjadi 165 personil dengan rasio terhadap 10.000 jiwa penduduk Kota Tual adalah sebesar 19.57 yang berarti untuk setiap 19-20 personil bertugas menangani 10.000 jiwa penduduk Kota Tual atau 1 orang personil bertugas menangani 511-512 jiwa penduduk Kota Tual.

## 2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3).

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 atau Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan merupakan indikator yang diperoleh dengan menghitung presentase pelanggaran K3 terselesaikan dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perkembangan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 selama

2013-2017 mengalami kemunduran dengan pertumbuhan -5,91 persen. Pada tahun 2013 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 60 persen atau terdapat 3 kasus K3 yang terselesaikan dari seluruh kasus pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi Satpol PP yaitu sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2017 indikator ini turun menjadi 44,44 persen yaitu terdapat 8 pelanggaran K3 dari total 18 pelanggaran K3.

Perkembangan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 atau ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kota Tual sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.67.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Pelanggaran K3 yang terselesaikan (kasus)	3	4	6	7	8	28,57
Pelanggaran K3 yang dilaporkan (kasus)	5	8	10	15	18	38,75
Pelanggaran K3 yang terselesaikan (%)	60	50	60	46,67	44,44	-5,91

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2018; data olahan, 2018

### 3. Presentase penegakan Perda

Presentase penegakan Perda mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dengan pertumbuhan 3,10 persen. Pada tahun 2013 terdapat 8 kasus dan terselesaikan 5 kasus dengan cakupan 62,50 persen. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 66,67 persen atau terselesaikan 4 kasus dari 6 kasus



pelanggaran yang terjadi. Perkembangan presentase penegakan perda ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.68.

Presentase Penegakan Perda Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah perda yang dihasilkan	8	17	5	4	9	12,5
Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda	5	8	5	3	4	3,96
Jumlah Pelanggaran Perda	8	10	7	5	6	-3,39
Presentase Penegakan Perda	62,50	80,00	71,43	60,00	66,67	3,10

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2018; data olahan, 2018

## F. Sosial

### 1. PMKS tertangani

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah kelompok atau individu karena hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi & kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani & sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan tersebut antara lain kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial, maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Memajukan taraf hidup PMKS yang ada di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi-instansi teknis terkait. Perkembangan cakupan PMKS tertangani di Kota Tual 2013-2017 dapat diikuti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69.

## PMKS tertangani di Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah PMKS tertangani (orang)	673	383	85	604	690	125,98
Jumlah PMKS seluruhnya (orang)	5418	5418	4735	18998	18998	72,15
Presentase PMKS tertangani (%)	12.42	7.07	1.80	3.18	3.63	-6,59

Sumber: Lakip Kota Tual 2014-2017; data olahan, 2018

Jumlah PMKS tertangani mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan selama 5 tahun mencapai 125,98 persen namun cakupan PMKS tertangani sebaliknya mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -6.69 persen. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan pada tahun 2016 & 2017. Presentase PMKS Kota Tual pada tahun 2017 adalah sebesar 3.63 persen lebih rendah dibandingkan dengan presentase pada tahun 2013 yaitu sebesar 12.42 persen. Presentase terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.80 persen dengan jumlah PMKS tertangani sebanyak 85 orang dari total 4735 orang PMKS yang ada saat itu. Hal tersebut terjadi karena tidak terdapat dukungan dana APBN melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dan dukungan dana APBD untuk bantuan modal usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi.

### 2.3.1.2 Tidak Terkait Pelayanan Dasar

#### A. Tenaga kerja

Analisis capaian pembangunan bidang urusan ketenagakerjaan di Kota Tual dilakukan terhadap komponen data sebagaimana tercantum pada tabel selanjutnya.

Tabel 2.70.

## Indikator Ketenagakerjaan Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	NA	NA	NA	3,94	9,40	1,39
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	24,775	24,508	25,947	26,766	27,759	2,92
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59.4	56.93	58.37	58.43	58.78	-0,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.48	10.8	12.79	8.53	7.27	-0,57
Presentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja (%)	NA	NA	NA	NA	100	0
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	NA	NA	NA	NA	54.25	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP&Tenaga Kerja, 2018

Menurut Badan Pusat Statistik, Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bekerja, dan atau sementara tidak bekerja dan atau sedang menganggur (tidak punya pekerjaan). Jumlah penduduk angkatan meningkat 2.92 persen setiap tahunnya sehingga pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebesar 24,775 jiwa menjadi 27,759 jiwa pada tahun 2017.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah Keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi yaitu yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan yang diukur dengan presentase

perbandingan angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angka Partisipasi Angkatan Kerja kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata -0.23 persen dimana pada tahun 2013 sebesar 59,4 persen berkurang menjadi 58,78 persen pada 2017.

Adapun Jumlah penduduk angkatan tercatat mengalami pertumbuhan 2.92 persen selama 5 tahun belakang dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 24.775 jiwa menjadi 27.759 jiwa pada tahun 2017.

Tingkat pengangguran terbuka adalah presentase jumlah penganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa banyak penduduk usia kerja yang tidak diserap dunia kerja. Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual selama 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang baik yaitu mengalami penurunan -0.57 persen. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 8.48 persen penganggur terbuka atau sebanyak 2101 jiwa dan jumlah tersebut turun menjadi 7.27 persen pada tahun 2017 atau sebanyak 2018 jiwa.

## B. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

### 1. Presentase angkatan kerja perempuan

Presentase angkatan kerja perempuan merupakan presentase rasio jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perempuan angkatan kerja yang bekerja secara aktif. Perkembangan Presentase angkatan kerja perempuan 2013-2017 di Kota Tual sebagaimana digambarkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.71.

## Presentase Angkatan Kerja Perempuan 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan (jiwa)	8.579	8.740	8.532	8.532	8.598	0,07
Angkatan kerja perempuan (jiwa)	9.621	9.748	9.802	9.802	10.219	1,53
presentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	89.17	89.67	87	87	84.14	-1,43

Sumber: DPPKB & PA Kota Tual, 2018; data olahan 2018.

Dari data tercatat, Perkembangan Presentase angkatan kerja perempuan Kota Tual periode 2013-2017 cukup baik dimana setiap tahunnya lebih dari 80 persen perempuan angkatan kerja terlibat dalam kegiatan perekonomian untuk mencari penghasilan. Pekerja perempuan yang aktif bekerja selama lima tahun belakangan rata-rata sebanyak 8532-8598 jiwa setiap tahunnya. Angka tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat peran perempuan yang juga penting dalam menggerakkan perekonomian keluarga.

## 2. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kasus KDRT terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada. Rasio KDRT di Kota Tual 2013-2017 ditunjukkan pada tabel selanjutnya.

Tabel 2.72.

Rasio KDRT Kota Tual, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah KDRT (kasus)	44	42	46	39	48	3,21
Jumlah Rumah Tangga (KK)	12.405	12.405	11.567	11.567	11.567	-1,69
Rasio KDRT (%)	0,35	0,34	0,40	0,34	0,41	5,19

Sumber: DPPKB & PA Kota Tual, 2018; data olahan 2018; Lakip Kota Tual 2016 & 2017; data olahan, 2018

Berdasarkan data tercatat, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga selama 2013-2017 adalah rata-rata sebanyak 44 kasus setiap tahunnya dengan pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Pada tahun 2013 terjadi 44 kasus KDRT dengan rasio 0,35 persen kemudian meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2017 dengan rasio 0,41 persen. Hasil analisis data KDRT menunjukkan selama periode berkenaan terjadi rata-rata 3-4 kasus KDRT di setiap 1000 rumah tangga yang ada. Rasio KDRT penting untuk terus ditekan pertumbuhannya karena sangat berpengaruh dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas di Kota Tual.

### 3. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan & anak

Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi terhadap perempuan dan anak. Pemerintah menganggap serius hal ini sehingga secara khusus mengatur regulasinya dalam undang-undang melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perkembangan penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.73.

Cakupan penanganan KDRT terhadap Perempuan dan Anak  
Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah pengaduan kekerasan	44	42	46	39	48	3,21
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	-	7	8	3	5	6,15
Cakupan	0	16.7	17.4	7.7	10.4	-5,5

Sumber: DPPKB& PA Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Penanganan pengaduan KDRT terhadap perempuan dan anak selama 2013-2017 di Kota Tual tidak maksimal. Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke unit pelayanan terpadu selama lima tahun terakhir berkisar antara 39-48 kasus namun yang mendapatkan penanganan hanya berkisar 3-8 kasus. Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -5,5%. Cakupan pada tahun

2014 sebesar 16.7 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 10.4 persen.

2. Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan serta Penegakan hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan serta Penegakan hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan indikator yang menunjukkan perhatian lingkungan baik pemerintahan maupun masyarakat dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum terus mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -14,72 persen. Indikator ini tercatat tidak begitu signifikan dimana setiap tahunnya hanya berkisar 13,03 persen, yang berarti sebagian besar kasusnya tidak mendapatkan layanan bantuan hukum atau sebanyak 86,98 persen kasus tersisa setiap tahunnya.

Demikian juga dengan cakupan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak memberikan gambaran yang cukup baik. Data tiga tahun terakhir dari 2015-2017 mencatat bahwa rata-rata penegakan hanya mencakup 0,3 persen dari total seluruh kasus yang ada yang berarti terdapat 99 persen lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak mendapat penegakan hukum.

Rendahnya capaian cakupan-cakupan tersebut dapat disebabkan karena korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mempunyai akses terhadap layanan bantuan hukum, berada dalam tekanan, cenderung diam ataupun memilih menyelesaikan masalah secara di luar jalur hukum sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidakadilan dan cenderung membawa kerugian secara fisik maupun psikis bagi para korban. Perlu kebersamaan antara pemerintah, aparat hukum, korban dan pihak terkait



lainnya dalam meningkatkan cakupan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat serta upaya menghadirkan SDM Kota Tual yang berkualitas. Perkembangan kedua indikator ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.74.

Cakupan Layanan Bantuan Hukum & Penegakan Hukum atas  
Kekerasan terhadap Perempuan & Anak,  
Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	16,6%	17,4%	7,7 %	10,4%	-14,72
Cakupan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	-	-	0,152%	0,076%	0,625%	

Sumber: DPPKB & PA Kota Tual, 2018; data olahan 2018

### C. Pangan

#### 1. Presentase Ketersediaan Pangan Utama

Penyediaan pangan adalah salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang mana erat kaitannya dengan perbaikan gizi yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan terutama dari sisi kesehatan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta terjamin

stabilitasnya. Ketersediaan pangan utama merupakan presentase perbandingan rata-rata ketersediaan pangan tahunan terhadap jumlah penduduk suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komoditi pangan utama yang merupakan kebutuhan dasar penduduk Kota Tual berupa beras, ketela pohon, jagung & ubi-ubian. perkembangan ketersediaan pangan utama Kota Tual Kurun waktu 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel 2.75. sebagai berikut.

Tabel 2.75.

Ketersediaan Pangan Utama Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (Kg)	1.920.400	2.912.081	1.065.375	2.836.967	3.130.457	29,44
Jumlah penduduk (Jiwa)	87.180	89.025	83.621	84.332	86.531	-0,12
Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa)	22.03	32.71	12.74	33.64	36.18	29,71

Sumber: Lakip Kota Tual 2015-2017; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; data olahan, 2018

Dari data pada tabel menunjukkan ketersediaan pangan utama Kota Tual umumnya terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 29.71 persen dan Rasio ketersediaan pangan rata-rata selama 5 tahun adalah sebesar 27,46 kg/jiwa. Pada tahun 2013 jumlah ketersediaan pangan Kota Tual adalah sebesar 22.03 kg/jiwa yang berarti untuk setiap 1 orang penduduk terdapat sebanyak 22.03 kg ketersediaan bahan pangan utama yang dikonsumsi selama setahun. Kondisi tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana presentase ketersediaan pangan meningkat menjadi 36.18 kg/jiwa/tahun

## 2. Ketersediaan energi dan protein perkapita

Indikator ketersediaan energi per kapita dan protein per kapita menunjukkan angka kecukupan energi dan protein sebagai salah

satu kebutuhan dasar kecukupan pangan. Perkembangan konsumsi energi dan protein perkapita per hari ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2.76.

Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita per Hari,  
Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita)	1.690,44	1.737,45	1,452,52	1.475,26	1.782,24	2,19
Ketersedian protein perkapita (gram/kapita)	59,98	53.73	39,24	39,69	54,53	0,29

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2013-2017; data olahan, 2018

Ketersediaan energi per kapita per hari selama 2013-2017 menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 2,19 persen. Pada tahun 2013, ketersediaan energi sebesar 1.690,44 kkal/kapita/hari yang meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.782,24 kkal/kapita/hari. Selama kurun waktu tersebut ketersediaan energi per kapita per hari rata-rata sekitar 1.627,58 kkal. Penduduk Kota Tual belum masuk dalam kategori penduduk sangat rawan pangan yang memiliki asupan kalori kurang dari 1.400 kkal per kapita per hari namun ketersediaan tersebut belum memenuhi kebutuhan standar energi sebesar 2100 kkal/hari sehingga ketersediaan energi per kapita per hari.

Ketersediaan protein per kapita per hari penduduk Kota Tual selama 2013-2017 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dan pertumbuhan sebesar 0,29 persen. Pada tahun 2013 ketersediaan protein per kapita sebesar 59,98 persen yang mana turun menjadi 54,53 gram per kapita per hari. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Sumber protein tertinggi yang dikonsumsi rata-rata berasal dari jenis padi-padian kemudian disusul dari konsumsi ikan.

Aksesibilitas energi dan protein ini sangat mempengaruhi kebutuhan gizi seimbang dan aman yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga perlu untuk diperhatikan kecukupannya.

### 3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di peroleh dengan melihat presentase perbandingan Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dalam kurun waktu tertentu. Data dua tahun terakhir yakni tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan hampir mencakup sebagian besar sampel pangan yang diperdagangkan. Pada tahun 2016 cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mencakup 88,89 persen sampel pangan yang ada di pengumpul di pasaran yaitu sebanyak 4000 sampel yang telah diperiksa aman dari total 4500 sampel pangan yang ada. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 91,67 persen atau mencakup 5500 sampel pangan dari total 6000 sampel pangan yang ada di pasaran. Keadaan ini perlu terus dipantau secara berkesinambungan agar dapat menjamin kesejahteraan penduduk terutama dari sisi konsumsi pangan yang aman.

#### D. Pertanian

##### 1. Presentase luas lahan bersertifikat

Presentase luas lahan bersertifikat merupakan presentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah. Untuk konteks Kota Tual, mengingat Luas wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan laut maka angka pembanding yang dijadikan penyebut adalah luas wilayah darat agar mendapatkan angka yang

rasional. Presentase luas lahan bersertifikat Kota Tual ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.77.  
Presentase Luas Lahan (ha) Bersertifikat Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas lahan bersertifikat	NA	25,33	NA	120,809	204,3533	69,15%
Luas wilayah	NA	25439	NA	25439	25439	
Presentase Luas lahan bersertifikat	NA	0,10%	NA	0,47%	0,80%	69,15%

Sumber: Badan Pertanahan dan Penataan Ruang Maluku Tenggara, 2018

## 2. Luas lahan milik pemerintah kota

Luas lahan milik pemerintah Kota Tual adalah lahan-lahan yang terdaftar sebagai hak milik Pemerintah Kota Tual yang digunakan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan, taman, hutan kota, sekolah dan sebagainya. Presentase Luasan tanah bersertifikat milik Pemerintah Kota Tual pada tahun 2013 adalah sebesar 4.08 persen dari total luas wilayah darat Kota Tual dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 10.75 persen dari total luas wilayah darat Kota Tual. Data tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.78.  
Luas Lahan Milik Pemerintah Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas lahan bersertifikat milik pemerintah Kota Tual (km <sup>2</sup> )	10.38	6.35	22.16	20.40	27.35	59,07%
Luas wilayah darat Kota Tual (km <sup>2</sup> )	254.39	254.39	254.39	254.39	254.39	0,00%
Presentasi luas lahan milik pemerintah kota	4.08	2.50	8.71	8.02	10.75	6,81%

Sumber: bagian Pemerintahan SETDA Kota Tual, 2018; RTRW Kota Tual 2012-2032; data olahan, 2018.

### 3. Penerbitan izin lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal perusahaan bersangkutan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomo 2 tahun 1999 tentang izin lokasi. Izin lokasi juga berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah. Selama tahun 2013-2017 izin lokasi yang diterbitkan setiap tahunnya berkisar antara 25-26 izin lokasi dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,131 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terdapat 26 izin yang diterbitkan kemudian pada tahun 2017 terdapat 24 izin lokasi yang diterbitkan.

#### E. Lingkungan Hidup.

##### 1. Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan dan Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat penyelenggaran urusan lingkungan hidup adalah dengan melihat Ketersediaan & Integrasi Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RPPLH). RPPLH adalah perencanaan yang memuat masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sekalipun merupakan salah satu dokumen penting yang menjamin keberlangsungan lingkungan hidup sebagai salah satu isu global dalam perencanaan pembangunan namun Kota Tual sampai saat ini belum memiliki dokumen dimaksud. Keberadaan RPPLH menjadi hal yang urgen untuk segera dilaksanakan karena juga membantu pencapaian SDG's.

## 2. Presentase sampah yang tertangani.

Presentase sampah yang tertangani merupakan presentase perbandingan jumlah sampah tertangani dengan jumlah perkiraan volume sampah. Sampah tertangani yaitu sampah yang diangkut dari wilayah Kota ke tempat pembuangan akhir. Indikator volume sampah yang tertangani di Kota Tual tahun 2013-2017 sebagaimana ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.79.

Volume Sampah yang tertangani di Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah sampah tertangani (Ton)	73.233	74.000	3.440	3.440.4	2.920	-27,35%
Jumlah target timbulan sampah (Ton)	75.000	75.000	75.000	3.440,4	3.440,4	-23,85%
Presentase Jumlah sampah tertangani (%)	97,64	98,67	4,59	100	84,87	77,15%

Sumber: Lakip Kota Tual 2014-2017; data olahan, 2018

Dari data tersaji, diketahui bahwa jumlah target timbulan sampah maupun jumlah sampah tertangani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah perkiraan sampah mencapai 75.000 ton dengan jumlah sampah tertangani sebesar 73.233 ton kemudian pada tahun 2017 jumlah sampah tertangani sebanyak 2.920 ton dari total 3.440,4 ton. Adapun presentase penanganan sampah mengalami fluktuasi dengan presentase tertinggi mencapai 100% pada tahun 2016 dan presentase terendah sebesar 4.59 persen terjadi pada tahun 2015.

### 3. Presentase cakupan area pelayanan sampah

Cakupan area pelayanan sampah merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pelayanan pengelolaan persampahan di suatu daerah. Presentase cakupan area pelayanan sampah di Kota Tual diukur dengan melakukan pendekatan pada luas area permukiman karena pelayanan pengelolaan yang dilaksanakan selama ini meliputi seluruh daerah permukiman. Pendekatan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa besar timbunan-timbunan sampah berasal dari daerah permukiman di Kecamatan Pulau Dullah Selatan.

Tabel 2.80.

Presentase Cakupan Area Pelayanan Sampah Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas area pengelolaan sampah (ha)	2097	2189	2276	2331	2594	5,52%
Luas Wilayah (ha)	25.439	25.439	25.439	25.439	25.439	0,00%
Presentase Cakupan area pelayanan terhadap luas wilayah (%)	8,24	8,60	8,95	9,16	10,20	9,03%

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, 2018; Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan, 2018; data olahan 2018

Luas area pengelolaan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan berkembangnya wilayah permukiman penduduk. Hal ini juga berpengaruh pada Presentase Cakupan area pelayanan terhadap luas wilayah. Pada tahun 2013 presentase cakupan area pelayanan sampah mencapai 8,24 persen dari total



luas wilayah seluruhnya. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 10,20 persen dari total luas wilayah. Jika dilihat dari luas permukiman sebagai penghasil timbunan sampah maka Presentase Cakupan area pelayanan sampah ini mencapai 100 persen.

#### G. Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil

##### 1. Rasio penduduk ber-KTP & cakupan KTP yang diterbitkan

Rasio penduduk ber-KTP & cakupan KTP ber-NIK yang diterbitkan merupakan indikator yang membandingkan jumlah penduduk ber-KTP usia 17 tahun atau lebih dari itu terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun atau lebih dari itu atau telah menikah. Indikator cakupan penerbitan KTP ber-NIK adalah indikator penerbitan ataupun kepemilikan KTP ber-NIK terhadap jumlah penduduk wajib KTP. Perkembangan kedua indikator ini ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.81.

Rasio Penduduk ber-KTP & Cakupan KTP yang diterbitkan,  
Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun yang Ber-KTP (jiwa)	31.826	32.296	33.232	36.616	38.565	4,97
Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun atau telah Menikah (Wajib KTP) (jiwa)	52.722	52.722	56.920	57.810	59.074	2,93
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.60	0.61	0.58	0.63	0.65	2,09
Cakupan penerbitan KTP (%)	60.36	61.26	58.38	61.27	65.46	2,14

Sumber: dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018; data olahan 2018

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 2,09 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 0,60 atau penerbitan KTP-nya mencakup 60,36 persen dimana terdapat 31826 KTP yang diterbitkan dari total 52722 penduduk wajib KTP. Pada tahun 2017 sebesar 0,65 atau penerbitan KTP-nya mencakup 65,46 persen dimana terdapat 38565 KTP yang diterbitkan dari total 59074 penduduk wajib KTP. Rasio dan cakupan tersebut perlu ditingkatkan lagi agar mencakup seluruh penduduk Kota Tual yang mana mempunyai dampak yang sangat penting bagi pembangunan.

## 2. Indikator Kependudukan lainnya

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan pelayanan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan terhadap komponen data seperti Jumlah penduduk berakte kelahiran, Jumlah pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala Kota, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Data tersebut sebagaimana ditampilkan dalam tabelberikut ini.

Tabel 2.82.

### Indikator Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah penduduk berakte kelahiran	92	1.487	3.256	13.636	17.413	47,07%
Jumlah pasangan berakte nikah	16	67	226	328	422	6,34%
Ketersediaan database kependudukan skala Kota (ada/tidak ada)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	-

Sumber: dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018; data olahan 2018

Ketersediaan database kependudukan skala Kota dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah tersedia dan diterapkan selama periode 2013-2017. Jumlah penduduk berakte kelahiran mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 92 jiwa meningkat menjadi 17413 jiwa pada tahun 2017. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap kelahiran ke pemerintah setempat yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Demikian juga dengan jumlah pasangan berakte nikah yang pada tahun 2013 sebanyak 16 pasangan meningkat menjadi 422 pasangan pada tahun 2017.

Database kependudukan skala Kota telah tersedia dan digunakan selama 2013-2017 sampai saat ini kemudian KTP nasional berbasis NIK juga telah diterapkan di Kota Tual selama periode 2013-2017.

#### H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### 1. Sarana prasarana pemerintahan desa

Indikator sarana prasaran Pemerintahan Desa diperoleh dengan mencari presentase perbandingan sarana-prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terhadap jumlah seluruh pemerintahan desa. Pada tahun 2015 terdapat 10 persen kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik dari total 27 desa yang ada. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 12 persen kemudian pada tahun 2017 mencapai 15 persen dari total 27 desa yang ada di Kota Tual.

##### 2. Presentase PKK Aktif

Pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK adalah kegiatan kelompok perempuan yang umumnya adalah ibu rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan di tingkat keluarga dimana peran PKK sangat strategis untuk mengimplementasikan visi

misi pembangunan di lingkungan yang sangat kecil. Presentase PKK aktif merupakan indikator yang membandingkan jumlah PKK aktif terhadap total seluruh kelompok PKK. Perkembangan presentase PKK aktif ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.83.

Presentase PKK Aktif, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah PKK aktif (Kelompok)	11	11	13	21	21	20%
jumlah PKK (Kelompok)	230	330	390	452	461	20%
Persentase PKK aktif (%)	4,78	3,33	3,33	4,65	4,56	0,64%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, 2018; data olahan 2018

Presentase PKK aktif Kota Tual selama 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan sebesar 0,64 persen. Pada tahun 2013 terdapat 11 kelompok PKK aktif dari total seluruhnya sebanyak 230 kelompok. Pada tahun 2017 jumlah tersebut turun menjadi 4,56 persen dimana terdapat 21 kelompok PKK aktif dari total seluruh kelompok PKK sebanyak 461 kelompok.

### 3. Posyandu aktif

Posyandu adalah salah satu pusat pelayanan kesejahteraan masyarakat khususnya ditingkat desa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan sasaran utama yaitu kesehatan ibu dan anak. Presentase Posyandu aktif merupakan indikator yang membandingkan jumlah posyandu yang aktif terhadap jumlah total seluruh posyandu yang ada di wilayah tertentu. Seluruh posyandu yang ada di Kota Tual selama tahun 2014-2017 aktif beroperasi dengan presentase 100 persen dimana pada tahun 2014 terdapat 97 posyandu dan seluruhnya

aktif kemudian pada tahun 2017 terdapat 91 posyandu yang seluruhnya juga aktif. Perkembangan posyandu aktif di Kota Tual ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.84.

Presentase Posyandu Aktif Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah posyandu aktif	NA	97	93	91	91	-2,09%
Jumlah posyandu	NA	97	93	91	91	-2,09%
Presentase PKK aktif	-	100	100	100	100	0,00%

Sumber: LAKIP Kota Tual, 2013-2017; data olahan 2018.

## I. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tolok ukur kependudukan untuk menunjukkan perubahan perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nilai negative pada indikator ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk dan sebaliknya nilai positif menunjukkan peningkatan jumlah penduduk. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kota Tual mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah sebesar 0.090% di Kecamatan Kur Selatan & Laju pertumbuhan terendah terdapat di Kecamatan Pulau-pulau Kur yaitu sebesar -0.089%. laju pertumbuhan penduduk dapat diamati dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.85.

## Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual Tahun 2013-2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan 2013-2017
	2013	2014	2015	2016	2017	
PP. Kur	6557*	3730	2516	2689	2814	5,92%
Kur Selatan	-	2820	3060	3454	3662	9,84%
Tayando Tam	7508	7489	7183	7146	7488	2,12%
P. Dullah Utara	21254	21691	21279	21224	22044	1,80%
P. Dullah Selatan	51861	53295	49583	49819	50523	0,95%
Kota Tual	87180	89025	83621	84332	86531	1,74%

\*angka gabungan Kec. PP. Kur & Kur selatan

\*hitungan berdasarkan angka gabungan pada tahun 2013

Sumber: Dinas kependudukan & Catatan sipil, 2018; data olahan 2018.

## 2. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah presentase perbandingan jumlah akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur. Indikator ini digunakan untuk mengetahui cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga berencana. Rasio akseptor KB di Kota Tual selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 46.47 persen. Rasio tertinggi sebesar 68.10 persen terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah akseptor KB sebanyak 7150 jiwa terhadap total seluruh pasangan usia subur sebanyak 12423 pasangan. Rasio terendah sebesar 19.63 persen terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah akseptor KB sebanyak 2635 jiwa terhadap total seluruh pasangan usia subur sebanyak 12423 pasangan. Data rasio akseptor KB di Kota Tual selama kurun 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.86.

## Rasio Akseptor KB Di Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah akseptor KB	6128	7150	8999	2635	4745	12,97%
Jumlah pasangan usia subur	11823	12423	13214	13423	13473	3,35%
Rasio akseptor KB	51.83	57.55	68.10	19.63	35.22	46,47%

Sumber: DPPKB & PA Kota Tual, 2018; data olahan 2018

## 3. Indikator pengendalian penduduk lainnya

Indikator pengendalian penduduk lainnya merupakan indikator-indikator yang terkait dengan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.87.

## Indikator Terkait Pengendalian Penduduk Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	1	1	1	1	1	0,00%
Cakupan ketersediaan alat & obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	0,00%
Jumlah keluarga sejahtera & keluarga sejahtera I (KK)	10174	10174	13625	13625	15535	11,98%
Presentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	-	-	-	13.8	13.8	0,82%

Sumber: DPPKB & PA Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kota Tual selama 2013-2017 adalah sebanyak 1 unit di setiap kecamatan. Cakupan ketersediaan alat & obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat memberikan gambaran memuaskan dimana cakupannya mencapai 100 persen setiap tahun. Jumlah keluarga sejahtera & keluarga sejahtera I mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 11.98 persen. Pada tahun 2013 terdapat 10174 kepala keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I yang meningkat menjadi 15535 kepala keluarga pada tahun 2017. Adapun Presentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB tercatat dalam dua tahun terakhir sebanyak 13,8 persen dari total perangkat daerah yang ada di Kota Tual.

#### J. Perhubungan.

##### 1. Jumlah Arus penumpang kapal

Indikator jumlah arus penumpang kapal menunjukkan besaran pergerakan penduduk yang dilakukan melalui pelabuhan penumpang kapal di Kota Tual. Jumlah arus penumpang kapal di Kota Tual selama 2013-2017 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 23.53 persen setiap tahunnya. Jumlah arus penumpang kapal yang masuk ke Kota Tual pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.120 jiwa yang pada akhir periode meningkat dua kali lipat menjadi 2.400 jiwa pada tahun 2017 kemudian jumlah arus penumpang Kapal yang Keluar dari Kota Tual pada tahun 2013 sebanyak 500 jiwa dan pada tahun 2017 berjumlah 2.100 jiwa. Perkembangan jumlah arus penumpang kapal 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.88.

## Arus Penumpang Kapal, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah arus penumpang Kapal yang masuk ke Kota Tual (Jiwa)	1,120	1,234	1,345	1,412	2,400	23,53%
Jumlah arus penumpang Kapal yang Keluar dari Kota Tual (Jiwa)	500	635	789	1,125	2,100	45,13%

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

## 2. Izin trayek.

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek dimana Trayek diartikan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Tabel 2.89.

## Jumlah Izin Trayek di Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	3	3	3	3	3	0,00%
Jumlah penduduk	87180	89025	83621	84332	86531	-12,00%
Rasio izin trayek						

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

### 3. Jumlah Uji Kir

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pertumbuhan jumlah uji Kir di Kota Tual adalah sebesar 1,78 persen dimana jumlah uji Kir yang dilaksanakan di Kota Tual pada tahun 2013 sebanyak 15 unit kendaraan dan pada tahun 2016 sebanyak 25 kendaraan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan data dinas terkait, tidak terdapat penambahan angkutan yang melakukan uji Kir. Perkembangan Jumlah uji Kir Kota Tual tahun 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.90.

Jumlah Uji Kir Kurun Waktu Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	15	15	20	25	–	1,78

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018.

### 4. Jumlah pelabuhan & terminal

Jumlah pelabuhan dan terminal di Kota Tual menunjukkan perkembangan yang stagnan. Pertumbuhan jumlah pelabuhan laut sebesar 14,58 persen yang terjadi karena penambahan pelabuhan-pelabuhan laut di wilayah kepulauan di Kota Tual. Jumlah pelabuhan dan dermaga sebagaimana tercantum tersebar merata di seluruh kecamatan Kota Tual, termasuk di dalamnya pelabuhan penumpang di kelurahan Masrum Tual. Jumlah terminal angkutan darat sebanyak 2 unit yang seluruhnya terletak di kelurahan Masrum merupakan terminal

kendaraan tipe c. Data jumlah pelabuhan terminal dan pelabuhan dicantumkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.91.

Jumlah Pelabuhan Dan Terminal Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Pelabuhan laut	3	4	5	5	5	14,58
Jumlah Dermaga lainnya	1	1	1	1	1	0
Jumlah terminal angkutan darat	2	2	2	2	2	0

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018.

5. Presentase layanan angkutan darat

Presentase layanan angkutan darat merupakan presentase perbandingan jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Indikator ini menunjukkan kemampuan angkutan darat dalam melaksanakan fungsi transportasi melayani kebutuhan yang ada. Perkembangan presentase layanan angkutan darat ditunjukkan dalam tabel 2.91.

Tabel 2.92.

Presentase Layanan Angkutan Darat, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Angkutan Darat	363	394	437	437	440	5,04%
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	11245	13342	15456	16123	17567	11,94%
Persentase Layanan Angkutan Darat	3.23	2.95	2.83	2.71	2.50	0,20%

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Presentase layanan angkutan darat selama periode 2013-2017 rata-rata sebesar 2,84 persen dengan pertumbuhan yang menurun atau rata-rata mencapai 0.20 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terdapat 363 angkutan darat yang beroperasi melayani 11245 jiwa penumpang dengan cakupan pelayanan hanya sebesar 3,23 persen. Pada tahun 2017 terdapat 440 angkutan darat yang beroperasi melayani 17567 jiwa penumpang dengan cakupan pelayanan yang turun menjadi 2,50 persen. Kecilnya cakupan pelayanan angkutan darat diasumsikan karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan meningkatnya jumlah kendaraan sewa roda dua yang beroperasi di Kota Tual.

#### 6. Cakupan pemasangan Rambu-rambu lalulintas

Rambu lalulintas merupakan salah satu komponen yang menunjang kelancaran berlalulintas dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan sehingga keberadaanya diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Perkembangan cakupan pemasangan rambu lalulintas Kota Tual selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.93.

Cakupan Pemasangan Rambu Lalulintas Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Rambu-Rambu Yang tersedia	30	43	83	75	81	33,68
Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	50	50	100	100	100	25,00
Cakupan Pemasangan Rambu-rambu	60	86	83	75	81	9,55

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018.

Cakupan pemasangan rambu lalu lintas mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 9,55 persen. Pada tahun 2013 terdapat 30 rambu yang tersedia dari total 50 rambu yang seharusnya ada sesuai kebutuhan. Cakupan tersebut meningkat menjadi 81 persen pada tahun 2017 dimana terdapat 81 rambu dari total 100 rambu yang dibutuhkan. Kondisi ini perlu terus ditingkatkan agar cakupannya mencapai 100 persen demi menjaga keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

#### K. Komunikasi dan Informatika

##### 1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi adalah indikator yang digunakan untuk melihat seberapa luas jangkauan jaringan telekomunikasi pada luasan wilayah suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari perbandingan luas wilayah tercoverage pelayanan jaringan telekomunikasi dengan luas wilayah daerah tersebut. Perkwmbangan cakupan layanan telekomunikasi ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.94.

Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Luas wilayah ter-coverage (km <sup>2</sup> )	132.32	162.37	177.63	185.98	196.33	10,59
Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	254,39	254,39	254,39	254,39	254,39	0
Cakupan layanan telekomunikasi (%)	52,01	63,83	69,83	73,11	77,18	10,59

Sumber: dinas Perhubungan Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan mencapai 10,59 persen. Pada

tahun 2013 luas wilayah tercoverage oleh layanan jaringan telepon adalah seluas 132,2 km persegi atau mencakup 52,01 persen dari total luas seluruh wilayah Kota Tual kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 196,33 km persegi atau mencakup 77,18 persen dari total luas seluruh wilayah sebesar 254,39 km persegi. Semakin besar cakupan layanan telekomunikasi memberikan gambaran akses informasi dan perhubungan yang semakin lancar sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan penduduknya.

## 2. Presentase Penggunaan Telepon

Presentase penggunaan telepon adalah indikator yang menunjukkan presentase penduduk pengguna HP/Telepon terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Perkembangan presentase penduduk pengguna HP/Telepon di Kota Tual ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.95.

Presentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Penduduk pengguna HP/telepon (jiwa)	40.053	45.932	47.210	48.510	48.834	5,22
Jumlah penduduk (jiwa)	87180	89025	83621	84332	86531	-0,12
Presentase penduduk pengguna HP/telepon	45,94	51,59	56,46	57,52	56,43	5,43

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Dari data tercatat diketahui bahwa presentase penduduk pengguna HP/telepon mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 5,43 persen pertahun. Presentase penduduk

pengguna HP/telepon pada tahun 2013 sebanyak 45,94 persen dari total penduduk saat itu sebanyak 87.180 jiwa atau terdapat 40.053 pengguna dan meningkat menjadi 56,43 persen dari total penduduk saat itu sebesar 86.531 jiwa atau terdapat pengguna sebanyak 48.834 jiwa. Semakin tinggi presentase penduduk pengguna HP/telepon menunjukkan semakin lancarnya arus informasi menjangkau satuan individu yang ada.

### 3. Surat kabar, Televisi dan Website

Surat kabar, televisi dan website merupakan media massa yang menyajikan informasi yang valid dan bertanggung jawab. Keberadaannya dianggap penting untuk menyajikan informasi yang lebih luas dan beragam. Jumlah surat kabar lokal maupun nasional yang ada sebagaimana ditunjukkan dalam tabel mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.96.

#### Surat Kabar, Televisi dan Website di Kota Tual, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah surat kabar lokal/nasional	3	3	4	6	6	20,83
Jumlah penyiaran radio/tv lokal	1	1	2	2	2	25,00
Jumlah website milik pemerintah daerah	-	-	1	1	1	0,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual, 2018; data olahan 2018

### L. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

#### 1. Presentase koperasi aktif

Koperasi adalah organisasi perekonomian rakyat yang dioperasikan untuk kepentingan bersama anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Perkembangan presentase koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.97.  
Presentase Koperasi Aktif Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Koperasi aktif (unit)	214	224	224	232	50	-17,55%
Jumlah seluruh koperasi (unit)	264	264	264	315	360	8,40%
Presentase Koperasi aktif	81.06	84.85	84.85	73.65	13.89	21,51%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; data olahan 2018.

Presentase Koperasi aktif selama tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013 presentase koperasi aktif sebesar 81,06 persen dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 214 unit dari total 264 koperasi yang ada. Pada tahun 2017 presentase jumlah koperasi aktif menurun menjadi 13,89 persen yaitu terdapat 50 koperasi aktif dari total seluruh koperasi sebanyak 360 unit.

## 2. Presentase usaha mikro kecil

Presentase usaha kecil dan mikro selama tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan mencapai 24,90 persen. Pada tahun 2013 usaha mikro & kecil sebesar 100 persen dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1986 unit dari total 1986 unit yang ada. Pada tahun 2017 presentase usaha mikro & kecil turun dari jumlahnya pada tahun 2013 menjadi 91,03 persen dimana terdapat 6280 unit usaha mikro dan kecil. Uraian data tersebut dapat diikuti pada tabel berikut.

Tabel 2.98.  
Presentase Usaha Mikro & Kecil Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah usaha mikro & kecil (unit)	1986	2087	2087	5902	6280	48,57%
Jumlah seluruh UKM (unit)	1,986	4,100	5,902	6,280	6,899	41,66%
Presentase Usaha Mikro & kecil (%)	100.00	50.90	35.36	93.98	91.03	24,90%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; data olahan 2018



## M. Penanaman Modal

Penanaman Modal mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu wilayah karena mempengaruhi pendapatan dari daerah bersangkutan. Analisis Pencapaian Pembangunan bidang urusan Penanaman Modal Kota Tual dilakukan terhadap indikator jumlah investor, Nilai Investasi dan perubahan nilai investasi sebagaimana tercantum pada tabel selanjutnya.

Tabel 2.99.

### Indikator Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	607	400	568	621	628	4,59
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar Rupiah)	107,535,038,047	110,664,558,978	109,895,126,000	113,190,000,000	116,789,100,000	2,10
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Na	3,129,520,931	(769,432,978)	3,294,874,000	3,599,100,000	

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Tual, 2018; data olahan 2018

Jumlah investor yang berinvestasi di Kota Tual saat ini adalah sebanyak 628 investor sesuai data terlampir. Perkembangan jumlah investor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4.59 persen. Sedangkan pertumbuhan Jumlah nilai investasi berskala nasional cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 2.10 persen. Pada tahun 2013, nilai investasi tercatat sebesar Rp.107,535,038,047 milyar dan meningkat menjadi Rp.116,789,100,000 pada tahun 2017.

#### N. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Tual ditilik beberapa indicator dalam uraian selanjutnya. Jumlah organisasi olahraga pada tahun 2017 menurut data Dinas Pemuda & Olahraga adalah sebanyak 9 organisasi dengan fasilitas lapangan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 16 unit. Jumlah tersebut meningkat dari jumlah lapangan olahraga pada tahun 2014 sebanyak 15 unit. Adapun jumlah cabang olahraga yang dijuarai pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 cabang dari 6 cabang yang ditargetkan. Jumlah tersebut sama dengan capaian pada tahun 2013 yaitu 2 cabang dari total 2 cabang yang ditargetkan.

#### O. Statistik

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan data statistik sebagai dasar dalam analisis pelaksanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan pembangunan. Data statistic Kota Tual mengacu pada Publikasi dari Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara meliputi publikasi seperti Kota Tual Dalam Angka, PDRB Kota Tual dan sebagainya. Perkembangan penyelenggaraan urusan statistik Kota Tual ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.100.

##### Ketersediaan Data Statistik

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017*
Kota Tual Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kota Tual	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BAPPEDA Kota Tual, 2018

#### P. Persandian

Belum ada Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

## Q. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kota Tual ditunjukkan melalui data pada tabel berikut ini

Tabel 2.101.

### Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan, Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah grup kesenian (kelompok)	NA	12	16	23	23	25,69
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	-	1,35	1,91	2,73	2,66	27,28
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-	

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017; data olahan 2018

Dari data pada tabel 2.101, Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah sanggar seni budaya aktif yang ada sebanyak 23 kelompok yang meningkat dari jumlah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 12 kelompok dengan pertumbuhan tahunan sebesar 25,69. Indikator Jumlah grup kesenian untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kota Tual terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,32 persen. Pada tahun 2014 sebesar 1,35 meningkat menjadi 2,66 pada tahun 2017 yang berarti pada tahun 2017 untuk setiap 10.000 orang penduduk Kota Tual terdapat 2-3 kelompok seni budaya. Apaun indikator jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu menunjukkan bahwa jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu belum ada sekalipun seperti diketahui Kota Tual mempunyai obyek-obyek potensial yang dapat ditetapkan dan kembangkan menjadi cagar budaya. Penyelenggaraan bidang urusan kebudayaan perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencakup

keempat indikator yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan ini.

#### R. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan umum dan meningkatkan softskill individu melalui berbagai pengetahuan disajikan dalam bahan bacaan yang dikelolanya. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan perpustakaan ditunjukkan melalui analisis data indikator berikut ini

Tabel 2.102.

Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	-	753	2.351	4.856	5.500	17,01%
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	-	1.000	334	3.064	500	96,31%
Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku (unit OPD)	-	-	6	7	7	8,33%

Sumber: Dinas Perpustakaan & kearsipan, 2018

Berdasarkan data terlampir diketahui bahwa pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan sangat signifikan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 17.01 persen. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebanyak 753 orang meningkat menjadi 5.500 orang pada tahun 2017. Jumlah koleksi buku yang ada mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 terdapat 1000 eksemplar buku dan pada tahun 2017 hanya sebanyak 500 eksemplar.

Penyelenggaraan perpustakaan di Kota Tual perlu dioptimalkan agar dapat memberi efek yang maksimal bagi sumber daya manusia Kota Tual dan memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## S. Kearsipan

Arsip merupakan rekaman peristiwa dalam berbagai media sesuai perkembangan teknologi dapat menjadi asset berharga yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Bidang urusan Kearsipan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan arsip yang dapat menunjang kegiatan administrasi, perencanaan, pengendalian dan lain sebagainya. Penyelenggaraan bidang urusan kearsipan di Kota Tual dapat diketahui dengan melihat indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan. Awalnya tidak terdapat OPD yang mengelola namun pada tahun 2015 telah terdapat 6 organisasi perangkat daerah yang melaksanakannya kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 7 OPD.

### **2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### A. Kelautan dan Perikanan

##### 1. Produksi Perikanan

Kota Tual merupakan daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut yaitu sebesar kurang lebih 19.088 km<sup>2</sup> dari total luas wilayah sebesar kurang lebih 19.342,39 km<sup>2</sup>. Ini mengindikasikan bahwa sector kelautan & perikanan seyogyanya merupakan sector andalan dalam menjalankan roda perekonomian. Produksi perikanan Kota Tual selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat namun hal tersebut masih cukup jauh dari target daerah yang ditetapkan. Perkembangan produksi perikanan Kota Tual dapat dilihat pada tabel 2.102. sebagai berikut.

Tabel 2.103.

## Produksi Perikanan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Produksi Ikan (Ton)	32.451,03	33.517,04	21.004,88	32.277,09	34.537,49	6,66%
Target daerah	56.315,06	50.098,15	60.175,04	65.354,05	70.597,56	6,43%
Presentase Produksi Perikanan	57.62	66.90	34.91	49.39	48.92	8,57%

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan, 2018; data olahan 2018

Selama kurun waktu dimaksud, produksi ikan mengalami pertumbuhan sebesar 6,66 persen setiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan dengan nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 34.537,49 Ton dan produksi terendah terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah produksi sebesar 21.004,88 Ton. Walaupun demikian, jumlah tersebut belum mencapai target daerah untuk produksi perikanan yang ditetapkan setiap tahunnya. Presentase produksi menunjukkan jumlah produksi ikan yang dihasilkan terhadap target daerah pada tahun berkenaan. Presentase produksi perikanan tertinggi di Kota Tual terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 66,90 persen dengan jumlah produksi ikan sebanyak 33.517,04 Ton dari target daerah 59.098,15 Ton sedangkan presentase produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 34,91 persen dengan produksi perikanan sebesar 21.004,88 dari total target daerah sebesar 60.175,04 Ton.

## 2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Salah satu indikator penyelenggaraan bidang kelautan & perikanan adalah Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat menunjukkan dampak penyelenggaraan bidang urusan Kelautan & Perikanan kepada masyarakat. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan presentase perbandingan jumlah kelompok

nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah terhadap jumlah kelompok nelayan yang ada pada daerah tersebut. cakupan bina kelompok nelayan Kota Tual mengalami fluktuasi dengan presentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 21,19 persen dan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 7.59 persen. Jumlah kelompok nelayan Kota Tual terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,94 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 859 Kelompok nelayan dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 terdapat 1080 kelompok nelayan sedangkan jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan Kota Tual ditunjukkan pada tabel 2.103. sebagai berikut.

Tabel 2.104.

Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan pemerintah	81	127	111	213	82	18,65
Jumlah kelompok nelayan	859	951	982	1005	1080	5,94
Cakupan bina kelompok nelayan	9.43	13.35	11.30	21.19	7.59	12,40

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan, 2018; data olahan 2018

### 3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah presentase perbandingan Jumlah produksi ikan kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan daerah. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi hasil kelompok nelayan di daerah terhadap jumlah produksi ikan yang ada di daerah pada kurun waktu tertentu. Produksi perikanan Kota Tual sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana kelompok nelayan juga mempunyai kontribusi dalam pencapaian target tersebut. Adapun hasil produksi kelompok nelayan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.105.

Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Produksi ikan kontribusi kelompok nelayan	3894.12	5027.56	2100.49	6455.42	1726.82	26,24
Jumlah Produksi ikan daerah	32451.03	33517.04	21004.88	322277.09	34536.49	6,65
Produksi Perikanan kelompok nelayan	11,99	15	10	2	5	15,33

Sumber: Dinas Kelautan & perikanan, 2018; data olahan 2018

Pada tahun 2013, Jumlah Produksi ikan kelompok nelayan sebanyak 3894,12 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 12 persen dari hasil seluruh produksi ikan daerah saat itu yaitu sebanyak 32451.03 Ton. Pada tahun 2014 produksi ikan nelayan mengalami peningkatan sebanyak 29 persen menjadi 5027,56 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 15 persen dari produksi ikan daerah. Produksi ikan kelompok nelayan



mengalami penurunan sebesar 58,22 persen pada tahun 2015 dengan jumlah produksi sebesar 2100,49 Ton memberikan kontribusi sebesar 10 persen dari jumlah produksi ikan daerah sebesar 2.1004,9 Ton. Pada tahun 2016 produksi ikan kelompok nelayan meningkat signifikan dari 2100,49 ton pada tahun 2015 menjadi 6455,42 Ton pada tahun 2016 atau sebesar 2 persen dari jumlah produksi ikan daerah pada tahun itu yaitu sebesar 322.277 Ton kemudian kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 sebanyak 1726,82 Ton atau 5 persen dari produksi ikan daerah sebanyak 34536,5 Ton.

#### 4. Rasio Kawasan Lindung perairan & proporsi tangkapan ikan.

Rasio Kawasan lindung perairan adalah indikator yang menunjukkan persentase perbandingan Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan suatu wilayah. Proporsi tangkapan ikan adalah indikator yang digunakan untuk melihat Batasan jumlah tangkapan ikan yang tidak melebihi 80 persen tangkapan maksimum lestari.

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,61 persen. Pada tahun 2013 sebesar 81,2 meningkat menjadi 93,2 pada tahun 2017. ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran untuk melestarikan lingkungan di wilayah perairan.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman masih berada dibawah Batasan yang ditentukan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 3,61 persen. Pada tahun 2013 proporsi tersebut sebanyak 60 persen dari Batasan dan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2017. Kedua indikator ini disajikan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.106.  
Rasio Kawasan Lindung Perairan & Proporsi Tangkapan Ikan  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	81.2	81.2	83.6	83.6	93.2	3,61
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	60	65	58	75	90	11,72

Sumber: Dinas Kelautan & perikanan, 2018; data olahan 2018

#### B. Pariwisata

Sebagai daerah kepulauan, Pariwisata merupakan salah satu sector penting dalam perekonomian Kota Tual khususnya wisata bahari dan ekosistem pulau-pulau kecil . Kota Tual mempunyai pantai pasir dan karang unik yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya, serta beberapa titik selam menarik di sekitar kepulauan Dullah. Selain itu terdapat beberapa obyek wisata budaya seperti tradisi tarian Debus, Masjid Tua Tayando dan sebagainya. Obyek-obyek wisata ini perlu diperhatikan dan dikembangkan lagi sehingga dapat memberi nilai tambah pada sektor pariwisata di Kota Tual. Adapun objek wisata Kota Tual dapat dilihat pada tabel 2.106. sebagai berikut.

Tabel 2.107.

## Obyek wisata di Kota Tual Tahun 2018

Kecamatan	Obyek Wisata	Lokasi
P.Dullah Utara	Bunker Pantai Tamedan Pantai Difur Pantai Dullah Pantai Nam Indah Danau Waren Danau Fanil Pantai Duroa Meriam dan benteng Pertahanan Duroa Danau Tahit Ko Pulau Adranan Pulau Rumadan Pulau Bair Pulau Ohoimas Museum Belan Pulau Burung	Desa Tamedan Desa Labetawi Desa Dullah Desa Ohoitahit Desa Ngadi Desa Ohoitel Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut
P.Dullah Selatan	Teluk Un Fid Bangir Jembatan Gantung Fair Taman Kota Tual Pulau Ut Alat Musik Tradisional Ekal	Desa Taar Desa Taar Desa Tual Kelurahan Lodar El Desa Tual Desa Taar
Tayando Tam	Pulau Varat Neu Pulau Nusreen Pulau Ree Goa TengkorakKepala Tujuh Tarian Tradisional Debus Masjid Tua dan Kuburan Tua Goa Kapal Kandas Vat Laai (Batu Timbul) Met Vait (Meti Panjang)	Ds.Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamtel
P.p Kur	Pulau Kaimer Meriam dan Benteng Pertahanan Kaimer Pulau Bui Pulau Tubur Pantai Werajo Fat Amfina Pit (Batu Perempuan Tujuh) Pantai Namaselap	Pulau Kaimer Pulau Kaimer  Pulau Bui Desa Lokwirin Desa Lokwirin Desa Lokwirin  Desa Tubyal
Kur Selatan	Pulau Mangur Pulau Woning Pulau Fadol Tebing Batu, Goa, dan Pantai  Telaga Werwari	Pulau Mangur Pulau Woning Pulau Fadol Desa Pasir Panjang dan Desa Hirit Desa Hirit

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2017

## 1. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dapat menunjukkan keberhasilan sektor pariwisata pada suatu daerah yang juga dapat mempengaruhi

peningkatan perekonomian daerah setempat. Hal ini dapat diketahui salah satunya dengan melihat minat wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut. Jumlah Kunjungan wisata Kota Tual selama 2013-2017 disajikan dalam tabel 2. 107. Sebagai berikut.

Tabel 2.108.

Jumlah Kunjungan Wisata Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara	1197	1200	1360	1530	1575	7,26
Jumlah wisatawan mancanegara	60	94	105	99	54	4,30
Jumlah Kunjungan wisatawan	1257	1294	1465	1629	1629	6,84
Target kunjungan wisata	1383	1423	1612	1792	1792	6,84
Realisasi kunjungan	91	91	91	91	91	0

Sumber: Dinas Pariwisata, 2018; data olahan 2018

Berdasarkan tabel 2.108, diketahui bahwa perkembangan kunjungan wisata selama 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan yang tidak begitu berbeda dari tahun ke tahun. Realisasi kunjungan Wisata tetap sebesar 91 persen dari tahun 2013-2017 namun jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata 6,84 persen setiap tahunnya. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisata perlu dilakukan peningkatan fasilitas penunjang pariwisata dan promosi yang gencar mengingat Kota Tual mempunyai potensi wisata yang unik, indah dan mempunyai nilai jual.

## 2. PAD Sektor Pariwisata

Pariwisata mempunyai kaitan yang erat dengan peningkatan perekonomian daerah yang berimbas pada Peningkatan penghasilan daerah. Semakin baik penyelenggaraan pariwisata

pada suatu daerah juga dapat dilihat melalui kontribusi hasil sector pariwisata terhadap pendapatan asli daerah bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah Kota Tual sector Pariwisata selama 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel 2.108. sebagai berikut.

Tabel 2.109.

PAD Sektor Pariwisata Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
PAD sektor Pariwisata	268,406,000	361,046,200	291,059,447	287,561,067	4,64
Total PAD	9,598,682,635	16,562,973,940	18,080,487,904	20,082,750,716	25,00
Presentase PAD sektor Pariwisata terhadap PAD	2.80	2.18	1.61	1.43	-19,82

Sumber: Dinas Pariwisata, 2018; data olahan 2018

Berdasarkan data pada tabel 2.109, presentase PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kota tual cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan -19,82 persen. Presentase PAD Sektor pariwisata kota tual tertinggi terjadi pada tahun 2013 dimana PAD sektor pariwisata menyumbang 2,80 persen PAD Kota Tual yaitu Rp.268.406.000 dari total PAD sebesar Rp.9,598,682,634.51. Presentase PAD Sektor pariwisata kota tual terendah yaitu sebesar 1.43 persen terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah PAD sektor Pariwisata Rp.287,561,067 dari Total PAD Rp.20,082,750,715.72.

### C. Pertanian

#### 1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sector pertanian dan perkebunan terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung presentase kontribusi pertanian/perkebunan terhadap nilai PDRB atas dasar harga

berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sector pertanian/perkebunan pada total PDRB suatu daerah.

Tabel 2.110.

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan,  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.066.300	1.132.473	1.195.770	1.265.189	1.337.784	5,83%
Nilai PDRB sector pertanian (Juta Rupiah)	37.598,14	39.254,38	39.844,08	41.045,07	43.315,09	3,61%
Kontribusi pertanian terhadap (%)	3,53	3,47	3,33	3,24	3,24	-2,10%

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2017; data olahan 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sector pertanian terhadap nilai PDRB Kota Tual mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2013-2017 dengan pertumbuhan -2,10 persen.

Pada tahun 2013 sektor pertanian berkontribusi sebesar 3,53 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tual atau senilai Rp.37.598,14 juta dari total PDRB sebesar Rp.1.066.300,30 juta. Pada tahun 2017, sektor pertanian berkontribusi sebesar 3,24 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tual atau senilai Rp.43.315,09 juta dari total PDRB sebesar Rp.1.337.783,92 juta. Dari gambaran ini, dapat diasumsikan bahwa lapangan usaha sector pertanian semakin mengalami penurunan yang digambarkan oleh hasil analisis indikator ini.

## 2. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sector perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung presentase kontribusi sector tersebut terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sector perkebunan (tanaman keras) pada total PDRB suatu daerah.

Tabel 2.111.

Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)  
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.066.300	1.132.473	1.195.770	1.265.189	1.337.784	5,83
Nilai PDRB sector perkebunan (Juta Rupiah)	8.515,56	8.722,14	8.926,35	9.155,34	9.640,60	3,16
Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	0,80	0,77	0,75	0,72	0,72	-2,53

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2017; data olahan 2018

Pertumbuhan rata-rata tahunan kontribusi PDRB sector perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kota Tual adalah sebesar -2,53 persen atau dengan kata lain sector ini mengalami pertumbuhan menurun. Pada tahun 2013 kontribusi PDRB sector perkebunan sebesar Rp.8.515,56 juta atau 0,80 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu senilai Rp.1.006300,30 juta. Pada tahun 2017 proporsi tersebut mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 0,72 persen atau senilai 9.640,60 terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu sebesar Rp.1.337.783,92 juta.

### 3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung presentase kontribusi sector tersebut terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sector perkebunan (tanaman pangan) pada total PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah.

Tabel 2.112.

Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.066.300.	1.132.473	1.195.770	1.265.188	1.337.783	5,83
Nilai PDRB sector perkebunan tanaman pangan (Juta Rupiah)	23.646,43	24.891,64	25.104,10	25.866,37	27.361,76	3,73
Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	2,22	2,20	2,10	2,04	2,05	-1,99

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2017; data olahan, 2018

Pertumbuhan rata-rata tahunan kontribusi PDRB sector perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB Kota Tual adalah sebesar -1,99 persen atau dengan kata lain sector ini mengalami pertumbuhan menurun. Pada tahun 2013 kontribusi PDRB sector perkebunan sebesar Rp.23646,43 juta atau 2,22 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu senilai Rp.1.006300,30 juta. Pada tahun 2017 proporsi tersebut mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 2,05 persen atau senilai Rp.27361,76 juta terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu sebesar Rp.1.337.783,92 juta.



#### 4. Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar

Produktivitas pangan utama lokal adalah indikator yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pasokan kebutuhan bahan pangan utama lokal. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan hasil panen atau hasil produksi bahan pangan utama lokal dengan luas areal tanam bahan pangan utama lokal tersebut. Perkembangan produktivitas bahan pangan utama lokal Kota Tual selama 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.113.

#### Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Per Hektar Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Produksi bahan pangan utama lokal (ton)	322,31	715,2	481,2	314,7	378,35	18,70
Luas Areal bahan pangan utama lokal (ha)	141,5	312,5	189	139	152,00	16,06
Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar (ton/hektar)	2,28	2,29	2,55	2,26	2,49	2,65

Sumber: Dinas Pertanian, 2018; data olahan 2018

Produktivitas bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 2,65 persen. Pada tahun 2013, produktivitas bahan pangan utama lokal sebanyak 2,28 ton/ha yang pada tahun 2017 meningkat menjadi 2,49 ton/ha. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hasil produksi pertanian khususnya bahan pangan lokal walaupun dengan intensitas yang tidak begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Bahan pangan utama lokal di Kota Tual antara lain berupa ketela pohon dan ubi-ubian.

## 5. Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok tani adalah indikator yang memberi gambaran seberapa besar pendampingan Pemerintah terhadap kelompok petani pada suatu daerah. Indikator ini diperoleh dengan menghitung presentase kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah terhadap kelompok petani. Tabel selanjutnya menunjukkan perkembangan cakupan bina kelompok tani Kota Tual selama tahun 2013-2017.

Tabel 2.114.

Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan binaan (kelompok)	124	131	137	142	144	3,82%
Jumlah kelompok tani (kelompok)	362	393	425	462	459	6,19%
Cakupan bina kelompok tani (%)	34,25	33,33	32,24	30,74	31,37	1,13%

Sumber: Dinas Pertanian, 2018; data olahan 2018

Cakupan bina kelompok tani menunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 1,13 persen. Pada tahun 2013 cakupan bina kelompok tani sebesar 34,35 persen atau terdapat 124 kelompok binaan dari total 362 kelompok tani yang ada. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 144 kelompok tani yang mendapatkan binaan dari total 459 kelompok yang ada atau mencakup 31,37 persen.

## D. Energi dan Sumber Daya Mineral

### 1. Persentase rumah tangga pengguna listrik

Untuk menggambarkan akses penduduk Kota Tual terhadap listrik, digunakan indikator presentase rumah tangga pengguna listrik yang diperoleh dari presentase perbandingan rumah

berlistrik terhadap total jumlah rumah yang ada di Kota Tual, mengingat setiap rumah tangga yang ada tidak selalu menempati satu rumah atau terdapat lebih dari 1 rumah tangga dalam 1 rumah. Perkembangan presentase rumah berlistrik di Kota Tual periode 2013-2017 sebagaimana ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.115.

Perkembangan Presentase Rumah Berlistrik 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah rumah berlistrik	15.912	16.281	15.201	15.343	15.783	-0,13
Jumlah rumah	17.436	16.486	16.724	16.867	17.307	-0,14
Presentase Rumah berlistrik	91,26	98,76	90,89	90,96	91,19	0,15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018; Dinas Perumahan & Permukiman, 2018; data olahan 2018

Dari data yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa penggunaan listrik dalam keperluan sehari-hari telah mencakup hampir seluruh rumah yang ada. Presentase rumah berlistrik mengalami pertumbuhan 0,15 persen setiap tahunnya dengan rata-rata presentase 92,61 persen. Sumber-sumber listrik yang dipakai antara lain dari PLN, Genset dan sumber serupa lainnya. Capaian ini perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar dapat mencapai nilai 100 persen.

## E. Perdagangan.

Tabel 2.116.  
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal  
Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kelompok usaha yang mendapat bantuan binaan pemerintah (kelompok)	-	-	332	662	687	17,75
Jumlah kelompok pedagang (kelompok)	-	2.087	5.092	6.280	6.919	16,75
Cakupan bina kelompok pedagang (%)	-	-	15,3	9,4	10,1	-2,60

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017

Nilai ekspor bersih perdagangan di kota Tual selama 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai -2,60 persen. pada tahun 2013 nilai ekspor perdagangan sebesar US\$50172507.73 turun menjadi US\$2130439. Data nilai ekspor bersih perdagangan Kota Tual ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.117.  
Nilai Ekspor Perdagangan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai ekspor bersih perdagangan (US\$)	50.172.507	53.130.439	53.130.439	53.130.439	2.130.439	-22,52%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017.

## F. Perindustrian

Tabel 2.118.

### Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Tual Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kelompok usaha yang mendapat bantuan binaan pemerintah (kelompok)	-	-	-	32	114	67	1,08
Jumlah kelompok pedagang (kelompok)	213	260	302	309	337	335	6,73%
Cakupan bina kelompok pedagang (%)	-	-	-	10,3	33,7	19,72	21,4%

Sumber: Lakip Kota Tual 2013-2017

## 1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dalam mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Tual ditinjau dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah (infrastruktur), iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

### 1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### B. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan kemampuan & daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Hal ini mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi Kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Semakin tinggi nilai pengeluaran konsumsi mengindikasikan keadaan perekonomian yang baik. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per Kapita dan Pengeluaran konsumsi Rumah tangga non

pangan per Kapita Kota Tual sebagaimana disajikan dalam tabel 2.119. sebagai berikut.

Tabel 2.119.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita  
Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Pengeluaran makanan (Rp)	368.651	455.053	324.629	357.750	410.052	4,9
Pengeluaran non makanan (Rp)	286.281	282.665	329.601	324.650	416.586	10,54
Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	654.932	737.718	654.230	682.400	826.638	6,69

Sumber: Kota Tual dalam Angka 2013-2017, data olahan, 2018

Selama tahun 2013-2017, pengeluaran per kapita Kota Tual mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,9 persen; pada tahun 2013 pengeluaran per kapita sebesar Rp.654.932 per bulan meningkat menjadi Rp. 826638 pada tahun 2017. Dari data tersaji, dapat dikatakan pengeluaran rumah tangga terbesar umumnya adalah kelompok pengeluaran makanan namun kelompok pengeluaran non makanan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 10,54 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pengeluaran makanan sebesar Rp.368.651 per bulan menjadi Rp. 410052 per bulan pada tahun 2017 sedangkan pengeluaran non makanan pada tahun 2013 sebesar Rp.286.281 meningkat menjadi Rp. 416.586 pada tahun 2017.

### **C. Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita**

Konsumsi non pangan adalah pengeluaran untuk membiayai item belanja konsumsi rumah tangga selain makanan yang terdiri dari 6 kebutuhan utama antara lain (1) perumahan, (2) barang & jasa, (3) pakaian, (4) barang tahan lama, (5) pajak & asuransi dan (6) Keperluan pesta & Upacara dimana kesehatan dan pendidikan juga tercakup di dalamnya.

Dalam pembahasan sebelumnya, tercatat nilai Konsumsi non pangan per kapita Kota Tual mengalami pertumbuhan positif sehingga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dapat memberi gambaran bahwa karakteristik pengeluaran Penduduk Kota Tual semakin kompleks karena berbagai perkembangan dan kemajuan yang mulai merambah sehingga menyebabkan semakin pentingnya berbagai kebutuhan lain selain kebutuhan dasar makanan. Perkembangan konsumsi non pangan perkapita Kota Tual 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,54 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pengeluaran non pangan sebesar 43,71 persen dari total pengeluaran, meningkat menjadi 50,39 persen dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017. Jenis konsumsi non pangan tertinggi adalah dari kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian disusul dengan kelompok barang dan jasa. Selanjutnya perkembangan pengeluaran non pangan per kapita Kota Tual 2013-2017 ditampilkan dalam tabel 2.120. sebagai berikut.

Tabel 2.120.

## Pengeluaran Non Pangan per Kapita Kota Tual Tahun 2013-2017

Jenis	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	112.000	144.000	172.324	200.243	226.958	19,45
Barang & Jasa	75.600	112.000	89.519	80.515	108.752	13,27
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	25.500	30.900	16.537	21.424	27.961	8,69
Barang Tahan lama	51.200	44.500	35.403	12.687	19.867	-10,27
Pajak Pemakaian & Asuransi	1.781	5.827	5.693	7.405	24.139	120,23
Keperluan pesta & Upacara	20.200	96.500	10.124	2.376	8.909	121,66
Jumlah pengeluaran Non pangan	286.281	282.665	329.601	324.650	416.586	10,54
Jumlah pengeluaran	654.932	433.727	654.230	682.400	826.638	10,63
Presentase	43,71	65,17	50,84	47,57	50,39	6,65

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2014-2017; data olahan, 2018

**D. Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah berguna untuk memberikan gambaran tentang kinerja sector perekonomian di daerah. Indikator ini didapat dari perbandingan nilai sector tertentu dengan jumlah angkatan kerja yang ada pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Produktivitas daerah Kota Tual dihitung menurut lapangan usaha yang terlebih dahulu dikelompokkan dalam 3 sector yaitu agrikultur, manufaktur & jasa. Sektor agrikultur terdiri dari sector pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian sector



manufaktur terdiri dari sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi kemudian sektor jasa terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; dan jasa-jasa lainnya. Adapun nilai produktivitas total daerah Kota Tual 2013-2016 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.121.

Produktivitas Total Kota Tual Tahun 2013-2016

Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Juta Rp.)					Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
	2012	2013	2014	2015*	2016**	
Agrikultur	462106.45	532218.17	624563.7	681089.34	720229.01	11,83 %
Manufaktur	129,923.75	149,927.34	171,276.10	195,986.03	212,719.28	13,15%
Jasa	599383.8	528192.46	770145.1	881249.72	971488.44	14,65%
Penduduk Usia Kerja (jiwa)						
Agrikultur	NA	11,325.00	9,258.00	6,367.00	6,367.00	-16,49%
Manufaktur	NA	1,172.00	1,511.00	2,315.00	2,315.00	27,38%
Jasa	NA	9,932.00	1,093.00	13,947.00	13,947.00	12,47%
Nilai Produktivitas (Juta/jiwa)						
Agrikultur	-	46.99	67.46	106.97	113.12	35,96%
Manufaktur	-	127.92	113.35	84.66	91.89	-9,39%
Jasa	-	53.18	69.43	63.19	69.66	10,60%

\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2013-2016; PDRB Kota Tual 2013-2016; data olahan 2018

Berdasarkan tabel 2. 121, menunjukkan bahwa lapangan usaha paling produktif adalah pada sektor agrikultur yang salah satunya mencakup sektor perikanan dengan nilai pertumbuhan produktivitas total mencapai 35,95persen, namun sektor agrikultur bukan kontributor utama terhadap struktur perekonomian & mempunyai penyerapan tenaga kerja yang cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -16,49 persen. Produktivitas sektor usaha

jasa hanya menghasilkan Rp.69,66 juta/jiwa sedangkan sektor agrikultur memberikan produktivitas senilai Rp. 113,12 juta/jiwa. Mengacu pada data olahan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar sektor jasa merupakan kontributor utama dalam struktur ekonomi Kota Tual dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 14,65 persen namun secara produktivitas masih lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor agrikultur.

#### **1.4.2. Fokus Fasilitas wilayah / Infrastruktur**

##### **A. Perhubungan**

###### **- Rasio jalan per kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses kepada setiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Data rasio jalan per kendaraan dapat dilihat pada tabel 2.122. sebagai berikut.

Tabel 2.122.

Rasio Panjang Jalan per Kendaraan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan (km)	146.618	179.30	330.6	330.6	330.6
jumlah kendaraan (unit)	363	394	437	437	-
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit)	0.40	0.46	0.76	0,76	-

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018; data olahan 2018

Pada tahun 2013, rasio panjang jalan per kendaraan sebesar 0,4 km/unit kemudian rasio tersebut meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2017. Angka tersebut berarti selama tahun 2013-2017 tersedia panjang jalan sebanyak 0,4-0,76 km untuk setiap 1

kendaraan yang menunjukkan gambaran keadaan lalu lintas Kota Tual yang lancar.

## **B. Penataan Ruang**

Tabel 2.123.

Presentase Luas Wilayah Produktif Kota Tual Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Luas Wilayah Produktif	6.816	6.806	6.796	6.786	6.776	-0,15%
Luas Seluruh Wilayah Budidaya	11.696	11.680	11.664	11.646	11.629	-0,14%
Presentase Luas Wilayah Produktif	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00%

Tabel 2.124.

Luas Wilayah Perkotaan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas Wilayah perkotaan	2.451	2.477	2.504	2.532	2.559	1,08%

## **C. Fasilitas Penunjang Perekonomian**

### **1. Bank yang beroperasi**

Bank adalah lembaga keuangan pemerintah maupun swasta yang mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah. berbagai sirkulasi keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui perantara dan bantuan perbankan. Adapun Bank yang beroperasi di Kota Tual antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN), dan Bank Danamon.

## **2. Restoran dan Hotel**

Restoran atau rumah makan merupakan tempat menjual, membeli dan menyantap makanan dan minuman yang disediakan dalam bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Keberadaan restoran dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah sekaligus menunjangnya. Pada tahun 2016 terdapat 15 unit restoran yang menurun dari tahun sebelum 2015 sebanyak 37 unit.

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel atau penginapan merupakan salah satu fasilitas yang sangat menunjang berbagai kegiatan ekonomi salah satunya pariwisata. Hotel dan penginapan yang ada di Kota Tual hanya berupa penginapan & hotel melati. Di Kota Tual terdapat 3 penginapan & 2 hotel melati.

## **D. Komunikasi & informatika**

### **1. Daya listrik**

Sebagian besar kebutuhan listrik Kota Tual dilayani oleh PT. PLN Wilayah IX cabang Tual. yang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel dan mempunyai 2 sub cabang. Data kelistrikan yang disajikan merupakan akumulasi data dari PLTD di Langgur Maluku Tenggara & PLTD Sub Cabang Kur. Adapun data ini juga mencakup penggunaan listrik di Maluku Tenggara namun tidak termasuk wilayah pulau Kei besar. Data kelistrikan Kota Tual Tahun 2013-2017 disajikan pada table berikut ini :

Tabel 2.125.

## Data Kelistrikan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Kapasitas terpasang (KW)*	15.012	7.792	21.160	14.600	14.280
Daya mampu (KW)*	3.480	6.145	8.910	9.830	10.190
Beban puncak (KW)*	7.489	7.720	8.295	8.210	9.144
Jumlah mesin (unit)	18	36	29	29	32

\*) akumulasi PLTD Langgur & Sub Ranting Kur;  
 Sumber: Kota Tual dalam angka 2014-2017

**1.4.3. Fokus Iklim Investasi****A. Angka Kriminalitas**

Mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan iklim investasi yang ideal. Keadaan yang aman, tertib dan terkendali dapat memberikan daya tarik dan jaminan bagi perkembangan iklim investasi. Angka kriminalitas Kota Tual disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.126.

## Angka Kriminalitas Kota Tual Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani (kasus)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Angka kriminalitas
2013	148	87180	16.98
2014	120	89025	13.48
2015	83	83621	9.93
2016	282	84332	33.44
2017	148	86531	17.10

Sumber : data Kepolisian Resort Maluku Tenggara 2018; Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tual, 2018; Data Olahan, 2018

Merujuk data tabel 2.126. Angka kriminalitas Kota Tual mengalami fluktuasi dengan titik tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 33,44 kasus dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 sebanyak 9.93 kasus. Ini berarti dari setiap 10.000 penduduk yang ada pada tahun 2015 terjadi 9 sampai 10 kasus kejahatan demikian juga pada tahun 2016 terjadi 33 sampai 34 kasus kejahatan pada setiap 10.000 penduduk Kota Tual. Tinggi dan rendahnya angka kriminalitas sangat mempengaruhi daya tarik investasi karena terkait stabilitas keamanan. Untuk itu, dibutuhkan upaya berbagai pihak di Kota Tual untuk menekan jumlah tindak criminal.

## **B. Demonstrasi**

Demonstrasi merupakan kegiatan menunjukkan sikap mendukung ataupun protes yang dilakukan di tempat-tempat public di hadapan umum. Hal tersebut menunjukkan kehidupan demokrasi di Negara kita yang semakin berkualitas. Namun di sisi lain kegiatan ini sering menimbulkan gangguan dan mengancam ketertiban. Selama tahun 2013-2017 rata-rata terjadi demonstrasi sebanyak 3-34 kali demonstrasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terjadi 5 kali demonstrasi kemudian meningkat menjadi 5 kali pada tahun 2014, kemudian terjadi 3 kali demonstrasi pada tahun 2015 dan selanjutnya pada tahun 2016 & 2017 terjadi 2 kali demonstrasi.

## **C. Perizinan**

Uraian cakupan penyelesaian izin l  
okasi pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat baik dari jumlah izin lokasi dan permohonan izin lokasi sesuai daftar tabel di bawah ini.

Tabel 2.127.

## Perizinan Kota Tual Tahun 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penyelesaian izin lokasi	NA	NA	NA	100	100
2	Jumlah izin lokasi	NA	NA	NA	42	24
3	Permohonan izin lokasi	NA	NA	NA	42	24

Sumber data : Dinas PTSP Kota Tual Data Dukung 2018.

**D. Pajak Daerah**

Pajak daerah Kota Tual Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi dan di tahun 2016 mencapai kenaikan Rp. 4.030.916.716,-. Di tahun 2017 mengalami penurunan sekitar Rp. 350.511.286,- Rata – rata total pajak daerah Kota Tual 23.69 Persen. Pajak daerah kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.128.

## Pajak Daerah Kota Tual Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
						Rata-rata Tahunan (%)
Pajak Hotel	63.706.000	63.457.700	80.304.000	56.987.000	81.622.500	10,09%
Pajak Restoran/Rumah Makan	115.100.000	118.939.000	127.229.000	153.121.100	167.360.400	9,99%
Pajak Hiburan	89.100.000	62.649.500	91.905.447	77.452.976	15.077.900	-19,81%
Pajak Reklame	113.259.960	116.000.000	118.850.000	143.919.400	146.485.775	6,94%
Pajak Penerangan Jalan	896.555.461	1.063.892.102	1.105.937.301	1.225.377.266	1.511.313.874	14,19%
Pajak Pajak Miniral Bukan Logam dan Batuan	202.119.544	288.241.515	689.805.108	923.704.472	637.350.420	46,21%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	1.032.835.873	558.659.393	1.081.410.002	597.224.211	0,96%
Pajak Bea Perolehan Atas Tanah Bangunan	290.595.100	253.688.475	257.703.100	368.944.500	523.970.350	18,52%
<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>1.770.436.065</b>	<b>2.999.704.165</b>	<b>3.030.393.349</b>	<b>4.030.916.716</b>	<b>3.680.405.430</b>	<b>23,69%</b>

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kota Tahun 2018

## E. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Kota Tual Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan dari tiga tahun terakhir ini menunjukkan retribusi semakin meningkat. Namun perlu dilakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas Retribusi Daerah. Pertumbuhan rata-rata ditahun 2013-2017 mencapai 8.27 perse. Retribusi daerah Kota Tual dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.129.  
Retribusi Daerah Kota Tual Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
						Rata-rata Tahunan (%)
Retribusi Jasa Umum	2.530.808.871	1.330.163.500	1.578.325.551	1.668.608.750	1.768.127.500	-4,28%
Retribusi Jasa Usaha	201.989.000	1.309.032.480	1.560.952.000	4.518.855.200	2.023.121.000	175,40%
Retribusi Perizinan Tertentu	609.722.725	503.044.744	512.534.175	525.394.225	741.838.325	7,02%
<b>Total Retribusi Daerah</b>	<b>3.342.520.596</b>	<b>3.142.240.724</b>	<b>3.651.811.726</b>	<b>3.993.460.975</b>	<b>4.533.086.825</b>	8,27%

### 1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

#### A. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yaitu dalam memperoleh komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk oleh 3(tiga) dimensi dasar mencakup Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Tual ditampilkan dalam tabel 2.130. sebagai berikut.



Tabel 2.130.

## IPM Kota Tual Tahun 2013-2017

Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kota Tual	64,16	64,95	65,20	65,64	66.25	0,81%
Provinsi Maluku	66,09	66,74	67,05	67,60	68.19	0,79%
Indonesia	68.31	68.9	69.55	70.18	70.81	0,90%

Sumber: Kota Tual Dalam angka 2017; BPS, 2018; data olahan, 2018

Berdasarkan skala internasional, IPM Kota Tual capaian IPM Kota Tual selama 2013-2017 termasuk dalam kategori menengah bawah yaitu berada antara kisaran nilai 50 sampai kurang dari 66.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup sejak waktu lahir karena komponen ini menunjukkan bahwa panjang usia hidup mengindikasikan kualitas kesehatan penduduk. Selanjutnya untuk mengukur dimensi Indeks pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun data komponen pembentuk IPM Kota Tual 2013-2017 ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 2.131.

## Komponen Pembentuk IPM Kota Tual 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Angka harapan hidup	63.37	63.76	64.06	64.33	64.61	0,49
Harapan lama sekolah	13.46	13.84	13.86	13.87	13.88	0,78
Rata-rata lama sekolah	9.54	9.65	9.67	9.76	9.87	0,85
Pengeluaran perkapita	6552.69	6642.48	6683	6803	7012	1,71

Sumber: BPS, 2018; data olahan, 2018

## B. Tenaga Kerja

### 1. Rasio S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggerak roda pembangunan. Untuk mencapai hasil pembangunan yang ditentukan dengan baik dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM adalah dengan melihat tingkat pendidikannya. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah perbandingan jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk total untuk setiap 10.000 jiwa penduduk. Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual selama 2013-2017 ditampilkan dalam tabel 2.132. sebagai berikut.

Tabel 2.132.

## Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
jumlah lulusan S1	3258	3462	3456	3816	3796	4,00
jumlah lulusan S2	109	114	109	134	133	5,60
jumlah lulusan S3	9	8	7	8	10	3,92
jumlah penduduk	87180	89025	83621	84332	86531	-0,12
rasio lulusan S1/S2/S3	3,87	4,03	4,27	4,69	4,55	4,23

Sumber: dinas Kependudukan & catatan sipil, 2018; data olahan, 2018

## 2. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini bertujuan untuk melihat beban tanggung jawab penduduk usia kerja terhadap penduduk non produktif. Perkembangan rasio ketergantungan Kota Tual 2013-2017 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.133.

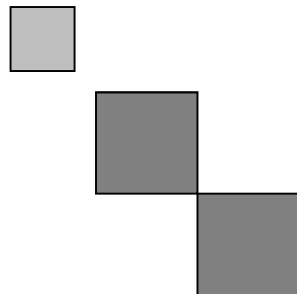
## Rasio Ketergantungan Kota Tual Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
penduduk berusia < 15 tahun	20085	23149	22974	21676	23326	4,12
penduduk berusia < 64 tahun	4900	4196	3910	3619	4185	-3,25
penduduk 15-64 tahun	62195	61680	56756	59037	59020	-1,21
rasio ketergantungan	40.17	44.33	47.37	42.85	46.61	4,11

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2018; data olahan, 2018

Dari tabel 2.133, Tercatat rasio ketergantungan Kota Tual mempunyai pertumbuhan rata-rata tahunan positif sebesar 4,11 persen yang berarti beban tanggung jawab penduduk usia kerja atas penduduk bukan usia kerja di Kota Tual dapat dikatakan semakin besar setiap tahunnya. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 47,37. Ini berarti pada tahun 2015 setiap 100 orang pekerja atau penduduk usia kerja mempunyai tanggung jawab tanggungan terhadap 47-48 orang yang belum bekerja atau tidak bekerja lagi (penduduk non produktif). Rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2013 dengan besaran rasio sebanyak 40,17.





**BAB III**  
**GAMBARAN**  
**PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN**  
**DAERAH**  
**SERTA**  
**KERANGKA**  
**PENDANAAN**



### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Tual, yang dilaksanakan dengan tetap berdasar dan mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Untuk dapat meningkatkan potensi sumber daya keuangan Pemerintah Daerah Kota Tual, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tual selama lima tahun ke belakang beserta kebijakan umum dan khusus yang menjadi acuannya. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tual terdiri dari beberapa komponen yakni kinerja pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah, kinerja pengelolaan pembiayaan daerah, serta neraca daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Secara umum komponen APBD Kota Tual terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat



Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Komponen Pendapatan Daerah Kota Tual adalah sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **2. Dana Perimbangan**

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

##### **3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Tual selama kurung waktu tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan angka 15,91% terjadi peningkatan positif yang cukup besar dibandingkan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 yang menunjukkan angka 11,47%. Hal ini memperlihatkan perkembangan yang positif dari pendapatan daerah Kota Tual selama kurung waktu 5 (lima) tahun tersebut yang juga memperlihatkan semakin menguatnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan Kota Tual. Dari angka pertumbuhan tersebut, peningkatan terjadi pada Dana Perimbangan pada yang tahun 2013–2018

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 134,83% dibandingkan ditahun 2010–2013 sebesar 55,15%, sedangkan untuk komponen PAD sendiri pada Tahun 2013–2018 mengalami pertumbuhan sebesar 36,51% dibandingkan tahun 2010 hingga tahun 2013 yakni sebesar 16,01%.



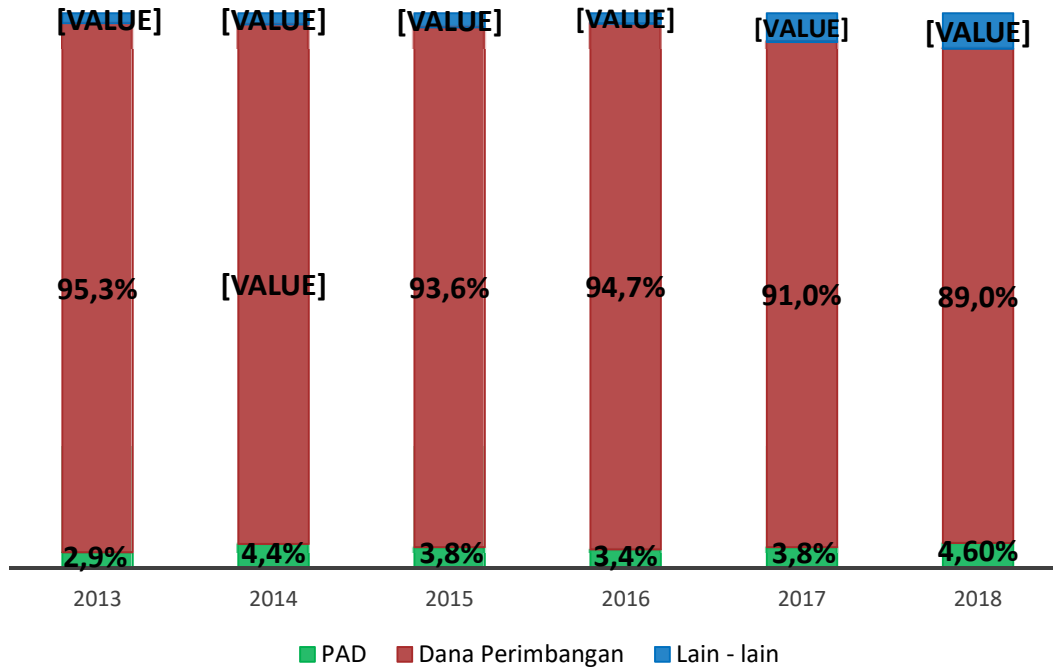


Tabel 3.1

Porsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2018.

No	Uraian	Tahun (Rp)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAD	9.598.682.634	16.562.973.939	18.080.487.904	20.082.750.715	21.734.939.129	27.114.696.278
2	Dana Perimbangan	312.656.341.365	350.787.153.815	439.870.458.181	554.677.559.176	514.636.307.053	524.145.033.609
3	Lain-lain	5.937.143.146	7.546.654.568	12.119.569.871	11.159.226.915	29.323.694.717	37.958.321.686

Gambar 3.1.  
Grafik Porsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain terhadap  
Total Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2018

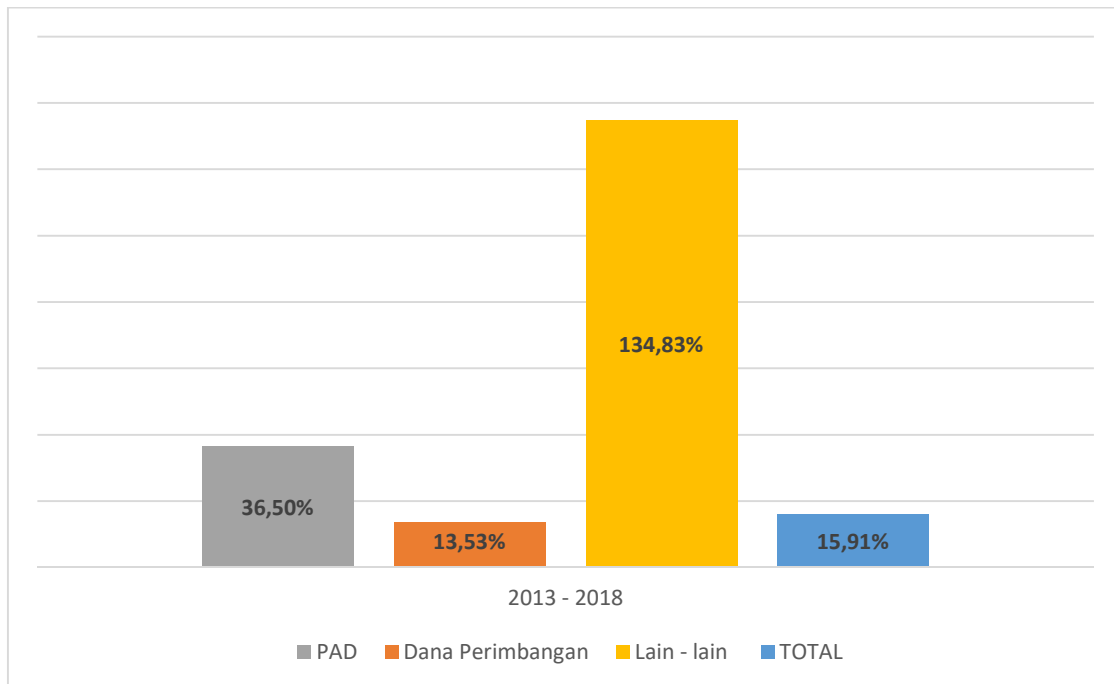


*Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)*

Dari Grafik diatas, terlihat bahwa kemampuan keuangan Kota Tual masih ditopang oleh dana perimbangan, sedangkan porsi PAD Kota Tual hanya berkisar 2,9%-4,6% dari total pendapatan daerah Kota Tual. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh komponen di Kota Tual untuk meningkatkan kemampuan PAD Kota Tual sehingga tidak terlalu bergantung kepada Dana Perimbangan.

Gambar 3.2.

Grafik Pertumbuhan Rata – Rata Pendapatan Daerah Kota Tual  
Tahun 2013 – 2018



Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Tual dimana terlihat total pertumbuhan sebesar 15,91% selama kurung waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2013–2018, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2010-2013 yakni sebesar 18,31%. Sedangkan pada komponen Pendapatan Lain-lain yang Sah pada tahun 2013 – 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan positif sebesar 134,83% dibandingkan tahun 2010 – 2013 yakni tercatat angka pertumbuhan negatif sebesar -123,57%.

## B. Belanja Daerah

Komponen belanja daerah Kota Tual terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

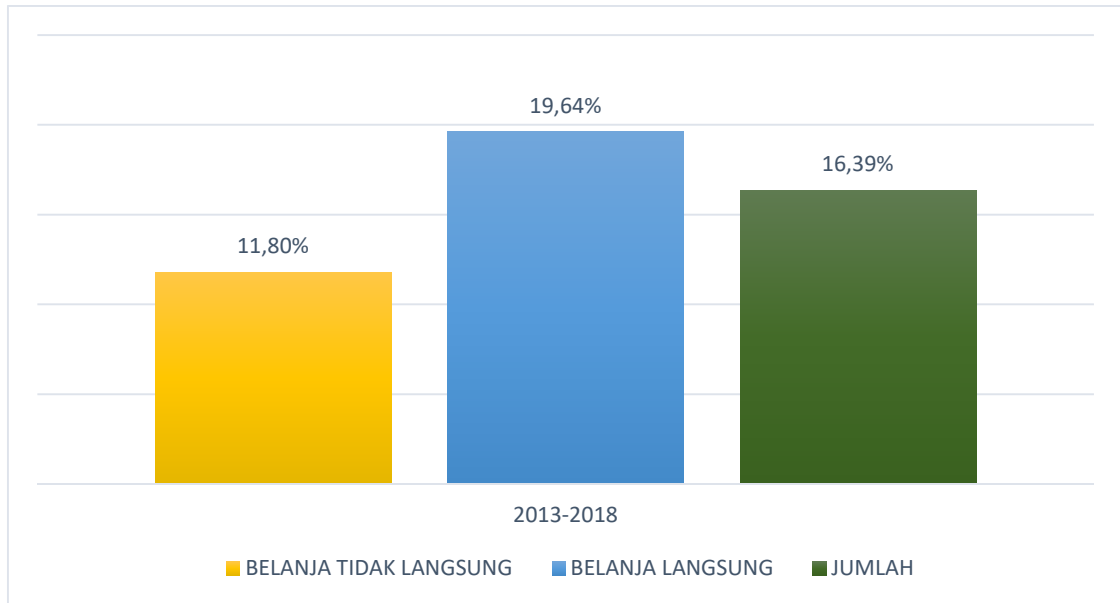
2. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal

Pada sisi belanja daerah selama 5 (lima) Tahun yakni tahun 2013 – 2018, Kota Tual mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penurunan belanja daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2013 – 2018 tercatat sebesar 16,39% dibandingkan dengan tahun 2010 – 2013 tercatat sebesar 25,02%. Sedangkan bila dilihat dari jenis belanjanya. Peningkatan tertinggi terjadi pada Belanja Langsung dimana pertumbuhan Belanja Langsung Kota Tual tahun 2013 – 2018 adalah sebesar 19,64% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2010 – 2013 tercatat sebesar 16,33%, sedangkan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Tual hanya pada tahun 2013 – 2018 sebesar 11,8% dibandingkan dengan tahun 2010 – 2013 sebesar 34,93%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja lebih banyak dialokasikan pada Belanja Langsung. Di masa depan, pertumbuhan Belanja Langsung harus dapat ditingkatkan agar pembangunan di Kota Tual dapat lebih dirasakan. Grafik 3.3 menunjukkan pertumbuhan rata-rata belanja Kota Tual per tahun selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Bila dilihat dari porsi masing-masing belanja terhadap total belanja daerah Kota Tual, Belanja Langsung memberikan porsi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, hal ini merupakan sebuah kondisi yang baik dimana alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan lebih besar.

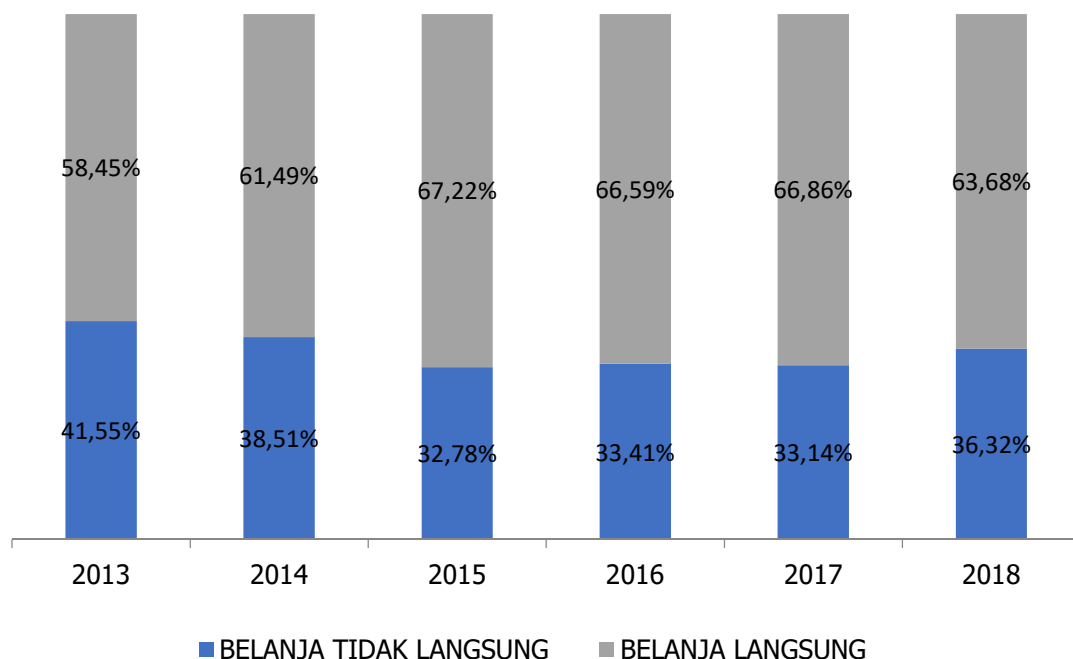


Gambar 3.3.  
Grafik Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Daerah  
Kota Tual Tahun 2013 – 2018



Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)

Gambar 3.4.  
Grafik Porsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  
terhadap Belanja Daerah Kota Tual  
Tahun 2013 – 2018



Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

#### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting

kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) aset tetap, dan (3) aset lainnya.

Tabel 3.2  
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Tual (Rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I</b>	<b>ASET</b>					
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>52.481.748,34</b>	<b>60.753.741.895,93</b>	<b>64.941.642.946,10</b>	<b>83.320.009.773,81</b>	<b>77.310.711.244,85</b>
1.1.1	Kas	46.626.615.879,66	50.364.868.045,79	55.463.161.141,18	70.793.679.764,48	69.696.211.204,36
2:01	Kas Di Bendahara Penerimaan	61.116.200,56	273.748.074,67	105.981.204,56	-	-
2:02	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.722.480.932,23	1.699.328.163,97	136.013.967,00	-	-
5.4.1	Kas Lainnya	-	-	198.119.324,30	-	-
2:01	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
1.1.2	Piutang	296.045.300,00	3.684.218.446,00	3.765.801.781,00	7.387.757.449,52	7.288.225.449,52
5.4.1	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	(376.540.504,91)	-	-
	Piutang Pajak Netto			3.389.262.276,09	-	-
2:01	Piutang Retribusi	348.164.700,00	563.501.950,00	903.386.200,00	-	-
5.4.1	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	609.572.250,03	-	-
	Piutang Retribusi Netto	-	-	293.813.949,97	-	-
5.4.1	Belanja Dibayar Dimuka			40.555.109,00	-	-
2:01	Piutang Dana Bagi Hasil	-	3.161.840.971,04	1.811.079.072	-	-
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	-	-	-	-	-
2:01	Piutang Lain-lain	126.766.550,00	332.969.479,00	142.795.287,00	2.343.802.805,06	2.358.895.805,06
5.4.1	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	(14.309.795,90)	-	-
	Piutang Lainnya Netto	-	-	128.485.491,10	-	-
5.4.1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	2.548.794.118,06	-	-
5.4.1	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	(509.758.823,61)	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	2.039.035.294,45	-	-
1.1.3	Persediaan	3.300.700.185,89	3.835.107.736,50	4.424.503.365,36	5.844.372.117,44	992.231.148,60
	Penyisihan Piutang	-	-	-	3.090.157.471,69	3.090.157.471,69
	Beban Bayar Dimuka	-	-	-	40.555.109,00	65.305.109,00

Sumber : BPKAD Kota Tual Tahun 2018;

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>7.258.000.000</b>	<b>8.258.000.000</b>	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	7.258.000.000	8.258.000.000	-	-
	Investasi Permanen					
<b>1.2</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>437.972.739.388,00</b>	<b>545.878.686.005,00</b>	<b>564.853.685.793,95</b>	<b>1.228.202.732.394,12</b>	<b>1.022.466.783.548,12</b>
1.2.1	Tanah	25.882.874.104,00	32.524.844.104,00	51.227.128.421,00	67.650.832.631,00	58.731.362.631,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin	108.804.664.543,00	133.416.936.008	153.645.892.458,87	206.027.359.887,65	178.219.300.153,65
1.2.3	Gedung dan Bangunan	138.048.195.219,92	168.441.780.405,92	245.816.493.826,92	374.986.802.674,40	281.876.589.612,40
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.280.057.987,84	170.109.890.937,84	267.626.926.555,84	528.291.131.682,84	455.953.069.532,84
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	6.153.703.040,00	6.521.439.078,00	811.749.840,00	5.223.275.440,00	1.663.131.540,00
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	12.803.244.493,24	34.863.795.471,24	35.052.937.113,24	46.023.330.078,24	46.023.330.078,24
5.4.1	Akumulasi Penyusutan	-	-	(189.327.442.421,92)	-	-
1.2.7	Dst...					
<b>1.2</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>16.094.544.544,00</b>	<b>193.581.308.266,31</b>	<b>30.814.066.022,73</b>	<b>29.847.263.289,78</b>	<b>29.847.263.289,78</b>
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-		
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.541.205.800,00	5.839.336.363,98	3.368.456.871,78	3.368.456.871,78	3.368.456.871,78
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	354.475.000,00	354.475.000,00	354.475.000,00
1.3.4	Aset tak berwujud	153.734.980,00	153.734.980,00	279.734.980,00	209.656.980,00	209.656.980,00
2:04	Aset Lain-lain	14.354.603.764,00	187.588.236.922,33	26.811.399.170,95	25.914.674.438,00	25.914.674.438,00
1.3.5	Dst...					
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>513.004.173.680,34</b>	<b>807.471.736.167,24</b>	<b>668.867.394.762,77</b>	<b>1.341.370.005.457,72</b>	<b>1.129.624.758.082,76</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>3.079.849.654,80</b>	<b>3.297.039.028,05</b>	<b>14.276.088.077,00</b>	<b>7.180.094.797,00</b>	<b>1.910.982.473,13</b>
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	196.984.774,80	494.934.148,05	104.380.537,00	80.162.070,00	-
2.1.2	Utang muka dari kas daerah	-	-	-	716.862.417,00	-
2.1.3	Pendapatan diterima uang muka	-	-	-	-	289.819.763,13
	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.882.864.880,00	2.802.104.880,00	4.597.973.480,00	1.621.162.710,00	1.621.162.710,00
	Utang Beban	-	-	9.573.734.060,00	4.761.907.600,00	-
2.1.4	Dst...					
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>11.533.989.211,00</b>	<b>11.918.269.211,00</b>	<b>14.577.544.475,00</b>	<b>15.925.334.475,00</b>	<b>15.925.334.475,00</b>
	Utang Dalam Negeri	11.533.989.211,00	11.918.269.211,00	14.577.544.475,00	15.925.334.475,00	15.925.334.475,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>49.402.040.093,54</b>	<b>15.215.308.239,05</b>	<b>28.853.632.552,00</b>	<b>23.105.429.272,00</b>	<b>17.836.316.948,13</b>

Sumber : BPKAD Kota Tual Tahun 2018;

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>					
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>49.402.040.093,54</b>	<b>60.618.543.838,92</b>	-	<b>76.109.591.273,70</b>	<b>75.344.532.566,61</b>
3.1.1	SILPA	48.151.443.832,79	51.893.605.112,38	-	70.464.753.896,11	69.157.505.140,86
3.1.2	Cadangan piutang	770.976.550,00	7.742.530.846,04	-	6.681.939.891,89	6.597.500.891,89
3.1.3	Cadangan persediaan	3.300.700.185,89	3.835.107.736,50	-	5.844.372.117,44	992.231.148,60
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	- 2.882.864.880,00	- 2.852.699.856,00	-	- 7.099.942.382,00	- 2.338.034.782,00
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	61.784.404,86	-	-	218.467.750,26	935.330.167,26
3.1.4	Dst...					
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>448.988.294.721,00</b>	<b>734.799.725.060,31</b>	-	<b>1.042.721.210.694,90</b>	<b>1.248.457.159.540,90</b>
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	6.500.000.000,00	7.258.000.000,00	-	8.258.000.000,00	8.258.000.000,00
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	437.972.739.388,00	545.878.686.005,00	-	1.020.582.323.838,12	1.226.318.272.684,12
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	16.049.544.544,00	193.581.308.266,31	-	29.806.221.331,78	29.806.221.331,78
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	(11.533.989.211)	- 11.918.269.211,00	-	- 15.925.334.475,00	- 15.925.334.475,00
3.2.3	Dst...					
	KOREKSI EKUITAS				-	24.750.000,00
	Koreksi Ekuitas				-	24.750.000,00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>498.390.334.814,54</b>	<b>60.618.543.838,92</b>	<b>643.102.128.460,14</b>	<b>1.118.830.801.968,60</b>	<b>1.323.801.692.107,51</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>513.004.173.680,34</b>	<b>75.833.852.077,97</b>	<b>671.955.761.012,14</b>	<b>1.141.936.231.240,60</b>	<b>1.341.638.009.055,64</b>

Sumber : BPKAD Kota Tual Tahun 2018;

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.5). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah :

1. Current Ratio (rasio lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kota Tual berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tual dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. Quick Ratio (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.5, Rasio Cair, Pemerintah Kota Tual capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset

yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kota Tual tergolong kecil, yaitu Rp. 14.613.838.865,80 pada tahun 2013 dan Rp. 17.836.316.948,13 pada tahun 2017. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur.

Hasil analisis terhadap current ratio dan quick ratio atas keuangan Pemerintah Kota Tual menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Tual relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tual dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Pada



pemerintahan daerah, Rasio Aktivitas terdiri dari perhitungan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

#### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Kebijakan pengelolaan keuangan dimasa lalu mengalokasikan pengeluaran bagi aparatur pada kisaran 30% hingga 26%. Hal tersebut terlihat dari sisi belanja aparatur, selama kurung waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, telah terjadi penurunan belanja yang bersifat pemenuhan kebutuhan aparatur dimana pada tahun 2015 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebesar 30,19% dan terjadi penurunan menjadi 28,85% pada tahun 2016 hingga pada tahun 2017 turun menjadi 26,16%. Tabel 3.6 menunjukkan porsi belanja untuk pemenuhan aparatur Kota Tual selama tahun 2015 hingga tahun 2017.

Sedangkan dari sisi neraca keuangan, selama kurun waktu tahun 2010-2013, Pemerintah Kota Tual menerapkan anggaran defisit, hal tersebut terlihat dari nilai defisit anggaran tahun 2015 hingga tahun 2017 pada tabel 3.3.2 sebagai berikut.

Tabel. 3.3.  
Porsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tual  
Tahun 2015 – 2017

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp)</b>	<b>Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d)</i>	<i>(e)</i>
1.	Tahun Anggaran 2015	166.380.644.557,-	551.100.633.944,-	30,19
2.	Tahun Anggaran 2016	192.477.364.264,-	667.159.150.811,-	28,85
3.	Tahun Anggaran 2017	191.672.942.303,-	732.739.838.020,-	26,16

*Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)*

Tabel 3.4.  
Defisit Anggaran Kota Tual Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	342.876.710.798,51	396.585.115.322,59	493.224.516.956,36	606.207.858.006,44	635.864.983.900,40
2	Belanja Daerah	344.987.273.874,00	392.842.954.043,00	487.049.447.261,00	590.522.512.627,33	637.172.232.655,65
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-
	Defisit	(2.110.563.075,49)	3.742.161.279,59	6.175.069.695,36	15.685.345.379,11	(1.307.248.755,25)

*Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)*

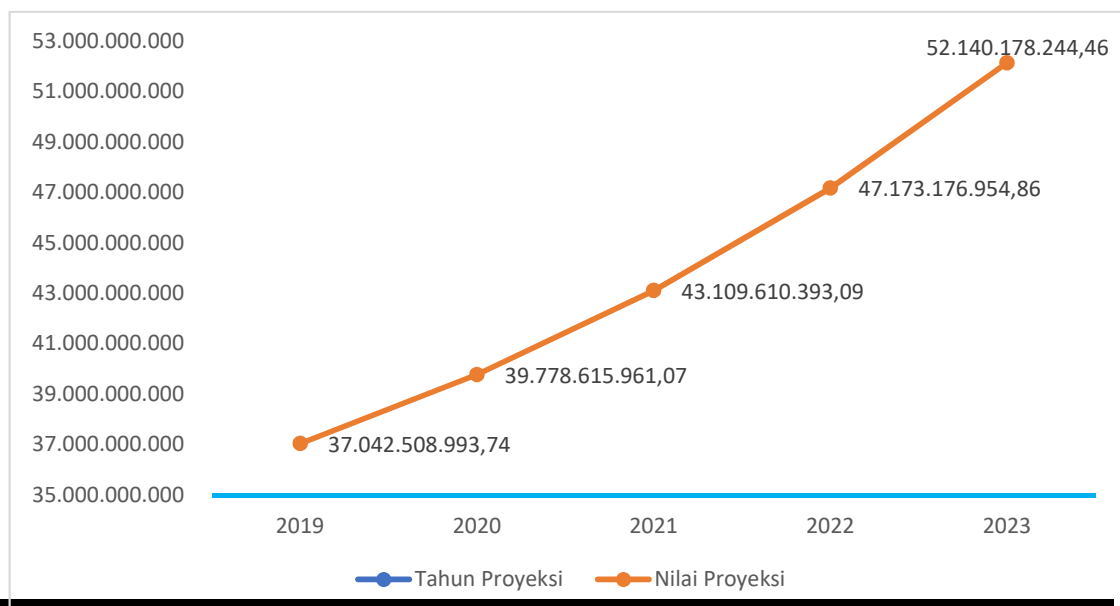
### 3.3. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan

#### A. Pendapatan

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Tual tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 3.5. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah ini disusun dengan memperhatikan pertumbuhan pendapatan Kota Tual selama beberapa tahun ke belakang juga potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kota Tual selama lima tahun ke depan.

Sebagai daerah otonom, disadari bahwa kemampuan fiskal Kota Tual masih cukup terbatas, oleh karena itu dalam kebijakan pengelolaan pendapatan dalam kurung waktu lima tahun ke depan yakni tahun 2019 – 2023, Pemerintah Daerah Kota Tual berusaha mencapai porsi PAD sebesar 4,83% dari total pendapatan daerah pada tahun 2023 untuk semakin meningkatkan kemampuan keuangan Kota Tual. Untuk mencapai hal tersebut, maka harus dapat dicapai pertumbuhan PAD sebesar 26,83% setiap tahun dengan asumsi pertumbuhan komponen pendapatan dari dana perimbangan sebesar 11,82% dan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 57,72%.

Gambar 3.5.  
Grafik Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Tual  
Tahun 2019 – 2023



*Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)*

Dalam proyeksi ini, direncanakan pada tahun 2023 nilai PAD Kota Tual adalah sebesar Rp. 52.140.178.244,46,-, sedangkan total pendapatan daerah Kota Tual pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai Rp. 959.745.593.046,73.-

Untuk mencapai proyeksi diatas, beberapa kebijakan yang akan dilakukan dimasa depan antara lain adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, terutama pada pos BPHTB dan PBB.
2. Pembaruan besaran NJOP yang sudah lama belum direvisi;
3. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
4. Pemanfaatan pasar rakyat yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Tual;
5. Pengembangan lahan untuk peti kemas;
6. Pembebasan Lahan Amir dan Ahmad Tamherwarin di untuk pengembangan pasar;
7. Pengembangan home industry di Sentra Industri Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah khususnya sektor perikanan secara lebih profesional dan *marketable*;
9. Optimalisasi promosi daerah untuk peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata.

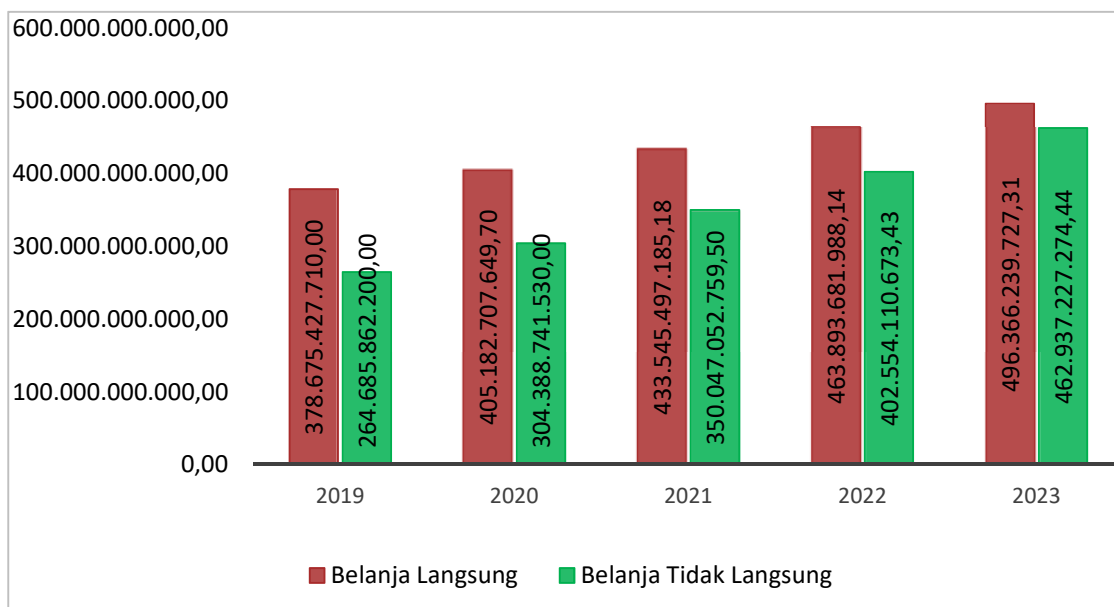
## **B. Belanja**

Penyusunan proyeksi belanja daerah Kota Tual dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan pendapatan Kota Tual selama lima tahun ke depan dan juga kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam menutupi defisit anggaran yang mungkin terjadi. Namun kebijakan fiskal daerah selama lima tahun ke depan diarahkan agar tidak terjadi defisit penganggaran

pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, belanja daerah Kota Tual disusun dengan menggunakan asumsi pertumbuhan yang sama dengan yang terjadi pada pendapatan daerah Kota Tual yaitu pertumbuhan sebesar 7% setiap tahun untuk masing-masing komponen belanja.

Atas dasar kebijakan perencanaan penganggaran diatas, belanja daerah Kota Tual pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 959.303.467.001,75.- Proyeksi belanja daerah Kota Tual dapat dilihat pada Gambar 3.6.

**Gambar 3.6.**  
**Grafik Proyeksi Belanja Daerah Kota Tual**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BAPPEDA Kota Tual, Tahun 2018 (diolah)

### C. Pembiayaan

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja (*balance budgetting*), sehingga semaksimal mungkin defisit anggaran dihindarkan. Namun, dalam perhitungan yang terjadi, defisit anggaran akan terjadi mengingat porsi PAD yang masih cukup kecil terhadap total pendapatan daerah. Sehingga, dalam kebijakan defisit anggaran selama lima tahun ke depan, nilai defisit diusahakan untuk berada

dibawah angka 8% walaupun secara fiskal hal tersebut memiliki resiko yang cukup besar terhadap pengelolaan keuangan daerah. Rata-rata Proyeksi Porsi Defisit anggaran berada pada angka 1,19% sampai 6,87% periode tahun 2019 – 2023. Pada posisi inilah, defisit anggaran mencapai angka yang ideal bagi Kota Tual sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan diperlukan untuk menutupi defisit yang terjadi, pembiayaan dialokasikan untuk menutup defisit anggaran berjalan, dan arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan dengan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah.

Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah dengan pertumbuhan yang lebih rendah yaitu 0,15% per tahun.

Namun dalam rencana pengelolaan pembiayaan, tidak dimungkinkan untuk melakukan penerimaan pembiayaan melalui SILPA dikarenakan proyeksi penerimaan dan belanja daerah menunjukkan kebutuhan belanja selalu lebih besar dari penerimaan, sehingga pendapatan pembiayaan diutamakan diperoleh dari laba investasi jangka pendek dan jangka panjang, hasil investasi aset, pembayaran piutang daerah, maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang dimungkinkan untuk diperoleh. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk melakukan pembiayaan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang, investasi pada aset tetap, alokasi dana cadangan daerah, serta pembayaran utang dan defisit daerah.

Oleh karena itu, di dalam kebijakan pembiayaan Kota Tual di masa depan, Pemerintah Kota Tual akan berusaha untuk mengurangi rasio defisit anggaran yang terjadi seiring dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



Tabel 3.5.

## Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2019-2023

<b>PENDAPATAN</b>		<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2023 (Rp)</b>
1.	P A D	37.042.508.993,74	39.778.615.961,07	43.109.610.393,09	47.173.176.954,86	52.140.178.244,46
2.	DANAPERIMBANGAN	511.900.360.400,00	554.976.762.262,00	594.970.209.144,96	628.521.556.781,71	650.176.403.485,16
3.	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93.050.153.100,00	113.326.016.898,09	143.551.434.307,06	188.789.828.956,74	256.729.011.317,11
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>641.993.022.493,74</b>	<b>708.081.395.121,16</b>	<b>781.631.253.845,11</b>	<b>864.484.562.693,31</b>	<b>959.045.593.046,73</b>
<b>BELANJA</b>		<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2023 (Rp)</b>
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	264.685.862.200,00	304.388.741.530,00	350.047.052.759,50	402.554.110.673,43	462.937.227.274,44
2.	BELANJA LANGSUNG	378.675.427.710,00	405.182.707.649,70	433.545.497.185,18	463.893.681.988,14	496.366.239.727,31
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>643.361.289.910,00</b>	<b>709.571.449.179,70</b>	<b>783.592.549.944,68</b>	<b>866.447.792.661,57</b>	<b>959.303.467.001,75</b>

Sumber : BAPPEDA Kota Tual Tahun 2018 (Diolah)

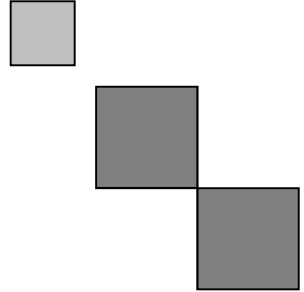
Tabel 3.6.

## Proyeksi Pembiayaan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2019-2023

KOMPONEN		PROYEKSI PEMBIAYAAN				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	PENDAPATAN	641.993.022.493,74	708.081.395.121,16	781.631.253.845,11	864.484.562.693,31	959.045.593.046,73
2.	BELANJA	643.361.289.910,00	709.571.449.179,70	783.592.549.944,68	866.447.792.661,57	959.303.467.001,75
	DEFISIT/SURPLUS	(1.368.267.416,26)	(1.490.054.058,54)	(1.961.296.099,56)	(1.963.229.968,26)	(257.873.955,02)
3.	PEMBIAYAAN (NETTO)	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pembiayaan	(1.368.267.416,26)	(1.490.054.058,54)	(1.961.296.099,56)	(1.963.229.968,26)	(257.873.955,02)
	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

Sumber : BAPPEDA Kota Tual Tahun 2018 (Diolah)





# BAB IV

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah secara umum muncul oleh adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak dapat diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan Kota Tual diuraikan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tual Tahun 2013-2018 dan sesuai dengan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun permasalahan pembangunan Kota Tual, sebagai berikut:

##### **4.1.1 Permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi;  
Kota Tual jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Maluku pada tahun 2016 berada pada urutan ke-7 dengan persentase 24,74% dari semua jumlah penduduk Kota Tual. Sedangkan pada tahun 2017 persentase kemiskinan di Kota Tual mencapai 24%, hal ini menunjukkan bahwa secara persentase mengalami penurunan namun tidak terlalu berdampak signifikan olehnya itu, terkait kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang perlu ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah Kota Tual maupun semua elemen masyarakat yang ada di Kota Tual.
- 2) Kurangnya lapangan kerja;  
Masih tingginya angka pengangguran di Kota Tual, hal ini disebabkan karena salah satu faktor yaitu penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah pencari kerja tiap tahun meningkat

sedangkan ketersediaan lapangan kerja di Kota Tual masih kurang, perkembangan rasio penduduk yang bekerja menunjukkan pertumbuhan yang menurun periode 2013-2017, pada tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja adalah 91,52% menurun menjadi 83,51% pada tahun 2017. Yang berarti terdapat 16,49 persen penduduk angkatan kerja belum memiliki lapangan pekerjaan atau sebanyak 4474 jiwa. Hal ini dapat memicu tingginya angka pengangguran. Terdapatnya ketimpangan antara penawaran kerja dengan kebutuhan;

3) Pendapatan daerah masih rendah;

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi meningkat dari Rp 1.770.436.065 pada tahun 2013 menjadi Rp 3.680.405.430, dan juga retribusi pada tahun 2017 sebesar Rp 4.533.086.825 meningkat dari tahun sebelumnya masih kurang di optimalkan, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan menemukan potensi asli daerah dan kepatuhan, kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah juga rendahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah;

4) Tata kelola pemerintahan masih lemah;

Penataan kelembagaan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Kelembagaan pemerintah daerah telah dibentuk berdasarkan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 namun hal pengisian jabatan-jabatan struktural organisasi perangkat daerah masih belum efektif terisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dituntut oleh jabatan-jabatan tersebut, sehingga integritas dan kinerja beberapa SKPD belum dapat dimaksimalkan;

Tata kelola pemerintahan masih lemah, hal ini terlihat dengan adanya beberapa indikator yang masih belum tercapai dengan baik diantaranya partisipasi/keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan masih rendah. Selain itu masih terdapatnya penyimpangan penggunaan

anggaran yang kurang tepat, kebijakan publik yang belum efektif, kepastian hukum serta rendahnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan yang mana mekanisme koordinasi yang baik tentunya tidak menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

- 5) Rendahnya pemenuhan kebutuhan air baku, air limbah dan sanitasi lingkungan;

Akses pemenuhan air baku di Kota Tual secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu dengan presentasi 21,84% menjadi 42,1% pada tahun 2018 dari total populasi sebanyak 86.531 jiwa, peningkatan pemenuhan akses air baku bagi warga harus di tingkatkan agar ketersediaan air bersih dapat mencangkup seluruh warga Kota Tual terutama pada wilayah hinterland (kepulauan);

Pada periode tahun 2013-2017 pada presentasi rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan dengan nilai presentase 67.82% pada tahun 2013 menjadi 40.23% pada tahun 2017. Penyediaan akses pemenuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik diharapkan dapat terus di tingkatkan dalam pemenuhan kualitas hidup masyarakat di Kota Tual.

- 6) Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas dan akses layanan kesehatan;

Pelaksanaan program pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Tual masih belum memberikan hasil yang mengembirakan, dari index pembangunan manusia (IPM) ada 3 komponen mencakup umur, kesehatan, pengetahuan yang menjadi standar hidup layak. Pencapaian IPM Kota Tual termasuk dalam kategori menengah kebawah dengan presentasi pada tahun 2013 sebesar 64,16% meningkat menjadi 66.25% pada tahun 2017;



Perbandingan rata-rata lama sekolah penduduk dari (SD-SMP/MTs), Kota Tual dengan kota/kabupaten lain di Maluku berada pada urutan 2 dengan presentasi 9,42 pada tahun 2012 meningkat menjadi 9.76 pada tahun 2016 diharapkan ada peningkatan jumlah rata-rata pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan Universitas hingga Universitas.

Angka harapan hidup (AHH) yaitu rata-rata lama hidup yang dihitung menurut umur merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah karena semakin panjang usia seseorang, dapat diasumsikan semakin baik kesehatannya. Usia harapan hidup dapat digunakan untuk sebagai patokan untuk mengukur & meningkatkan kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Kota Tual mempunyai usia harapan hidup rata-rata 64,61 tahun. Angka ini masih di bawah Kota Ambon dan Nasional. Angka harapan hidup tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan harapan usia hidup sebesar 0.27 per tahun. Pada tahun 2013, AHH Kota Tual sebesar 69,41 tahun yang menurun menjadi 63,76 tahun pada tahun 2014 kemudian meningkat menjadi 64,06 pada tahun 2015. Tahun 2016 AHH meningkat menjadi 64,33 tahun dan pada tahun 2017 terjadi mencapai sebesar 64,61 tahun.

- 7) Rendahnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota;

Luas RTH publik yang tersedia 2808ha tahun 2013 menjadi 2789ha tahun 2017 dengan presentasi pertumbuhan -0,17%, namun penyediaan RTH masih di luar target yang diinginkan yaitu 20% karena perubahan ruang publik yang tidak sesuai dengan

peruntukannya, oleh karena itu diharapkan adanya peningkatan RTH publik di Kota Tual.

Peningkatan bangunan yang ber IMB masih kecil dari 31 unit di menjadi 25 unit yang ber IMB dari total 13886 unit, pada tahun 2013 rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan adalah 0,21 menjadi 0,18, secara umum perencanaan dan pemanfaatan tata ruang Kota Tual masih terkendala dengan perijinan ketaatan pada RTRW;

- 8) Masih minimnya kinerja transportasi, terutama transportasi laut antar pulau;

Jumlah pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tual yang melayani wilayah kepulauan kini menjadi 5 dari 3 dermaga pada tahun 2013 dengan jumlah dermaga sebanyak 1, pemenuhan fasilitas dalam penunjang kinerja transportasi laut masih kurang dibandingkan dengan jumlah penumpang yang semakin meningkat, selain faktor cuaca yang secara langsung mempengaruhi akses dan kinerja pelayaran;

- 9) Kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; Kontribusi pertanian terhadap PDRB 0,80% pada tahun 2013 menurun menjadi 0,72 di tahun 2017 hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang sebelumnya berada pada sektor pertanian menjadi pemukiman,

- 10) Produksi pertanian, perikanan dan pengelolaan pariwisata yang belum optimal;

Pada nilai produksi meningkat perikanan 66.33% pada tahun 2013 menjadi 69.71% di tahun 2017, kenaikan produksi perikanan tidak terlalu signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kecukupan protein dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kontribusi sektor pertanian pada PDRB mengalami penurunan dari 3,53% di tahun 2014 menjadi 3,24 % di tahun 2017, hal ini disebabkan oleh faktor cuaca, peralihan tata guna lahan dll,

- 11) Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum belum stabil;  
Jumlah Satpol PP yang melayani masih kurang 1 orang personil bertugas menangani 511-512 jiwa penduduk Kota Tual. Perkembangan tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) mengalami penurunan dari 60% pada tahun 2014 menjadi 44,44 % pada tahun 2017
- 12) Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya hayati makin menurun.  
Pemenuhan infrastruktur untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan belum tersedia fasilitas pengurangan sampah dan Presentasi cakupan pelayanan area persampahan yang masih kurang yaitu 10,20% pada tahun 2017 dari 8,24% pada tahun 2013.
- 13) Kurangnya Sumberdaya Manusia;  
Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah masih rendah. SDM aparatur di Kota Tual masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- 14) Persampahan  
Pemenuhan infrastruktur untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan belum tersedia fasilitas pengurangan sampah berupa 3R pada sumber sampah; cakupan penerapan sistem penanganan sampah diperkotaan masih di ruas-ruas jalan utama belum mencakup jalan-jalan lingkungan; dan belum adanya tempat pembuangan akhir karena permasalahan pembebasan lahan; serta akses informasi lingkungan hidup kepada masyarakat juga masih kurang,
- 15) Limbah pencemaran laut.  
Kurangnya pemenuhan infrastruktur limbah secara terpadu pada wilayah pesisir, pelayanan sampah pada pemukiman padat pesisir terkendala dengan akses jalan lingkungan yang sulit di lewati oleh

Truck sampah, kesadaran akan dampak pencemaran oleh sampah rumah tangga masih kecil.

16) Mitigasi dan adaptasi bencana

Masih kurangnya program perencanaan daerah yang berhubungan dengan mitigasi bencana terutama pada wilayah pesisir dengan kerentanan lebih tinggi, selain itu kurangnya informasi tentang bencana dan dampak bagi masyarakat serta mitigasi dan adaptasi

#### **4.1.2 Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.**

##### **A. Layanan Urusan Wajib Dasar.**

###### **1) Pendidikan**

- a. Partisipasi pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat di pulau-pulau;
- b. Kualitas hasil lulusan masih rendah.
- c. Distribusi dan jumlah tenaga pendidik (guru) dan kependidikan tidak merata ke sekolah-sekolah terutama sekolah yang berada di daerah terpencil;
- d. Masih rendahnya kompetensi guru;
- e. Kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan masih kurang;
- f. Rendahnya minat baca peserta didik di satuan pendidikan;
- g. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan terutama di wilayah pulau-pulau;
- h. Rendahnya akses pelayanan pendidikan.
- i. Kurangnya koordinasi pemerintah provinsi pada jenjang pendidikan menengah.

###### **2) Kesehatan**

- a. Distribusi fasilitas kesehatan tidak merata di masing-masing kecamatan terutama di daerah terpencil dan belum memiliki aksesibilitas yang baik;

- b. Angka kematian ibu melahirkan dan anak masih tinggi;
- c. Kasus gizi buruk masih tinggi;
- d. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
- e. Kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi) permukiman penduduk masih rendah;
- f. Rendahnya kualitas SDM kesehatan;
- g. Minimnya fasilitas berupa alat-alat kesehatan yang sesuai standar terutama wilayah kecamatan kepulauan;
- h. Minimnya aksesibilitas pasien masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan terutama wilayah kecamatan kepulauan;
- i. Kurangnya SDM tenaga kesehatan, medis, paramedis dan non kesehatan di RSUD Maren;
- j. Aksesibilitas menuju ke RSUD Maren belum terjangkau trayek.

### **3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Terbatasnya akses air bersih.
- b. Belum optimalnya ketersediaan air baku, air limbah dan drainase;
- c. Kondisi jalan, jembatan dan drainase belum sepenuhnya baik sesuai dengan kapasitas jalan;
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi;
- e. Rendahnya sertifikasi tenaga jasa konstruksi;
- f. Kebutuhan akan perumahan di perkotaan makin meningkat, menyebabkan alih fungsi lahan tidak terbandung;
- g. Rencana tata ruang wilayah Kota Tual belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat hal ini menyebabkan ruang publik berubah peruntukkan.

#### **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

- a. Masih banyak penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat keterbatasan pembiayaan perumahan;
- b. Kurangnya penataan kawasan permukiman dan rendahnya kualitas permukiman padat penduduk;
- c. Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki prasarana dan utilitas umum yang memadai;

#### **5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.**

- a. Masih rendahnya kompetensi anggota (Polisi Pamong Praja) dalam pelayanan;
- b. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
- c. Keterbatasan sarana prasarana dalam penanganan pelanggaran K3;
- d. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan masih rendah;
- e. Masih kurangnya pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi;
- f. Masih kurangnya kemandirian dan kinerja bidang politik;
- g. Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan konflik sosial seperti huru hara;
- h. Belum optimalnya pelayanan terkait bencana kebakaran.
- i. Rendahnya kuantitas dan kualitas sdm PNS

#### **6) Sosial**

- a. Meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan seperti narkoba, miras dan HIV/AIDS;
- b. Ketersediaan data base terkait kemiskinan, PMKS dan PSKS belum baik;
- c. Belum optimalnya masyarakat miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial;
- d. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terjangkau dan menerima manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan;
- e. Penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat guna pengurangan resiko bencana belum optimal;
- f. Belum adanya panti rehabilitasi untuk penanganan masalah sosial;
- g. Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan terhadap disabilitas.

## **B. Layanan Urusan Wajib Bukan Dasar**

### **1) Tenaga kerja**

- a. Tingkat pengangguran masih tinggi;
- b. Kurangnya database ketenagakerjaan daerah;
- c. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis kompetensi;
- d. Penyerapan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal masih rendah;
- e. Belum adanya gedung dan sarana prasarana BLK sebagai tempat untuk peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat;
- f. Ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai untuk menunjang jumlah angkatan kerja yang tinggi.
- g. Belum terbangunnya kantor PTSP yang memadai dalam melaksanakan pelayanan secara terpadu.

## **2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Kesejahteraan dan perlindungan anak masih rendah, kualitas anak dan perempuan belum optimal;
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki;
- c. Penanganan kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal;
- d. Belum adanya tenaga konselor hukum dan tenaga konseling terkait penanganan kasus perempuan dan anak;
- e. Pengharus Utama Gender (PUG) belum optimal.

## **3) Pangan**

- a. Kurangnya ketersediaan bahan pangan lokal;
- b. Rendahnya konsumsi protein dan energi.
- c. Belum adanya pemetaan terkait potensi wilayah kerawanan pangan;
- d. Masih rendahnya produksi pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai pangan pokok;
- e. Belum memiliki kelompok binaan terkait pengolahan bahan lokal;
- f. Belum tersedia Penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan;

## **4) Pertanahan**

- a. Manajemen administrasi pertanahan masih belum tertata dengan baik;
- b. Masih terdapatnya tumpang tindih kepemilikan lahan;
- c. Belum adanya data terkait kejelasan status kepemilikan lahan;
- d. Belum maksimalnya penyelesaian konflik tanah.

## **5) Lingkungan Hidup**

- a. Kurang optimalnya penanganan terkait persampahan Kota;
- b. Belum adanya pengembangan teknologi pengolahan sampah;



- c. Penanganan sampah khususnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya belum dilakukan;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dan membuangnya ke tempat sampah;
- e. Kualitas air makin menurun, kualitas udara (polusi) makin meningkat terutama dalam Kota;
- f. Tingginya kerusakan sumber daya alam daerah pesisir dan pulau kecil;
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

#### **6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP;
- b. Belum optimalnya tertib administrasi dan pencatatan data kependudukan;
- c. Masih terdapat bayi yang belum memiliki Akte kelahiran;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan.

#### **7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Masih banyaknya desa tertinggal dan desa berkembang;
- b. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga Desa dengan Pemerintahan Desa;
- c. Masih lemahnya SDM aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa;
- d. Minimnya pendampingan dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan penyertaan modal bagi kelompok usaha ekonomi Desa;
- e. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
- f. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok-kelompok usaha ekonomi desa dan rendahnya pemanfaatan dana desa bagi usaha ekonomi masyarakat;

- g. Pemanfaatan potensi desa dan pengembangan sesuai dengan karakteristik daerah belum optimal;
- h. Kurangnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan desa dengan program kegiatan pemerintah kota serta OPD terkait;
- i. Belum tersedianya data profil desa (luas dan batas definitif) yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan MusrenbangDes dan penyusunan RPJMDes.
- j. Status Desa adat belum diakui

#### **8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Minimnya tenaga penyuluh KB yang memiliki kompetensi bidang kesehatan khususnya reproduksi dan keluarga berencana;
- b. Akses masyarakat miskin terhadap alat KB masih rendah;
- c. Tingginya angka kelahiran menyebabkan tingginya angka kemiskinan;
- d. Kesadaran ber-KB dalam masyarakat masih rendah;
- e. Masih tingginya keluarga pra-sejahtera.

#### **9) Perhubungan**

- a. Jumlah trayek belum mencakup semua kawasan pemukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru;
- b. Pengelolaan terhadap rute dan pemberhentian (halte) bagi angkutan umum belum tertata dengan baik;
- c. Jumlah terminal sebagai sarana pelayanan transportasi darat belum memadai;
- d. Pengelolaan terhadap area parkir pada sepadan jalan belum tertata dengan baik;
- e. Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas, pagar pengaman maupun ketersediaan marka jalan yang memadai;
- f. Kurangnya fasilitas pelabuhan Feri;
- g. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan belum memadai;

- h. Angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan masih sedikit;
- i. Moda transportasi untuk wilayah kecamatan kepulauan belum memadai;
- j. Aksesibilitas ke daerah terpencil khususnya kecamatan kepulauan belum memiliki pelabuhan laut.
- k. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang KIR dan tambat labuh

#### **10) Komunikasi dan Informatika**

- a. Masih terdapatnya daerah yang belum terakses telekomunikasi;
- b. Akses informasi yang belum optimal (internet cepat) dan cakupannya belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Tual;
- c. Belum optimalnya pelayanan terkait penyebarluasan informasi pembangunan;
- d. Teknologi, informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk pelayanan publik belum optimal.
- e. Proporsi rumah tangga dengan akses internet masih rendah.

#### **11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Ketersediaan koperasi aktif yang cukup berkualitas masih sedikit;
- b. Rendahnya minat masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan koperasi;
- c. Kurangnya peran aparat pemerintahan dalam pembinaan koperasi;
- d. Kerja sama antar koperasi, UKM dan lembaga keuangan (perbankan) belum terlaksana;
- e. UKM Non BPR/LKM yang aktif masih sedikit;
- f. BPR/LKM yang aktif masih sedikit;
- g. Pengembangan UKM belum didukung dengan optimalisasi peningkatan SDM para pelaku usaha;
- h. Kurangnya inovasi, penelitian dan pengembangan produk.

## **12) Penanaman Modal**

- a. Masih rendahnya minat investor nasional dan asing;
- b. MOU terkait kerjasama investasi masih kurang;
- c. Rendahnya investasi terutama bidang industri kecil dan padat karya;
- d. Integrasi kerja antar sektor dalam mendukung pelaksanaan investasi belum optimal;
- e. Koordinasi lintas sektor terkait dalam penanganan perizinan daerah masih lemah;
- f. Layanan perizinan belum efisien dan terintegrasi;
- g. Ketersediaan sumber daya aparatur masih rendah.

## **13) Kepemudaan dan Olah Raga**

- a. Fasilitas untuk menampung aktivitas dan kreativitas kepemudaan tidak tersedia;
- b. Rendahnya perhatian terhadap olah raga prestasi;
- c. SDM bidang olahraga (pembina, pelatih dan olahragawan) masih kurang baik kuantitas maupun kualitas;
- d. Masih terbatasnya upaya pembibitan untuk atlet berprestasi dan unggul.
- e. Masih minim pemahaman masyarakat akan pentingnya olahraga;
- f. Belum adanya pembinaan bagi wirausaha muda dan organisasi olah raga serta atletnya;
- g. Koordinasi antar Lembaga-Lembaga dengan Dinas terkait dalam pembinaan bidang keolahragaan;
- h. Belum tersedianya database tentang kepemudaan.

## **14) Statistik**

- a. Masih lemahnya sistem pendataan dan pelaporan data
- b. Masih kurangnya akurasi data;
- c. Masih terlambatnya penyusunan dokumentasi dan publikasi daerah;
- d. Kurangnya koordinasi antar dinas dalam menyediakan data-data terkait statistik;

#### **16) Kebudayaan**

- a. Belum optimalnya pelestarian seni dan nilai-nilai budaya;
- b. Belum adanya penyelenggaraan event budaya dan seni;
- c. Minimnya organisasi/komunitas kesenian dan budaya;
- d. Kurangnya pembinaan terhadap organisasi/komunitas kesenian dan budaya;
- e. Belum tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan seni & budaya daerah;
- f. Lemahnya manajemen grup kesenian dan belum terorganisir dengan baik;
- g. Belum adanya kurikulum muatan lokal yang baku di sekolah.

#### **17) Perpustakaan**

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk kantor belum memadai;
- b. Belum adanya regulasi (PERDA,PERWALI) terkait perpustakaan;
- c. Minimnya minat baca masyarakat;
- d. Kurangnya ketersediaan koleksi buku dan judul buku;
- e. Kurangnya sosialisasi terkait minat baca;
- f. Tidak ada pustakawan, tenaga teknik dan penilai yang bersertifikat;
- g. Belum optimalnya pengelolaan pustaka.

#### **18) Kearsipan**

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan belum ada;
- b. Kurangnya perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku;

- c. Masih minimnya tenaga arsiparis;
- d. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan kearsipan.

### **C. Layanan Urusan Pilihan**

#### **1) Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum adanya data base terkait perikanan;
- b. Belum optimalisasi potensi perikanan sebagai daya gerak untuk ekonomi daerah yang berkelanjutan;
- c. Masih terbatasnya sumber daya aparatur bidang perikanan (tenaga penyuluh/pendamping) dalam pengelolaan hasil budidaya dan tangkapan;
- d. Masih terbatasnya sarana prasarana penangkapan ikan dan pengelolaan hasil tangkapan bagi nelayan;
- e. Belum adanya rencana dan pemetaan potensi areal budidaya (misalnya: Areal penangkapan);
- f. Pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan yang belum tepat sasaran (perencanaan tidak sesuai kebutuhan tetapi masih bersifat keinginan);
- g. Rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, dan terbatasnya akses pemasaran;
- h. Masih banyak nelayan yang termasuk kategori miskin.
- i. Kurang optimal dukungan pemerintah terhadap Perusahaan Daerah;
- j. Kurangnya pendampingan, pelatihan dan pendidikan bagi petani;
- k. Masih ada Penangkapan dengan bahan peledak.

#### **2) Pariwisata**

- a. Masih rendahnya infrastruktur pariwisata diantaranya seperti akomodasi yang belum memadai dan sesuai dengan standar;
- b. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata berbasis pesisir, laut dan pulau kecil dan wisata budaya;

- c. Masih banyak kawasan wisata dan objek wisata yang belum dikelola secara profesional;
- d. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional, dikarenakan kurangnya perhatian untuk pengembangan daerah yang memiliki potensi pariwisata serta kurangnya promosi pariwisata yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PDRB.
- e. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata.

### **3) Pertanian**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian;
- b. Kurangnya tenaga penyuluh dan pendamping;
- c. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan teknologi produksi di tingkat petani/peternak;
- d. Masih kurangnya produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan;
- e. Minimnya nilai tambah yang diperoleh para petani akibat mutu hasil pertanian yang rendah;
- f. Ketersediaan pasar dan penanganan produk pasca panen belum maksimal.
- g. Belum dilakukan pemetaan kesesuaian lahan.

### **4) Energi dan Sumberdaya Mineral**

- a. Belum adanya regulasi mengenai pertambangan batuan/pasir (galian C);
- b. Pasokan listrik untuk wilayah kecamatan kepulauan masih kurang terutama suplai energi listrik dari PLN.

### **6) Perdagangan**

- a. Ketersediaan stok barang dan regulasi terkait ketersediaan Stok barang (Gudang) belum ada;
- b. Belum memiliki kemampuan dalam export dan import;
- c. Belum dimanfaatnya prasarana pasar secara optimal;
- d. Masih rendahnya daya saing untuk produk daerah;
- e. Pembinaan terhadap kelompok pedagang belum ada;
- f. Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi terkait komoditi perdagangan yang masuk-keluar daerah;
- g. Belum tersedianya data dan informasi usha mikro dan kecil.

## **7) Perindustrian**

- a. Belum berkembangnya industri ekonomi kreatif;
- b. Masih rendahnya SDM (tenaga fungsional) baik kuantitatif maupun kualitas bidang industri terutama industri padat karya dan orientasi ekspor;
- c. Pembinaan terhadap kelompok industri/pengrajin belum optimal;
- d. Pengembangan produk hasil olahan belum terstandarisasi;
- e. Penguasaan teknologi masih kurang dan pengembangan produk lokal belum optimal;
- f. Jejaring pemasaran (*Network Marketing*) berbagai produk IKM masih terbatas;
- g. Komunikasi dan Koordinasi lintas sektor masih rendah;
- h. Masih rendahnya jiwa profesionalisme dan wirausaha masyarakat Kota Tual;
- i. Regulasi terkait pengembangan industri kecil belum ada;
- j. Belum adanya kawasan industri yang diatur dalam RTRW.

## **D. Fungsi Penunjang Urusan**

### **1) Perencanaan**



- a. Masih kurangnya sumberdaaya manusia yang berkualitas di bidang perencanaan pembangunan;
- b. Belum efektifnya perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya sinkronisasi, integrasi, sinergitas, dan harmonisasi segala dokumen perencanaan di tingkat pemerintah Kota Tual;
- d. Masih rendahnya penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Konsistensi antar dokumen perencanaan belum terlaksana, persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana masih tinggi;
- f. Sistem pengumpulan data dan akurasi data belum optimal;
- g. Perencanaan partisipatif belum dapat terlaksana secara efektif karena keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat pada umumnya;
- h. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan serta infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. Koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar OPD belum optimal.
- j. Simda perencanaan belum terealisasi

## **2) Keuangan**

- a. Tata kelola keuangan dan anggaran daerah belum sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi lebih cenderung mengikuti keinginan.
- b. Penatausahaan keuangan pada OPD masih belum tertib;
- c. Sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas khususnya bidang pengelolaan kuangan dan aset daerah masih terbatas;
- d. Administrasi kepemilikan aset daerah masih belum tertib;
- e. Budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik belum optimal;

- f. Kurangnya koordinasi antar individu maupun instansi (OPD) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. Sumber pendapatan daerah masih terbatas;
- i. Penggalan potensi penerimaan daerah belum dioptimalkan;
- j. Peran BUMD dalam peningkatan PAD masih belum optimal.

### **3) Pengawasan**

- a. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan;
- b. Kapasitas dan profesionalisme lembaga pengawas (inspektorat) masih lemah;
- c. Kurangnya dukungan SDM aparatur dalam melakukan operasinalisasi kelembagaan;
- d. Jumlah aparatur pengawas yang melakukan fungsi pengawasan masih kurang dan minim tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi;
- e. Masih rendahnya tindak lanjut LHP;
- f. Belum terpenuhinya anggaran penunjang pelaksanaan pengawasan sebesar 1% dari APBD Kota Tual sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008;
- g. Belum tersedianya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- h. Masih belum terbangunya infrastruktur yang mendukung penertapan SPIP.

### **4) Kepegawaian**

- a. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan berbasis kompetensi;
- b. Perencanaan dan penetapan formasi ASN sering tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi;
  - c. SDM Aparatur (ASN) relatif masih rendah;

- d. Kuantitas ASN pada masing-masing OPD tidak seimbang dengan beban kerja;
- e. Pengangkatan dalam jabatan struktural belum didasarkan pada nilai-nilai objektifitas, akuntabilitas dan kompetensi yang baik dan sehat;
- f. Netralisasi ASN, pengaruh kepentingan politik terhadap birokrasi masih dominan sehingga ASN tidak netral terutama jabatan struktural;
- g. Manajemen SDM belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai;
- h. Pengelolaan data kepegawaian masih bersifat manual;
- i. Belum terlaksananya penilaian kinerja ASN.

#### **5) Pemerintahan Umum (Administrasi)**

- a. Belum optimalnya sosialisasi produk hukum ke masyarakat;
- b. Penegakan supremasi hukum masih rendah;
- c. Masih lambatnya respon dan kesiapan Daerah terhadap perubahan regulasi dari pusat;
- d. Kapasitas sumberdaya birokrasi belum sepenuhnya mampu bersaing, cenderung pasif dan kurang inovatif;
- e. Masih rendahnya pemahaman aparatur secara umum terkait pelaksanaan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, olehnya itu kinerja yang dicapai tidak optimal;
- f. Belum optimalnya kerja sama seluruh bidang pembangunan dalam mendukung ekonomi daerah;
- g. Belum terlaksananya sistem tambahan penghasilan berbasis kinerja;
- h. Belum konkritnya pelaksanaan “*reward and punishman*”;
- i. Pelayanan publik untuk semua bidang masih perlu perbaikan;
- j. Belum optimalnya pelaksanaan urusan terkait SPM pada masing-masing OPD pelaksana;

- k. Belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. Penerapan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan belum terlaksana;
- m. Kurananya koordinasi antar OPD dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan;
- n. Penanganan terkait penetapan kewilayaan seperti batas antar daerah bahkan desa belum dilakukan secara tepat dan akurat sehingga berpotensi memicu konflik dan dapat mengganggu iklim investasi.

#### **4.2. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah dan masyarakat untuk masa mendatang. Penjabaran isu-isu strategis dilakukan dengan tujuan agar memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Isu-isu strategis tersebut memiliki pengaruh yang sangat luas, besar dan signifikan terhadap penanganan kondisi masyarakat untuk lima tahun yang akan datang. Peluang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan semakin terarah dan tercapai dengan memprioritaskan penanganan terkait isu-isu strategis tersebut. Berikut isu strategis pembangunan jangka menengah daerah guna mewujudkan Kota Tual yang berdaya saing dan terciptanya kondisi perekonomian yang kokoh dan terpelihara.

Sejalan dengan isu global, nasional, dan provinsi Maluku serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2019-2023, maka dirumuskan isu-isu strategis Kota Tual sebagai berikut:

##### **1. Penanggulangan Kemiskinan;**

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan merumuskan isu strategis kemiskinan yakni dengan memperhatikan aspek sosial dan tenaga kerja. Aspek sosial yakni perlindungan sosial secara komprehensif, sedangkan aspek tenaga kerja yaitu dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

## **2. Ketahanan Pangan Masyarakat**

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (UU Pangan, 2012). Ketersediaan pangan merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar manusia. Apalagi melihat perkembangan masyarakat yang kian meningkat, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terus menerus, dengan cara meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan dan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan. Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil kehewanian dan perikanan serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian perlu mendapat perhatian khusus, karena secara keseluruhan saling bersinergi satu dengan yang lain.

## **3. Sumberdaya Manusia;**

Kapasitas sumber daya manusia masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah masih rendah. SDM aparatur di Kota Tual

masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **4. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan;**

Pendidikan merupakan unsur utama dalam pembentukan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam pembangunan Kota Tual. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan. Layanan dan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan kepulauan.

#### **5. Pelayanan Kesehatan;**

Masih tingginya angka kematian bayi, belum memadainya layanan kesehatan masyarakat, berkembangnya penyakit endemic (flu burung, flu babi, virus HIV dan AIDS), kurangnya jumlah tenaga medis dan non medis. Akses masyarakat miskin terhadap kesehatan masih rendah.

#### **6. Tata kelola pemerintahan;**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien belum sepenuhnya diterapkan, hal ini akan berdampak pada ketidakpuasan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan akan berhasil jika pelayanan publik yang diberikan optimal dan memuaskan masyarakat.

Dengan adanya berbagai tuntutan terkait reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan. Meningkatnya gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan dengan menekankan pada pelaksanaan anggaran yang efektif dan digunakan secara baik, Menurunkan prakterk KKN dan perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, partisipatif.

#### **7. Kemandirian Ekonomi;**

Kemandirian ekonomi di Kota Tual berarti kemandirian Pemerintah Kota dan masyarakat, dimana dapat dilakukan melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan yakni:

Produktivitas dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata harus ditingkatkan. Potensi kelautan dan perikanan Kota Tual yang sangat besar, termasuk dalam pemetaan Wilayah Pengelolaan Sumberdaya Perikanan V (Laut Banda) dan VI (Laut Arafuru). Berdasarkan data potensi perikanan oleh KOMNAS pengkajian stok dilihat dari hasil produksi per tahun menunjukkan bahwa potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki masih belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Potensi pariwisata di Kota Tual sangat besar, namun pengembangan potensi tersebut belum optimal khususnya pariwisata berbasis pantai dan alam, pesisir dan pulau-pulau kecil serta sejarah.

Produksi sektor pertanian subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan yang dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Tual dalam jangka panjang dan menciptakan kemandirian sektor pertanian masih rendah. Produksi pertanian dan peternakan di Kota Tual masih rendah dan ketergantungan kepada daerah lain

Pengembangan dan peningkatan industri pengolahan, kewirausahaan yang berbasis sumber daya lokal guna penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal. Konsep *branding* dan *packaging* merupakan faktor penting dalam mendukung konteks daya saing ekonomi kota. Desain yang baik, dan didukung dengan marketing yang terintegrasi. Proses pembangunan sering kali tidak mengakomodasi budaya lokal. Pengembangan nilai tambah industri kecil terhadap total nilai industri masih sangat rendah.

Iklim investasi belum kondusif dan mampu untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;

Kawasan cepat tumbuh dengan pendekatan sektor unggulan komperatif per satuan wilayah belum ada.

**8. Kondisi Saran dan Prasarana Wilayah, jaringan transportasi, jalan dan jembatan belum memadai serta komunikasi dan informasi belum maksimal;**

Belum terbangunnya jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan ekonomi daerah. Akses layanan transportasi dan moda transportasi khususnya tarpulau-pulau masih rendah. Kota Tual sebagian besar wilayahnya adalah kelautan, olehnya itu moda transportasi laut harus kuat. Keseimbangan pembangunan antar wilayah yang meliputi pembangunan transportasi antar desa dan kota, antar pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal, transportasi dalam pulau dengan antar pulau guna meningkatkan ekonomi berbasis pariwisata dan pelayanan infrastruktur.

Banyaknya kondisi yang rusak dan jalan yang belum terbangun khususnya di wilayah kecamatan kepulauan. Selain itu belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan serta ketersediaan pasar tentunya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Tual masih belum maksimal. Keterbatasan sarana internet dan minimnya sarana komunikasi dan informasi khususnya di wilayah kecamatan kepulauan akan menghambat kemajuan daerah.

**9. Air bersih, air limbah dan Sanitasi Lingkungan;**

Sumber air minum merupakan indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan keluarga. Masih kurangnya akses air bersih bagi rumah tangga miskin. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak mencapai 40,16%. Ketersediaan



air bersih untuk masyarakat masih kurang. Cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Kota Tual masih belum terpenuhi.

Kerusakan lingkungan, bencana alam perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam baik di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Salah satu pemanfaatan sumber daya seperti air tanah yang telah berlebihan menyebabkan masyarakat sulit memperoleh air.

#### **10. Kesenjangan Wilayah dan Pemerataan Pembangunan;**

Kesenjangan antar wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi potensi permasalahan dimasa kini dan masa depan, hal ini dipicu dengan munculnya persepsi ketidakadilan antar sesama masyarakat. Kota Tual merupakan wilayah kepulauan dimana terdapat tiga kecamatan merupakan kecamatan kepulauan. Masalah yang paling mendasar adalah konektivitas dan aksesibilitas di wilayah kepulauan. Selain itu adanya kesenjangan wilayah antar kecamatan dikarenakan adanya ketidakmerataan pengalokasian program pembangunan di Kota Tual yang berdampak langsung pada terjadinya ketimpangan pembangunan di tiap kecamatan terutama di wilayah kecamatan kepulauan.

Program pembangunan terkonsentrasi pada kecamatan di wilayah daratan yakni 2 kecamatan (Kec. Pulau Dullah Selatan dan Kec. Pulau Dullah Utara). Ketidakmerataan pembangunan mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial terutama pada kecamatan yang merasa dimarjinalkan.

Dampak lain yang ditimbulkan dari ketidakmerataan program pembangunan yakni terancamnya stabilitas daerah dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah kecamatan dan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kota Tual. Sebaran penduduk menjadi tidak merata,

penduduk cenderung terkonsentrasi pada kecamatan di daratan yang lebih berpotensi mampu memberikan kehidupan lebih layak.

#### **11. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang;**

Proporsi penduduk perkotaan dari tahun ke tahun makin bertambah, angka kemiskinan perkotaan tinggi mengakibatkan meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang tentunya berujung pada ketidakmampuan pemerintah kota menuju kota layak huni. Perwujudan RTH sebesar 30% merupakan tantangan sekaligus permasalahan yang sangat signifikan dalam penyelegaraan pembangunan perkotaan. Fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah yang terdiri dari kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan pariwisata, kawasan pertanian dan juga kegiatan-kegiatan pendukungnya hingga sekarang belum dioptimalkan.

Kualitas lingkungan dan ketersediaan ruang publik merupakan salah satu isu yang perlu untuk diperhatikan dan menjadi sorotan. Perubahan alih fungsi lahan dari lahan terbuka hijau untuk publik menjadi lahan untuk privat, perubahan ruang terbuka hijau untuk privat sering tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana pengganti sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial. Peningkatan jumlah penduduk dengan kebutuhannya telah mengubah lahan hutan menjadi lahan industri, pertanian, pemukiman dan sebagainya. Penegakan regulasi terkait lingkungan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) belum optimal bahkan ketersediaan Perda tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) belum ada.

#### **12. Pelestarian sumberdaya alam keterkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharannya;**

Tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang pesisir.

Konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya, pengelolaan yang tidak terkendali, dan belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil yang terpadu. Kota Tual merupakan kota kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya laut yang besar. Belum adanya rencana pemanfaatan untuk keberadaan pulau-pulau kecil cenderung membahayakan dan terjadinya kerusakan. Sinkronisasi antara perencanaan darat dan laut perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan yang direncanakan.

Pengembangan pulau-pulau kecil terkait dengan pelestarian ekosistem di dalamnya, potensi sumberdaya yang ada diantaranya terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan dan konservasi sangat rentan terhadap kerusakan. Keanekaragaman potensi sumber daya tersebut sangat penting untuk pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

### **13. Adaptasi dan Mitigasi Bencana;**

Wilayah Kota Tual tergolong daerah rawan terhadap bencana terutama berpotensi bencana gempa bumi, tsunami, angin topan atau angin puting beliung, genangan banjir Rob, gelombang tinggi dan abrasi. Selain itu Kota Tual juga harus menghadapi berbagai potensi bencana lainnya seperti kebakaran, kekeringan akibat dari kompleksitas permasalahan perkotaan. Kota Tual juga harus menghadapi dampak dari adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Adanya konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya pemerintah dan bersifat preventif dan responsive secara terpadu dan multisektoral. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan bencana. Upaya meningkatkan mitigasi bencana dan melatih masyarakat dalam melakukan penganggulangan bencana secara cepat untuk

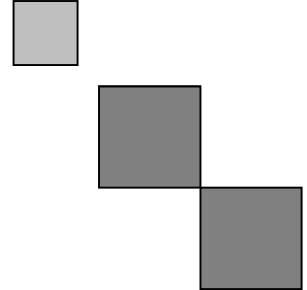
menekan resiko korban jiwa akibat bencana alam dan non alam. Kesiapan masyarakat merupakan penentu besar kecilnya dampak bencana olehnya itu perlu ditingkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana dengan membudayakan kepedulian terhadap lingkungan agar tercipta kelestarian demi kelangsungan hidup generasi penerus.

#### **14. Toleransi dan kerukunan umat beragama yang rentan serta potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

Tatanan kehidupan sosial yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kota Tual yang aman dan sejahtera. Meningkatnya konflik sosial yang dipicu oleh kecemburuan sosial, pertentangan antar suku, agama dan ras (SARA). Konflik inter dan antar umat beragama, kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang belum merata dan logika mayoritas dan minoritas berbasis suku, agama menjadi faktor masalah yang memicu adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Konflik kerukunan beragama antar umat beragama maupun antas sesama penganut agama mengalami kerentanan. Hal ini dapat dipicu oleh adanya pemahaman dan penafsiran keagamaan yang sempit yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki penafsiran yang berbeda. Penafsiran sempit ini dapat mengancam toleransi, bahkan pada aksi kekerasan baik kepada antar umat beragama maupun antar sesama penganut agama yang sama.





## BAB V

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1 Visi**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual tahun 2005-2025, maka visi di dalam RPJMD Kota Tual tahun 2018-2023 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Tual tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Tual tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kota Tual adalah untuk **“Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”** serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Tual periode 2018-2023 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokratis, Amanah, dan Transparan).**

Dimana di dalam Visi Pembangunan Kota Tual di atas, terdapat Tujuh komponen gambaran Kota Tual di akhir kurun waktu 2018-2023, yaitu:

#### **❖ Beriman**

Kota tual yang **beriman** bermakna bahwa pemerintah kota tual menyangandarkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang



Maha Esa sebagai zat yang maha agung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan hubungan kemasyarakatan.

❖ **Ekonomi kerakyatan**

**Ekonomi kerakyatan** artinya penyelenggara pemerintahan menjamin pembangunan sistem perekonomian bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

❖ **Responsif**

Responsif artinya penyelenggara pemerintah selalu tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat, dan proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

❖ **Akuntabel**

**Akuntabel** artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga kota tua pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.

❖ **Demokratis**

**Demokratis** artinya penyelenggara pemerintahan menjamin masing-masing warga masyarakat memiliki hak yang seimbang dan setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga masyarakat tersebut.

❖ **Amanah**

**Amanah** artinya penyelenggara pemerintah menjamin tersampainya segala hak setiap warga masyarakat, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak warga masyarakat.

❖ **Transparan**

**Transparan** artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan adalah terbuka dan semua orang

dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai.

## **5.2 Misi**

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belumlah sempurna tanpa serangkaian misi yang berfungsi sebagai upaya dalam pewujudan visi tersebut. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Tual pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Tual dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023, berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, cerdas, dan sehat.
2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan sosial, dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif.
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pengembangan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar serta memberikan ruang yang cukup bagi peningkatan kesempatan kerja.
5. Mengembangkan iklim kondusif untuk peningkatan daya tarik investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

6. Memantapkan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.
7. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Hubungan keterkaitan di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual tahun 2018-2023 menjadi tulang punggung pembangunan Kota Tual selama lima tahun ke depan. Bertolak dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual inilah kemudian dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tual dalam jangka menengah.

Selain itu, diperlukan keterkaitan antara Visi, Misi dan Isu Strategis Kota Tual sehingga rangkaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual menjadi langkah nyata dalam penanganan isu-isu strategis Kota Tual selama lima tahun ke depan. Keterkaitan antara Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kota Tual periode 2018-2023 ditampilkan di dalam Tabel 5.1.2

**Tabel 5.1**  
**Visi, Misi dan Penjelasan Misi Kota Tual**  
**Periode 2018-2023**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>
<b>“Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokratis, Amanah, dan Transparan).</b>	<b><u>Misi 1:</u></b> Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, cerdas, dan sehat.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama.
		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan
		Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
		Pembangunan Kota Layak Anak
	<b><u>Misi 2:</u></b> Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik
		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan
	<b><u>Misi 3:</u></b> Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan sosial, dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif.	Mewujudkan penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat.
	<b><u>Misi 4:</u></b> Mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pengembangan	Pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh sektor Perikanan, Pertanian, Pariwisata Perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan.
		Mengembangkan sektor unggulan untuk mengatasi

	perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar serta memberikan ruang yang cukup bagi peningkatan kesempatan kerja.	pengangguran dan kemiskinan
	<b><u>Misi 5:</u></b> Mengembangkan iklim kondusif untuk peningkatan daya tarik investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.
	<b><u>Misi 6:</u></b> Memantapkan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.	Menjadikan tata ruang sebagai dasar dalam pembangunan infrastruktur
		Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata
	<b><u>Misi 7:</u></b> Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap
		Pengembangan wisata alam
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 merupakan penjabaran misi pembangunan Kota Tual yang ditetapkan dengan memperhatikan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Pembangunan dirumuskan dari penjelasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual periode 2018-2023 yang kemudian dijabarkan ke dalam standar kinerja yang harus dicapai pada Sasaran Pembangunan. Dengan memperhartikan penjelasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual periode 2018-2023.

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tual periode 2018-2023 merupakan sebuah jalan (*pathway*) yang memiliki keterkaitan dengan 13 Isu Strategis Pembangunan Kota Tual. Dimana 13 Isu Strategis Pembangunan Kota Tual sebagai hulu dari perencanaan strategis pembangunan Kota Tual untuk kemudian menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan Kota Tual yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota

Tual periode 2018-2023. Keterkaitan antara 13 Isu Strategis dan perencanaan strategis pembangunan Kota Tual dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dijabarkan di dalam Tabel 5.2

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Pembangunan Kota Tual periode 2018-2023**

<b><u>VISI:</u> “Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota <b>BERADAT</b></b> <b>(<b>B</b>eriman, <b>E</b>konomi <b>K</b>erakyatan, <b>R</b>esponsif, <b>A</b>kuntabel, <b>D</b>emokrasi, <b>A</b>manah, dan <b>T</b>ransparan)”</b>		
<b>MISI 1.</b> <b>MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Peningkatan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Kasus konflik antar umat beragama
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		Harapan Lama Sekolah
Menjamin Kehidupan yang Sehat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Angka harapan hidup
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja
Pembangunan Kota Layak Anak	Peningkatan kualitas Kota Layak Anak	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
<b>MISI 2.</b> <b>MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah



**MISI 3.****MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN**

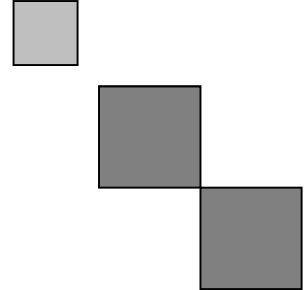
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Jumlah sanggar budaya yang aktif
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait ketentraman & ketertiban umum	Angka pelanggaran Perda
	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka kriminalitas

**MISI 4.****MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per kapita	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
		PDRB perkapita
Meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak	Menurunnya Presentasi Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin

<b>MISI 5. MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.	Pertumbuhan ekonomi meningkat;	Angka pertumbuhan ekonomi;
	Investasi di Kota Tual meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi
<b>MISI 6. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Membangun infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus Penduduk dan Barang	Jumlah Dermaga penyeberangan; Jumlah Pelabuhan strategis
	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni
		Persentase permukiman layak huni

	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan air, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
	Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
<b>MISI 7.</b> <b>MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan
Pengembangan wisata alam	Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan	PAD sektor Pariwisata
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
	mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua	Persentase rumah tinggal bersanitasi
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R



BAB VI

**STRATEGI, ARAH  
KEBIJAKAN DAN  
PROGRAM  
PEMBANGUNAN  
DAERAH**



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan harapan visi Kota Tual, maka pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan secara simultan dengan mematuhi kaidah pelaksanaan melalui mekanisme dan tahapan yang terstruktur dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan visi Kota Tual sebagai “**Kota BERADAT** (**B**eriman, **E**konomi, **K**erakyatan, **R**esponsif, **A**kuntabel, **D**emokratis, **A**manah, dan **T**ransparan”, melalui pencapaian setiap butir pernyataan misi.

Pada konteks dokumen perencanaan RPJMD periode 2018-2023, merupakan konsep perencanaan yang didasarkan pada keberlanjutan pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya. Sehingga strategi umum dalam pencapaian Visi dan Misi saat ini bertumpu pada pernyataan “melanjutkan” dan “mempertahankan”. Melanjutkan merupakan perwujudan dari program-program kerja pada periode 2013-2018 yang perlu untuk ditindaklanjuti dalam kerangka

meningkatkan kualitas pencapaian outcome maupun impact. Sedangkan pada strategi mempertahankan, merupakan fakta publik bahwa periode sebelumnya Pemerintah Kota Tual memperoleh berbagai pencapaian yang sangat signifikan, untuk itu pada saat ini kinerja tersebut perlu dipertahankan sebagai bentuk konsistensi pelayanan publik di Kota Tual.

Dengan berpedoman pada strategi umum diatas, dalam kerangka menetapkan strategi yang lebih spesifik berdasarkan waktu maupun setiap uraian misi. Seyogyanya perlu ditetapkan prinsip, sebagai ideologi pembangunan di Kota Tual yang perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh kalangan maupun stakeholder pembangunan di Kota Tual.

## **6.1 Strategi**

Strategi dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 7 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**  
**Kota Tual**

<b><u>VISI:</u> “Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokratis, Amanah, dan Transparan)”</b>		
<b>MISI 1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Peningkatan pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Peningkatan kualitas hidup beragama
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	(1). Peningkatan daya saing pendidikan. (2) Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar; (3). Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
Menjamin Kehidupan yang Sehat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	(1). Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang; (2). Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (3) eningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja
Pembangunan Kota Layak Anak	Peningkatan kualitas Kota Layak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak



<b>MISI 2. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.
<b>MISI 3.MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Mewujudkan penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Peran serta masyarakat dalam pengembangn dan pelestarian budaya meningkat	(1). Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya; (2). Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa; (3). Optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi.
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	(1). Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah; (2). Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat

**MISI 4.  
MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA,  
PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN  
KERJA**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per kapita	(1). Meningkatkan kemandirian pelaku usaha produktif bidang pertanian dan kelautan; (2). Meningkatkan kemandirian pelaku usaha produktif bidang perdagangan dan jasa; (3). Meningkatkan tumbuhnya industri kecil dan menengah.
Meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak	(1). Menurunnya Tingkat Pengangguran; (2). Menurunnya Tingkat Kemiskinan;	(1). Meningkatkan tumbuhnya industri kecil dan menengah; (2). Meningkatkan perluasan lapangan kerja; (3). Optimalisasi penanggulangan kemiskinan terpadu.

**MISI 5.MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN  
EKONOMI**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.	Pertumbuhan ekonomi meningkat;	(1). Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar; (2). Pengoptimalan pembinaan perindustrian; (3). Pengembangan dan pemasaran pariwisata; (4). Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif;
	Investasi di Kota Tual meningkat	(1). Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan; (2).Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan;

<b>MISI 6. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	(1). Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang ; (2). Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; (3). Optimalisasi pengelolaan pertanahan;
Membangun infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Jalan	Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus Penduduk dan Barang	Meningkatkan Pelayanan Dermaga dan Pelabuhan
	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemerataan dan Pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan, kualitas permukiman dan tata bangunan
	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan air , termasuk penanganan sampah kota.	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.
	Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau	mempertahankan dan meningkatkan luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya
<b>MISI 7. MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan	Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok nelayan kecil.

Pengembangan wisata alam	Penataan dan Pengembangan Potensi Pariwisata	Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air minum
	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua	Meningkatkan Mutu Pengelolaan Air Limbah Masyarakat
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Tual dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Kota Tual**

<b>VISI:</b> “Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokratis, Amanah, dan Transparan)”					
<b>MISI 1.</b> <b>MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT</b>					
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama				
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin				
	(1). Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan ; (2). Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti. (1). Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini.				
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	(1). Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan; (1). Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.				
	Meningkatkan sarana dan Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan;				
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran				
Peningkatan kualitas Kota Layak Anak	(1). Pelayanan Publik yang Ramah Anak; (2). Penyediaan Sarana Konsultasi Bagi Orang Tua atau Keluarga; (3). Penyediaan Informasi Layak Anak; (4). Perlindungan khusus kepada anak				

<b>MISI 2. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>					
<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	(1). Meningkatkan kualitas SDM birokrasi. (2). Mengembangkan layanan birokrasi yang prima.				
<b>MISI 3. MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF</b>					
<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Peran serta masyarakat dalam pengembangn dan pelestarian budaya meningkat	(1). Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya; (2). Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya; (1). Meningkatkan pelestarian dan pengembangan sejarah; (2). Meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa Daerah; (1). Meningkatkan kampanye sadar wisata;				
Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	(1). Penyiapan tenaga penertiban; (2). Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan; (3). Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota; (4). Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda; (1). Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat; (2). Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan; (3). Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang; (4). Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama; (5). Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;				
<b>MISI 4. MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>					
<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	(1). Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan kelautan; (2). Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perdagangan dan jasa; (3). Penguatan modal pengembangan industri kecil dan menengah dan jasa berbasis pariwisata.				
(1). Menurunnya Tingkat Pengangguran; (2). Menurunnya Tingkat Kemiskinan;	(1). Penguatan modal pengembangan industri kecil dan menengah dan jasa berbasis pariwisata; (2). Peningkatan fasilitas penduduk usia kerja terhadap lapangan kerja; (3). Peningkatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.				

MISI 5. MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI					
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Pertumbuhan ekonomi meningkat;	(1). Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar; (2). Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional; (1). Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian; (2). Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM; (3). Meningkatkan pembinaan sentra industri; (1). Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata; (2). Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW); (3). Meningkatkan pembinaan kampung wisata; (1). Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata; (2). Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata;				
Investasi di Kota Tual meningkat	(1). Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin; (2). Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur; (1). Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan; (2). Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan; (3). Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan;				
MISI 6. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG					
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	(1). Meningkatkan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang ; (2). Meningkatkan pemahaman peraturan tata ruang. (3). Meningkatkan pelaksanaan ketentuan peraturan tata ruang; (4). Meningkatkan basis data tata ruang. (5). Meningkatkan kepemilikan tanah pemerintah; (6). Meningkatkan ketertiban dokumen administrasi pertanahan; (7). Meningkatkan basis data pertanahan.				
Peningkatan Kualitas Jalan	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan;				
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus Penduduk dan Barang	Penambahan Dermaga dan pelabuhan				
Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan sarana prasarana pelayanan komunikasi, informatika yang merata dan terkendali				
Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	(1). Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);; (2). Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh; (3). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman (4). Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah; (5). Mengoptimalkan pengelolaan air minum;				

Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan air, termasuk penanganan sampah kota.	Peningkatan kinerja dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan				
Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau	1. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan publik; 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Publik.				
MISI 7. MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN					
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kelompok nelayan kecil.				
Penataan Pengembangan Potensi Pariwisata	1) Penataan kelembagaan wisata alam ; 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Perkembangan Pariwisata; 3) Pengembangan Jaringan Promosi dan Kerjasama Pada Level Regional, Nasional, dan Internasional;				
Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum.				
Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua	Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Permukiman yang Memadai.				
Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan .				



## 6.3 Program Pembangunan Daerah

**Tabel 6.3**

### Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Tual

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT															
			Peningkatan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama															
			Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama															
4	01	31	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase tempat ibadah	Gereja : 26, Masjid : 75, Musholah : 2 (1,44)	105 Tempat Ibadah		108 Tempat Ibadah		112 Tempat Ibadah		116 Tempat Ibadah		120 Tempat Ibadah		561 Tempat Ibadah		BAG. KESRA - SETDA
				Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	691 Pengajar TPQ, Sekami, Sekolah Minggu	691 Pengajar	5.466.640	700 Pengajar	6.013.304	705 Pengajar	6.614.634	710 Pengajar	7.276.098	715 Pengajar	8.003.708	3521 Pengajar	33.374.384	
			Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama	Persentase Peningkatan pemahaman dan Pengamalan nilai-Nilai Agama, Pancasila dan Budaya Lokal	10%	20%	435.398	20%	478.938	20%	526.832	20%	579.515	20%	637.466	100%	2.658.148	BAG. KESRA - SETDA
			Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan pemberdayaan & Rehabilitasi Sosial	-	20%	315.340	20%	346.874	20%	381.561	20%	419.718	20%	461.689	100%	1.925.182	
2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan objek budaya yang dilestarikan														DINAS DIKBUD
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan keayaan budaya		20%		40%		60%		80%		100%		100%		DINAS DIKBUD
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Keragaman Budaya		3	359.887	5	539.831	6	755.763	6	1.058.068	6	1.322.585	6	4.036.133	DINAS DIKBUD

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	16	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama														DINAS DIKBUD
			Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata															
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan															
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APM, APK PAUD	APM : APK : 89,96%	APK : 90,11%	3.431.607	APK : 92,56%	3.431.607	APK : 93,01%	3.431.607	APK : 95%	3.431.607	APK : 95,11%	3.431.607	APK : 97,00%	17.158.035	Dinas DIKBUD
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK Wajib Belajar Sembilan Tahun (SD & SMP)	SD/Mi : 105,8%	106,2%	37.456.397	108%	44.947.676	108,8%	47.195.060	109%	48.610.912	111,2%	49.625.606	112,1%	227.835.651	Dinas DIKBUD
					SMP/MTs : 98,1%	100,2%		101%		100,2%		104%		106,4%		107,8%		Dinas DIKBUD
1	01	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase Percepatan Pelayanan Pendidikan LB (Paket A dan Paket B)	%	25	30.651	25	30.651	25	30.651	25	30.651	25	30.651	25	153.255	Dinas DIKBUD
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi (S1/D-IV)	64,42%	65,50%	1.141.380	70,00%	1.712.070	85,00%	2.568.105	92,40%	3.852.158	95,00%	5.778.236	95,00%	15.051.949	Dinas DIKBUD
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Prinsip-prinsip MBS	%	30	851.495	35	911.100	40	974.877	45	1.072.364	50	1.179.601	50	4.989.436	Dinas DIKBUD
2	13	16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan Kepemudaan	100 Orang	150 Orang	231.565	170 Orang	254.722	200 Orang	280.194	225 Orang	308.213	250 Orang	339.034	995 Orang	1.413.727	DISPORA
2	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan	Jumlah Pemuda yang Memiliki Kecakapan Hidup	100 Orang	125 Orang	1.393.927	150 Orang	1.533.320	175 Orang	1.686.652	200 Orang	1.855.317	225 Orang	2.040.849	875 Orang	8.510.064	DISPORA

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Hidup Pemuda															
2	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Presentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	20%	20%	515.689	20%	567.258	20%	623.984	20%	686.382	20%	755.020	100%	3.148.333	DISPORA
2	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	20%	20%	320.495	20%	352.545	20%	387.799	20%	426.579	20%	469.237	100%	1.956.654	DISPORA
2	13	22		Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga	-	20%	124.985	20%	137.484	20%	151.232	20%	166.355	20%	182.991	100%	763.046	DISPORA
2	13	23		Program Peningkatan Kemandirian Pemuda	Presentase Peningkatan Kemandirian Pemuda	-	20%	150.800	20%	165.880	20%	182.468	20%	200.715	20%	220.786	100%	920.649	DISPORA
				Menjamin Kehidupan yang Sehat															
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan															
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersiadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	950 Jenis Obat dan BMHP	950 Jenis Obat dan BMHP	2.200.000	950 Jenis Obat dan BMHP	2.420.000	950 Jenis Obat dan BMHP	2.662.000	950 Jenis Obat dan BMHP	2.928.200	950 Jenis Obat dan BMHP	3.221.020	950 Jenis Obat dan BMHP	13.431.220	DINKES
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	27.930 Jiwa	28,000 Jiwa	165.000	28,500 Jiwa	181.500	29,000 Jiwa	199.650	29,500 Jiwa	219.615	30,000 Jiwa	241.577	145.000 Jiwa	1.007.342	DINKES
				Cakupan Pemulihan Kesehatan	27.930 Jiwa	28,000 Jiwa	28,000 Jiwa		28,000 Jiwa		28,000 Jiwa		87.538 Jiwa						
1	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	15 IRTP, 10 Toko Obat dan 15 Toko Kosmetik	24 Sarana	75.000	24 Sarana	82.500	24 Sarana	90.750	24 Sarana	99.825	24 Sarana	109.808	120	457.883	DINKES
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS	10 SMA dan SMK, 30 dasawisma, 10 Posyandu dan 15 Desa ber PHBS	2160 RT PHBS	500.000	2090 RT PHBS	550.000	2091 RT PHBS	605.000	2090 RT PHBS	665.500	2090 RT PHBS	732.050	10.801 RT PHBS	3.052.550	DINKES
				Cakupan PKRS	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD		1 RSUD		1 RSUD		1 RSUD						
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Gizi Buruk	41 Kasus	10 Kasus	400.000	8 kasus	360.000.000	6 Kasus	324.000.000	5 kasus	291.000.000	4 kasus	261.900.000	2 kasus	1.237.300.000	DINKES

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa / Kelurahan STBM	5 Desa/Kelurahan STBM	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000	6 Desa/Kelurahan STBM	385.000.000	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000	30 Desa/Kelurahan STBM	1.435.350.000	
1	02	22	Program Pencehagan dan Peangggulangan Penyakit Menular	Penanganan Penyakit Menular	3341 org	668 org	1.000.000	668 org	1.000.000.000	668 org	1.000.000.000	668 org	1.000.000.000	668 org	1.000.000.000	3341 org	4.001.000.000	DINKES
				Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	8393 Orang	1679 org		1679 org		1679 org		1679 org		1679 org		8393 Orang		
			Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase penanganan kasus penyakit tidak Menular	1015 Orang	3598 org	200.000	3598 org	200.000.000	3598 org	200.000.000	3598 org	200.000.000	3598 org	200.000.000	17.990 org	800.200.000	DINKES
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1.781.000	5 Puskesmas	1.959.100	4 Puskesmas	1.781.000	4 Puskesmas	1.781.000	4 Puskesmas	1.781.000	15 Puskesmas	9.083.100	DINKES
				Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada Semua Unit Pelayanan	6 Unit pelayanan	4 Unit pelayanan		4 Unit pelayanan		3 Unit pelayanan		2 Unit pelayanan		2 Unit pelayanan		15 unit pelayanan		DINKES
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	21.000 Jiwa	4200 Jiwa	100.000	4200 Jiwa	110.000	4200 Jiwa	121.000	4200 Jiwa	133.100	4200 Jiwa	146.410	21.000 Jiwa	610.510	DINKES
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	35 sarana	20 Sarana	4.000.000	20 Sarana	4.400.000	20 Sarana	4.840.000	20 Sarana	5.324.000	20 Sarana	5.856.400	79 Sarana	24.420.400	DINKES
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 RSUD	1 sarana	5.100.000	1 sarana	5.610.000	1 sarana	6.171.000	1 sarana	6.788.100	1 sarana	7.466.910	1 sarana	31.136.010	DINKES
				Cakupan pelayanan kesehatan (Rujukan)	4.641 pasien	6.935 pasien		6.935 pasien		6.935 pasien		6.935 pasien		6.935 pasien		34.675 pasien		DINKES
1	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan	18189	84.035 Jiwa	11.300.000	84.035 Jiwa	12.430.000	84.035 Jiwa	13.673.000	84.035 Jiwa	15.040.300	84.035 Jiwa	16.544.330	84.035 Jiwa	68.987.630	DINKES
1	02	29	Program Peningkatan Pelayanan	Angka Kematian Bayi (AKB)	26 Kasus	10 kasus	400.000	10 kasus	360.000	8 kasus	324.000	5 kasus	291.600	5 kasus	262.440	5 kasus	1.638.040	DINKES

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Kesehatan Anak Balita																
1	02	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	1184 Lansia	545 Lansia	350.000	545 Lansia	385.000	545 Lansia	423.500	545 Lansia	465.850	545 Lansia	512.435	2725 Lansia	2.136.785	DINKES	
1	02	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pengawasan & pengendalian kesehatan makanan	15 IRTP	20 Sarana IRTP, 20 Rumah Makan, 20 Sarana Pangan Siap Saji	35.000	25 Sarana IRTP, 30 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	38.500	25 Sarana IRTP, 35 Rumah Makan, 30 Sarana Pangan Siap Saji	42.350	35 Sarana IRTP, 25 Rumah Makan, 20 Sarana Pangan Siap Saji	46.585	35 Sarana IRTP, 30 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	51.244	140 Sarana IRTP, 30 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	213.679	DINKES	
1	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	10 kasus	10 kasus	400.000	8 kasus	440.000	7 kasus	484.000	6 kasus	532.400	4 kasus	585.640	4 kasus	2.442.040	DINKES	
1	02	33	Program Indonesia Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM	87.538 jiwa	17.508 jiwa	71.000	17.508 jiwa	71.000	17.508 jiwa	78.100	17.508 jiwa	85.910	17.508 jiwa	94.501	87.538 jiwa	400.511	DINKES	
1	02	34	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	6,684 Jiwa	2.212 Jiwa	100.000	2.212 Jiwa	100.000	2.212 Jiwa	110.000	2.212 Jiwa	121.000	2.212 Jiwa	133.100	11,061 jiwa	564.100	DINKES	
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	542 Item Obat dan BHP Medik	552	650.000	572	715.000	592	786.500	612	865.150	632	951.665	632	3.968.315	RSUD MAREN	
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	6171 Pasien	6788 Pasien	1.849.320	7127 Pasien	2.034.252	7484 Pasien	2.237.677	7858 Pasien	2.461.445	8251 Pasien	2.707.589	37408 Pasien	11.290.284	RSUD MAREN	
				Cakupan Pemulihan Kesehatan	95%	95%		95%		96%		96%		97%		95,80%			
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	10 Pokja	15 Pokja	275.560	15 Pokja	303.116	15 Pokja	333.428	15 Pokja	366.770	15 Pokja	403.447	15 Pokja	1.682.321	RSUD MAREN	
				Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada Semua Unit Pelayanan	690 SOP														
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah	Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Sarana (Gedung Pelayanan) Prasarana (2 Rumah Dinas		12.224.256		13.446.682		14.791.350		16.270.485		17.897.533		74.630.305	RSUD MAREN	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		Dokter, (2 Mobil Ambulans, 1 Mobil Operasional, 5 Mobil Operasional Dokter Spesialis dan 1 Mesin Genset 32 KVA)													
				Cakupan Prasarana ALKES Pelayanan Kesehatan Rujukan	91 Jenis Alat Kesehatan													
1	02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	40%	60%	100.000	70%	110.000	80%	121.000	90%	133.100	100%	146.410	100%	610.510	RSUD MAREN
1	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan	4292 Pasien BPJS		1.800.000		1.980.000		2.178.000		2.395.800		2.635.380		10.989.180	RSUD MAREN
1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4.515 KK KPM PKH	903 KK	1.047.487	903 KK	1.152.236	903 KK	1.267.459	903 KK	1.394.205	903 KK	1.533.626	100%	6.395.013	Dinas SOSIAL
1	06	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Ditangani	525 Anak Total 56 Anak yg sdh ditangani	105 Anak	72.500	105 Anak	79.750	105 Anak	87.725	105 Anak	96.498	105 Anak	106.147	100%	442.620	Dinas SOSIAL
1	06	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas	26 Cacat Lansia 15 Cacat Bwan/Lahir	8 Org	105.250	9 Org	115.775	8 Org	127.353	8 Org	140.088	8 Org	154.097	100%	642.562	Dinas SOSIAL
1	06	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Cakupan Penghuni Panti Asuhan yang Dibina	2 Pantai Ashn (1 yg ditangi)	1 Pnti Ashn	67.150	1 Pnti Ashn	73.865	1 Pnti Ashn	81.252	1 Pnti Ashn	89.377	1 Pnti Ashn	98.314	100%	409.957	Dinas SOSIAL
1	06	20	Program Pembinaan Eks Penyandang	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial	22 Narkoba, 120 PSK 9 Anak X	32 Org	275.825	35 Org	303.408	35 Org	333.748	35 Org	367.123	35 Org	403.835	100%	1.683.939	Dinas SOSIAL

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	yang Ditangani	Napi 25 Peyki Sosial													
1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kelembagaan Sosial yang Diberdayakan	15 Peguyuban, LSM & Orsos 2 Yang ditangai	3 Orms	390.216	3 Orms	429.238	3 Orms	472.161	3 Orms	519.377	3 Orms	571.315	100%	2.382.308	Dinas SOSIAL
				Meningkatnya Pembinaan Karakter Orang Muda dan Kelembagaan	2 Lbg Karang Taruna 2 Wahana Kesjhran Berbasis Masyarakat	1 Lbga		1 Lbga		1 Lbga		1 Lbga		100%				
				Cakupan Layanan KIE Konseling bagi Kaum Muda	10 Keluarga Muda 10 Anak Msla Psikososial	4 Kel. Muda		4 Kel. Muda		4 Kel. Muda		4 Kel. Muda		100%				
			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja															
			Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja															
2	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi		89.505		98.456		108.301		119.131		131.044		546.437	Dinas PMD, PTSP dan NAKER	
2	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		162.889		179.178		197.096		216.805		238.486		994.454	Dinas PMD, PTSP dan NAKER	
2	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga		185.500		204.050		224.455		246.901		271.591		1.132.496	Dinas PMD, PTSP dan NAKER	
			Pembangunan Kota Layak Anak															
			Peningkatan kualitas Kota Layak Anak															
2	02	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan & Anak	50%	-	20%	125.000	40%	125.000	60%	125.000	80%	125.000	100%	500.000	DP3AP2KB	
2	02	16	Program Penguatan Kelembagaan	Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang	5 Lembaga	3 Lembaga	287.726	3 Lembaga	287.726	3 Lembaga	287.726	3 Lembaga	287.726	3 Lembaga	15 Lembaga	1.438.630	DP3AP2KB	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terbina														
2	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan Yang di Intervensi	150 Orang	60 Orang	233.570	60 Orang	233.570	60 Orang	233.570	60 Orang	233.570	60 Orang	233.570	300 Orang	1.167.850	DP3AP2KB
2	02	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	250 Orang	150 Orang	781.045	150 Orang	781.045	150 Orang	781.045	150 Orang	781.045	150 Orang	781.045	750 Orang	3.905.225	DP3AP2KB
2	08	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	4031 Orang	-	3.359.811	4434 Orang	3.359.811	4877 Orang	3.359.811	5365 Orang	3.359.811	5901 Orang	3.359.811	6492 Orang	16.799.055	DP3AP2KB
2	08	23	Program Penyiapan Pendampingan Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga	21 Kelompok	-	-	25 Kelompok	125.000	30 Kelompok	125.000	35 Kelompok	125.000	40 Kelompok	125.000	130 Kelompok	500.000	DP3AP2KB
			Program Kesehatan Reproduksi	Advokasi dan KIE bagi Remaja	Baik	-	-	100	155.750	150	155.750	200	155.750	250	155.750	700	623.000	DP3AP2KB
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Akseptor Baru	1453 Orang	-	-	1.598	225.500	1.758	225.500	1.934	225.500	2.127	225.500	2.340	902.000	DP3AP2KB
			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	11	-	-	16	250.000	21	250.000	26	250.000	30	250.000	93	1.000.000	DP3AP2KB
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Kelompok PIK KRR yang sudah di bentuk	20 Kelompok	-	-	30 Kelompok	175.250	30 Kelompok	175.250	30 Kelompok	175.250	30 Kelompok	175.250	120 Kelompok	701.000	DP3AP2KB
			Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jumlah BKB Holistik yang sudah di bentuk	10	-	-	15	4.291.311	20	4.291.311	25	4.291.311	30	4.291.311	90	17.165.244	DP3AP2KB
			MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK															
			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															
			Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat															
4	05	15	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti		18 ASN	835.724	21 ASN	877.510.600	24 ASN	934.739.300	27 ASN	996.164.800	30 ASN	1.078.287.500	120 ASN	3.887.537.924	BKPSDM



Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pendidikan Kedinasan														
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		721 JFT		844 JFT		914 JFT		984 JFT		1084 JFT		4547 JFT		
4	05	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara		112,34%		132,42%	413.408	80,78%	511.744	102,52%	499.159	76,25%	654.606	100%	2.469.133	BKPSDM
4	05	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		76,16%	390.216	102,28%	5.843.649	85,68%	6.820.484		7.039.820	91,23%	7.716.367	100%	27.420.320	BKPSDM
4	05	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Belum Ada			1 Dokumen	406.433	-	-	-	-	-	-		406.433	BAG. ORTALA - SETDA
				Pemetaan Jabatan	Belum Ada			1 Dokumen	199.000	-	-	-	-	-	-		199.000	BAG. ORTALA - SETDA
				Standar Kompetensi Jabatan	Belum Ada			1 Dokumen	225.000	-	-	-	-	-	-		225.000	BAG. ORTALA - SETDA
4	01	07	Program Peningkatan Kesehatan Aparatur	Cakupan Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	20 Orang	20 Orang	350.000	20 Orang	385.000	20 Orang	423.500	20 Orang	465.850	20 Orang	512.435	100 Orang	2.136.785	SEKWAN
4	02	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan		20%		30%		40%		50%		80%		100%		Inspektorat
				Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Persentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti		20%		30%		40%		50%		80%		100%		
				Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	12 OPD	15 OPD		12 OPD		25 OPD		25 OPD		25 OPD		25 OPD		
				Cakupan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	Level 2	Level 3		Level 3		Level 4		Level 5		Level 5		Level 5		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Prensentase transparansi desa dalam mengelola keuangan dan aset.	100%	20%		40%		60%		80%		100%		100%			
4	02	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP	6 Orang	8 Oorang	230.000	18 Orang	500.000.000	23 Orang	850.000.000	27 Orang	950.000.000	29 Orang	1.250.000.000	105 Orang	3.550.230.000	Inspektorat
4	02	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan Standar Operasional Prosedur	10 Dokumen	5 Dokumen	525.000	5 Dokumen	577.500	5 Dokumen	635.250	5 Dokumen	698.775	5 Dokumen	768.653	25 Dokumen	3.205.178	Inspektorat
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Pengaduan Masyarakat	100%	20%	832.500	40%	915.750	60%	1.007.325	80%	1.108.058	100%	1.218.863	100%	5.082.496	Inspektorat
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sisten dan Prosedur Pengawasan	100%	20%	1.020.000	40%	1.122.000	60%	1.234.200	80%	1.357.620	100%	1.493.382	100%	6.227.202	Inspektorat
				Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan													Kelurahan Ketsoblak	
4	01	28	Program Reformasi Birokrasi	Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi	Belum Ada	Dokumen		1 Dok	185.000.000		-		-		-		185.000.000	BAG. ORTALA - SETDA	
				Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kurang	Dokumen		1 Dok	115.000.000		-		-		-		115.000.000	BAG. ORTALA - SETDA	
				Evaluasi OPD	36 Dokumen Perwali	6 Dokumen Perwali	99.738			-	34 Dok	115.000.000		-	40 Dok	115.099.738	BAG. ORTALA - SETDA		
				Penataan Kelembagaan	1 Dokumen UPTD	1 Dok	50.000	6 Dok. UPTD	125.000.000		-		-		7 UPTD	125.050.000	BAG. ORTALA - SETDA		
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Baik	12 Bulan	58.067.618		63.874.380		70.261.818		77.288.000		85.016.800		354.508.615	Semua OPD
		02		Program Peningkatan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur			73.323.534		80.655.887		88.721.476		97.593.624		107.352.986		447.647.507	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Prasarana Perkantoran														
	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3.006.674		3.307.341		3.638.076		4.001.883		4.402.071		18.356.045		
	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		67.025.587		73.728.146		81.100.960		89.211.056		98.132.162		409.197.911		
	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.170.011		1.287.012		1.415.713		1.557.285		1.713.013		7.143.034		
2	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		30 Desa		230.204		30 Desa		278.547		30 Desa		306.402		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		27 Desa		121.546		27 Desa		133.701		27 Desa		147.071		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		70%		133.668		80%		147.035		80%		161.738		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		162 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dilatih / Mengikuti BIMTEK														
			Jumlah Desa / Kelurahan yang Didampingi / Difasilitasi		27 Desa		27 Desa		27 Desa		27 Desa		27 Desa		27 Desa		
			Persentase Pendampingan Desa / Kelurahan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	07	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		330		390		452		461		461		461		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		900 Produk Hukum		900 Produk Hukum		900 Produk Hukum		900 Produk Hukum		900 Produk Hukum		900 Produk Hukum		BAG. HUKUM & HAM - SETDA
			Program Peningkatan regulasi dan		90%		95%		96%		97%		98%		99%		BAG. HUKUM & HAM - SETDA

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	kasus hukum yang diselesaikan														
4	01		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan Nilai SAKIP	Niai C	Nilai CC	63.363	Nilai CC	83.363.000	Nilai CC	103.363.000	Nilai B	123.363.000	Nilai B	143.363.000	Nilai B	453.515.363	BAG. ORTALA - SETDA
				Penguatan SAKIP berbasis Aplikasi	9 Perangka Daerah	Dok.	-	47 PD	125.000.000	-	-	-	-	47 PD	125.000.000			
				Penerapan SOP	kurang		-	1 dok	120.000.000	-	-	-	-	1 Dok.	120.000.000			
				Penilaian Pelayanan Publik	Belum Ada		-		150.000.000	-	-	-	-	47 PD	150.000.000			
				Inovasi Pelayannan Publik	Belum Ada		-	3 Dok	170.000.000	-	-	-	-	3 Dok.	170.000.000			
4	01	15	Program Peningkatan Sistem Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan yang selesai tepat waktu	117 Paket	128 Paket	308.106	128 Paket	338.917	128 Paket	372.808	128 Paket	410.089	128 Paket	451.098	640 Paket	1.881.018	BAG. PEMBANGUNAN - SETDA
4	01	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayaanan Kedinasan KDH dan WKDH		20%	4.500.000	20%	4.000.000	20%	3.500.000	20%	3.500.000	20%	3.500.000	100%	19.000.000	BAG. UMUM & PERLENGKAPAN - SETDA
				Persentase sarana dan prasarana keperluan kantor dan rumah tanga		20%	75.000	20%	82.500	20%	90.750	20%	99.825	20%	109.808	100%	457.883	BAG. UMUM & PERLENGKAPAN - SETDA
				Persentase penomoran surat keluar dan masuk		20%	150.000	20%	165.000	20%	181.500	20%	199.650	20%	219.615	100%	915.765	BAG. UMUM & PERLENGKAPAN - SETDA
4	04	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	5,78%	6,11%	2.828.663	6,11%	3.111.529	6,11%	3.422.682	6,11%	3.764.950	6,11%	4.141.445	30,55%	17.269.270	BPKAD
				Penetapan APBD	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat				
				Persentase SILPA terhadap APBD	19,33%	8,70%		8,70%		8,70%		8,70%		43,50%				
				Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				daerah (opini)															
				Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	56,38%	69,52%		69,52%		69,52%		69,52%		69,52%		69,52%			
4	04	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Presentase Penyelesaian dan Pendokumentasian Administrasi Keuangan Daerah	70,21%	100%	1.095.895	100%	1.205.485	100%	1.326.033	100%	1.458.636	100%	1.604.500	100%	6.690.549	BPKAD	
				Persentase BMD yang Diinventarisir, Diamankan dan Dipelihara	50%	50%		50%		50%		50%		100%					
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD	33 SKPD	47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD					
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	639.291	27 Dokumen	703.220	27 Dokumen	773.542	27 Dokumen	850.896	27 Dokumen	935.986	27 Dokumen	3.902.935	BPKAD	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi	27 Desa	27 Desa	27 Desa		27 Desa		27 Desa		27 Desa							
4	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran			2.930.313		3.223.344		3.545.679		3.900.247		4.290.271		17.889.854	Badan Pendapatan Daerah	
				Proporsi Kenaikan jumlah wajib pajak	9.720	10.800		11.340		11.907		12.502		13.127		59.677			
				Jumlah objek pajak PBB yang dimutakhirkan	507	563		318		533		681		438		2533			
				Jumlah wajib pajak yang diklarifikasi	25	28		31		34		37		41		45			
				Proporsi aparatur yang telah bersertifikat kompetensi profesi	6,7% (1 Org)	33,33% (5 Org)		47% (7 Org)		60% (9 Org)		73% (11 Org)		87% (13 Org)		100% (15 Org)			
				Proporsi wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran secara online															
4	03	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	10 Dokumen	1.789.527	10 Dokumen	1.968.480	10 Dokumen	2.165.328	10 Dokumen	2.381.860	10 Dokumen	2.620.046	50 Dokumen	10.925.241	BAPPEDA		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
4	03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang Bekerjasama	5 MOU	6 MOU	10.000.000	6 MOU	11.000.000	6 MOU	12.100.000	6 MOU	13.310.000	6 MOU	14.641.000	30 MOU	61.051.000	BAPPEDA	
4	03	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh		1 Dokumen	600.000	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.320.000	2 Dokumen	1.452.000	2 Dokumen	1.597.200	9 Dokumen	6.169.200	BAPPEDA	
4	03	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan kota		1 Dokumen	700.000	1 Dokumen	770.000	1 Dokumen	847.000	1 Dokumen	931.700	1 Dokumen	1.024.870	5 Dokumen	4.273.570	BAPPEDA	
4	03	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana yang mengikuti rakor perencanaan		100%	131.390	100%	144.529	100%	158.982	100%	174.880	100%	192.368	100%	802.149	BAPPEDA	
4	03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	3.253.398	1 Dokumen	3.578.738	1 Dokumen	3.936.612	1 Dokumen	4.330.273	1 Dokumen	4.763.300	7 Dokumen	19.862.320	BAPPEDA	
				Jumlah Peserta yang Mengikuti MUSRENBANG	200	200		200		200		200		BAPPEDA					
				Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam Dokumen RKPD										BAPPEDA					
4	03	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 Dokumen	6 Dokumen	2.116.909	6 Dokumen	2.328.600	6 Dokumen	2.561.460	6 Dokumen	2.817.606	6 Dokumen	3.099.366	30 Ddokumen	12.923.941	BAPPEDA	
4	03	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	5 Dokumen	9 Dokumen	795.684.350	10 Dokumen	875.252.785	12 Dokumen	962.778.064	12 Dokumen	1.059.055.870	15 Dokumen	1.164.961.457	58 Dokumen	4.857.732.525	BAPPEDA	
4	03	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta sumberdaya alam		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	1.210.000	2 Dokumen	1.331.000	2 Dokumen	1.464.100	10 Dokumen	6.105.100	BAPPEDA	
4	03	25	Program Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan		1 Dokumen	800.000	1 Dokumen	880.000	1 Dokumen	968.000	1 Dokumen	1.064.800	1 Dokumen	1.171.28	5 Dokumen	4.884.080	BAPPEDA	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana									n	0	n				
4	03		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Presentase Kesesuaian capaian kinerja perangkat daeran	96,22	96,40	1.295.000	96,60	1.424.500	96,80	1.566.950	97	1.723.645	97,20	1.896.010	97,20	7.906.105	BAPPEDA	
4	03	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pengendalian nilai inflasi daerah	4,5% +/-1	4,5% +/-1	226.500	4,5% +/-1	249.150	3,5% +/-1	274.065	3,5% +/-1	301.472	3,5% +/-1	331.619	3,5% +/-1	1.382.805	BAG. EKONOMI - SETDA	
4	06		Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, IPTEK, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Jumlah Penelitian yang dikembangkan		2 Dok	600.000	2 dokumen	660.000	2 dokumen	726.000	2 dokumen	798.600	2 dokume n	878.460	10 Dokume n	3.663.060	BAPPEDA	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		20%	820.000	40%	902.000	60%	992.200	80%	1.091.420	100%	1.200.562	100%	1.200.562	BAPPEDA	
4	06		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		20%	550.000	40%	605.000	60%	665.500	80%	732.050	100%	805.255	100%	805.255	BAPPEDA	
			Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	103.500	20 Dokumen	113.850	20 Dokumen	125.235	20 Dokumen	137.759	20 Dokume n	151.534	90 Dokume n	631.878	BAG. PEMBANGUNAN - SETDA	
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Daerah														Dinas KOMINFO, STATISTIK dan PERSANDIAN	
2	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan	KK : KTP : AKTE :	KK : KTP : AKTE :	1.176.910	KK : KTP : AKTE :	1.294.601	KK : KTP : AKTE :	1.424.061	KK : KTP : AKTE :	1.566.467	KK : KTP : AKTE :	1.723.114	KK : KTP : AKTE :	7.185.153	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	01	37	Program Peningkatan Pelayanan Informasi	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah														BAG. HUMAS - SETDA	
				Rasio jumlah berita positif di media massa														BAG. HUMAS - SETDA	
				Jumlah acara kedinasan yang sesuai standar keprotokolern														BAG. HUMAS - SETDA	
4	01	25	Program Peningkatan Kerja	Persentase perikatan	4 MOU	3 MOU	263.991	5 MOU	501.583	8 MOU	752.374	12 MOU	1.053.324	15 Mou	1.579.98	47 MOU	4.151.258	BAG. KERJASAMA - SETDA	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		Sama antar Daerah	kerjasama yang ditindaklanjuti										6				
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan													Kelurahan Ketsoblak	
2	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka	7000	1.273.000	8.000	1.400.300	9.000	1.540.330	10.000	1.694.363	11.000	1.863.799	45.000	7.771.792	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik	200	30.000	225	33.000	250	36.300	275	39.930	300	43.923	1.250	183.153	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Ddaerah	Jumlah Dokumen / Arsip Daerah yang Diselamatkan DAN Dilestarikan	200	140.000	225	154.000	250	169.400	275	186.340	300	204.974	1.250	854.714	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	18	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Aksebilitas / Ketersediaan Layanan Informasi Kearsipan	3	160.000	3	176.000	4	193.600	4	212.960	5	234.256	19	976.816	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan	Jumlah sarana & Prasarana yang dipelihara secara berkala	10	40.000	12	44.000	14	48.400	16	53.240	18	58.564	70	244.204	
4	04	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	5,78%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	30,55%			
			Penetapan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat			
			Persentase SILPA terhadap APBD	19,33%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	43,50%			
			Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
			Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	56,38%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%			
2	11	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil	Ketersediaan Jumlah UKM/LKM yang dibina	1.500	158.967	1.500	174.864	1.500	192.350	1.500	211.585	1.500	278.034.626	1.500	278.772.392	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Menengah dan Kondusif															
2	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Wirausaha Baru / Wirausaha Pemula	62 Wirausaha Baru	100	945.683	100	1.040.251	100	1.144.276	100	1.258.704	100	1.654.00 4.932	100	1.658.393.847	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	11	17	Program Pengembangan Sistem Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM dan Koperasi yang Diperkuat Sistem Pemasaran	150 UM dan 40 Koperasi	200 UM, 40 Koperasi	961.683	200 UM, 40 Koperasi	1.057.851	200 UM, 40 Koperasi	1.163.636	200 UM, 40 Koperasi	1.280.000	200 UM, 40 Koperasi	1.681.98 9.032	1000 UM, 200 Koperasi	1.686.452.203	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	237 Koperasi	20 Koperasi	231.458	20	254.604	20	280.064	20	308.071	20	404.820. 946	100	405.895.143	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF															
			Mewujudkan penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial															
			Peran serta masyarakat dalam pengembagn dan pelestarian budaya meningkat															
4	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terakomodirnya dan Terwujudnya Aspirasi Masyarakat Kedalam Publikasian Pembangunan Daerah		70%	12.344.109	75%	13.578.520	80%	14.936.372	85%	16.430.009	90%	18.073.0 10	100%	19.880.311	SEKWAN
1	05	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/ Pemilukada		20%	1.340.000	40%	1.474.000	60%	1.621.400	80%	1.783.540	100%	1.961.89 4	100%	8.180.834	Badan KESBANGPOL
			Program Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada	Persentase Dukungan Penyelenggaraan yang diberikan bagi Parpol di Daerah		100%												Badan KESBANGPOL dan LINMAS
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penanganann Konflik Daerah		4 Kali	1.292.000	4 Kali	1.421.200	4 Kali	1.563.320	4 Kali	1.719.652	4 Kali	1.891.61 7	20 Kali	7.887.789	Badan KESBANGPOL
1	05	16	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan	Persentase Penyelesaian Masalah Kantribmas		20%	559.000	40%	614.900	60%	676.390	80%	744.029	100%	818.432	100%	3.412.751	Badan KESBANGPOL

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Tindak Kriminal	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual		20%		40%		60%		80%		100%		100%			
1	05	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Sasaran	0,25%	2,40%	528.600	15%	581.460	22,50%	639.606	32%	703.567	50%	773.923	100%	3.227.156	SATPOL PP	
1	05	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat	47,63%	49,02%	165.000	52,35%	181.500	55,15%	199.650	60,25%	219.615	75,08%	241.577	100%	1.007.342	SATPOL PP	
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama																
			Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun																
1	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan		20%	590.000	40%	649.000	60%	713.900	80%	785.290	100%	863.819	100%	3.602.009	Badan KESBANGPOL	
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kerjasama dengan lembaga kemitraan guna fasilitasi konflik SARA		20%	526.000	40%	578.600	60%	636.460	80%	700.106	100%	770.117	100%	3.211.283	Badan KESBANGPOL	
			MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA																
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan																
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per kapita																
3	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan		1	4.000.000	2	4.400.000	2	4.840.000	2	5.324.000	2	5.856.400	9	24.420.400	Dinas Pariwisata	
3	06	16	Program Persaingan Usaha	Jumlah Pedagang Kaki Lima & Asongan yang Dibina		340	1.295.800	370	1.425.380	370	1.567.918		1.724.710		1.897.181		7.910.989	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ketersediaan Data Ekspor Barang		12	30.000	12	33.000	12	36.300	12	39.930	12	43.923	12	183.153	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				Persentase Ekspor Barang		20	50.000	40	55.000	60	60.500	80	66.550	100	73.205	100	305.255		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
3	07	20	Program Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri Daerah	Persentase Promosi & Pemasaran Hasil IKM		20%	40.180	40%	44.198	60%	48.618	80%	53.480	100%	58.828	100%	245.303	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang Dikembangkan		11	1.375.000	13	1.512.500	17	1.663.750	19	1.830.125	23	2.013.138	83	8.394.513	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Jenis Industri Kerajinan dan Pangan yang Diserap		10	200.000	15	220.000	20	242.000	25	266.200	30	292.820	100	1.221.020	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Persentase Peningkatan sentra industri		20%	1.000.000	25%	1.100.000	50%	1.210.000	75%	1.331.000	100%	1.464.100	100%	6.105.100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pengembangan Pasar Daerah		8	916.400	10	1.008.040	10	1.108.844	10	1.219.728	10	1.341.701	48	5.594.714	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	19	Program Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Ketersediaan sarana prasarana UPT Kemetrollogian		20	54.819.000	20	60.300.900	20	66.330.990	20	72.964.089	20	80.260.498	20	334.675.477	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Pelayanan Kemetrollogian bagi masyarakat		12	54.819	12	60.301	12	66.331	12	72.964	12	80.260	12	334.675	
3	03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Petani yang Ditingkatkan Kesejahteraannya	705 Petani	-	-	600 Petani	200.000	600 Petani	220.000	600 Petani	242.000	600 Petani	266.200	2400 Petani	928.200	Dinas Pertanian
3	03	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	50	55	38.400	60	42.240	65	46.464	70	51.110	75	56.221	75	234.436	Dinas Pertanian
3	03	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alsintan	105	30	2.646.656	30	2.911.322	30	3.202.454	30	3.522.699	30	3.874.969	150	16.158.100	Dinas Pertanian
3	03	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Dokumen Kawasan Pertanian / Perkebunan	-	1	1.947.485	1	2.142.234	1	2.356.457	1	2.592.103	1	2.851.313	5	234.435.840	Dinas Pertanian
				Jumlah Produksi Tanaman Pertanian / Perkebunan	1.116	1.228		1.351		1.486		1.634		1.798		7.497		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Program Pencegahan dan Penanggulangan OPT Perkebunan	Persentase pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman Pertanian/ Perkebunan	50	55	-	60	125.000	65	137.500	70	151.250	75	166.375	75	580.125	Dinas Pertanian	
3	03	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh yang Diberdayakan	29	29	413.704	29	455.074	29	500.582	29	550.640	29	605.704	145	2.525.704	Dinas Pertanian	
3	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Presenentase Pelayanan Kesehatan Hewan	50	55	95.400	60	125.000.000	65	137.500.000	70	151.250.000	75	166.375.000	75	580.220.400	Dinas Pertanian	
3	03	22	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnyan Populasi Ternak	29.694	30.009	1.720.200	31.509,45	1.892.220	33.084,92	2.081.442	34.739,17	2.289.586	36.476,13	2.518.545	36.476	10.501.993	Dinas Pertanian	
3	03	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Produk Sapi / Kambing yang Dipasarkan	46.171	46.171	-	50.788	300.000	55.867	330.000	61.454	363.000	67.599	399.300	281.879	1.392.300	Dinas Pertanian	
3	03	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase peningkatan penerapan teknologi ternak bagi kelompok ternak	55	60	-	65	350.000	70	385.000	75	423.500	80	465.850	80	1.624.350	Dinas Pertanian	
			Meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak																
			Menurunnya Tingkat Pengangguran																
2	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi			89.505		98.456		108.301		119.131		131.044		546.437	Dinas PMD, PTSP dan NAKER	
2	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja			162.889		179.178		197.096		216.805		238.486		994.454	Dinas PMD, PTSP dan NAKER	
2	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga			185.500		204.050		224.455		246.901		271.591		1.132.496	Dinas PMD, PTSP dan NAKER	
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan																

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	5.209 KK BDT Rastra	794 KK	380.361	883 KK	418.397	883 KK	460.237	883 KK	506.260	883 KK	556.887	100%	2.322.142	Dinas SOSIAL
			MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA Mendukung pertumbuhan ekonomi															
			Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.															
			Pertumbuhan ekonomi meningkat;															
2	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak	Energi : Kkal /Kap/Hari, Protein : Gram/Kap/Hari, Lemak Gram/Kap/Hari		190.620		209.682		230.650		253.715		279.087		1.163.754	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Ketersediaan Tanaman Pangan		-	-		100.000		110.000		121.000		133.100		464.100	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	19	Program Peningkatan Diservikasi Pangan	% PPH Konsumsi	Capaian untuk PPH Kota Tual	70	120.431	72	132.474	74	145.722	76	160.294	78	176.323	78	735.243	Dinas Ketahanan Pangan
			Investasi di Kota Tual meningkat															
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah PMDN/PMA			327.525		360.278		396.305		435.936		479.529		1.999.573	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase Sistem Investasi yang Dibangun		20%	311.900	40%	343.090	60%	377.399	80%	415.139	100%	456.653	100%	1.904.181	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana & Prasarana Daerah	Ketersediaan dokumen potensi sumberdaya, sarana prasarana Daerah			135.412		148.953		163.849		180.233		198.257		826.704	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	18	Program Pengembangan Sistem Perizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan			65.390		71.929		79.122		87.034		95.737		399.212	Dinas PMD, PTSP dan NAKER

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
			MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG															
			Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan															
			Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat															
1	03	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	5 Dokumen	4 Dokumen	1.805.480	2 Dokumen	1.986.028	2 Dokumen	2.184.631	2 Dokumen	2.403.094	1 Dokumen	2.643.403	11 Dokumen	11.022.636	DINAS PUPR
1	03	15	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang	40%	40%	805.480	40%	886.028	40%	974.631	40%	1.072.094	40%	1.179.303	100%	4.917.536	DINAS PUPR
1	03	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1.278.000		1.405.800		1.546.380		1.701.018		1.871.120	100%	7.802.318	DINAS PUPR
1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Ccepat Tumbuh	Persentase Pembangunan di Wilayah Strategis dan Ccepat Tumbuh	20 Titik	11 Titik	15.303.900	11 Titik	16.834.290	11 Titik	18.517.719	12 Titik	20.369.491	12 Titik	22.406.440	57 Titik	93.431.840	DINAS PUPR
2	04	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat	-	0,01	8.384.714	0,01	9.223.185	0,01	10.145.504	0,01	11.160.054	0,01	12.276.060	0,01	51.189.517	BAG. TAPEM - SETDA
			Membangun infrastruktur yang berkualitas															
			Peningkatan Kualitas Jalan															
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	191 Km	6,6 Km	185.407.810	20 Km	56.410.200	20 Km	56.410.200	20 Km	56.410.200	20 Km	56.410.200	87 Km	411.048.610	DINAS PUPR
			Persentase Panjang Jalan Non Kota yang Dibangun	37 Km	4,5 Km	10 Km		10 Km		10 Km		44,50 Km						
1	03	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	16 Km	1,50 Km	25.710.575	6 ,0 Km	28.281.633	6 ,0 Km	31.109.796	6 ,0 Km	34.220.775	6 ,0 Km	37.642.853	25,50 Km	156.965.631	DINAS PUPR
1	03	22	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	Terlaksananya sistem informasi/ Data Base jalan & Jembatan	5 Dokumen	1 Dokumen	35.000	1 Dokumen	38.500	1 Dokumen	42.350	1 Dokumen	46.585	1 Dokumen	51.244	5 Dokumen	213.679	DINAS PUPR
1	03	31	Program Pengaturan Jasa	Cakupan Pengaturan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	596.915	12 Bulan	656.607	12 Bulan	722.267	12 Bulan	794.494	12 Bulan	873.943	60 Bulan	3.644.226	DINAS PUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Konstruksi	Konstruksi															
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus Penduduk dan Barang																
2	09	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Fasilitas transportasi, jumlah transportasi lokal Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	3	3	51.282.000	4	56.410.200	4	62.051.220	4	68.256.342	4	75.081.976	19	313.081.738	Dinas Perhubungan	
2	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis / Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	3	4	19.814.960	5	21.796.456	6	23.976.102	7	26.373.712	8	29.011.083	9	120.972.312	Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi																
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		-	489.450	1 Kec (P. Dullah Selatan)	291.250	1 Kec. (P. Dullah Utara)	320.375	Kec. Tayando Tam	352.413	Kec. P.P Kur dan P. Kur Selatan	387.654	5 Kecamatan di Kota Tual	1.841.141	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Cakupan Layanan Informasi		-	-	40%	650.750	60%	150.000	80%	200.000	100%	250.000	100%	1.250.750	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	10	17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Tenaga IT Tingkat Kota		-	-	12 Tenaga IT	235.200.000	12 Tenaga IT	235.200.000	4 Tenaga IT	90.400.000	4 Tenaga IT	90.400.000	30 Tenaga IT	651.200.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan																
			Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh																
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	52,47%	500	11.675.250	1.000	23.350.500	1.500	35.025.750	2.000	46.701.000	2.500	58.376.250	2500	175.128.750	DINAS PERKIM	
				Persentase penerapan Backlog	20.45%	100		200		300		400		500		500			
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses air minum yang aman dan sanitasi di lingkungan perumahan	20	5	5.271.945	10	5.799.140	15	6.379.053	20	7.016.959	25	7.718.655	25	32.185.751	DINAS PERKIM	
1	04	17	Program Pengembangan Perumahan	Persentase (cakupan)	141,09 Ha	30	1.000.000	60	1.100.000	90	1.210.000	120	1.331.000	140	1.464.100	140	6.105.100	DINAS PERKIM	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			prasarana perumahan dan kawasan permukiman	kawasan permukiman kumuh perkotaan										0				
1	04	18	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Ketersediaan sarana permukiman berbasis masyarakat	5	2	81.578	4	89.736	6	98.709	8	108.580	10	119.438	10	498.042	DINAS PERKIM
1	04	21	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Perumahan dan Pemukiman	Ketersediaan Database Perumahan dan Pemukiman	2	2	450.000	3	495.000	4	544.500	5	598.950	6	658.845	6	2.747.295	DINAS PERKIM
1	04	19	Program Peningkatan dan Pemnatapan Sistem Penyelenggaraan Penanganann Korban Bencana	Cakupan penanganan pasca bencana	5 Kecamatan	30%	435.099	31%	478.609	40%	526.470	45%	579.117	50%	637.028	100%	2.656.323	BPBD
1	04		Program Peningkatan Prosedur dan Tata Cara Penanggulangan Bencana	Cakupan penurunan resiko bencana kebakaran	5 Kecamatan	45%	635.416	50%	698.958	55%	768.853	60%	845.739	70%	930.313	100%	3.879.278	BPBD
1	04	19	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Pengendalian bencana kebakaran	50%	50%	1.095.059	60%	1.204.565	70%	1.325.021	80%	1.457.524	90%	1.603.276	100%	6.685.445	Dinas Pemadam Kebakaran
1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang Dibangun dengan Kondisi Baik	333 Meter	175 M	32.185.325	500 M	35.403.858	300 M	38.944.243	500 M	42.838.668	500 M	47.122.534	1975 M	196.494.628	DINAS PUPR BPBD
			Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.															
2	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah Perkotaan	(2 Kecamatan (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	114.600	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	126.060	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	138.666	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	152.533	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	167.786	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	699.644	DINAS DLH & KEBERSIHAN
			Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau															
2	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan	Prosentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-ULP dan	51 Dokumen	53 Dokumen	326.900	54 Dokumen	359.590	61 Dokumen	395.549	65 Dokumen	435.104	70 Dokumen	478.614	303 Dokumen	1.995.757	DINAS DLH & KEBERSIHAN



Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Perusakan Lingkungan Hidup	SPPL yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan															
2	05	17	Program Perlindungan & konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan area mata air yang di konservasi	Ha (Kecamatan P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	66.214	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	72.835	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	80.119	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	88.131	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	96.944	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	404.243	DINAS DLH & KEBERSIHAN	
2	05	18	Program Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Cakupan rehabilitasi lahan kritis	Ha (Kecamatan P.Dullah Utara)	Ha (Labetawi, Dullah, Ohoitel, Ngadi)	441.959	Ha (Labetawi, Dullah, Ohoitel, Ngadi)	486.155	Ha (Labetawi, Dullah, Ohoitel, Ngadi)	534.770	Ha (Labetawi, Dullah, Ohoitel, Ngadi, Taar)	588.247	Ha (Labetawi, Dullah, Ohoitel, Ngadi, Taar)	647.072	Ha (Labetawi, Dullah, Ohoitel, Ngadi, Taar)	2.698.204	DINAS DLH & KEBERSIHAN	
2	05	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dokumen	20 Dokumen	250.000	25 Dokumen	275.000	30 Dokumen	302.500	35 Dokumen	332.750	40 Dokume n	366.025	50 Dokume n	1.526.275	DINAS DLH & KEBERSIHAN	
2	05	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Ketersediaan laporan status baku mutu udara			155.000		170.500		187.550		206.305		226.936		946.291	DINAS DLH & KEBERSIHAN	
2	05	24	Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan ketersediaan RTH kawasan perkotaan	30%	40%	400.000	60%	440.000	70%	484.000	80%	532.400	90%	585.640	100%	2.442.040	DINAS DLH & KEBERSIHAN	
1	04	20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Area TPU yang dikelola	1 TPU	1 TPU	11.000	2 TPU	22.000	3 TPU	33.000	3 TPU	36.300	3 TPU	39.930	3 TPU	142.230	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN																
			Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap																
			Meningkatnya produksi perikanan																
3	01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		20.098	1.517.000	21.100	1.668.700	22.155	1.835.570	23.263	2.019.127	24.426	2.221.040	24.426	9.261.437	Dinas Perikanan	
3	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		40.195	6.927.500	42.200	7.620.250	44.310	8.382.275	46.526	9.220.503	48.852	10.142.553	48.852	42.293.080	Dinas Perikanan	
3	01	23	Program Optimalisasi Pengelolain dan Pemasaran Produksi	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)		6.669	1.184.000	7.034	1.302.400	7.386	1.432.640	7.755	1.575.904	8.143	1.733.494	8.143	7.228.438	Dinas Perikanan	
				Poklahsar yang dibina (Kelompok/		383				402				422				443	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Perikanan	org)															
3	01	25	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Usaha Perikanan yang difasilitasi (unit)		3	713.500	3	784.850	4	863.335	4	949.669	5	1.044.635	5	4.355.989	Dinas Perikanan	
				Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan		70		75		80		85		90		90			
			Pengembangan wisata alam																
			Penataan Pengembangan Potensi Pariwisata																
3	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata		1710	300.000	1796	330.000	1886	363.000	1980	399.300	2079	439.230	9451	1.831.530	Dinas Pariwisata	
3	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan		1	4.000.000	2	4.400.000	2	4.840.000	2	5.324.000	2	5.856.400	9	24.420.400	Dinas Pariwisata	
3	01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan		10	400.000	10	440.000	10	484.000	10	532.400	10	585.640	10	2.442.040	Dinas Pariwisata	
			Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan																
			Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.																
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Akses Air Minum yang Aman	710 SR	605 SR	34.488.382	665 SR	37.937.220	732 SR	41.730.942	805 SR	45.904.036	886 SR I	50.494.440	3693 SR	210.555.021	DINAS PUPR	
			Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua																
1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Presentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong dalam Kondisl Baik	700 M	692 M	6.106.600	761 M	6.717.260	837 M	7.388.986	921 Km	8.127.885	1013 M	8.940.673	4224,73 M	37.281.404	DINAS PUPR	
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Akses Sanitas	710 SR dan Ipal	605 SR dan Ipal	34.488.382	665 SR dan Ipal	37.937.220	732 SR dan Ipal	41.730.942	805 SR dan Ipal	45.904.036	886 SR dan Ipal	50.494.440	3693 SR dan Ipal	210.555.021	DINAS PUPR	
			Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan																
			Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.																

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R	8,22%	9,2%	114.600	9,87%	126.060	9,87%	138.666	10,78	152.533	11,23%	167.786	13,44	699.644	DINAS DLH & KEBERSIHAN

#### **7.1.4 Program Unggulan**

##### **1. program peningkatan pelayanan kehidupan beragama.**

Terus menggalakkan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan asn, pelatihan bagi penyuluh dan orientasi bagi pemuka agama; serta pemberian bantuan bagi kegiatan ritual, seperti mtq, pesparawi, dan pesparani; secara rutin melaksanakan forum dialog antarumat beragama, pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan, seperti sumbangan kitab suci, lektur keagamaan, dan pengembangan perpustakaan di tempat peribadatan; memberikan bantuan rehabilitasi secara bertahap tempat ibadah; terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, efisiensi, transparansi, serta penyelenggaraan ibadah haji; memberikan pelayanan pembinaan agama bagi keluarga melalui peningkatan kemampuan para petugas pencatat nikah, peningkatan pelayanan dan pengelolaan dana sosial yang berbasis agama, seperti dana infak, zakat, wakaf, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya.

##### **2. Program peningkatan kualitas pendidikan.**

Dalam usaha mendukung peningkatan harkat martabat hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi masyarakat miskin, maka pendidikan akan diarahkan pada pemenuhan hak-hak seluruh warga untuk menyelesaikan sampai jenjang menengah, sedangkan bagi yang berprestasi akan dijamin sampai pada jenjang pendidikan tinggi.

Mendorong pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung sekolah. Menciptakan guru yang “sakti” (**s**ungguh-sungguh, **a**ktif, **k**reatif, **t**anggap, dan **i**dealis) lewat perhatian mulai

dari rekrutmen calon guru, pembinaan dan pengangkatan, dan penempatan guru, yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui skema :

- a. Pemberian tunjangan profesi untuk guru yang sudah dapat sertifikat profesi.
- b. Pemberian biaya tambahan penghasilan kepada guru.
- c. Tunjangan untuk tenaga guru di kecamatan dan desa-desa terpencil atau di pulau-pulau.
- d. Pelaksanaan sertifikasi pendidik melalui pendidikan dan latihan profesi guru (plpg).

Melaksanakan mou dengan universitas terkemuka dalam rangka peningkatan kualitas guru dan dosen mulai dari S1, S2, dan S3, menyediakan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, pertukaran guru antara sekolah unggulan dan non unggulan. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, melaksanakan pertukaran pelajar, pengembangan manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah melalui penerapan model manajemen berbasis sekolah (mbs) yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifitas sekolah (otonomi sekolah) diantaranya melalui kursus/les tambahan di luar jam sekolah pada hari-hari tertentu bagi siswa miskin yang diakomodasi oleh sekolah, sehingga siswa miskin dapat memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat dan menghindari kasus putus sekolah. Membangun ilmu sama saja dengan bangun peradaban manusia. Memberi bantuan untuk menghasilkan doktor dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya doktor-doktor yang ada diberi dana untuk penelitian sehingga hasil penelitiannya diharapkan dapat berkontribusi untuk kemajuan kota tual di berbagai bidang. Memajukan

pendidikan di sekolah agama melalui sinergi pendanaan bersama dengan kementerian agama sehingga sekolah ini tidak lagi jadi sekolah alternatif untuk masyarakat tapi justru menjadi sekolah favorit atau pilihan utama. Hal lain yang juga penting adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas secara merata di semua wilayah.

### **3. program peningkatan kualitas kesehatan.**

Dalam lima tahun ke depan, kesehatan akan diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Program tersebut akan ditekankan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan terjaganya gizi masyarakat. Dalam hal ini jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah harus benar-benar mampu melayani seluruh warga masyarakat yang memang berhak, dengan mengoptimalkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pihak-pihak lainnya. Kami berkomitmen untuk menyediakan jaminan penyangga sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang terlewatkan mendapatkan pelayanan. Target yang dicapai adalah universal health coverage.

Mendorong percepatan pembangunan baru rsud noho renuat, rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu. pembangunan puskesmas rawat inap dengan memiliki empat ruang inap. Membangun mou dengan universitas pattimura ambon dalam bentuk pengiriman siswa-siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan kedokteran di fakultas kedokteran unpatti.

Mengirim para dokter muda untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis secara bertahap untuk mendukung pelayanan medis pada rumah sakit umum daerah dan semua jenjang fasilitas kesehatan.

#### **4. Program peningkatan pelayanan publik.**

Kegiatan yang dilakukan yaitu: mengoptimalkan peran perangkat daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam mendukung percepatan pelaksanaan berusaha yang bebas kkn di kota tual; pembenahan manajemen pelayanan publik pada semua unit pemerintahan/opd; mengembangkan integrasi sistem informasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; merubah budaya organisasi yang semula melayani secara tradisional menjadi pemerintahan yang berbasis elektronik.

#### **5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.**

Kegiatan yang dilakukan yaitu Meminimalisir kebocoran keuangan negara/daerah melalui :

- a. Penataan manajemen barang milik daerah.
- b. Meningkatkan peran inspektorat kota tual untuk mengawal tata kelola keuangan pemerintah daerah dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka meraih opini bpk wajar tanpa pengecualian (WTP).
- c. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyelesaian pembangunan proyek-proyek yang tersebar di kota tual .
- d. Penguatan peran inspektorat kota tual dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, termasuk

fokus pada penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas.

- Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kota surabaya dalam hal tata kelola keuangan berbasis teknologi dan informasi.
- Menyediakan lebih banyak dana terutama bagi 9 desa dengan tipologi sangat tertinggal (kaimear, sermaf, kanara, yapas, rumoin, hirit, mangur niela, mangur tiflean, tam ngurhir) dan 12 desa yang bertipologi tertinggal (tubyal, finualen, lokwirin, warkar, langgiar, ohoiel, yamru, yamtel, labetawi, tamedan, dullah laut, dullah darat) untuk dapat mewujudkan desanya sebagai desa berkembang dan maju dan/atau mandiri, dengan tetap mendorong eksistensi beberapa desa yang telah bertipologi berkembang untuk juga dapat mempercepat perwujudan desanya sebagai desa maju dan/atau mandiri.
- Menggunakan apbd untuk mengembangkan program perlindungan sosial (diantaranya kebijakan raskin daerah).

#### **6. Program reformasi birokrasi.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Memantapkan aparatur sipil negara yang berdimensi akhlak (profesional, amanah, santun);
- b. Memantapkan aparatur sipil negara yang berdimensi karakter (disiplin, kreatif, dan inovatif); dan
- c. Memantapkan aparatur sipil negara yang berdimensi kualitas (mampu dan mau bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat dan tuntas).

#### **7. Program pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:



- a. Membina hubungan kerjasama yang harmonis dengan kekuatan partai politik pada dewan perwakilan rakyat daerah kota tual; dan
- b. Secara berkala melakukan penyuluhan politik kepada masyarakat.

**8. Kedua, program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Membina kerjasama yang erat dan harmonis dengan jajaran aparat penegak hukum dalam rangka menekan angka kriminalitas.
- b. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan badan narkotika nasional (bnn) kota tual dalam rangka pelaksanaan kapasitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) di kota tual.
- c. Mendorong terlaksananya penegakkan hukum secara adil dan merata.
- d. Mendorong dan meningkatkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adat dan petuanan antar desa.

**9. Program pengembangan ekonomi masyarakat.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Menyiapkan lokal pasar dan pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku ekonomi dengan skema:
  - Modal usaha maupun lokal pasar diberikan dengan syarat-syarat yang ringan dan menguntungkan.
  - Cicilan bunga untuk modal usaha akan dibayar setelah 4 sampai 6 bulan menjalankan usaha.
  - Sewa lokal pasar akan dibayar setelah 4 sampai 6 bulan menjalankan usaha.

- b. Bantuan sarana prasarana nelayan dan budidaya rumput laut;
- c. Pengembangan kawasan kuliner ikan segar;
- d. Bantuan traktor dan pompa air serta bibit tanaman produktif.
- e. Membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro (lpm) yang memberi manfaat pada penduduk miskin;
- f. Membangun sentra-sentra kerajinan berbasis potensi sda lokal, diantaranya kerajinan gerabah dan anyaman di tayando tam, perlengkapan rumah tangga berbahan alumunium di desa ohoitel dan watran;

**10. program penguatan kapasitas regulasi daerah tentang penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atasnya.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Penyelenggaraan investasi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atasnya.
- b. Bagi regulasi daerah yang telah ada agar diimplementasikan secara baik dan sungguh-sungguh dan diberikan sanksi tegas jika tidak dilaksanakan dengan baik.
- c. Evaluasi terhadap regulasi daerah yang kontradiktif dengan upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan investasi.
- d. Menyediakan regulasi daerah untuk semua jenis pelayanan perizinan sesuai amanat ketentuan perundang-undangan di atasnya, dengan tetap mengedepankan terlaksananya tujuan dan prinsip pelayanan terpadu satu pintu.

**11. Program peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.**

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Menyusun roadmap investasi kota tual.
- b. Membangun koordinasi lintas instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan kinerja penanaman modal.
- c. Mempertahankan eksistensi beberapa investor di bidang perikanan yang telah ada yakni pt. Karya yang telah memanfaatkan lahan di sekitar ppn dumar 3 ha, pt perum perindo 2 ha, pt. Maluku prima makmur dan mendorong 3 perusahaan lainnya yang saat ini sedang melakukan survey di lapangan.

**12. Program pemberian insentif dan kemudahan dalam menjalankan investasi dan usaha.**

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Untuk pemberian insentif dapat berbentuk:
  - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Pemberian dana stimulan dan/atau pemberian bantuan modal.
- b. Untuk pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - Penyediaan data dan informasi jenis-jenis pelayanan dan peluang penanaman modal.
  - Penyediaan sarana dan prasarana.
  - Penyediaan lahan atau lokasi.
  - Pemberian bantuan teknis dan/atau percepatan pemberian izin.

**13. Program pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur umum lainnya.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, juga akan terus diupayakan melalui

penataan kawasan kumuh lewat program kotaku, pembangunan kawasan pemukiman baru dan rumah susun, bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan taman kota dan ruang terbuka publik. Ke depan, kita juga akan membenahi lorong sebagai sel terkecil dari kota ini. Penataan lorong akan dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan kualitas jalan lingkungan, drainase, jalur pedestrian, penghijauan, penerangan jalan, serta pemberdayaan ekonomi warga dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

#### **14. Program pembangunan infrastruktur sejarah.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pembangunan tugu pemekaran kota tual; dan
- b. Pembangunan museum pemekaran kota tual.

#### **15. Program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pembangunan dermaga fery di desa tayando langgiar dan Desa Tam.
- b. Penambahan kapal perintis dan kapal penumpang.
- c. Peningkatan jalan aspal lingkaran kur
- d. Peningkatan jalan tayando tam

#### **16. Program pembangunan infrastruktur komunikasi dan kelistrikan.**

Dengan berkembangnya media dan teknologi, Kota yang pertumbuhannya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang lebih mumpuni. Untuk itu, dizaman yang serba digital ini, kemampuan pengawasan dari pihak Pemerintah Kota perlu diupgrade. Dengan adanya

pengawasan kota secara realtime sehingga mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota tengah mengembangkan suatu konsep pengawasan dengan adanya Tual Smart City, Program-program dalam pengembangan *Smartcity* di kota Tual antara lain :

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pembangunan jaringan seluler di Pulau-Pulau Berpenghuni.
- b. Pembangunan pembangkit tenaga listrik diesel (PLTD) di desa tayando yamtel, Ohoiel, Langgiar dan Yamru, Desa Tam, Desa Kaimear.

#### **17.program pembangunan kepariwisataan**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata.
- c. Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor pariwisata.
- d. Optimalisasi produk-produk lokal dan optimalisasi hotel sebagai pendukung promosi pariwisata.
- e. Promosi pariwisata di kota tual, melalui berbagai media dan melalui kemitraan dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.
- f. Mengembangkan dan memperkuat data base dan jaringan sistem informasi kepariwisataan.
- g. Mengembangkan sekaligus memantapkan koordinasi dan jaringan kerja antar sektor, instansi, wilayah, daerah dan pelaku pariwisata.

- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dan ukm dalam membangun industri pariwisata.
- i. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata.
- j. Memperluas diversifikasi dan meningkatkan daya saing daerah tujuan dan produk wisata.
- k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal.
- l. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan (bank maupun non bank) baik lembaga pemerintah maupun swasta untuk menciptakan investasi baru di bidang wisata.
- m. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hotel, dan memperbaiki manajemen pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan hotel.
- n. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan pengusaha kuliner sehingga dapat menyusun dan mempunyai *bussines plan* yang jelas, kreatif dan mampu membaurkan masakan khas kota tual dengan selera pasar.

#### **18. Program pengembangan budidaya perikanan**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Penyediaan sarana penunjang budidaya rumput laut
- b. Panen raya rumput laut
- c. Penyediaan kebun bibit rumput laut

**19. Program pengembangan perikanan tangkap.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pendataan program kartu nelayan dan asuransi nelayan
- b. Melanjutkan kerjasama dengan perusahaan perikanan yang berasal dari indramayu dan PT. Djuana dari pati-jawa tengah yang menggunakan kapal di atas 50 Gt untuk kegiatan bongkar muat di ppn dumar.

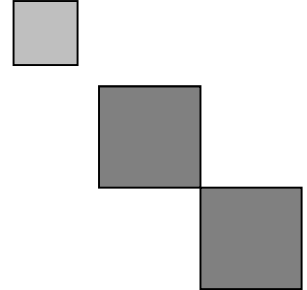
**20. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan.**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan pasca panen hasil perikanan pada 2 kecamatan.

**21. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Menerapkan program *eco-office* di setiap OPD dengan berbagai cara seperti mengurangi pemakaian plastik, kertas, penghematan air.
- b. Meningkatkan peran PKK Kota Tual dalam melakukan sosialisasi pembangunan berwawasan lingkungan kepada ibu-ibu rumah tangga di kota tual.



# BAB VII

## **ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH**





## **BAB VII**

### **ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH**

#### **7.1. Kebijakan Umum**

##### **7.1.1. Arah Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah Kota Tual ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis perikanan, jasa dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Memperhatikan kondisi fisiografis dan geografis, sebagai wilayah perkotaan yang sedang berkembang informasi tentang pengembangan setiap sub wilayah harus lebih ditingkatkan dalam mengurangi disparitas antar wilayah terutama pada kecamatan-kecamatan terluar dengan akses transportasi yang masih minim maka kebijakan pengembangan wilayah kota tual dibagi menjadi:

##### **7.1.1.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang**

Dalam mendukung arah pengembangan wilayah, diperlukan jaringan prasarana wilayah yang ditekankan pada pengembangan prasarana pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Lokal (PKW dan PKL). Adapun pengembangan jaringan prasarana dimaksud berupa jaringan prasarana transportasi meliputi pengembangan: jaringan jalan; angkutan umum aglomerasi perkotaan; pelabuhan; terminal; jaringan prasarana energi; dan jaringan prasarana sumber daya air. Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah dilakukan antara lain melalui:

- 1) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
- 2) Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung kawasan-kawasan strategis;
- 3) Pengembangan sistem prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan domestik, sektor industri dan pertanian;

#### **7.1.1.2. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya**

##### **1. Kawasan Lindung**

Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada : kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

- a. Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar 30%, yang terdiri RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%;
- b. Rehabilitasi lahan kritis;
- c. Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air;
- d. Peningkatan upaya mitigasi dan adatasi pada Kawasan Rawan Bencana.

##### **2. Kawasan Budidaya**

Fokus perwujudan kawasan budidaya diarahkan pada : kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Pemantapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- b. Pengembangan kawasan agropolitan;
- c. Pengembangan kawasan industri;
- d. Pengembangan kawasan pariwisata;
- e. Peningkatan kawasan permukiman.

#### **7.1.1.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis**

Penetapan kawasan strategis didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional pemerintah Kota Tual terhadap ekonomi, dan lingkungan bagi kepentingan tingkat skala Kota. Kawasan tersebut terbagi menurut 2 sudut kepentingan yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  - a. Pengembangan kawasan agropolitan yang di fokuskan pada Kecamatan Pulau-pulau kur, kur selatan dan Dullah Utara;
  - b. Pengembangan kawasan minapolitan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Dullah Utara, Dullah Selatan;
  - c. Pengembangan kawasan penangkapan dan budidaya akan di laksanakan pada kecamatan Tayando-Tam, Pulau Kur Selatan, Dullah utara dan selatan;
  - d. Pengembangan kawasan perdagangan dan Jasa yang akan dilakukan pada kecamatan Dullah Selatan;
  - e. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan wisata bahari yang akan dilakasanakan pada kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Dullah Utara, dan Kecamtan Kur

Tam Tayando.

Pengembangan konsep kawasan agropolitan di kecamatan Dullah utara dibangun berdasarkan kriteria kondisi potensi eksisting alam, sosial dan geografis yang mendukung upaya pengembangan agropolitan diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sektor lain.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan agropolitan antara lain sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan, air, tenaga kerja, modal dan teknologi.
- (2) Memperluas struktur pembangunan pertanian melalui diversifikasi, teknologi sumber daya, produksi dan konsumsi.
- (3) Meningkatkan efisiensi sistem agrobisnis dengan memanfaatkan IPTEK untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdaya saing tinggi sehingga memberi dampak peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen.

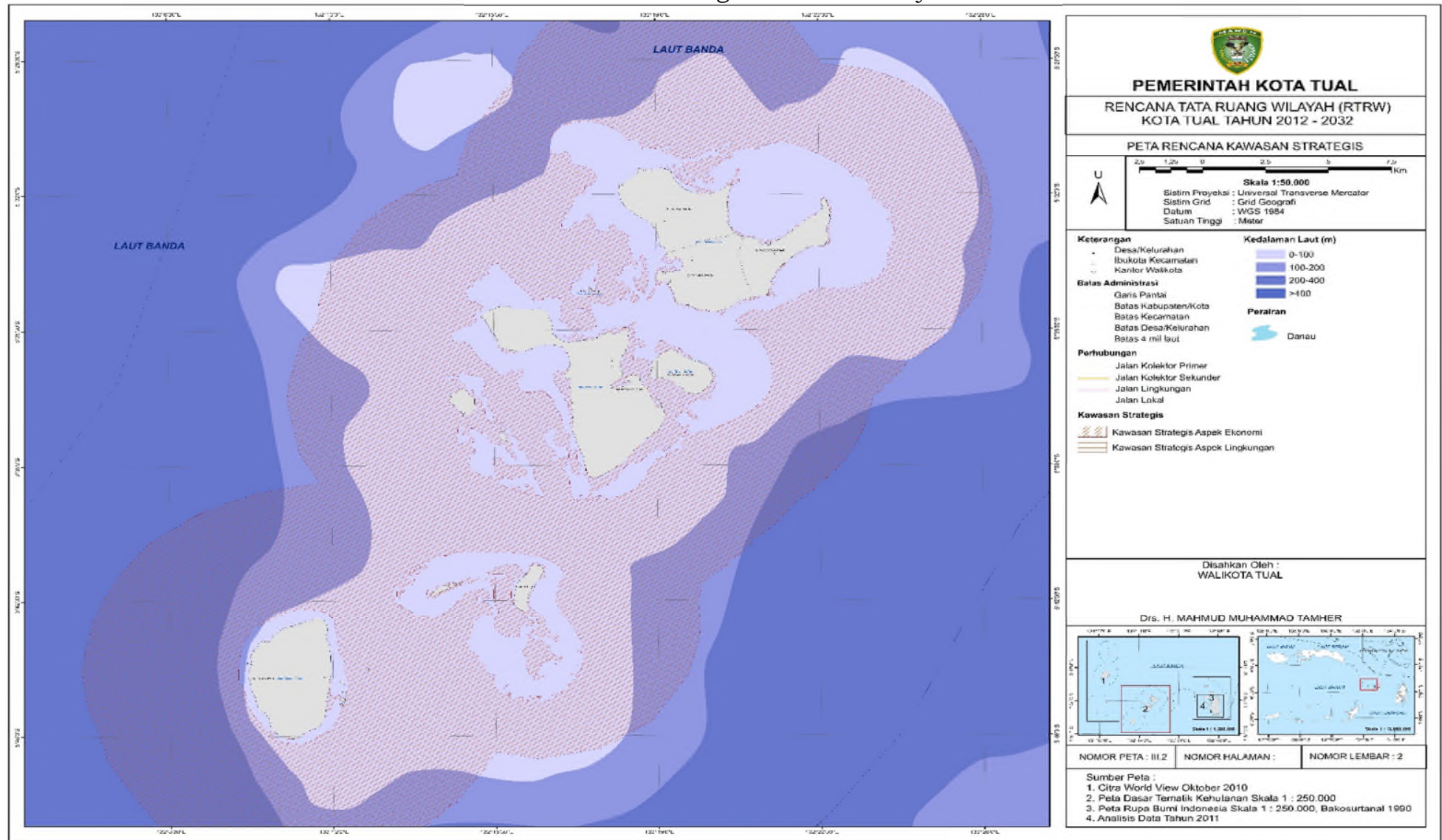
Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan minapolitan antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan nelayan;
2. pengadaan fasilitas penangkapan dan nelayan;
3. Pengembangan sarana dan prasarana;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya;

5. Pengembangan infrastruktur penunjang berupa jalan, Pembangunan Dan Pengembangan transportasi Multimoda dan Perkotaan, telekomunikasi.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi
  - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan konservasi penyu, dilakukan di Pulau Woning di Kecamatan Kur Selatan;
  - b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan konservasi mangrove pada Kawasan Dullah utara dan Dullah selatan;
  - c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan konservasi pada garis sempadan danau di Kecamatan Dullah Utara;
  - d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan konservasi pada garis sepadan pantai Kota Tual.

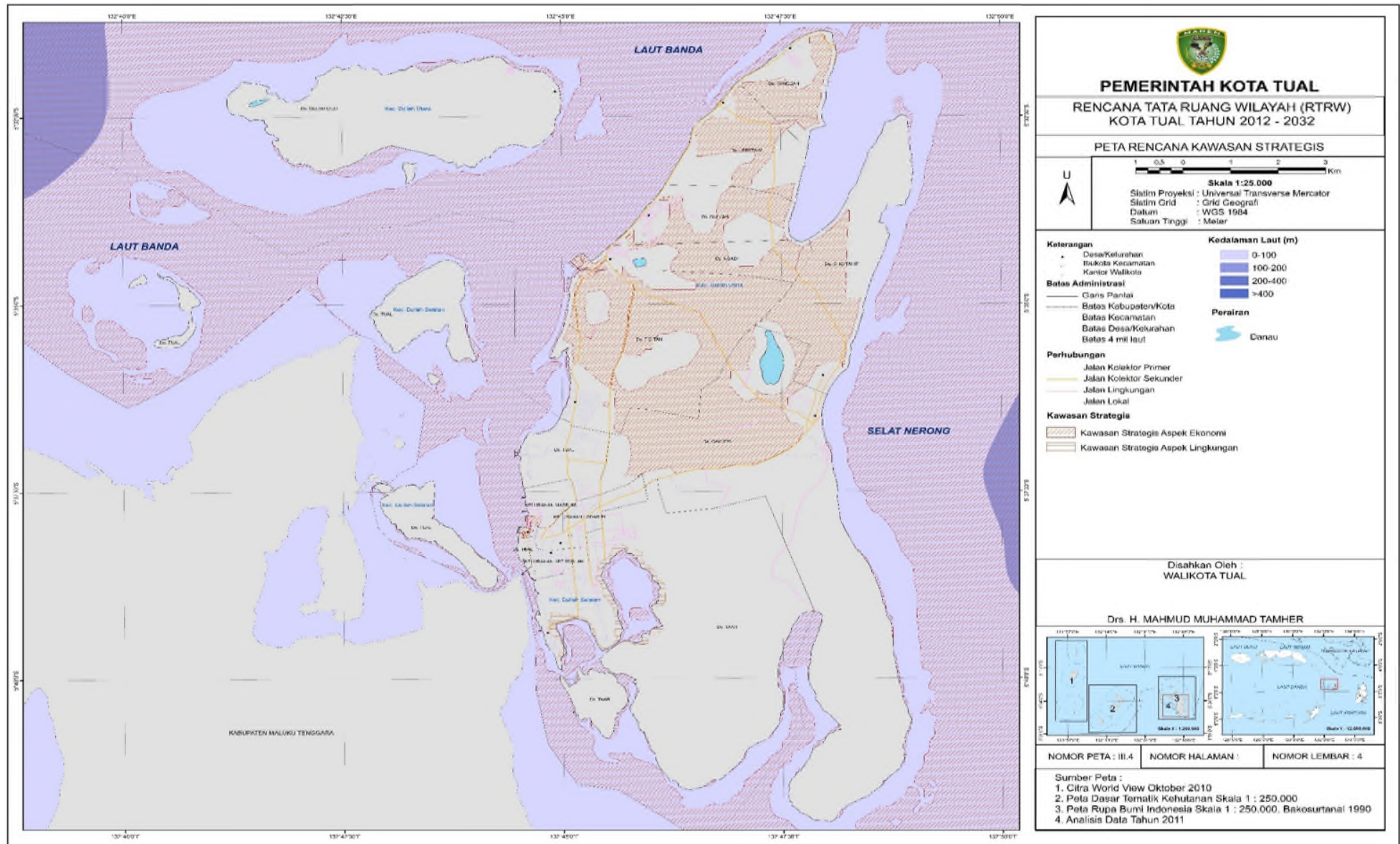
Kawasan strategis lingkungan hidup secara lengkap dapat dilihat pada peta pada Gambar 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4

Gambar 7.1  
Peta Kawasan Strategis Kecamatan Tayando-Tam



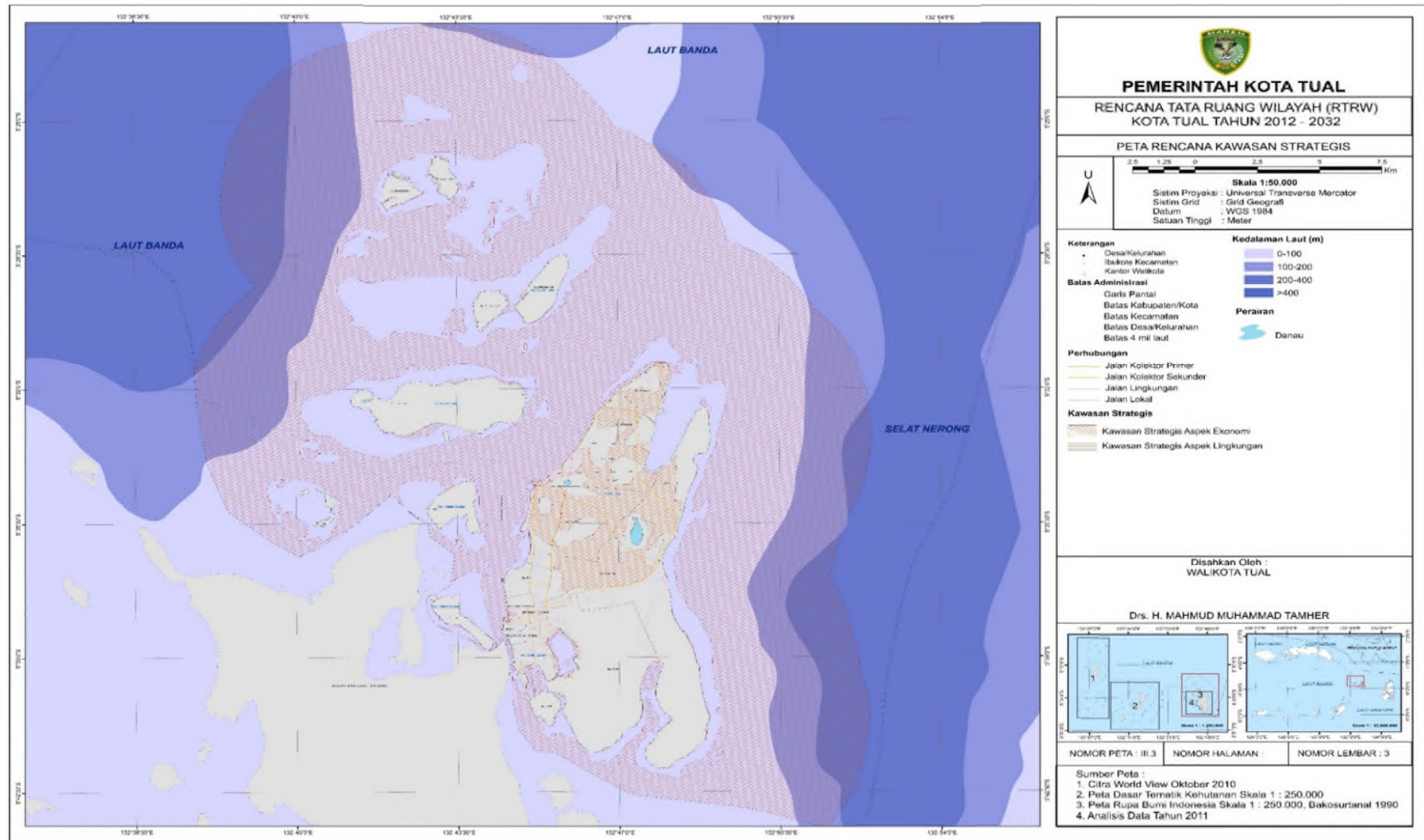


Gambar 7.2  
Peta Kawasan Strategis Kecamatan Dullah Selatan

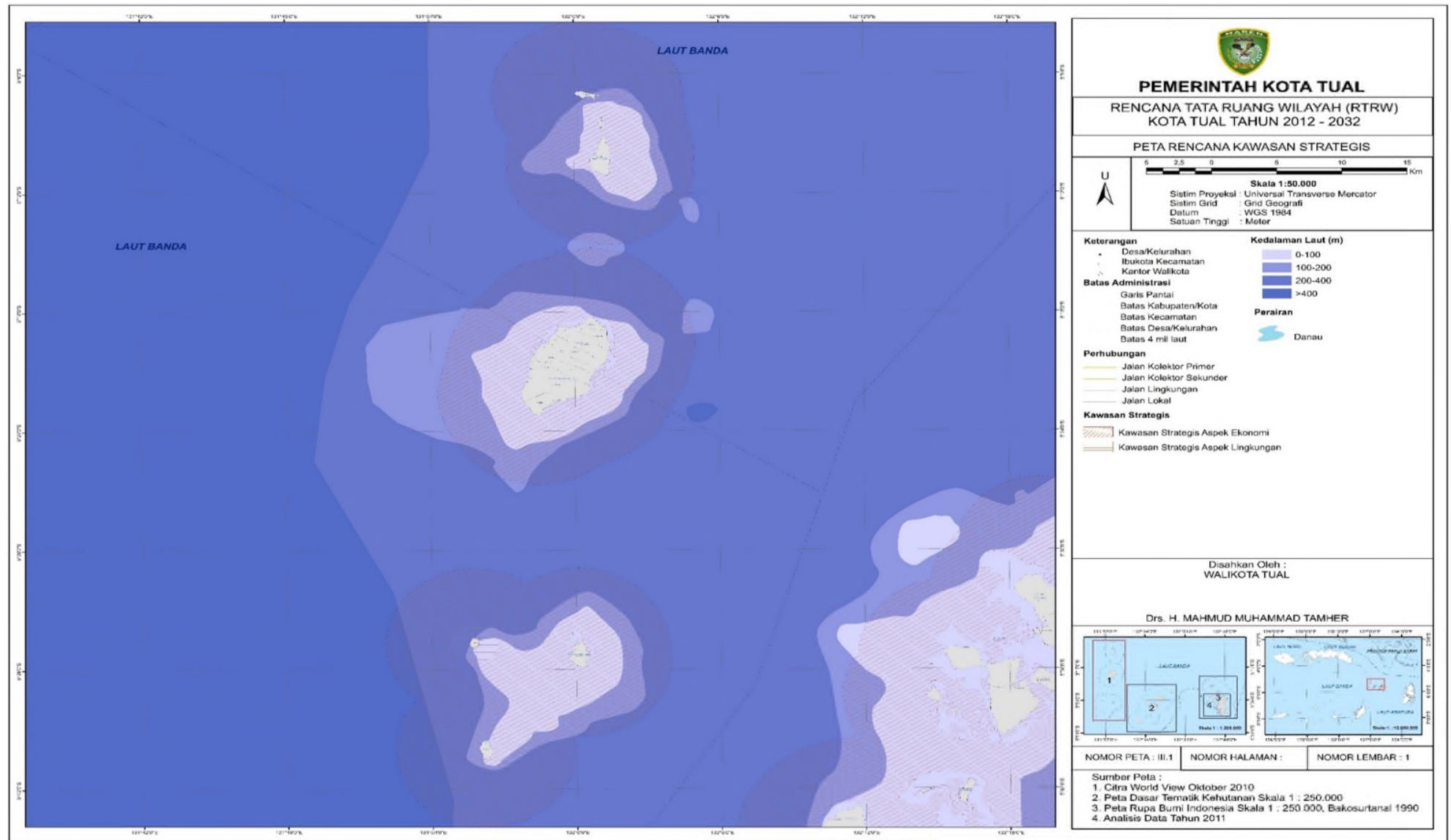




Gambar 7.3  
Peta Kawasan Strategis Kecamatan Dullah utara



Gambar 7.4  
Peta Kawasan Strategis Pulau-Pulau Kur



## **7.2. Pengembangan Perwilayahan**

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kota Tual yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 3 (Tiga) wilayah pengembangan menurut 3 pulau utama yaitu pulau Dullah, Pulau Kur dan Tayando. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan fungsi pelayanan, mengurangi kesenjangan, serta untuk menentukan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Tual dilakukan pembagian wilayah dalam unit-unit kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit kawasan fungsional yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Sistem Perwilayahan (Regionalisasi wilayah). Pertimbangan dalam Penetapan Sistem Perwilayahan di Kota Tual berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan wilayah, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan wilayah tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.
- b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala wilayah.
- c. Adanya batas wilayah administrasi.
- d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .

- e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara wilayah pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).
- f. Memantapkan peran regionalisasi wilayah dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g. Kemudahan dalam pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.

#### **7.2.1 Kepulauan Dullah**

Secara administrasi Kepulauan Dullah di bagi menjadi 2 kecamatan yaitu Dullah Utara dan Dullah Selatan.

1. Dullah selatan dibagi menjadi 4 pulau besar yaitu pulau Dullah, Fair, Ut dan Ubur yang diarahkan sebagai PKW dan PKL, Karakteristik Perwilayahan Kota Tual Secara umum adalah kepulauan dan. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial, tersedia dan tersebar. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan rendah-sedang, sehingga dimasa yang akan datang dengan melihat fungsi kawasan harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara bijaksana untuk keberlanjutan ekonomi,

Pulau Dullah selatan, Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). menjadi pusat sektor ekonomi industri dan jasa bagi wilayah hiterland, oleh karena itu peningkatan konektifitas dan aksesibilitas dan peningkatan

infrastruktur meliputi jalan antar wilayah, kota Tual dan kecamatan, dan antar kabupaten,kota, fasilitasi pengembangan sistim jaringan transportasi darat dan laut meliputi

- Ruas Lebetawi-Difur- Ohoitahit, ruas Ohoitahit-Nam, ruas Watran-Tual, Pengembangan terminal tipe B di Kelurahan Masrum
- Pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi ruas lingkaran Tual- Tamedan di Pulau Dullah, ruas Tual-Ohoitel-Ohoitahit
- Pengembangan terminal tipe B di Kelurahan Masrum
- Pembangunan terminal tipe B di kelurahan Lodar el
- Pembangunan Pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) angkutan kota dengan trayek: Tual-Ohoitahit,Tual-Fiditan, Tual dullah, Tual Taar, Tual Langgur, Ohoitahit-Tamedan-Labetawi Dullah-Ngadi-Ohoitel,Ohoitel-Watran-Luv
- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tual-Tayando Yamtel- Langgiar, Tam, Tubyal, Kaimear, di kelurahan Masrum, Desa Tayando Yamtel,Desa Tubyal
- Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pengembangan Pelabuhan Pengumpul di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Pengumpan di Pelabuhan Lokwirin dan Pelabuhan Yamtel, Kaimear, Tam dan Pelabuhan Khusus Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Angkatan Laut di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Perikanan Nasional di Desa Tual, dan Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan

di Kelwik

Selain itu Pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan lainnya yaitu dengan Pembangunan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik PLTD, PLTMG, genset komunal, dan pengembangan jarsistim prasarana telekomunikasi disemua pulau berpenghuni dengan pengembangan jaringan terestrial pada wilayah perkotaaan Kecamatan Dullah selatan, Pulau Ut dan Pulau Ubur.

Pemerintah Kota Tual memiliki Program Strategis yaitu Program Tuntas kumuh yang selaras dengan konsep *Water Front City* dalam bentuk Reklamasi pada wilayah pesisir bagian barat Pulau Dullah terutama pada kawasan pantai Kiom-Wearhir Tual dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi, terutama memperbaiki beranda kota, penyediaan Ruang terbuka Hijau, pusat pengembangan ekonomi kreatif, kawasan wisata kuliner, kawasan *water sport centre* dan lokasi pembangunan *Landmark* Kota Tual.

2. Kecamatan Dullah Utara terdiri dari desa Ngadi-Dullah-Dullah Laut (Duroa) Labetawi Desa Tamedan, sesuai dengan RTRW Kota Tual, dan potensi maka arahan pengembangan Kecamatan Dullah Utara sebagai kawasan wisata dan budidaya. Dalam, pengembangan kawasan strategis, kecamatan Dullah Utara akan di kembangkan menjadi kawasan minapolitan dan agropolitan. Dalam konteks itu, maka beberapa strategi dan prioritas dalam pengembangan kawasan antara lain:

- Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut

- a. Pengembangan jalan local meliputi ruas Lebetawi-Difur- Ohoitahit, ruas Ohoitahit-Nam, Ruas Watran-Tual, dan Jalan Lingkar Pulau Fair
  - b. Pembangunan terminal tipe C di Desa Ohoitel
- Pengembangan Pelabuhan Pengumpul di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Pengumpan di Pelabuhan Lokwirin dan Pelabuhan Yamtel, dan Pelabuhan Khusus di Pelabuhan Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Angkatan Laut di Kelurahan Masrum, Pembangunan dan pengembangan jaringan tenaga listrik dan distribusi minyak dan gas bumi
  - a. Pembangunan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik PLTD,PLTMG jaringan distribusi minyak dan gas bumi
- 1. Pengembangan sistem prasarana sumber daya air
  - a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
  - b. Pengendalian/rehabilitasi pengelolaan Danau ngadi
  - c. Pengendalian/rehabilitasi pengelolaan Danau fanill
  - d. Pembangunan dan peningkatan sistem pengamanan pantai pelindung pemukiman di kecamatan Dullah Utara,
- 2. Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan RTH
  - a. Pengembangan dan pengelolaan RTH sempadan danau
  - b. Pengembangan dan pengelolaan RTH sempadan

pantai

- c. Pengembangan dan pengelolaan RTH taman lingkungan pemukiman
  - d. Pengembangan dan pengelolaan RTH lapangan terbuka
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri di desa ngadi
  4. Pengembangan kawasan wisata alam

### **7.2.3 Kepulauan Kur**

Dari segi geografis dan potensi alam pulau-pulau Kur di prioritaskan menjadi kawasan agropolitan, dari keseluruhan luas area Kecamatan Kur Selatan sebesar 38,62 Km<sup>2</sup> 3.862,64 Ha) yang digunakan sebagai Areal Pertanian (pertanian, perkebunan, dan kehutanan) adalah sebesar 17,47 Km<sup>2</sup> (1.747 Ha) atau sekitar 45% dari luas areal. Sedangkan luas areal pertanian padi palawija sebagai bahan makanan pokok adalah sebesar 42 Ha (0,42 Km<sup>2</sup>). produksi dari pertanian padi palawija yang paling dominan di Kecamatan Kur Selatan adalah Ketela Pohon sebesar 61,6 ton selama tahun 2016.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan memiliki komoditi unggulan juga harus perlu pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung pengembangan sistim dan usaha agribisnis khususnya pangan, Jalan Lingkar Pulau Kur ,irigasi/pengairan, pelabuhan penyebrangan penunjang transportasi bongkar muat barang dan orang antar pulau dan yang di lengkapi dengan depo BBM, pengembangan jaringan teristerial (telekomunikasi), sarana pengelolaan hasil



pertanian dan fasilitas umum lainnya yang dapat di lihat pada tabel 7.1

Selain itu Kecamatan pulau kur dan Kur selatan merupakan wilayah kawasan budidaya dan perikanan tangkap, pulau woning merupakan kawasan strategis lingkungan hidup dalam pengembangan kawasan konserfasi punyu belimbing, maka pengembangan kecamatan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) harus di tunjang dengan sarana-prasana transpotasi laut yang memadai dalam menunjang aktifitas antar pulau PKW.

#### **7.2.4 Kepulauan Tayando Tam**

Secara geografis dan potensi kecamatan Tam-tayando mempunyai kesamaan potensi dan pengembangan sebagai wilayah kawasan budidaya, perikanan tangkap dan kawasan wisata bahari yang, penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tam dan Desa Langgiar, Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Taman dan Pulau Tayando, sarana telekomunikasi melalui Pembangunan menara telekomunikasi berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan perencanaan pengembangan jaringan sistem telekomunikasi berbasis gelombang radio, pada wilayah kepulauan.

### **7.3. Arahlan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Kabupaten/Kota dan Negara.**

#### **7.3.1. Arah Perbatasan Kabupaten/Kota**

Pembangunan dan pelayanan publik seringkali terlupakan pada wilayah perbatasan daerah. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, Kondisi yang

dinamis Kota Tual) dan pusat kegiatan wilayah (PKW) yang didukung dengan sektor utama kota sebagai pusat jasa dan perdagangan tentunya berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan pembangunan dan kepadatan penduduk yang memiliki kecenderungan didominasi faktor urbanisasi penduduk dan perubahan lingkungan yang terus berubah, maka untuk mendukung dan mengatur kondisi tersebut, dalam penataan ruang wilayah Kota Tual bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota sebagai PKW yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (RTRW Kota Tual, 2012-2032). Aktualisasi pengembangan *water front city* dilakukan pada pesisir pantai Desa Taar hingga Desa Tamedan dengan pembangunan talud Laut, dan Program Tuntas kumuh yang selaras dengan konsep *Water Front City* dengan pengembangan ekonomi kreatif, kawasan wisata kuliner, kawasan *water sport centre* dan lokasi pembangunan *Landmark* Kota Tual yang dilakukan pada Kawasan pantai Kiom-Wearhir, kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pembangunan *water front city* adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang lainnya antara lain:

- Pembangunan jembatan fair;
- Penyediaan akses air bersih;
- Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi
- Pengendalian Banjir, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai

### **7.3.2 Arah Perbatasan Negara.**

Arahan kebijakan nasional yakni Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan agenda Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, terutama terkait pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah dan juga menjadi arah pembangunan nasional. Dengan pengembangan kawasan perbatasan, diharapkan dapat meningkatnya kualitas kawasan perbatasan negara melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan pengembangan kawasan perbatasan diharapkan penetapan dan penegasan batas wilayah negara dapat diselesaikan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pertahanan keamanan dan penegakan hukum, demi semakin tegaknya keutuhan wilayah Indonesia. Disamping itu, pembangunan kawasan perbatasan dapat meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola perbatasan negara melalui penataan dan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola perbatasan yang moderen, efektif dan efisien, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika regional dan global. Kota Tual sebagai kawasan perbatasan tidak hanya sebagai kawasan yang membutuhkan dukungan infrastruktur tetapi lebih sebagai wilayah pertumbuhan baru, yang mampu menjadi *leverage* atau pengungkit bagi pembangunan di kawasan

sekitarnya, program kegiatan dan kegiatan pembangunan perbatasan negara, Kota Tual dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Dalam PEPRES 33 Tahun 2015 Kota Tual masuk dalam kawasan perbatasan negara, Kota Tual memiliki keunggulan dalam bidang pertahanan dan keamanan, karena merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain yang dapat dijadikan sebagai basis pertahanan keamanan. Pembangunan infrastruktur militer yang lengkap yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam mempertahankan diri dari serangan musuh, ataupun sebaliknya menjadi basis kekuatan untuk tentara melakukan penyerangan kepada musuh. Pada saat tertentu, bila negara dalam kondisi perang maka pihak musuh tidak mudah untuk melacak kekuatan militer yang ada. Dan bila pihak musuh melakukan serangan maka dapat dipastikan membutuhkan logistik perang dalam jumlah banyak, oleh karena Kota Tual berada pada wilayah perbatasan, maka perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah Kota Tual terutama pembangunan infrastruktur militer yaitu pengembangan dan pemantapan Lanal Tual Yang di laksanakan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada gugus Kepulauan Kei. Selain menggunakan pendekatan keamanan, pembangunan kawasan tersebut juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, termasuk pulau-pulau kecil dan pulau terluar. Rencana program pembangunan wilayah dapat pada tabel berikut.

**Tabel 7.1 Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR PROGRAM UTAMA	INSTANSI PELAKSANA	LOKASI
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN			
Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Penyangga			
1	penyusunan dan penetapan RDTR	Kemen Agraria dan Taru	PKW Tual-Langgur, Benjina
2	Peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan	Kemendagri dan/atau Pemda	PKW Tual
3	Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kemenhan dan/atau Pemda	PKW Tual
4	Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau kejuruan	Kemenbud-diknasmen, Pemda dan/atau Swasta	PKW Tual
5	Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan/atau posyandu) dan pelayanan jasa medis	Kemenkes, Pemda dan/atau Swasta	PKW Tual
6	pengembangan kawasan Perdagangan dan jasa skala regional	Kemendag, Pemda, dan/atau Swasta	PKW Tual
7	Pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, dan/atau rumput laut	Kemen KP, Kemenperin, dan/atau Swasta	PKW Tual
8	pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kemenhub, Pemda dan/atau Swasta	PKW Tual
9	Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas	Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PU dan Pera,	PKW Tual

	umum	Pemda dan/atau Swasta	
10	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan drainase, jaringan limbah, dan pengelolaan sampah	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda	PKW Tual
PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA			
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI			
Sistem Transportasi Darat			
Sistem Jaringan Jalan			
Jaringan Jalan Kolektor Primer			
11	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer Tual-Langgur- Ibra	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual dan Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
12	Pengembangan terminal penumpang tipe B	Kemenhub dan/atau Pemda	Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Antarkabupaten/Kota			

13	Penyeberangan Masrum yang terhubung dengan jaringan transportasi lainnya dan dilengkapi dengan depo BBM	Kemenhub, Kemen ESDM, Pemda dan/atau Swasta	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten			
14	Penyeberangan Tayando Yamtel dan Tubyal yang terhubung dengan jaringan transportasi lainnya dan dilengkapi dengan depo BBM	Kemenhub, Kemen ESDM, Pemda dan/atau Swasta	Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi			
15	Pengembangan lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan PKS N Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur)-PKS N Ilwaki- PKS N Saumlaki-PKW Tual- Langgur-PKS N Dobo-PKW Merauke	Kemenhub, Kemen ESDM, Pemda dan/atau Swasta	Selat Wetar, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Aru
16	Pengembangan lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan PKS N Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak (Provinsi Papua)	Kemenhub, Kemen ESDM, Pemda dan/atau Swasta	Laut Aru
17	Pengembangan lintas penyeberangan lintas kabupaten /kota yang menghubungkan benjina-PKW Tual-Langgur-PKS N Saumlaki	kemenhub/pemda swasta	Laut arafura
18	Pengembangan lintas penyeberangan kabupaten Kota yang menghubungkan weduar fer-PKW Tual-Langgur	kemenhub/pemda swasta	Selat Nerong
19	Pengembangan lintas penyeberangan kabupaten Kota yang menghubungkan	kemenhub/pemda swasta	Laut Banda

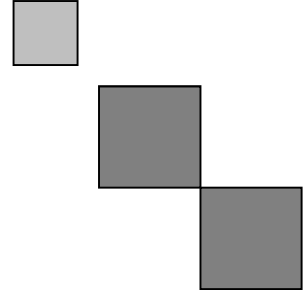
	Geser(Kab.Seram Bagian Timur)-PKW Tual Langgur		
Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota			
20	Pengembangan lintas penyebrangan Kabupaten/Kota yang menghubungkan PKW Tual-Langgur-Tayando-Tubyal	Kemen KP, Pemda dan / atau Swasta	Laut Banda
21	Pengembangan lintas penyebrangan Kabupaten/Kota yang menghubungkan PKW Tual-Langgur-Elat	Kemen KP, Pemda dan / atau Swasta	Laut Banda
Sistem Transportasi Laut			
Pelabuhan Laut			
Pelabuhan Pengumpul			
22	Pengembangan pemantapan pelabuhan tual	Kemen KP, Pemda dan / atau Swasta	Kecamatan Dullah selatan
Pelabuhan Pengumpan			
23	Pengembangan pemantapan pelabuhan tayando	Kemen KP, Pemda dan / atau Swasta	Kecamatan Tayando tam di kota Tual
Pelabuhan lainnya			
Pelabuhan Untuk Kegiatan Pertahanan dan Keamanan			
24	pengembangan dan pemantapan Lanal Tual	kemenhan/pemda	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada gugus Kepulauan Kei
Pelabuhan untuk kegiatan perikanan			
25	pengembangan dan pemantapan PPN Tual dan PPI Kelvik Taar	Kemen KP, Pemda dan / atau Swasta	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada gugus Kepulauan Kei
SISTEM JARINGAN dan ENERGI			



Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Nasional			
26	Pengembangan PLTGB Tual	Kemen ESDM, Pemda dan/atau Swasta	Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik			
27	Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Tual-Langgur	Kemen ESDM, Pemda dan/atau Swasta	Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Sistem Jaringan Telekomunikasi			
Jaringan Terestrial			
28	Pengembangan jaringan terestrial	Kemenkominfo, Pemda dan/atau Swasta	3. PKW Tual- Langgur di Kota Tual Langgur pada Gugus Kepulauan Kei
Sistem Jaringan Sumber Daya Air			
Sumber Air			
Sumber Air Permukaan Pada Danau			
29	Pengembangan pengelolaan Danau Ngadi dan Danau Fanil	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta	Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Prasarana Sumber Daya Air			
Sistem Pengendalian Banjir			
30	Pengembangan sistem pengendalian banjir untuk mengurangi daya rusak air	Kemen PU dan Pera, Pemkab, dan/atau Swasta	Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam,

			dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
Sistem Pengamanan Pantai			
31	Pengembangan sistem pengamanan pantai untuk melindungi permukiman dan titik dasar penentuan garis pangkal	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda	Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual Langgur pada Gugus Kepulauan Kei
Sistem Jaringan Prasarana Permukiman			
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
32	Pengembangan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan yang melayani pusat pelayanan perbatasan negara	Kemen PU dan Pera, Pemda dan/atau Swasta	PKW Tual-Langgur di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei
Sistem Jaringan Drainase			
33	Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda	PKW Tual-Langgur, Benjina
Sistem Jaringan Air Limbah			
34	Pengembangan IPAL	Kemen PU dan Pera dan/atau	. Kecamatan Dullah Utara di

		Pemda	Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei
Sistem Pengelolaan Sampah			
35	Pengembangan TPA	Kemen PU dan Pera, Pemda dan/atau Swasta	Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;



BAB VIII

**KERANGKA  
PENDANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAN  
PROGRAM  
PERANGKAT  
DAERAH**



## **BAB VIII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Gambaran kerangka pendanaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Kemampuan Belanja Daerah, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023). Program prioritas pembangunan tahun 2018-2023 akan dilaksanakan setiap tahun melalui RKPD. Prioritas pembangunan kota Tual ini dilaksanakan melalui program pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan.

#### **8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Kerangka pendanaan pembangunan terhadap anggaran belanja Kota Tual selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2019 – 2023) dapat dilihat pada tabel 8.1.

Tabel 8.1

## Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2019-2028

KODE			KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAPASITAS RILL KEUANGAN								
2			BELANJA	643.361.289.910,00	709.571.449.179,70	783.592.549.944,68	866.447.792.661,57	959.303.467.001,75
2	1		Belanja Tidak Langsung	264.685.862.200,00	304.388.741.530,00	350.047.052.759,50	402.554.110.673,43	462.937.227.274,44
2	1	1	Belanja Pegawai	155.876.362.000,00	179.257.816.300,00	206.146.488.745,00	237.068.462.056,75	272.628.731.365,26
2	1	2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	115.000.000,00	132.250.000,00	152.087.500,00	174.900.625,00
2	1	4	Belanja Hibah	17.362.600.000,00	19.966.990.000,00	22.962.038.500,00	26.406.344.275,00	30.367.295.916,25
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	345.000.000,00	396.750.000,00	456.262.500,00	524.701.875,00
2	1	6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	87.046.900.200,00	100.103.935.230,00	115.119.525.514,50	132.387.454.341,68	152.245.572.492,93
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.600.000.000,00	5.290.000.000,00	6.083.500.000,00	6.996.025.000,00

KODE			KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	2		Belanja Langsung	378.675.427.710,00	405.182.707.649,70	433.545.497.185,18	463.893.681.988,14	496.366.239.727,31
2	2	1	Belanja Pegawai	12.372.895.000,00	13.238.997,650,00	14.165.727.485,50	15.157.328.409,49	16.218.341.398,15
2	2	2	Belanja Modal	248.286.208.758,00	265.666.243.371,06	284.262.880.407,03	304.161.282.035,53	325.452.571.778,01
2	2	3	Belanja Barang dan Jasa	118.016.323.952,00	126.277.466.628,64	135.116.889.292,65	144.575.071.543,13	154.695.326.551.15
Sumber : Data Olahaan, BAPPEDA Kota Tual 2018								



## **8.2. Program Perangkat Daerah**

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan guna mencapai visi pembangunan Kota Tual. Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan publik, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat guna capaian visi dan misi daerah yakni Kota Tual BERADAT. Program prioritas diselenggarakan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pembagian urusan tersebut terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah (OPD). Program prioritas pembangunan di Kota Tual Tahun 2019-2023 terdiri dari program pada setiap Perangkat Daerah yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program, indikator kinerja, pagu indikatif dan pagu indikatif target. Program pembangunan Kota Tual berdasarkan urusan pemerintah secara rinci dituangkan pada Tabel 8.2 sebagai berikut:

**Tabel 8.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tual**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program pada setiap OPD				202.593.423.772,00		341.528.523.339,70		369.442.844.639,97		405.640.995.983,97		446.107.706.312,36		1.765.313.494.048,00	
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Baik	12 Bulan	58.067.617.798,50		75.651.726.747,85		83.047.352.481,04		91.296.952.729,14		100.271.659.002,05		408.335.308.758,58	Semua OPD
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur			73.323.533.883,00		62.109.007.382,30		65.810.210.798,43		72.060.461.878,27		79.328.938.066,10		352.632.152.008,10	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Disiplinnya			3.006.673.996,00		50.168.241.395,60		55.099.285.535,16		60.286.841.238,68		66.389.125.362,54		234.950.167.527,98	
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti BIMTEK / DIKLAT			67.025.586.779,50		149.236.165.437,45		164.166.676.981,20		180.603.289.679,31		198.658.138.647,25		759.689.857.524,71	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja OPD			1.170.011.315,00		4.363.382.376,50		1.319.318.844,15		1.393.450.458,57		1.459.845.234,42		9.706.008.228,64	
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														1.630.072.166.713,13	
1	01		PENDIDIKAN				42.911.530.350,00		51.033.104.422,20		54.200.300.225,15		56.997.692.203,86		60.045.701.169,18		265.188.328.370,39	Dinas DIKBUD
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APM, APK PAUD	APM : 89,96% APK : 90,11%	APK : 90,11%	3.431.607.080,00	APK : 92,56%	3.431.607.080,00	APK : 93,01%	3.431.607.080,00	APK : 95%	3.431.607.080,00	APK : 95,11%	3.431.607.080,00	APK : 97,00%	17.158.035.400,00	Dinas DIKBUD
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK Wajib Belajar Sembilan Tahun (SD & SMP)	SD/Mi : 105,8%	106,2%	37.456.397.050,00	108%	44.947.676.460,00	108,8%	47.195.060.283,00	109%	48.610.912.091,49	111,2%	49.625.605.887,57	112,1%	227.835.651.772,07	Dinas DIKBUD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					SMP/MTs : 98,1%	100,2%		101%		100,2%		104%		106,4%		107,8%	Dinas DIKBUD	
1	01	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase Percepatan Pelayanan Pendidikan LB (Paket A dan Paket B)	%	25	30.650.800,00	25	30.650.800,00	25	30.650.800,00	25	30.650.800,00	25	30.650.800,00	25	153.254.000,00	Dinas DIKBUD
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi (S1/D-IV)	64,42%	65,50%	1.141.379.960,00	70,00%	1.712.069.940,00	85,00%	2.568.104.910,00	92,40%	3.852.157.365,00	95,00%	5.778.236.047,50	95,00%	15.051.948.222,50	Dinas DIKBUD
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Prinsip-prinsip MBS	%	30	851.495.460,00	35	911.100.142,20	40	974.877.152,15	45	1.072.364.867,37	50	1.179.601.354,11	50	4.989.438.975,83	Dinas DIKBUD
							42.911.530.350,00		51.033.104.422,20		54.200.300.225,15		56.997.692.203,86		60.045.701.169,18		265.188.328.370,39	
1	02		KESEHATAN				45.426.136.000,00		49.458.549.600,00		53.945.204.560,00		58.820.825.016,00		64.236.187.517,60		271.886.902.693,60	DINKES
							28.527.000.000,00		30.869.500.000,00		33.497.250.000,00		36.328.075.000,00		39.494.162.500,00		168.715.987.500,00	
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	950 Jenis Obat dan BMHP	950 Jenis Obat dan BMHP	2.200.000.000,00	950 Jenis Obat dan BMHP	2.420.000.000,00	950 Jenis Obat dan BMHP	2.662.000.000,00	950 Jenis Obat dan BMHP	2.928.200.000,00	950 Jenis Obat dan BMHP	3.221.020.000,00	950 Jenis Obat dan BMHP	13.431.220.000,00	DINKES
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	27.930 Jiwa	28,000 Jiwa	165.000.000,00	28,500 Jiwa	181.500.000,00	29,000 Jiwa	199.650.000,00	29,500 Jiwa	219.615.000,00	30,000 Jiwa	241.576.500,00	145,000 Jiwa	1.007.341.500,00	DINKES
				Cakupan Pemulihan Kesehatan	27.930 Jiwa	28,000 Jiwa		28,000 Jiwa		28,000 Jiwa		28,000 Jiwa		87.538 Jiwa				
1	02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	15 IRTP, 10 Toko Obat dan 15 Toko Kosmetik	24 Sarana	75.000.000,00	24 Sarana	82.500.000,00	24 Sarana	90.750.000,00	24 Sarana	99.825.000,00	24 Sarana	109.807.500,00	120	457.882.500,00	DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS	10 SMA dan SMK, 30 dasawisma, 10 Posyandu dan 15 Desa ber PHBS	2160 RT PHBS	500.000.000,00	2090 RT PHBS	550.000.000,00	2091 RT PHBS	605.000.000,00	2090 RT PHBS	665.500.000,00	2090 RT PHBS	732.050.000,00	10.801 RT PHBS	3.052.550.000,00	DINKES
				Cakupan PKRS	1 RSUD	1 RSUD		1 RSUD		1 RSUD		1 RSUD		1 RSUD				
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Gizi Buruk	41 Kasus	10 Kasus	400.000.000,00	8 kasus	360.000.000,00	6 Kasus	324.000.000,00	5 kasus	291.000.000,00	4 kasus	261.900.000,00	2 kasus	1.636.900.000	DINKES
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa / Kelurahan STBM	5 Desa/Kelurahan STBM	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000,00	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000,00	6 Desa/Kelurahan STBM	385.000.000,00	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000,00	6 Desa/Kelurahan STBM	350.000.000,00	30 Desa/Kelurahan STBM	1.785.000.000	
1	02	22	Program Pencehagan dan Peanggulangan Penyakit Menular	Penanganan Penyakit Menular	3341 org	668 org	1.000.000.000,00	668 org	1.000.000.000,00	668 org	1.000.000.000,00	668 org	1.000.000.000,00	668 org	1.000.000.000,00	3341 org	5.000.000.000,00	DINKES
				Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	8393 Orang	1679 org		1679 org		1679 org		1679 org		1679 org		8393 Orang		
			Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase penanganan kasus penyakit tidak Menular	1015 Orang	3598 org	200.000.000,00	3598 org	200.000.000,00	3598 org	200.000.000,00	3598 org	200.000.000,00	3598 org	200.000.000,00	17.990 org	1.000.000.000	DINKES
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1.781.000.000,00	5 Puskesmas	1.781.000.000,00	4 Puskesmas	1.781.000.000,00	4 Puskesmas	1.781.000.000,00	4 Puskesmas	1.781.000.000,00	15 Puskesmas	8.905.000.000,00	DINKES
				Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada Semua Unit Pelayanan	6 Unit pelayanan	4 Unit pelayanan		4 Unit pelayanan		3 Unit pelayanan		2 Unit pelayanan		2 Unit pelayanan		15 unit pelayanan		DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	21.000 Jiwa	4200 Jiwa	100.000.000,00	4200 Jiwa	110.000.000,00	4200 Jiwa	121.000.000,00	4200 Jiwa	133.100.000,00	4200 Jiwa	146.410.000,00	21.000 Jiwa	610.510.000,00	DINKES
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	35 sarana	20 Sarana	4.000.000.000,00	20 Sarana	4.400.000.000,00	20 Sarana	4.840.000.000,00	20 Sarana	5.324.000.000,00	20 Sarana	5.856.400.000,00	79 Sarana	24.420.400.000	DINKES
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 RSUD	1 sarana	5.100.000.000,00	1 sarana	5.610.000.000,00	1 sarana	6.171.000.000,00	1 sarana	6.788.100.000,00	1 sarana	7.466.910.000,00	1 sarana	31.136.010.000	DINKES
				Cakupan pelayanan kesehatan (Rujukan)	4.641 pasien	6.935 pasien		6.935 pasien		6.935 pasien		6.935 pasien		34,675 pasien		DINKES		
1	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan	18189	84.035 Jiwa	11.300.000.000,00	84.035 Jiwa	12.430.000.000,00	84.035 Jiwa	13.673.000.000,00	84.035 Jiwa	15.040.300.000,00	84.035 Jiwa	16.544.330.000,00	84.035 Jiwa	68.987.630.000	DINKES
1	02	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	26 Kasus	10 kasus	400.000.000,00	10 kasus	360.000.000,00	8 kasus	324.000.000,00	5 kasus	291.600.000,00	5 kasus	262.440.000,00	5 kasus	1.638.040.000	DINKES
1	02	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	1184 Lansia	545 Lansia	350.000.000,00	545 Lansia	385.000.000,00	545 Lansia	423.500.000,00	545 Lansia	465.850.000,00	545 Lansia	512.435.000,00	2725 Lansia	2.136.785.000	DINKES
1	02	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pengawasan & pengendalian kesehatan makanan	15 IRTP	20 Sarana IRTP, 20 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	35.000.000,00	25 Sarana IRTP, 30 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	38.500.000,00	25 Sarana IRTP, 35 Rumah Makan, 30 Sarana Pangan Siap Saji	42.350.000,00	35 Sarana IRTP, 25 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	46.585.000,00	35 Sarana IRTP, 30 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	51.243.500,00	140 Sarana IRTP, 30 Rumah Makan, 25 Sarana Pangan Siap Saji	213.678.500,00	DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	10 kasus	10 kasus 400.000.000,00	8 kasus 440.000.000,00	7 kasus 484.000.000,00	6 kasus 532.400.000,00	4 kasus 585.640.000,00	4 kasus 2.442.040.000	DINKES						
1	02	33	Program Indonesia Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM	87.538 jiwa	17.508 jiwa 71.000.000,00	17.508 jiwa 71.000.000,00	17.508 jiwa 71.000.000,00	17.508 jiwa 71.000.000,00	17.508 jiwa 71.000.000,00	87.538 jiwa 355.000.000,00	DINKES						
1	02	34	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	6,684 Jiwa	2.212 Jiwa 100.000.000,00	2.212 Jiwa 100.000.000,00	2.212 Jiwa 100.000.000,00	2.212 Jiwa 100.000.000,00	2.212 Jiwa 100.000.000,00	11,061 jiwa 500.000.000,00	DINKES						
						16.899.136.000,00	18.589.049.600,00	20.447.954.560,00	22.492.750.016,00	24.742.025.017,60	103.170.915.193,60	RSUD MAREN						
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	542 Item Obat dan BHP Medik	552 650.000.000,00	572 715.000.000,00	592 786.500.000,00	612 865.150.000,00	632 951.665.000,00	632 3.968.315.000,00							
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	6171 Pasien	6788 Pasien	1.849.320.000,00	7127 Pasien	2.034.252.000,00	7484 Pasien	2.237.677.200,00	7858 Pasien	2.461.444.920,00	8251 Pasien	2.707.589.412,00	37408 Pasien	11.290.283.532,00	RSUD MAREN
				Cakupan Pemulihan Kesehatan	95%	95%		95%		96%		96%		97%		95,80%		
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	10 Pokja	15 Pokja	275.560.000,00	15 Pokja	303.116.000,00	15 Pokja	333.427.600,00	15 Pokja	366.770.360,00	15 Pokja	403.447.396,00	15 Pokja	1.682.321.356,00	RSUD MAREN
				Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada Semua Unit Pelayanan	690 SOP													
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Sarana (Gedung Pelayanan) Prasarana (2 Rumah Dinas Dokter, (2 Mobil Ambulans, 1 Mobil Operasional, 5 Mobil Operasional Dokter Spesialis dan 1 Mesin Genset 32 KVA)		12.224.256.000,00		13.446.681.600,00		14.791.349.760,00		16.270.484.736,00		17.897.533.209,60		74.630.305.305,60	RSUD MAREN
				Cakupan Prasarana ALKES Pelayanan Kesehatan Rujukan	91 Jenis Alat Kesehatan													

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	40%	60%	100.000.000,00	70%	110.000.000,00	80%	121.000.000,00	90%	133.100.000,00	100%	146.410.000,00	100%	610.510.000,00	RSUD MAREN
1	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan	4292 Pasien BPJS		1.800.000.000,00		1.980.000.000,00		2.178.000.000,00		2.395.800.000,00		2.635.380.000,00		10.989.180.000,00	RSUD MAREN
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				323.654.666.282,00		117.192.635.445,10		108.046.898.989,61		113.461.588.858,27		118.478.800.764,10		780.834.590.339,08	DINAS PUPR
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	191 Km	6,6 Km	185.407.809.972,00	20 Km	63.000.000.000,00	20 Km	63.000.000.000,00	20 Km	63.000.000.000,00	20 Km	63.000.000.000,00	87 Km	437.407.809.972,00	DINAS PUPR
				Persentase Panjang Jalan Non Kota yang Dibangun	37 Km	4,5 Km		10 Km		10 Km		10 Km		10 Km		44,50 Km		
1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Presentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong dalam Kondisl Baik	700 M	692 M	6.106.600.000,00	761 M	3.021.467.130,00	837 M	3.323.613.843,00	921 Km	3.655.975.227,00	1013 M	4.021.572.749,70	4224,73 M	20.129.228.949,70	DINAS PUPR
1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang Dibangun dengan Kondisi Baik	333 Meter	175 M	32.185.325.000,00	500 M	15.000.000.000,00	300 M	2.100.000.000,00	500 M	3.500.000.000,00	500 M	3.500.000.000,00	1975 M	56.285.325.000,00	DINAS PUPR
1	03	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	16 Km	1,50 Km	25.710.574.700,00	6,0 Km	7.200.000.000,00	6,0 Km	7.200.000.000,00	6,0 Km	7.200.000.000,00	6,0 Km	7.200.000.000,00	25,50 Km	54.510.574.700,00	DINAS PUPR
1	03	22	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	Terlaksananya sistem informasi/ Data Base jalan & Jembatan	5 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	235.000.000,00	DINAS PUPR
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	55 Ha	4 Ha	5.146.000.000,00	5 Ha		5 Ha		5 Ha		3 Ha			5.146.000.000,00	DINAS PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Akses Air Minum yang Aman	710 SR dan lpal	605 SR dan lpal	34.488.381.610,00	665 SR dan lpal	13.529.021.512,00	732 SR dan lpal	14.881.923.663,20	805 SR dan lpal	16.370.116.029,52	886 SR dan lpal	18.007.127.632,47	3693 SR dan lpal	97.276.570.447,19	DINAS PUPR
1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Ccepat Tumbuh	Persentase Pembangunan di Wilayah Statgis dan Cepat Tumbuh	20 Titik	11 Titik	15.303.900.000,00	11 Titik	7.821.923.803,10	11 Titik	8.604.116.183,41	12 Titik	9.464.527.801,75	12 Titik	10.410.980.581,93	57 Titik	51.605.448.370,19	DINAS PUPR
1	03	31	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	Cakupan Pengaturan Jasa Kontruksi	12 Bulan	12 Bulan	596.915.000,00	12 Bulan	520.223.000,00	12 Bulan	572.245.300,00	12 Bulan	629.469.800,00	12 Bulan	629.469.800,00	60 Bulan	2.948.322.900,00	DINAS PUPR
1	03	34	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Peningkatan Akses Listrik	122 Tiang	68 Tiang	14.785.200.000,00	250 Tiang	6.250.000.000,00	300 Tiang	7.500.000.000,00	350 Tiang	8.750.000.000,00	450 Tiang	11.250.000.000,00	1418 Tiang	48.535.200.000,00	DINAS PUPR
1	03	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	5 Dokumen	4 Dokum en	1.805.480.000,00	2 Dokum en	600.000.000,00	2 Dokum en	600.000.000,00	2 Dokum en	600.000.000,00	1 Dokum en	150.000.000,00	11 Dokum en	3.755.480.000,00	DINAS PUPR
1	03	15	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang	40%	40%	805.480.000,00	40%	150.000.000,00	40%	165.000.000,00	40%	181.500.000,00	40%	199.650.000,00	100%	1.501.630.000,00	DINAS PUPR
1	03	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1.278.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	100%	1.498.000.000,00	DINAS PUPR
							323.654.666.282,00		117.192.635.445,10		108.046.898.989,61		113.461.588.858,27		118.478.800.764,10		780.834.590.339,08	
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				18.489.772.500,00		30.856.374.750,00		43.291.012.225,00		55.792.788.447,50		68.377.217.292,25		216.807.165.214,75	DINAS PERKIM
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	52,47%	500	11.675.250.000,00	1.000	23.350.500.000,00	1.500	35.025.750.000,00	2.000	46.701.000.000,00	2.500	58.376.250.000,00	2500	175.128.750.000,00	DINAS PERKIM
				Persentase penerapan Backlog	20.45%	100		200		300		400		500		500		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses air minum yang aman dan sanitasi di lingkungan perumahan	20	5	5.271.945.000,00	10	5.799.139.500,00	15	6.379.053.450,00	20	7.016.958.795,00	25	7.718.654.674,50	25	32.185.751.419,50	DINAS PERKIM
1	04	17	Program Pengembangan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase (cakupan) kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan	141,09 Ha	30	1.000.000.000,00	60	1.100.000.000,00	90	1.210.000.000,00	120	1.331.000.000,00	140	1.464.100.000,00	140	6.105.100.000,00	DINAS PERKIM
1	04	18	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Ketersediaan sarana permukiman berbasis masyarakat	5	2	81.577.500,00	4	89.735.250,00	6	98.708.775,00	8	108.579.652,50	10	119.437.617,75	10	498.038.795,25	DINAS PERKIM
1	04	21	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Perumahan dan Pemukiman	Ketersediaan Database Perumahan dan Permukiman	2	2	450.000.000,00	3	495.000.000,00	4	544.500.000,00	5	598.950.000,00	6	658.845.000,00	6	2.747.295.000,00	DINAS PERKIM
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan														
							18.478.772.500,00		30.834.374.750,00		43.258.012.225,00		55.756.488.447,50		68.337.287.292,25		216.664.935.214,75	
1	04	20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Area TPU yang dikelola	1 TPU	1 TPU	11.000.000,00	2 TPU	22.000.000,00	3 TPU	33.000.000,00	3 TPU	36.300.000,00	3 TPU	39.930.000,00	3 TPU	142.230.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
							11.000.000,00		22.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		142.230.000,00	
1	05		KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM serta PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.326.174.000,00		14.625.224.900,00		16.146.347.390,00		17.651.382.129,00		19.327.510.341,90		81.076.638.760,90	
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penanganann Konflik Daerah		4 Kali	1.292.000.000,00	4 Kali	1.421.200.000,00	4 Kali	1.563.320.000,00	4 Kali	1.719.652.000,00	4 Kali	1.891.617.200,00	20 Kali	7.887.789.200,00	Badan KESBANGPOL
1	05	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penyelesaian Masalah Kantribmas		20%	559.000.000,00	40%	614.900.000,00	60%	676.390.000,00	80%	744.029.000,00	100%	818.431.900,00	100%	3.412.750.900,00	Badan KESBANGPOL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase Penyeselaian Masalah Aktual		20%		40%		60%		80%		100%		100%		
1	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan		20%	590.000.000,00	40%	649.000.000,00	60%	713.900.000,00	80%	785.290.000,00	100%	863.819.000,00	100%	3.602.009.000,00	Badan KESBANGPOL
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kerjasama dengan lembaga kemitraan guna fasilitasi konflik SARA		20%	526.000.000,00	40%	578.600.000,00	60%	636.460.000,00	80%	700.106.000,00	100%	770.116.600,00	100%	3.211.282.600,00	Badan KESBANGPOL
1	05	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/ Pemilukada		20%	1.340.000.000,00	40%	1.474.000.000,00	60%	1.621.400.000,00	80%	1.783.540.000,00	100%	1.961.894.000,00	100%	8.180.834.000,00	Badan KESBANGPOL
			Program Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada	Persentase Dukungan Penyelenggaraan yang diberikan bagi Parpol di Daerah		100%											Badan KESBANGPOL dan LINMAS	
							4.307.000.000,00		4.737.700.000,00		5.211.470.000,00		5.732.617.000,00		6.305.878.700,00		26.294.665.700,00	KESBANGPOL
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan	44,44%	44,50%	495.000.000,00	44,75%	544.500.000,00	50,00%	598.950.000,00	60,00%	658.845.000,00	75,00%	724.729.500,00	100%	3.022.024.500,00	SATPOL PP
1	05	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penurunan Tindak Kriminal	65,52%	72,07%	6.160.000.000,00	77,12%	6.776.000.000,00	83,75%	7.453.600.000,00	89,70%	8.198.960.000,00	93,10%	9.018.856.000,00	100%	37.607.416.000,00	SATPOL PP
1	05	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Sasaran	0,25%	2,40%	528.600.000,00	15%	581.460.000,00	22,50%	639.606.000,00	32%	703.566.600,00	50%	773.923.260,00	100%	3.227.155.860,00	SATPOL PP
1	05	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Penyuluhan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat	47,63%	49,02%	165.000.000,00	52,35%	181.500.000,00	55,15%	199.650.000,00	60,25%	219.615.000,00	75,08%	241.576.500,00	100%	1.007.341.500,00	SATPOL PP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							6.853.600.000,00		7.538.960.000,00		8.292.856.000,00		9.122.141.600,00		10.034.355.760,00		41.841.913.360,00	SATPOL PP
1	04	19	Program Peningkatan dan Pemnatapan Sistem Penyelenggaraan Penanganann Korban Bencana	Cakupan penanganan pasca bencana	5 Kecamatan	30%	435.099.000,00	31%	455.000.000,00	40%	617.000.000,00	45%	632.000.000,00	50%	650.000.000,00	100%	2.789.099.000,00	BPBD
1	04		Program Peningkatan Prosedur dan Tata Cara Penanggulangan Bencana	Cakupan penurunan resiko bencana	5 Kecamatan	45%	635.416.000,00	50%	689.000.000,00	55%	700.000.000,00	60%	707.100.000,00	70%	734.000.000,00	100%	3.465.516.000,00	BPBD
							1.070.515.000,00		1.144.000.000,00		1.317.000.000,00		1.339.100.000,00		1.384.000.000,00		6.254.615.000,00	BPBD
1	04	19	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Pengendalian bencana kebakaran	50%	50%	1.095.059.000,00	60%	1.204.564.900,00	70%	1.325.021.390,00	80%	1.457.523.529,00	90%	1.603.275.881,90	100%	6.685.444.701	Dinas Pemadam Kebakaran
							1.095.059.000,00		1.204.564.900,00		1.325.021.390,00		1.457.523.529,00		1.603.275.881,90		6.685.444.701	
1	06		SOSIAL				2.338.789.100,00		2.572.668.010,00		2.829.934.811,00		3.112.928.292,10		3.424.221.121,31		14.278.541.334,41	Dinas SOSIAL
1	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Ppemberdayaan Fakir Miskin , KAT san PMKS Lainnya	5.209 KK BDT Rastra	794 KK	380.361.000,00	883 KK	418.397.100,00	883 KK	460.236.810,00	883 KK	506.260.491,00	883 KK	556.886.540,10	100%	2.322.141.941,10	Dinas SOSIAL
1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4.515 KK KPM PKH	903 KK	1.047.487.000,00	903 KK	1.152.235.700,00	903 KK	1.267.459.270,00	903 KK	1.394.205.197,00	903 KK	1.533.625.716,70	100%	6.395.012.883,70	Dinas SOSIAL
1	06	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Ditangani	525 Anak Total 56 Anak yg sdh ditangani	105 Anak	72.500.000,00	105 Anak	79.750.000,00	105 Anak	87.725.000,00	105 Anak	96.497.500,00	105 Anak	106.147.250,00	100%	442.619.750,00	Dinas SOSIAL
1	06	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas	26 Cacat Lansia 15 Cacat Bwan/Lahir	8 Org	105.250.000,00	9 Org	115.775.000,00	8 Org	127.352.500,00	8 Org	140.087.750,00	8 Org	154.096.525,00	100%	642.561.775,00	Dinas SOSIAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	06	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Cakupan Penghuni Panti Asuhan yang Dibina	2 Pantai Ashn (1 yg ditangai)	1 Pnti Ashn	67.150.000,00	1 Pnti Ashn	73.865.000,00	1 Pnti Ashn	81.251.500,00	1 Pnti Ashn	89.376.650,00	1 Pnti Ashn	98.314.315,00	100%	409.957.465,00	Dinas SOSIAL
1	06	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Ditangani	22 Narkoba, 120 PSK 9 Anak X Napi 25 Peyki Sosial	32 Org	275.825.000,00	35 Org	303.407.500,00	35 Org	333.748.250,00	35 Org	367.123.075,00	35 Org	403.835.382,50	100%	1.683.939.207,50	Dinas SOSIAL
1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kelembagaan Sosial yang Diberdayakan	15 Peguyuban, LSM & Orsos 2 Yang ditangai	3 Orms	390.216.100,00	3 Orms	429.237.710,00	3 Orms	472.161.481,00	3 Orms	519.377.629,10	3 Orms	571.315.392,01	100%	2.382.308.312,11	Dinas SOSIAL
				Meningkatnya Pembinaan Karakter Orang Muda dan Kelembagaan	2 Lbg Karang Taruna 2 Wahana Kesjhran Berbasis Masyarakat	1 Lbga		1 Lbga		1 Lbga		100%						
				Cakupan Layanan KIE Konseling bagi Kaum Muda	10 Keluarga Muda 10 Anak Msla Psikososial	4 Kel. Muda		4 Kel. Muda		4 Kel. Muda		4 Kel. Muda		100%				
							2.338.789.100,00		2.572.668.010,00		2.829.934.811,00		3.112.928.292,10		3.424.221.121,31		14.278.541.334,41	
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														1.737.235.903.664,88	
2	01		TENAGA KERJA				437.893.100,00		481.682.410,00		529.850.651,00		582.835.716,10		641.119.287,71		2.673.381.164,81	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi			89.505.000,00		98.455.500,00		108.301.050,00		119.131.155,00		131.044.270,50		546.436.975,50	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja			162.888.100,00		179.176.910,00		197.094.601,00		216.804.061,10		238.484.467,21		994.448.139,31	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga			185.500.000,00		204.050.000,00		224.455.000,00		246.900.500,00		271.590.550,00		1.132.496.050,00	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
							437.893.100,00		481.682.410,00		529.850.651,00		582.835.716,10		641.119.287,71		2.673.381.164,81	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.302.341.000,00		1.427.341.000,00		1.427.341.000,00		1.427.341.000,00		1.427.341.000,00		7.011.705.000,00	DP3AP2KB
2	02	15	Program Kereserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan & Anak	50%	-	-	20%	125.000.000,00	40%	125.000.000,00	60%	125.000.000,00	80%	125.000.000,00	100%	500.000.000,00	DP3AP2KB
2	02	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Terbina	5 Lembaga	3 Lembaga	287.726.000,00	3 Lembaga	287.726.000,00	3 Lembaga	287.726.000,00	3 Lembaga	287.726.000,00	3 Lembaga	287.726.000,00	15 Lembaga	1.438.630.000,00	DP3AP2KB
2	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan Yang di Intervensi	150 Orang	60 Orang	233.570.000,00	60 Orang	233.570.000,00	60 Orang	233.570.000,00	60 Orang	233.570.000,00	60 Orang	233.570.000,00	300 Orang	1.167.850.000,00	DP3AP2KB
2	02	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	250 Orang	150 Orang	781.045.000,00	150 Orang	781.045.000,00	150 Orang	781.045.000,00	150 Orang	781.045.000,00	150 Orang	781.045.000,00	750 Orang	3.905.225.000,00	DP3AP2KB
							1.302.341.000,00		1.427.341.000,00		1.427.341.000,00		1.427.341.000,00		1.427.341.000,00		7.011.705.000	
2	03		PANGAN				311.050.583,00		442.155.641,30		486.371.205,43		535.008.325,97		588.509.158,57		2.363.094.914,27	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak	Energi : Kkal /Kap/Hari, Protein : Gram/Kap/Hari, Lemak Gram/Kap/Hari	Energi : Kkal /Kap/Hari, Protein : Gram/Kap/Hari, Lemak Gram/Kap/Hari	190.620.000,00		209.682.000,00		230.650.200,00		253.715.220,00		279.086.742,00		1.163.754.162,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Ketersediaan Tanaman Pangan		-	-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		464.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	19	Program Peningkatan Diservikasi Pangan	% PPH Konsumsi	Capaian untuk PPH secara Nasional ditetapkan		120.430.583,00		132.473.641,30		145.721.005,43		160.293.105,97		176.322.416,57		735.240.752,27	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							311.050.583,00		442.155.641,30		486.371.205,43		535.008.325,97		588.509.158,57		2.363.094.914,27	
2	04		PERTANAHAN				8.384.713.744,00		9.223.185.118,40		10.145.503.630,24		11.160.053.993,26		12.276.059.392,59		51.189.515.878,49	BAG. TAPEM - SETDA
2	04	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat	-	0,01	8.384.713.744,00	0,01	9.223.185.118,40	0,01	10.145.503.630,24	0,01	11.160.053.993,26	0,01	12.276.059.392,59	0,05	51.189.515.878,49	BAG. TAPEM - SETDA
							8.384.713.744,00		9.223.185.118,40		10.145.503.630,24		11.160.053.993,26		12.276.059.392,59		51.189.515.878,49	
2	05		LINGKUNGAN HIDUP				1.754.673.000,00		1.930.140.300,00		2.123.154.330,00		2.335.469.763,00		2.569.016.739,30		10.712.454.132,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah Perkotaan	(2 Kecamatan (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	114.600.000,00	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	126.060.000,00	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	138.666.000,00	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	152.532.600,00	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	167.785.860,00	2 Kec. (P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	699.644.460,00	DINAS DLH & KEBERSIHAN
2	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-ULP dan SPPL yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan	51 Dokumen	53 Dokumen	326.900.000,00	54 Dokumen	359.590.000,00	61 Dokumen	395.549.000,00	65 Dokumen	435.103.900,00	70 Dokumen	478.614.290,00	303 Dokumen	1.995.757.190,00	DINAS DLH & KEBERSIHAN
2	05	17	Program Perlindungan & konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan area mata air yang di konservasi	Ha (Kecamatan P. Dullah Selatan dan P. Dullah Utara)	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	66.214.000,00	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	72.835.400,00	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	80.118.940,00	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	88.130.834,00	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	96.943.917,40	Ha ( Un, Ngadi, Fanil)	404.243.091,40	DINAS DLH & KEBERSIHAN
2	05	18	Program Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Cakupan rehabilitasi lahan kritis	Ha (Kecamatan P. Dullah Utara)	Ha (Labeta wi, Dullah, Ohoitel, Ngadi)	441.959.000,00	Ha (Labeta wi, Dullah, Ohoitel, Ngadi)	486.154.900,00	Ha (Labeta wi, Dullah, Ohoitel, Ngadi)	534.770.390,00	Ha (Labeta wi, Dullah, Ohoitel, Ngadi, Taar)	588.247.429,00	Ha (Labeta wi, Dullah, Ohoitel, Ngadi, Taar)	647.072.171,90	Ha (Labeta wi, Dullah, Ohoitel, Ngadi, Taar)	2.698.203.890,90	DINAS DLH & KEBERSIHAN
2	05	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dokumen	20 Dokumen	250.000.000,00	25 Dokumen	275.000.000,00	30 Dokumen	302.500.000,00	35 Dokumen	332.750.000,00	40 Dokumen	366.025.000,00	50 Dokumen	1.526.275.000,00	DINAS DLH & KEBERSIHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	05	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Ketersediaan laporan status baku mutu udara			155.000.000,00		170.500.000,00		187.550.000,00		206.305.000,00		226.935.500,00		946.290.500,00	DINAS DLH & KEBERSIHAN
2	05	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan ketersediaan RTH kawasan perkotaan	30%	40%	400.000.000,00	60%	440.000.000,00	70%	484.000.000,00	80%	532.400.000,00	90%	585.640.000,00	100%	2.442.040.000,00	DINAS DLH & KEBERSIHAN
							1.754.673.000,00		1.930.140.300,00		2.123.154.330,00		2.335.469.763,00		2.569.016.739,30		10.712.454.132,30	
2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				1.176.910.405,00		1.294.601.445,50		1.424.061.590,05		1.566.467.749,06		1.723.114.523,96		7.185.155.713,57	DINAS DUKCAPIL
2	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan	KK : KTP : AKTE :	KK : KTP : AKTE :	1.176.910.405,00	KK : KTP : AKTE :	1.294.601.445,50	KK : KTP : AKTE :	1.424.061.590,05	KK : KTP : AKTE :	1.566.467.749,06	KK : KTP : AKTE :	1.723.114.523,96	KK : KTP : AKTE :	7.185.155.713,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							1.176.910.405,00		1.294.601.445,50		1.424.061.590,05		1.566.467.749,06		1.723.114.523,96		7.185.155.713,57	
2	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				1.845.498.746,00		2.030.048.620,60		2.233.053.482,66		2.456.358.830,93		2.701.994.714,02		11.266.954.394,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga/Desa/Kelompok Masyarakat Pedesaan yang Diberdayakan		30 Desa	230.203.854,00	30 Desa	253.224.239,40	30 Desa	278.546.663,34	30 Desa	306.401.329,67	30 Desa	337.041.462,64	30 Desa	1.405.417.549,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/Pos Pelayanan Tepat Guna		27 Desa	121.546.314,00	27 Desa	133.700.945,40	27 Desa	147.071.039,94	27 Desa	161.778.143,93	27 Desa	177.955.958,33	27 Desa	742.052.401,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan		70%	133.667.998,00	80%	147.034.797,80	80%	161.738.277,58	85%	177.912.105,34	90%	195.703.315,87	100%	816.056.494,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dilatih / Mengikuti BIMTEK		162 Orang	1.345.412.439,00	20 Orang	1.479.953.682,90	20 Orang	1.627.949.051,19	20 Orang	1.790.743.956,31	20 Orang	1.969.818.351,94	20 Orang	8.213.877.481,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah Desa / Kelurahan yang Didampingi / Difasilitasi		27 Desa		27 Desa		27 Desa		27 Desa		27 Desa				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase Pendampingan Desa / Kelurahan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	07	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kader Perempuan yang Diberdayakan	330	14.668.141,00	390	16.134.955,10	452	17.748.450,61	461	19.523.295,67	461	21.475.625,24	2094	89.550.467,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						1.845.498.746,00	2.030.048.620,60		2.233.053.482,66	2.456.358.830,93		2.701.994.714,02	11.266.954.394,20					
2	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3.359.811.000,00	8.582.622.000,00		8.582.622.000,00	8.582.622.000,00		8.582.622.000,00	8.582.622.000,00		37.690.299.000,00	DP3AP2KB		
2	08	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	4031 Orang	-	3.359.811.000,00	4434 Orang	3.359.811.000,00	4877 Orang	3.359.811.000,00	5365 Orang	3.359.811.000,00	5901 Orang	3.359.811.000,00	6492 Orang	16.799.055.000,00	DP3AP2KB
2	08	23	Program Penyiapan Pendampingan Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga	21 Kelompok	-	-	25 Kelomp ok	125.000.000,00	30 Kelomp ok	125.000.000,00	35 Kelomp ok	125.000.000,00	40 Kelomp ok	125.000.000,00	130 Kelomp ok	500.000.000,00	DP3AP2KB
			Program Kesehatan Reproduksi	Advokasi dan KIE bagi Remaja	Baik	-	-	100	155.750.000,00	150	155.750.000,00	200	155.750.000,00	250	155.750.000,00	700	623.000.000,00	DP3AP2KB
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Akseptor Baru	1453 Orang	-	-	1.598	225.500.000,00	1.758	225.500.000,00	1.934	225.500.000,00	2.127	225.500.000,00	2.340	902.000.000,00	DP3AP2KB
			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	11	-	-	16	250.000.000,00	21	250.000.000,00	26	250.000.000,00	30	250.000.000,00	93	1.000.000.000,00	DP3AP2KB
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Kelompok PIK KRR yang sudah di bentuk	20 Kelompok	-	-	30 Kelomp ok	175.250.000,00	30 Kelomp ok	175.250.000,00	30 Kelomp ok	175.250.000,00	30 Kelomp ok	175.250.000,00	120 Kelomp ok	701.000.000,00	DP3AP2KB
			Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jumlah BKB Holistik yang sudah di bentuk	10	-	-	15	4.291.311.000,00	20	4.291.311.000,00	25	4.291.311.000,00	30	4.291.311.000,00	90	17.165.244.000,00	DP3AP2KB



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							3.359.811.000,00		8.582.622.000,00		8.582.622.000,00		8.582.622.000,00		8.582.622.000,00		37.690.299.000,00	
2	09		PERHUBUNGAN				915.791.360.000,00		141.452.740.000,00		152.768.959.200,00		164.990.475.956,00		178.189.712.175,00		1.553.193.247.331,00	Dinas Perhubungan
2	09	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Fasilitas transportasi, jumlah transportasi lokal Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	3	3	51.282.000.000,00	4	33.310.200.000,00	4	35.975.016.000,00	4	38.853.017.280,00	4	41.961.258.662,00	19	201.381.491.942,00	Dinas Perhubungan
2	09	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	5	6	774.400.000,00	6	851.840.000,00	6	919.987.200,00	5	993.586.176,00	5	1.073.073.069,00		4.612.886.445,00	Dinas Perhubungan
2	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum/Persentase layanan angkutan darat/Rasio ijin trayek / Peningkatan Pelayanan Angkutan.	3	5	71.500.000.000,00	6	78.650.000.000,00	7	84.942.000.000,00	8	91.737.360.000,00	9	99.076.347.000,00		425.905.707.000,00	Dinas Perhubungan
2	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis / Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	3	3	19.814.960.000,00	4	21.538.000.000,00	5	23.261.040.000,00	6	25.121.923.200,00	7	27.131.677.056,00		116.867.600.256,00	Dinas Perhubungan
2	09	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu-rambu / Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan.	50	60	715.000.000.000,00	68	786.500.000,00	60	849.420.000,00	60	917.373.600,00	60	990.763.488,00		718.544.057.088,00	Dinas Perhubungan
2	09	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum/Persentase kepemilikan KIR angkutan umum / Presentase Angkutan Umum yang Layak Beroperasi dan Memenuhi Standar Keselamatan.	250	350	57.420.000.000,00	300	6.316.200.000,00	300	6.821.496.000,00	300	7.367.215.700,00	300	7.956.592.900,00		85.881.504.600,00	Dinas Perhubungan
							915.791.360.000,00		141.452.740.000,00		152.768.959.200,00		164.990.475.956,00		178.189.712.175,00		1.553.193.247.331,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				489.450.000,00		1.177.200.000,00		660.400.000,00		515.600.000,00		515.600.000,00		3.358.250.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		-	489.450.000,00	1 Kec (P. Dullah Selatan )	291.250.000,00	1 Kec. (P. Dullah Utara)	275.200.000,00	Kec. Tayand o Tam	275.200.000,00	Kec. P.P Kur dan P. Kur Selatan	275.200.000,00	5 Kecamatan di Kota Tual	1.606.300.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	10	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Tenaga IT Tingkat Kota		-	-	12 Tenaga IT	235.200.000,00	12 Tenaga IT	235.200.000,00	4 Tenaga IT	90.400.000,00	4 Tenaga IT	90.400.000,00	30 Tenaga IT	651.200.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Cakupan Layanan Informasi		-	-	40%	650.750.000,00	60%	150.000.000,00	80%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	1.100.750.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							489.450.000,00		1.177.200.000,00		660.400.000,00		515.600.000,00		515.600.000,00		3.358.250.000,00	
2	11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENAGAH				2.297.790.266,00		2.527.569.292,60		2.780.326.221,86		3.058.358.844,05		4.018.849.536,42		14.682.894.160,93	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	11	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Kondusif	Ketersediaan Jumlah UKM/LKM yang dibina	6.919 UKM/LKM	1.500	158.967.200,00	1.500	174.863.920,00	1.500	192.350.312,00	1.500	211.585.343,20	1.500	278.034.626,35	1.500	1.015.801.402	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Wirausaha Baru / Wirausaha Pemula	62 Wirausaha Baru	100	945.682.688,00	100	1.040.250.956,80	100	1.144.276.052,48	100	1.258.703.657,73	100	1.654.004.931,83	100	6.042.918.287	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	11	17	Program Pengembangan Sistem Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM dan Koperasi yang Diperkuat Sistem Pemasaran	150 UM dan 40 Koperasi	200 UM, 40 Koperasi	961.682.688,00	200 UM, 40 Koperasi	1.057.850.956,80	200 UM, 40 Koperasi	1.163.636.052,48	200 UM, 40 Koperasi	1.279.999.657,73	200 UM, 40 Koperasi	1.681.989.031,83	1000 UM, 200 Koperasi	6.145.158.387	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	237 Koperasi	20 Koperasi	231.457.690,00	20	254.603.459,00	20	280.063.804,90	20	308.070.185,39	20	404.820.946,42	100	1.479.016.086	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
							2.297.790.266,00		2.527.569.292,60		2.780.326.221,86		3.058.358.844,05		4.018.849.536,42		14.682.894.161	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	12		PENANAMAN MODAL				840.226.500,00		924.249.150,00		1.016.674.065,00		1.118.341.471,50		1.230.175.618,65		5.129.666.805,15	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah PMDN/PMA			327.525.000,00		360.277.500,00		396.305.250,00		435.935.775,00		479.529.352,50		1.999.572.877,50	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase Sistem Investasi yang Dibangun		20%	311.900.000,00	40%	343.090.000,00	60%	377.399.000,00	80%	415.138.900,00	100%	456.652.790,00	100%	1.904.180.690,00	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana & Prasarana Daerah	Ketersediaan dokumen potensi sumberdaya , sarana prasarana Daerah			135.412.000,00		148.953.200,00		163.848.520,00		180.233.372,00		198.256.709,20		826.703.801,20	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
2	12	18	Program Pengembangan Sistem Perizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan			65.389.500,00		71.928.450,00		79.121.295,00		87.033.424,50		95.736.766,95		399.209.436,45	Dinas PMD, PTSP dan NAKER
							840.226.500,00		924.249.150,00		1.016.674.065,00		1.118.341.471,50		1.230.175.618,65		5.129.666.805	
2	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.737.461.186,00		3.011.207.304,60		3.312.328.035,06		3.643.560.838,57		4.007.916.922,42		16.712.474.286,65	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2	13	16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan Kepemudaan	100 Orang	150 Orang	231.565.300,00	170 Orang	254.721.830,00	200 Orang	280.194.013,00	225 Orang	308.213.414,30	250 Orang	339.034.755,73	995 Orang	1.413.729.313,03	DISPORA
2	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Pemuda yang Memiliki Kecakapan Hidup	100 Orang	125 Orang	1.393.927.200,00	150 Orang	1.533.319.920,00	175 Orang	1.686.651.912,00	200 Orang	1.855.317.103,20	225 Orang	2.040.848.813,52	875 Orang	8.510.064.948,72	DISPORA
2	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Presentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	20%	20%	515.688.800,00	20%	567.257.680,00	20%	623.983.448,00	20%	686.381.792,80	20%	755.019.972,08	100%	3.148.331.692,88	DISPORA
2	13	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	20%	20%	320.494.886,00	20%	352.544.374,60	20%	387.798.812,06	20%	426.578.693,27	20%	469.236.562,59	100%	1.956.653.328,52	DISPORA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	13	22	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga	-	20%	124.985.000,00	20%	137.483.500,00	20%	151.231.850,00	20%	166.355.035,00	20%	182.990.538,50	100%	763.045.923,50	DISPORA
2	13	23	Program Peningkatan Kemandirian Pemuda	Presentase Peningkatan Kemandirian Pemuda	-	20%	150.800.000,00	20%	165.880.000,00	20%	182.468.000,00	20%	200.714.800,00	20%	220.786.280,00	100%	920.649.080,00	DISPORA
							2.737.461.186,00		3.011.207.304,60		3.312.328.035,06		3.643.560.838,57		4.007.916.922,42		16.712.474.286,65	
2	14		STATISTIK															Dinas KOMINFO, STATISTIK dan PERSANDIAN
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Daerah														Dinas KOMINFO, STATISTIK dan PERSANDIAN
2	16		KEBUDAYAAN				359.886.900,00		539.830.350,00		755.762.490,00		1.058.067.486,00		1.322.584.357,50		4.036.131.583,50	DINAS DIKBUD
2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan objek budaya yang dilestarikan														DINAS DIKBUD
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan keayaan budaya		20%		40%		60%		80%		100%		100%		DINAS DIKBUD
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Keragaman Budaya		3	359.886.900,00	5	539.830.350,00	6	755.762.490,00	6	1.058.067.486,00	6	1.322.584.357,50	6	4.036.131.583,50	DINAS DIKBUD
2	16	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama														DINAS DIKBUD
							359.886.900,00		539.830.350,00		755.762.490,00		1.058.067.486,00		1.322.584.357,50		4.036.131.583,50	
2	17		PERPUSTAKAAN				1.273.000.000,00		1.400.300.000,00		1.540.330.000,00		1.694.363.000,00		1.863.799.300,00		7.771.792.300,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
																		Daerah	
2	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka		7000	1.273.000.000,00	8.000	1.400.300.000,00	9.000	1.540.330.000,00	10.000	1.694.363.000,00	11.000	1.863.799.300,00	45.000	7.771.792.300	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
							1.273.000.000,00		1.400.300.000,00		1.540.330.000,00		1.694.363.000,00		1.863.799.300,00		7.771.792.300,00		
2	18		KEARSIPAN				370.000.000,00		407.000.000,00		447.700.000,00		492.470.000,00		541.717.000,00		2.258.887.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik		200	30.000.000,00	225	33.000.000,00	250	36.300.000,00	275	39.930.000,00	300	43.923.000,00	1.250	183.153.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Ddaerah	Jumlah Dokumen / Arsip Daerah yang Diselamatkan DAN Dilestarikan		200	140.000.000,00	225	154.000.000,00	250	169.400.000,00	275	186.340.000,00	300	204.974.000,00	1.250	854.714.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	18	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Akseblitas / Ketersediaan Layanan Informasi Kearsipan		3	160.000.000,00	3	176.000.000,00	4	193.600.000,00	4	212.960.000,00	5	234.256.000,00	19	976.816.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
			Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan	Jumlah sarana & Prasarana yang dipelihara secara berkala		10	40.000.000,00	12	44.000.000,00	14	48.400.000,00	16	53.240.000,00	18	58.564.000,00	70	244.204.000		
							370.000.000,00		407.000.000,00		447.700.000,00		492.470.000,00		541.717.000,00		2.258.887.000		
3			URUSAN PILIHAN														489.444.540.730,90		
3	01		KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.342.000.000,00		11.376.200.000,00		12.513.820.000,00		13.765.202.000,00		15.141.722.200,00		63.138.944.200,00	Dinas Perikanan	
3	01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		20.098	1.517.000.000,00	21.100	1.668.700.000,00	22.155	1.835.570.000,00	23.263	2.019.127.000,00	24.426	2.221.039.700,00	24.426	9.261.436.700,00	Dinas Perikanan	
3	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		40.195	6.927.500.000,00	42.200	7.620.250.000,00	44.310	8.382.275.000,00	46.526	9.220.502.500,00	48.852	10.142.552.750,00	48.852	42.293.080.250,00	Dinas Perikanan	
3	01	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)		6.669	1.184.000.000,00	7.034	1.302.400.000,00	7.386	1.432.640.000,00	7.755	1.575.904.000,00	8.143	1.733.494.400,00	8.143	7.228.438.400,00	Dinas Perikanan	
				Poklaksar yang dibina (Kelompok/ org)		383		402		422		443		465		465		Dinas Perikanan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3	01	25	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Usaha Perikanan yang difasilitasi (unit)		3	713.500.000,00	3	784.850.000,00	4	863.335.000,00	4	949.668.500,00	5	1.044.635.350,00	5	4.355.988.850,00	Dinas Perikanan
				Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan		70		75		80		85		90		90		
							10.342.000.000,00		11.376.200.000,00		12.513.820.000,00		13.765.202.000,00		15.141.722.200,00		63.138.944.200,00	
3	01		PARIWISATA				4.700.000.000,00		5.170.000.000,00		5.687.000.000,00		6.255.700.000,00		6.881.270.000,00		28.693.970.000,00	Dinas Pariwisata
3	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata		1710	300.000.000,00	1796	330.000.000,00	1886	363.000.000,00	1980	399.300.000,00	2079	439.230.000,00	9451	1.831.530.000,00	Dinas Pariwisata
3	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan		1	4.000.000.000,00	2	4.400.000.000,00	2	4.840.000.000,00	2	5.324.000.000,00	2	5.856.400.000,00	9	24.420.400.000,00	Dinas Pariwisata
3	01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan		10	400.000.000,00	10	440.000.000,00	10	484.000.000,00	10	532.400.000,00	10	585.640.000,00	10	2.442.040.000,00	Dinas Pariwisata
							4.700.000.000,00		5.170.000.000,00		5.687.000.000,00		6.255.700.000,00		6.881.270.000,00		28.693.970.000,00	
3	03		PERTANIAN				5.141.645.000,00		6.650.869.500,00		7.315.956.450,00		8.047.552.095,00		8.852.307.304,50		24.353.175.516,00	Dinas Pertanian
3	03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Petani yang Ditingkatkan Kesejahteraannya	705 Petani	-	-	600 Petani	200.000.000,00	600 Petani	220.000.000,00	600 Petani	242.000.000,00	600 Petani	266.200.000,00	2400 Petani	928.200.000,00	Dinas Pertanian
3	03	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	50	55	38.400.000,00	60	42.240.000,00	65	46.464.000,00	70	51.110.400,00	75	56.221.440,00	75	234.435.840,00	Dinas Pertanian
3	03	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alsintan	105	30	2.646.656.000,00	30	2.911.321.600,00	30	3.202.453.760,00	30	3.522.699.136,00	30	3.874.969.049,60	150	16.158.099.545,60	Dinas Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3	03	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Dokumen Kawasan Pertanian / Perkebunan	-	1		1		1		1		1		5		Dinas Pertanian
				Jumlah Produksi Tanaman Pertanian / Perkebunan	1.116	1.228	1.947.485.000,00	1.351	2.142.233.500,00	1.486	2.356.456.850,00	1.634	2.592.102.535,00	1.798	2.851.312.788,50	7.497	234.435.840,00	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan OPT Perkebunan	Persentase pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman Pertanian/ Perkebunan	50	55	-	60	125.000.000,00	65	137.500.000,00	70	151.250.000,00	75	166.375.000,00	75	580.125.000,00	Dinas Pertanian
3	03	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh yang Diberdayakan	29	29	413.704.000,00	29	455.074.400,00	29	500.581.840,00	29	550.640.024,00	29	605.704.026,40	145	2.525.704.290,40	Dinas Pertanian
3	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Presenentase Pelayanan Kesehatan Hewan	50	55	95.400.000,00	60	125.000.000,00	65	137.500.000,00	70	151.250.000,00	75	166.375.000,00	75	675.525.000,00	Dinas Pertanian
3	03	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Produk Sapi / Kambing yang Dipasarkan	46.171	46.171	-	50.788	300.000.000,00	55.867	330.000.000,00	61.454	363.000.000,00	67.599	399.300.000,00	281.879	1.392.300.000,00	Dinas Pertanian
3	03	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase peningkatan penerapan teknologi ternak bagi kelompok ternak	55	60	-	65	350.000.000,00	70	385.000.000,00	75	423.500.000,00	80	465.850.000,00	80	1.624.350.000,00	Dinas Pertanian
							5.141.645.000,00		6.650.869.500,00		7.315.956.450,00		8.047.552.095,00		8.852.307.304,50		24.353.175.516,00	
3	06		PERDAGANGAN				58.396.019.000,00		64.235.620.900,00		70.659.182.990,00		77.725.101.289,00		85.497.611.417,90		356.513.535.597	
3	06	16	Program Persaingan Usaha	Jumlah Pedagang Kaki Lima & Asongan yang Dibina		340	1.295.800.000,00	370	1.425.380.000,00	370	1.567.918.000,00		1.724.709.800,00		1.897.180.780,00		7.910.988.580,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ketersediaan Data Ekspor Barang		12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	36.300.000,00	12	39.930.000,00	12	43.923.000,00	12	183.153.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase Ekspor Barang		20	50.000.000,00	40	55.000.000,00	60	60.500.000,00	80	66.550.000,00	100	73.205.000,00	100	305.255.000,00	
3	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pengembangan Pasar Daerah		8	916.400.000,00	10	1.008.040.000,00	10	1.108.844.000,00	10	1.219.728.400,00	10	1.341.701.240,00	48	5.594.713.640,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	19	Program Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Ketersediaan sarana prasarana Kemetrologian		20	54.819.000.000,00	20	60.300.900.000,00	20	66.330.990.000,00	20	72.964.089.000,00	20	80.260.497.900,00	20	334.675.476.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Pelayanan Kemetrologian bagi masyarakat		12	54.819.000,00	12	60.300.900,00	12	66.330.990,00	12	72.964.089,00	12	80.260.497,90	12	334.675.476,90	
3	06		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan			1.230.000.000,00	20	1.353.000.000,00	40	1.488.300.000,00	60	1.637.130.000,00	80	1.800.843.000,00	100	7.509.273.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							58.396.019.000,00		64.235.620.900,00		70.659.182.990,00		77.725.101.289,00		85.497.611.417,90		356.513.535.597	
3	07		PERINDUSTRIAN				2.615.180.000,00		2.956.698.000,00		3.322.367.800,00		3.714.604.580,00		4.136.065.038,00		16.744.915.418	
3	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang Dikembangkan		11	1.375.000.000,00	13	1.512.500.000,00	17	1.663.750.000,00	19	1.830.125.000,00	23	2.013.137.500,00	83	8.394.512.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Jenis Industri Kerajinan dan Pangan yang Diserap		10	200.000.000,00	15	300.000.000,00	20	400.000.000,00	25	500.000.000,00	30	600.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Persentase Peningkatan sentra industri		20%	1.000.000.000,00	25%	1.100.000.000,00	50%	1.210.000.000,00	75%	1.331.000.000,00	100%	1.464.100.000,00	100%	6.105.100.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	20	Program Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri Daerah	Persentase Promosi & Pemasaran Hasil IKM		20%	40.180.000,00	40%	44.198.000,00	60%	48.617.800,00	80%	53.479.580,00	100%	58.827.538,00	100%	245.302.918,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							2.615.180.000,00		2.956.698.000,00		3.322.367.800,00		3.714.604.580,00		4.136.065.038,00		16.744.915.418	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG													5.238.435.815.141,09		
4	01		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				29.902.222.274,00		33.525.511.301,40		35.256.226.131,54		38.663.312.444,69		42.460.807.389,16		124.364.371.344,68	
4	01	07	Program Peningkatan Kesehatan Aparatur	Cakupan Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	20 Orang	20 Orang	350.000.000,00	20 Orang	385.000.000,00	20 Orang	423.500.000,00	20 Orang	465.850.000,00	20 Orang	512.435.000,00	100 Orang	2.136.785.000,00	SEKWAN
4	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terakomodirnya dan Terwujudnya Aspirasi Masyarakat Kedalam Publikasian Pembangunan Daerah		70%	12.344.108.850,00	75%	13.578.519.735,00	80%	14.936.371.708,50	85%	16.430.008.879,35	90%	18.073.009.767,29	100%	19.880.310.744,01	SEKWAN
							12.694.108.850,00		13.963.519.735,00		15.359.871.708,50		16.895.858.879,35		18.585.444.767,29		22.017.095.744,01	
4	01	28	Program Reformasi Birokrasi	Capaian Penilaian LPPD Kota Tual	Rendah	Sedang	745.981.962,00	Tinggi	820.580.158,20	Tinggi	902.638.174,02	Tinggi	992.901.991,42	Tinggi	1.092.192.190,56	Tinggi	4.554.294.476,21	BAG. TAPEM - SETDA
				Persentase dokumen & tata kelola pemerintahn	30%	55%	745.981.962,00	60%	820.580.158,20	65%	902.638.174,02	70%	992.901.991,42	75%	1.092.192.190,56	100%	4.554.294.476,21	BAG. TAPEM - SETDA
							1.491.963.924,00		1.641.160.316,40		1.805.276.348,04		1.985.803.982,84		2.184.384.381,13		9.108.588.952,41	
4	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	900 Produk Hukum	900 Produk Hukum	664.112.500,00	900 Produk Hukum	730.523.750,00	900 Produk Hukum	803.576.125,00	900 Produk Hukum	883.933.737,50	900 Produk Hukum	972.327.111,25	900 Produk Hukum	4.054.473.223,75	BAG. HUKUM & HAM - SETDA
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase regulasi dan kasus hukum yang diselesaikan	90%	95%	395.511.000,00	96%	435.062.100,00	97%	478.568.310,00	98%	526.425.141,00	99%	579.067.655,10	100%	2.414.634.206,10	BAG. HUKUM & HAM - SETDA
							1.059.623.500,00		1.165.585.850,00		1.282.144.435,00		1.410.358.878,50		1.551.394.766,35		6.469.107.429,85	
4	01	28	Program Reformasi Birokrasi	Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi	Belum Ada	Dokumen		1 Dok	185.000.000,00	-		-		-			185.000.000,00	BAG. ORTALA - SETDA
				Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kurang	Dokumen		1 Dok	115.000.000,00		-		-		-		115.000.000,00	BAG. ORTALA - SETDA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	691 Pengajar TPQ, Sekami, Sekolah Minggu	691 Pengajar		700 Pengajar		705 Pengajar		710 Pengajar		715 Pengajar		3521 Pengajar		
			Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama	Persentase Peningkatan pemahaman dan Pengamalan nilai-Nilai Agama, Pancasila dan Budaya Lokal	10%	20%	435.398.000,00	20%	478.937.800,00	20%	526.831.580,00	20%	579.514.738,00	20%	637.466.211,80	100%	2.658.148.329,80	BAG. KESRA - SETDA
			Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan pemberdayaan & Rehabilitasi Sosial	-	20%	315.340.000,00	20%	346.874.000,00	20%	381.561.400,00	20%	419.717.540,00	20%	461.689.294,00	100%	1.925.182.234,00	
							6.217.378.000,00		6.839.115.800,00		7.523.027.380,00		8.275.330.118,00		9.102.863.129,80		37.957.714.427,80	
4	01	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH		20%	4.500.000.000,00	20%	4.000.000.000,00	20%	3.500.000.000,00	20%	3.500.000.000,00	20%	3.500.000.000,00	100%	19.000.000.000,00	BAG. UMUM & PERLENGKAPAN - SETDA
				Persentase sarana dan prasarana keperluan kantor dan rumah tangga		20%	75.000.000,00	20%	82.500.000,00	20%	90.750.000,00	20%	99.825.000,00	20%	109.807.500,00	100%	457.882.500,00	BAG. UMUM & PERLENGKAPAN - SETDA
				Persentase penomoran surat keluar dan masuk		20%	150.000.000,00	20%	165.000.000,00	20%	181.500.000,00	20%	199.650.000,00	20%	219.615.000,00	100%	915.765.000,00	BAG. UMUM & PERLENGKAPAN - SETDA
							4.500.000.000,00		4.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		19.000.000.000,00	
4	01	37	Program Peningkatan Pelayanan Informasi	Tersedianya sistem informasi pemerintah daerah														BAG. HUMAS - SETDA
				Rasio jumlah berita positif di media massa														BAG. HUMAS - SETDA
				Jumlah acara kedinasan yang sesuai standar keprotokoleran														BAG. HUMAS - SETDA
							-		-		-		-		-		-	
4	01	25	Program Peningkatan Kerja Sama antar Daerah	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	4 MOU	3 MOU	263.991.000,00	5 MOU	600.000.000,00	8 MOU	850.000.000,00	12 MOU	1.000.000.000,00	15 Mou	1.500.000.000,00	47 MOU	4.213.991.000,00	BAG. KERJASAMA - SETDA
							263.991.000,00		600.000.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		4.213.991.000,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan					20%			40%		60%		80%		100%		Kelurahan Ketsoblak
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan					20%			40%		60%		80%		100%		Kelurahan Ketsoblak
							-		-			-		-		-		-		
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan			100.000.000	20%	110.000.000	40%	121.000.000	60%	133.100.000	80%	146.410.000	100%	610.510.000		Kelurahan Lodar Ei	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			500.000.000	20%	550.000.000	40%	605.000.000	60%	665.500.000	80%	732.050.000	100%	3.052.550.000		Kelurahan Lodar Ei	
							600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		3.663.060.000			
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan			100.000.000	20%	110.000.000	40%	121.000.000	60%	133.100.000	80%	146.410.000	100%	610.510.000		Kelurahan Masrum	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			600.000.000	20%	660.000.000	40%	726.000.000	60%	798.600.000	80%	878.460.000	100%	3.663.060.000		Kelurahan Masrum	
							700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000		4.273.570.000			
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan			200.000.000	20%	218.000.000	40%	239.800.000	60%	263.780.000	80%	290.158.000	100%	1.211.738.000		Kecamatan Pulau Dullah Selatan	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100.000.000,00	20%	162.000.000,00	40%	178.200.000,00	60%	196.020.000,00	80%	215.622.000,00	100%	851.842.000,00		Kecamatan Pulau Dullah Selatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							300.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		459.800.000,00		505.780.000,00		2.063.580.000,00	
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kmsyaraktan			100.000.000	20%	110.000.000,00	40%	121.000.000,00	60%	133.100.000,00	80%	146.410.000,00	100%	610.510.000,00	Kecamatan Pulau Dullah Utara
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			400.000.000,00	20%	440.000.000,00	40%	484.000.000,00	60%	532.400.000,00	80%	585.640.000,00	100%	2.442.040.000,00	Kecamatan Pulau Dullah Utara
							500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		3.052.550.000,00	
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyaraktan			200.000.000	20%	220.000.000	40%	242.000.000	60%	266.200.000	80%	292.820.000	100%	1.221.020.000	Kecamatan Tayando Tam
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			450.000.000	20%	495.000.000	40%	544.500.000	60%	598.950.000	80%	658.845.000	100%	2.747.295.000	Kecamatan Tayando Tam
							650.000.000,00		715.000.000,00		786.500.000,00		865.150.000,00		951.665.000,00		3.968.315.000,00	
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyaraktan			100.000.000	20%	105.000.000	40%	115.500.000	60%	127.050.000	80%	139.755.000	100%	587.305.000	Kecamatan Pp. Kur
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100.000.000	20%	190.000.000	40%	209.000.000	60%	229.900.000	80%	252.890.000	100%	981.790.000	Kecamatan Pp. Kur
							200.000.000		295.000.000		324.500.000		356.950.000		392.645.000		1.569.095.000	
			Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyaraktan			100.000.000	20%	105.000.000	40%	115.500.000	60%	127.050.000	80%	139.755.000	100%	587.305.000	Kecamatan Kur Selatan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			450.000	20%	500.000.000	40%	550.000.000	60%	605.000.000	80%	665.500.000	100%	2.320.950.000	Kecamatan Kur Selatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
							100.450.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		805.255.000,00		2.908.255.000,00		
4	02		PENGAWASAN				4.042.500.000,00		4.693.750.000,00		5.463.125.000,00		6.024.437.500,00		6.831.881.250,00		27.055.693.750,00	Inspektorat	
4	02	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan		20%	1.435.000.000,00	30%	1.578.500.000,00	40%	1.736.350.000,00	50%	1.909.985.000,00	80%	2.100.983.500,00	100%	8.760.818.500,00	Inspektorat	
				Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP					
				Persentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti		20%		30%		40%		50%		80%		100%			
				Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	12 OPD	15 OPD		12 OPD		25 OPD		25 OPD		25 OPD					
				Cakupan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	Level 2	Level 3		Level 3		Level 4		Level 5		Level 5					
				Prensentase transparansi desa dalam mengelola keuangan dan aset.	100%	20%		40%		60%		80%		100%					
4	02	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan	Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP	6 Orang	8 Oorang	230.000.000,00	18 Orang	500.000.000,00	23 Orang	850.000.000,00	27 Orang	950.000.000,00	29 Orang	1.250.000.000,00	105 Orang	3.780.000.000	Inspektorat	
4	02	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan Standar Operasional Prosedur	10 Dokumen	5 Dokum en	525.000.000,00	5 Dokum en	577.500.000,00	5 Dokum en	635.250.000,00	5 Dokum en	698.775.000,00	5 Dokum en	768.652.500,00	25 Dokum en	3.205.177.500	Inspektorat	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Pengaduan Masyarakat	100%	20%	832.500.000,00	40%	915.750.000,00	60%	1.007.325.000,00	80%	1.108.057.500,00	100%	1.218.863.250,00	100%	5.082.495.750	Inspektorat
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sisten dan Prosedur Pengawasan	100%	20%	1.020.000.000,00	40%	1.122.000.000,00	60%	1.234.200.000,00	80%	1.357.620.000,00	100%	1.493.382.000,00	100%	6.227.202.000	Inspektorat
								4.042.500.000,00		4.693.750.000,00		5.463.125.000,00		6.024.437.500,00		6.831.881.250,00		27.055.693.750,00	
4	03			PERENCANAAN				817.597.074.501,00		899.896.781.951,10		989.886.460.146,21		1.088.875.106.160,83		1.197.762.616.776,91		4.994.018.039.536,05	
4	03	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi		10 Dokumen	1.789.527.101,00	10 Dokumen	1.968.479.811,10	10 Dokumen	2.165.327.792,21	10 Dokumen	2.381.860.571,43	10 Dokumen	2.620.046.628,57	50 Dokumen	10.925.241.904,32	BAPPEDA
4	03	16		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang Bekerjasama	5 MOU	6 MOU	10.000.000.000,00	6 MOU	11.000.000.000,00	6 MOU	12.100.000.000,00	6 MOU	13.310.000.000,00	6 MOU	14.641.000.000,00	30 MOU	61.051.000.000,00	BAPPEDA
4	03	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh		1 Dokumen	600.000.000,00	2 Dokumen	1.200.000.000,00	2 Dokumen	1.320.000.000,00	2 Dokumen	1.452.000.000,00	2 Dokumen	1.597.200.000,00	9 Dokumen	6.169.200.000,00	BAPPEDA
4	03	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan kota		1 Dokumen	700.000.000,00	1 Dokumen	770.000.000,00	1 Dokumen	847.000.000,00	1 Dokumen	931.700.000,00	1 Dokumen	1.024.870.000,00	5 Dokumen	4.273.570.000,00	BAPPEDA
4	03	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana yang mengikuti rakor perencanaan		100%	131.390.000,00	100%	144.529.000,00	100%	158.981.900,00	100%	174.880.090,00	100%	192.368.099,00	100%	802.149.089,00	BAPPEDA
4	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	3.253.398.200,00	1 Dokumen	3.578.738.020,00	1 Dokumen	3.936.611.822,00	1 Dokumen	4.330.273.004,20	1 Dokumen	4.763.300.304,62	7 Dokumen	19.862.321.350,82	BAPPEDA

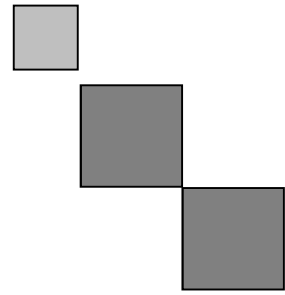
Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Jumlah Peserta yang Mengikuti MUSRENBANG	200	200		200		200		200		200		200		BAPPEDA
				Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam Dokumen RKPD														BAPPEDA
4	03	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 Dokumen	6 Dokumen	2.116.909.200,00	6 Dokumen	2.328.600.120,00	6 Dokumen	2.561.460.132,00	6 Dokumen	2.817.606.145,20	6 Dokumen	3.099.366.759,72	30 Dokumen	12.923.942.356,92	BAPPEDA
4	03	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	5 Dokumen	9 Dokumen	795.684.350.000,00	10 Dokumen	875.252.785.000,00	12 Dokumen	962.778.063.500,00	12 Dokumen	1.059.055.869.850,00	15 Dokumen	1.164.961.456.835,00	58 Dokumen	4.857.732.525.185,00	BAPPEDA
4	03	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta sumberdaya alam		2 Dokumen	1.000.000.000,00	2 Dokumen	1.100.000.000,00	2 Dokumen	1.210.000.000,00	2 Dokumen	1.331.000.000,00	2 Dokumen	1.464.100.000,00	10 Dokumen	6.105.100.000,00	BAPPEDA
4	03	25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan Daerah Rawan Bencana		1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	880.000.000,00	1 Dokumen	968.000.000,00	1 Dokumen	1.064.800.000,00	1 Dokumen	1.171.280.000,00	5 Dokumen	4.884.080.000,00	BAPPEDA
4	03		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Presentase Kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	96,22	96,40	1.295.000.000,00	96,60	1.424.500.000,00	96,80	1.566.950.000,00	97	1.723.645.000,00	97,20	1.896.009.500,00	97,20	7.906.104.500,00	BAPPEDA
							817.370.574.501,00		899.647.631.951,10		989.612.395.146,21		1.088.573.634.660,83		1.197.430.998.126,91		4.992.635.234.386,05	
4	03	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pengendalian nilai inflasi daerah	4,5% +/-1	12 Bulan	226.500.000,00	12 Bulan	249.150.000,00	3,5% +/-1	274.065.000,00	12 Bulan	301.471.500,00	12 Bulan	331.618.650,00	3,5% +/-1	1.382.805.150,00	BAG. EKONOMI - SETDA
							226.500.000,00		249.150.000,00		274.065.000,00		301.471.500,00		331.618.650,00		1.382.805.150,00	
4	04		KEUANGAN				7.494.162.325,00		8.243.578.557,50		9.067.936.413,25		9.974.730.054,58		10.972.203.060,03		45.752.610.410,36	BPKAD dan BAPENDA
4	04	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	5,78%	6,11%	2.828.663.500,00	6,11%	3.111.529.850,00	6,11%	3.422.682.835,00	6,11%	3.764.951.118,50	6,11%	4.141.446.230,35	30,55%	17.269.273.533,85	BPKAD
				Penetapan APBD	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase SILPA terhadap APBD	19,33%	8,70%		8,70%	8,70%		8,70%		8,70%		43,50%			
				Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WDP	WTP		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP			
				Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	56,38%	69,52%		69,52%	69,52%		69,52%		69,52%		69,52%			
4	04	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Presentase Penyelesaian dan Pendokumentasian Administrasi Keuangan Daerah	70,21%	100%	1.095.894.900,00	100%	100%	1.326.032.829,00	100%	1.458.636.111,90	100%	1.604.499.723,09	100%	6.690.547.953,99	BPKAD	
				Persentase BMD yang Diinvetarisir, Diamankan dan Dipelihara	50%	50%		50%	50%		50%		50%		100%			
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD	33 SKPD	47 SKPD		47 SKPD	47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD					
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	639.291.425,00	27 Dokumen	27 Dokumen	773.542.624,25	27 Dokumen	850.896.886,68	27 Dokumen	935.986.575,34	27 Dokumen	3.902.938.078,77	BPKAD	
				Jumlah Desa yang Difasilitasi	27 Desa	27 Desa		27 Desa	27 Desa		27 Desa							
							4.563.849.825,00		5.020.234.807,50		5.522.258.288,25		6.074.484.117,08		6.681.932.528,78	27.862.759.566,61		
4	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran			2.930.312.500,00			3.223.343.750,00		3.545.678.125,00		3.900.245.937,50		4.290.270.531,25	17.889.850.843,75	Badan Pendapatan Daerah
				Proporsi Kenaikan jumlah wajib pajak	9,720	10,800		11,340	11,907		12,502		13,127		59,677			
				Jumlah objek pajak PBB yang dimutakhirkan	507	563		318	533		681		438		2533			
				Jumlah wajib pajak yang diklarifikasi	25	28		31	34		37		41		45			
				Proporsi aparatur yang telah bersertifikat kompetensi profesi	6,7% (1 Org)	33,33% (5 Org)		47% (7 Org)	60% (9 Org)		73% (11 Org)		87% (13 Org)		100% (15 Org)			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Proporsi wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran secara online														
						2.930.312.500,00		3.223.343.750,00		3.545.678.125,00		3.900.245.937,50		4.290.270.531,25		17.889.850.843,75		
4	05		KEPEGAWAIAN			7.359.850.400,00		7.965.001.450,00		8.266.966.500,00		8.535.144.400,00		9.449.260.350,00		41.576.223.100,00	BKPSDM	
4	05	15	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan	18 ASN	835.724.500,00	21 ASN	877.510.600,00	24 ASN	934.739.300,00	27 ASN	996.164.800,00	30 ASN	1.078.287.500,00	120 ASN	4.722.426.700,00	BKPSDM	
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	721 JFT		844 JFT		914 JFT		984 JFT		1084 JFT		4547 JFT			
4	05	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	112,34 %	547.415.400,00	132,42 %	413.408.260,00	80,78%	511.743.700,00	102,52 %	499.159.100,00	76,25%	654.605.600,00	100%	2.626.332.060,00	BKPSDM	
4	05	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	76,16%	5.976.710.500,00	102,28 %	5.843.649.590,00	85,68%	6.820.483.500,00		7.039.820.500,00	91,23%	7.716.367.250,00	100%	33.397.031.340,00	BKPSDM	
						7.359.850.400,00		7.134.568.450,00		8.266.966.500,00		8.535.144.400,00		9.449.260.350,00		40.745.790.100,00		
4	05	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Belum Ada		1 Dokumen	406.433.000,00		-		-		-		406.433.000,00	BAG. ORTALA - SETDA	
				Pemetaan Jabatan	Belum Ada		1 Dokumen	199.000.000,00		-		-		-		199.000.000,00	BAG. ORTALA - SETDA	
				Standar Kompetensi Jabatan	Belum Ada		1 Dokumen	225.000.000,00		-		-		-		225.000.000,00	BAG. ORTALA - SETDA	
						-		830.433.000,00		-		-		-		830.433.000,00		
4	06		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.970.000.000,00		2.167.000.000,00		2.383.700.000,00		2.622.070.000,00		2.884.277.000,00		5.668.877.000,00		
4	06		Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, IPTEK, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Jumlah Penelitian yang dikembangkan	2 Dok	600.000.000	2 dokumen	660.000.000	2 dokumen	726.000.000	2 dokumen	798.600.000	2 dokumen	878.460.000	10 Dokumen	3.663.060.000	BAPPEDA	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	20%	820.000.000	40%	902.000.000	60%	992.200.000	80%	1.091.420.000	100%	1.200.562.000	100%	1.200.562.000	BAPPEDA	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
4	06		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penelitian Pengembangan Daerah serta Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		20%	550.000.000	40%	605.000.000	60%	665.500.000	80%	732.050.000	100%	805.255.000	100%	805.255.000	BAPPEDA
							1.970.000.000,00		2.167.000.000,00		2.383.700.000,00		2.622.070.000,00		2.884.277.000,00		5.668.877.000	
			TOTAL PAGU PROGRAM (Tiap OPD + Urusan Wajib P.Dasar + U.Wajib Non Dasar + U. Pilihan + U.Penunjang)														10.860.501.920.298	



**BAB IX**

**KINERJA**

**PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAHAN**

**DAERAH**



## **BAB IX**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Keberhasilan pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian-capaian kinerja tahunan pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain visi misi daerah, penetapan indikator kinerja juga merujuk pada Capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual 2005-2025, Sustainable Development's Goal (SDGs), RPJMD Provinsi Maluku serta beberapa standar dan norma yang berlaku pada kementerian dan Lembaga terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator kinerja utama Kota Tual selanjutnya disajikan dalam tabel 9.1 dan indikator kinerja kunci yang merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah disajikan dalam table 9.2

**Table 9.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tual**

“Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan)”									
NO.	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT									
Tujuan. I	Peningkatan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama								
	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Penurunan Konflik inter dan antar umat beragama	%	100	100	100	100	100	100
Tujuan. II	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata								
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,30	10,48	10,66	10,84	11,02	11,20
		harapan lama sekolah	tahun	10,45	10,66	10,87	11,08	11,29	11,5
Tujuan. III	Menjamin Kehidupan yang Sehat								
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	angka harapan hidup	tahun	64,88	65,15	65,42	65,69	65,96	66,23
Tujuan. IV	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja								
	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	85,84	87,6	88,34	89,07	90,33	91,02
Tujuan. V	Pembangunan Kota Layak Anak								
	Peningkatan kualitas Kota Layak Anak	Persentase indikatorKota Layak Anak(KLA) yang terpenuhi	%	60	60	70	80	90	100
MISI 2: MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHANAN YANG BAIK									
Tujuan. I	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih								

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	nilai	CC	CC	B	B	BB	BB
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>MISI 3: MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>									
<b>Tujuan. I</b>	<b>Mewujudkan penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial</b>								
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Penyelenggaraan festival budaya	festival	1	1	1	1	1	1
<b>Tujuan. II</b>	<b>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat</b>								
	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Tingkat Pelanggaran K3 yang tertangani;	%	44,44	44,50	44,50	44,75	50	60
		Presentase penegakan Peraturan Daerah	%	1,5	2	2,5	3	3,5	4
<b>MISI 4: MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>									
<b>Tujuan. I</b>	<b>Pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh sektor Perikanan, Pertanian, Perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan.</b>								
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per kapita	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita	%	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
		Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita pertahun	%	1,83	1,80	1,76	1,73	1,70	1,68
<b>Tujuan. II</b>	<b>Mengembangkan sektor unggulan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan</b>								
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	16,50	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	presentase penduduk miskin	%	23,42	21,42	19,42	17,42	15,42	13,42
<b>MISI 5: MENGEMBANGKAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI</b>									



<b>Tujuan. I</b>	<b>Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.</b>								
	Pertumbuhan ekonomi meningkat;	Angka pertumbuhan ekonomi;	%	5,68	6,03	6,29	6,54	6,61	6,70
	Investasi di Kota Tual meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>MISI 6: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG</b>									
<b>Tujuan. I</b>	<b>mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan</b>								
	Kesesuaian pemanfaatan ruang mengingkat	Presentase kesesuaian pemanfatan ruang	%	70	80	85	90	95	95
	peningkatan kualitas Jalan	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik	Point	0,48	0,58	0,68	0,78	0,90	0,90
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Laut Guna Memperlancar Arus Penduduk dan Barang	Jumlah Dermaga Penyebrangan	unit	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Pelabuhan Strategis	unit	3	4	5	6	7	8
	meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	77,18	83,18	89,18	95,18	100	100
<b>Tujuan. II</b>	<b>Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>								
	menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	rasio rumah layak huni	Point	0,81	0,86	0,90	0,93	0,96	1
		Rasio permukiman layak huni	Point	0,96	0,98	1	1	1	1
	mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	presentase sampah perkotaan yang tertangani	%	88,44	89,76	91,54	98,98	100	100

	menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	poin	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,81
<b>MISI 7: MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN</b>									
<b>Tujuan. I</b>	<b>Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap</b>								
	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	%	50	51	52	54	55	56
<b>Tujuan. II</b>	<b>Pengembangan wisata alam</b>								
	menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan	PAD sektor Pariwisata	%	1,43	2	3	4	5	6
<b>Tujuan. IV</b>	<b>Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>								
	mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	42	53	65	79	84,00	100
	mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua	presentase rumah tinggal bersanitasi	%	40,19	50	62	75	86	100
	mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	8,22	9,2	9,87	10,78	11,23	13,44

**Tabel 9.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tual**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
I.1	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
I.1.1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,68	6,03	6,29	6,54	6,61	6,70	6,70
2	Laju inflasi	poin	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
3	PDRB per kapita	Juta Rupiah per kapita	10,97	11,90	12,82	13,74	14,66	15,58	15,58
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	76,44	77,06	77,68	78,30	78,92	79,54	79,54
5	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	%	23,56	20,56	17,56	14,56	11,56	8,56	8,56
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	66,78	67,31	67,85	68,38	68,91	69,45	69,45
7	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	mutu	-	-	C	B	B	B	B
9	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	76,4	79,4	82,4	85,4	88,4	91,4	91,4
10	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,60	4,60	5,13	5,40	5,69	5,98	5,98%
I.2	<b>Kesejahteraan Sosial</b>								
I.2.1	<b>Pendidikan</b>								
1	Angka melek huruf	%	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,97	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,30	10,48	10,66	10,84	11,02	11,20	11,20
<b>I.2.2</b>	<b>Kesehatan</b>								
1	Angka usia harapan hidup	Tahun	64,92	65,23	65,54	65,85	66,16	66,47	66,47
2	Persentase balita gizi buruk	%	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	12,54	8,19	11,99	15,8	19,61	23,42	23,42
<b>I.2.3</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	59,41	60,05	60,68	61,31	61,95	62,58	62,58
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	16,50	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5	11,5
3	Rasio penduduk yang bekerja	%	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5
4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	6,23	6,56	6,89	7,22	7,55	7,88	7,88
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	56	64,17	72,34	80,51	88,68	96,85	96,85
<b>I.3</b>	<b>Seni Budaya dan Olah Raga</b>								
<b>I.3.1</b>	<b>Kebudayaan</b>								
1	Presentase Sanggar Budaya yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>I.3.2</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>								
1	Jumlah ajang olahraga yang diselenggarakan daerah	event	0	0	1	1	1	1	4,00
<b>II</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>									
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	117,	100	100	100	100	100	100
2	Angka partisipasi kasar								
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		105,8	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP /MTs/ Paket B		98,1	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,51	96,20	97,00	98,00	98,80	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP /MTs/ Paket B	%	92,00	93,00	95,00	96,00	98,00	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Sekolah								
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	98,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar	11	11	11	11	11	11	11
6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	guru per 10.000 Murid SD+MI+SMP+MTs	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13
8	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,97	100,00
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	64,42	65,50	70,00	85,00	92,40	95,00	95,00
II	Kesehatan								
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	kematian per 1000 kelahiran hidup	18	17,00	11,00	10,00	5,00	4,00	4,00
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	kematian balita per 1000 kelahiran hidup	23	12,00	11,00	8,00	5,00	3,00	3,00
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kematian per 100.000 kelahiran hidup	18	17,00	11,00	10,00	5,00	4,00	4,00
4	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	83,33	85,26	87,19	89,12	91,05	93	93,00
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	unit per 1000 penduduk	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
6	Rasio dokter per satuan penduduk	dokter per 1000 penduduk	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	tenaga medis/1000 penduduk	0,21	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
8	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	kasus per 100.000 penduduk	320	359,00	342,00	319,00	290,00	256,00	256,00
9	Angka kejadian Malaria	kasus per 100.000 penduduk	1,09	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	32	32	33	33	34	34	34
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
<b>3.1</b>	<b>Pekerjaan Umum:</b>								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Point	0,72	0,75	0,80	0,85	0,90	1	1
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Point	0,0048	0,0059	0,0069	0,0080	0,0090	0,0101	0,01
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	1,34	1,44	1,53	1,63	1,72	1,81	1,81
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	40,19	50	62	75	86	100	100
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	42	53	65	79	84,00	100	100
6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	42	53	65	79	84,00	100	100
7	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56
8	Persentase Pembangunan Turap & Talud di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	77,84	80,02	82,19	84,36	86,54	88,71	88,71
9	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	15,49	16,90	18,31	19,72	21,13	22,54	22,54

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
<b>3.2</b>	<b>Penataan Ruang:</b>								
10	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,81	1,81
11	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	54,91	60,41	65,91	65,91	82,96	100,00	100,00
12	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio	0,186	0,6	0,606	0,612	0,618	0,624	0,62
<b>IV</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>								
1	Rasio rumah layak huni	Point	0,81	0,86	0,90	0,93	0,96	1	1
2	Rasio permukiman layak huni	Point	0,94	0,96	0,98	1	1	1	1
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	20,32	18,76	17,20	15,64	14,08	14,25	14,25
4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	-	25	37,5	50	62,5	75	75,00
<b>V</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>								
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	14,2	58	59	60	62	65	65
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	44,44	44,50	44,50	44,75	50	60	75
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	52,01	52,01	52,01	81,00	92,29	100,00	100
4	Persentase Penegakan PERDA	%	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
<b>VI</b>	<b>Sosial</b>								
1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	27,22	27,78	28,33	28,85	29,44	30	30,00
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	16,98	20,77	24,56	28,35	32,13	35,92	35,92
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	81,18	82	82	83	84	85	85,00
<b>VII</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
I	<b>Tenaga Kerja</b>								
1	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	48	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00	528,00
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	20	40,00	60,00	80,00	80,00	128,00	528,00
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
II	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
1	Rasio KDRT	kasus per 100 rumah tangga	20,10	19,50	18,25	16,13	15,00	13,53	13,53
2	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	jiwa per 100 penduduk 5 tahun ke atas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	58	60,00	61,05	61,20	62,00	65,50	65,50
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	10	12,00	15,00	18,00	20,00	25,00	25,00
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	10,4	11,00	11,50	12,00	12,40	3,01	3,01
III	<b>Pangan</b>								
1	Ketersediaan pangan utama	kg/jiwa	36,18	36,20	37,08	37,80	38,02	38,80	87,08
2	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kapita/hari	1821,27	1821,28	1822,27	1822,27	1822,29	1823,27	1823,28
3	Ketersediaan protein perkapita	gram /kapita/hari	61,7	61,10	61,20	61,25	61,30	62,40	90,90
IV	<b>Pertanahan</b>								



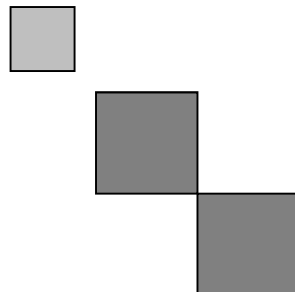
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	1,2	1,59	1,98	2,38	2,77	3,17	3,17
2	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>VII</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada/tidak ada	tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada
3	Timbulan sampah yang ditangani	%	88,44	89,76	91,54	98,98	100	100	100%
4	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	8,22%	9,20%	9,87%	10,78%	11,23%	13,44%	13,44%
5	Persentase cakupan area pelayanan	%	11,12%	11,12%	20%	35%	50%	70%	70%
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	84,87%	85%	85%	87%	87%	90%	90%
<b>VIII</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
1	Rasio pasangan berakate nikah	Poin	90,02	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	69,64	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	60,770	75,91	90,17	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>IX</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		60,770	78,77	60,77				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	klpk	2	2	2	2	2	2	2
2	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	klpk	0	1,00	1,00	1,00	1	1	1
3	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	unit	2	2	2	2	2	2	2
<b>X</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Poin	3,80	3,70	3,60	3,50	3,40	3,30	3,30
2	Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2,6	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10
3	Ratio Akseptor KB	%	35	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	45	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00	60,00
<b>XI</b>	<b>Perhubungan</b>								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
1	Jumlah Pelabuhan Laut	unit	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Persentase layanan angkutan darat	%	10	20	40	50	65	75	75
XII	<b>Komunikasi dan Informatika</b>								
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	77,18	83,18	89,18	95,18	100	100	100,00
XIII	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>		-	-	-	-	-	-	-
1	Persentase koperasi aktif	%	239	7,72	7,16	6,68	6,26	5,89	33,71
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	20,53	17,98	15,24	13,22	11,68	10,40	68,52
XIV	<b>Penanaman Modal</b>								
1	Rasio daya serap tenaga kerja	poin	25,47	30,99	36,12	41,02	50,01	59,64	68,28
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	5	4,76	4,55	4,35	4,17	4	4,00
XV	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
1	Persentase wirausaha muda	%	78	78	78	78	78	78	78
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	88,89
3	Presentase organisasi Pemuda yang aktif	%	70	70	75	78	78	78	78
XVI	<b>Statistik</b>								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	tidak	tidak	Ada	ada	ada	Ada	ada
XVII	<b>Persandian</b>								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	0,00	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
XVIII	<b>Kebudayaan</b>								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	20	20	20	20	20	20	20
XIX	<b>Perpustakaan</b>								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Poin	8,35%	10,06%	11,49%	12,93%	14,37%	15,80%	15,80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
XX	<b>Kearsipan</b>								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	17,02	31,91	42,55	53,19	63,83	74,47	74,40
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	3	3	4	4	5	5,00
	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>								
I	<b>Pariwisata</b>								
1	Kunjungan wisata	%	1.629	1710	1796	1886	1980	2079	2079
2	Lama kunjungan Wisata rata-rata tahunan	hari	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	PAD sektor pariwisata	%	1,43	2	3	4	5	6	6
II	<b>Pertanian</b>								
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,27	3,34	3,41	3,48	3,55	3,62	3,62
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,91	2,91
III	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	91,21	91,22	91,24	91,26	91,28	91,29	91,29
IV	<b>Perdagangan</b>								
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10,10	10,85	11,60	12,36	13,11	13,86	13,86
V	<b>Perindustrian</b>								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	19,72	24,33	28,95	33,56	38,18	42,79	42,79
VI	<b>Kelautan dan Perikanan</b>								
1	Produksi perikanan	%	66,33	66,99	67,66	68,34	69,02	69,71	69,71
2	Nilai tukar nelayan	Poin	0,99	0,99	0,99	1	1	1	1
	<b>Penunjang Urusan</b>								
I	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	60	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	70	80,00	85,00	90,00	90,00	95,00	100,00
II	<b>Keuangan</b>								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	hasil opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10.32	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	44,00
3	Penetapan APBD	tepat/tidak tepat waktu	Tepat	tepat	Tepat	tepat	tepat	Tepat	tepat
III	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>								
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	47,62	48,89	50,00	54,55	66,67	66,67
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	-	2,94	3,43	3,92	4,40	4,89	4,89
IV	<b>Penelitian dan pengembangan</b>								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	-	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
	<b>Penerapan SiDa:</b>								
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	-	-	6,25	8,33	10,42	12,50	12,50
V	<b>Pengawasan</b>								
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	70	20,00	30,00	40,00	60,00	80,00	80,00
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	<b>Sekretariat Dewan</b>								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	Tidak	tidak	ada	ada	ada	Ada	ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			tahun 0	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada
<b>III</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>III.1</b>	<b>Kemampuan Ekonomi</b>								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp/rumah tangga	881.953	937.267	992.582	1.047.896	1.103.211	1.158.525	1.158.525
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	52,86	55,32	57,78	60,24	62,70	65,16	65,16
3	Produktivitas total daerah	Juta Rp/tenaga kerja	81,69	86,37	91,05	95,74	100,42	105,10	110,10
4	Nilai tukar petani	poin	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1	1
5	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,27	3,34	3,41	3,48	3,55	3,62	3,62
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08
7	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	33,86	34,16	34,46	34,76	35,06	35,36	35,36
8	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,02	15,24	15,46	15,68	15,9	16,12	16,12
<b>III.2</b>	<b>Iklim Investasi</b>								
1	Angka kriminalitas yang tertangani	kasus setiap 10.000 penduduk	13,71	10,34	9,17	9,03	8,88	8,74	8,74
2	Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	1	1	1	1
<b>III.3</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>								
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	lulusan per 10.000 penduduk	22,08	29,10	34,75	39,25	46,44	55,48	67,05
2	Rasio ketergantungan	jiwa per 100 penduduk	48,53	50,44	52,36	54,28	56,19	58,11	58,11



# BAB X

# **PENUTUP**



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota Terpilih Periode 2018-2023 dalam upaya mewujudkan tahapan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJPD Kota Tual tahun 2005-2025 sekaligus upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang di Kota Tual di tahun 2025.

RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 merupakan tahapan terakhir dalam RPJPD Kota Tual Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 disusun melalui optimalisasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Kota Tual. Capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Tual di tahun-tahun sebelumnya menjadi modal bagi kinerja pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Penyusunan RPJMD Kota Tual ini melibatkan komitmen dan kerjasama yang kuat dan terintegrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Tual. Seluruh Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan isu strategis sesuai dengan bidang urusan masing-masing serta merumuskan dalam rencana program dan kegiatan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih.